

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT ACEH



LPKM Universitas Syiah Kuala

Bekerjasama dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Aceh



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPKM) UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kantor Pusat Adminstrasi Universitas Syiah Kuala
Kopelma Darussalam, Jalan Putroe Phang No. 7
Banda Aceh 23111
Telp: (0651) 741-2377
Fax: (0651) 755-5808
Email: lpkm_unsyiah@yahoo.com
Website: www.lpkm.unsyiah.ac.id

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PEMERINTAH ACEH

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 26
Banda Aceh 23212
Telp: (0651) 21440
Fax: (0651) 33654
Email: bappeda@acehprov.go.id
Website: www.bappeda.acehprov.go.id

© Dicetak pada bulan November 2015.

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh adalah produk dari kerjasama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Syiah Kuala dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Aceh, sebagai laporan akhir penelitian.

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT ACEH



Kata Pengantar

Kemiskinan identik dengan kemelaratan, kesengsaraan, kebodohan, kesakitan, dan sebagainya yang harus diperangi. Setiap insan manusia menginginkan hidup sejahtera, kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, baik di dunia dan akhirat. Namun, adakalanya individu tidak berusaha untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan, sehingga pemerintah selalu berusaha keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan baik yang bersumber dari individu, masyarakat dan lingkungan, maupun dari penyebab dari dalam pemerintah itu sendiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Aceh telah dilaksanakan setiap tahunnya melalui alokasi anggaran pembangunan yang relatif memungkinkan untuk dilakukan pengurangan angka kemiskinan baik secara persentase maupun absolut. Namun, kadangkala mendapatkan hambatan baik yang bersumber dari *natural*, *cultural*, dan *structural*. Oleh karenanya, perlu dilakukan terobosan untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal tersebut melalui riset semacam ini. Penguatan perilaku positif dari individu dan oknum aparat pemerintah, perbaikan sistem birokrasi pemerintah, pembangunan prasarana dasar, pengembangan kelembagaan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan kewirausahaan perlu terus dilakukan. Di samping itu, kebijakan ketahanan pangan berupa bantuan beras, dan sebagainya tetap dilanjutkan. Namun persentase pemberian bantuannya diperkecil. sebaliknya diperbesar pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Angka kemiskinan di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional pada tahun 2014 berkisar di angka 18,05 persen sementara nasional 11,47 persen. Selama beberapa dekade belakangan ini angka persentase jumlah penduduk miskin di Aceh selalu berada di atas nasional. Di samping itu, angka kemiskinan di kabupaten/kota di Aceh juga banyak yang berada di atas rata-rata Provinsi Aceh. Ada 11 kabupaten/kota yang masih berada di atas rerata provinsi, dan hanya satu daerah yang berada di bawah rata-rata provinsi bahkan nasional, yakni Kota Banda Aceh. Angka kemiskinan di Kota Banda Aceh sebesar 8,03 persen pada tahun 2014, merupakan kota yang pesat pembangunannya pasca tsunami di tahun 2004. Namun di sisi lain, Kabupaten Aceh Barat yang juga merupakan daerah yang terparah terkena bencana gempa dan tsunami, angka kemiskinan pasca 11 tahun tsunami merupakan tertinggi di wilayah Aceh yakni mencapai 23,70 persen jauh di atas rata-rata provinsi apalagi nasional.

Dengan demikian persoalan mengatasi kemiskinan bukanlah hal mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang sulit. Bila komitmen pemerintah bersama masyarakat tetap terjaga dan terbina serta terlaksana dengan baik, maka angka kemiskinan pasti akan berkurang di masa mendatang. Oleh karena itu, pengalokasian dana yang tepat jumlah dan sasaran peruntukkan, pengimplementasi program dan kegiatan, dan monitoring dan pengawasan tetap perlu dilaksanakan dan disempurnakan.

Banda Aceh, 30 November 2015
Kepala Bappeda Aceh

Drs. Zulkifli Hasan, M.M

Ucapan Terima Kasih

Laporan penelitian ini merupakan program kerja yang berjudul 'Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh', mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Aceh dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Syiah Kuala. Program kerja ini mencakup penyusunan beberapa catatan kebijakan (*policy notes*) tentang strategi percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat di Aceh. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan pada tahun-tahun mendatang untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh secara signifikan.

Laporan ini disusun oleh Tim di bawah koordinasi LPKM Unsyiah dan Bappeda Aceh. Tim peneliti yang terlibat dalam program kerja ini meliputi unsur dari berbagai disiplin ilmu antara lain ekonomi, sosial, psikologi, pertanian, keagamaan, hukum, dan lainnya. Seorang peneliti mengkaji dari satu wilayah (kabupaten/kota) sehingga total peneliti berjumlah 23 orang di bawah satu orang kordinator yakni Dr. Ir. Sofyan Syamsuddin, M.Agric. Sc. Oleh karena itu ucapan terimakasih disampaikan kepada 23 peneliti yang telah berhasil melakukan kajian ini dengan baik. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Gubernur Aceh, Kepala Bappeda Aceh, dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) lainnya di 23 kabupaten/kota dan provinsi yang telah membantu bekerjasama dalam memenuhi data dan informasi yang diperlukan dalam program kerja ini.

Kepala LPKM Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr. Nasir Azis, MBA.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Kajian	2
1.3. Manfaat Kajian	3
1.4. Ruang Lingkup Pekerjaan	3
1.5. Metode Penelitian	3
1.5.1. Teknik Pengumpulan, Pencatatan dan Pengolahan Data	5
1.6. Kerangka Laporan	7
BAB II. KONSEP STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
2.1. Definisi Kemiskinan	9
2.2. Kemiskinan dalam Perspektif Syariah Islam	10
2.3. Perspektif Kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia	10
2.4. Jenis-jenis Kemiskinan	11
2.5. Faktor Penyebab Kemiskinan	12
2.6. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	13
BAB III. PROFIL KEMISKINAN ACEH	
3.1. Profil Singkat Kemiskinan di Aceh dan Tantangan ke Depan	17
3.2. Profil Kemiskinan di Kota Banda Aceh	21
3.2.1. Kemiskinan Alamiah	23
3.2.2. Kemiskinan Struktural	24
3.2.3. Kemiskinan Kultural	25
3.3. Profil Kemiskinan di Kota Sabang	27
3.3.1. Kemiskinan Alamiah	32
3.3.2. Kemiskinan Struktural	36
3.3.3. Kemiskinan Kultural	36
3.4. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar	38
3.4.1. Kemiskinan Alamiah	39
3.4.2. Kemiskinan Struktural	40
3.4.3. Kemiskinan Kultural	42
3.5. Profil Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues	43
3.5.1. Kemiskinan Alami	44
3.5.2. Kemiskinan Struktural	45
3.5.3. Kemiskinan Kultural	46
3.6. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara	47
3.6.1. Kemiskinan Alamiah	48
3.6.2. Kemiskinan Struktural	50
3.6.3. Kemiskinan Kultural	51
3.7. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah	52
3.7.1. Kemiskinan Alamiah	53
3.7.2. Kemiskinan Struktural	54
3.7.3. Kemiskinan Kultural	55
3.8. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya	56
3.8.1. Kemiskinan Alamiah	57
3.8.2. Kemiskinan Struktural	59
3.8.3. Kemiskinan Kultural	61

3.9. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat	62
3.9.1. Kemiskinan Alamiah	63
3.9.2. Kemiskinan Struktural	65
3.9.3. Kemiskinan Kultural	67
3.10. Profil Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya	70
3.10.1. Kemiskinan Alamiah	70
3.10.2. Kemiskinan Struktural	71
3.10.3. Kemiskinan Kultural	73
3.11. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya	74
3.11.1. Kemiskinan Alamiah	74
3.11.2. Kemiskinan Struktural	77
3.11.3. Kemiskinan Kultural	79
3.12. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan	81
3.12.1. Kemiskinan Alamiah	82
3.12.2. Kemiskinan Struktural	83
3.12.3. Kemiskinan Kultural	86
3.13. Profil Kemiskinan di Kota Subulussalam	87
3.13.1. Kemiskinan Alamiah	87
3.13.2. Kemiskinan Struktural	89
3.13.3. Kemiskinan Kultural	90
3.14. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil	91
3.14.1. Kemiskinan Alamiah	93
3.14.2. Kemiskinan Struktural	96
3.14.3. Kemiskinan Kultural	98
3.15. Profil Kemiskinan di Kabupaten Semelue	99
3.15.1. Kemiskinan Alamiah	100
3.15.2. Kemiskinan Struktural	101
3.15.3. Kemiskinan Kultural	102
3.16. Profil Kemiskinan di Kabupaten Pidie	103
3.16.1. Kemiskinan Alamiah	104
3.16.2. Kemiskinan Struktural	105
3.16.3. Kemiskinan Kultural	106
3.17. Profil Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya	107
3.17.1. Kemiskinan Alamiah	108
3.17.2. Kemiskinan Struktural	109
3.17.3. Kemiskinan Kultural	110
3.18. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bireuen	111
3.18.1. Kemiskinan Alamiah	112
3.18.2. Kemiskinan Struktural	113
3.18.3. Kemiskinan Kultural	115
3.19. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	116
3.19.1. Kemiskinan Alamiah	117
3.19.2. Kemiskinan Struktural	118
3.19.3. Kemiskinan Kultural	120
3.20. Profil Kemiskinan di Kota Lhokseumawe	121
3.20.1. Kemiskinan Alamiah	123
3.20.2. Kemiskinan Struktural	124
3.20.3. Kemiskinan Kultural	126
3.21. Profil Kemiskinan di Kota Langsa	127
3.21.1. Kemiskinan Alamiah	128
3.21.2. Kemiskinan Struktural	129
3.21.3. Kemiskinan Kultural	131
3.22. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur	132

3.22.1. Kemiskinan Alamiah	133
3.22.2. Kemiskinan Struktural	134
3.22.3. Kemiskinan Kultural	136
3.23. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang	137
3.23.1. Kemiskinan Alamiah	138
3.23.2. Kemiskinan Struktural	138
3.23.3. Kemiskinan Kultural	140
BAB IV. POTENSI MASYARAKAT MISKIN DI ACEH	
4.1. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Banda Aceh	144
4.2. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Sabang	145
4.3. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Besar	147
4.4. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gayo Lues	148
4.5. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara	149
4.6. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bener Meriah	152
4.7. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tengah	153
4.8. Potensi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Jaya	154
4.9. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat	155
4.10. Potensi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Nagan Raya	157
4.11. Potensi Masyarakat Miskin di Aceh Barat Daya	158
4.12. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan	159
4.13. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Subulussalam	161
4.14. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Singkil	162
4.15. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semeulue	163
4.16. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie	164
4.17. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie Jaya	165
4.18. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bireuen	166
4.19. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kota Lhokseumawe	168
4.20. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara	169
4.21. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Langsa	170
4.22. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Timur	171
4.23. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang	173
BAB V. EFEKTIVITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH	
5.1. Evaluasi Program Kegiatan Pembangunan	178
5.1.1 Analisis Komposisi Anggaran Belanja	178
5.1.2 Analisis Relevansi dan Efektivitas Pencapaian Indikator Utama	182
5.1.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh	184
5.1.4 Efektifitas Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh	188
BAB VI. STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
6.1. Prinsip-Prinsip Strategi	195
6.2. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	195
6.2.1 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Provinsi Aceh	196
6.2.2 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Timur	201
6.2.3 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Barat-Selatan	205
6.2.4 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Tengah	211
6.2.5 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	219
6.2.6 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kepulauan	224
6.3. Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	229
6.4. Beberapa Program yang Dilakukan untuk Menanggulangi Kemiskinan	232
6.5. Beberapa Usaha untuk Mengatasi Permasalahan Bantuan	233
BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	235
DAFTAR PUSTAKA	238
LAMPIRAN	240

Daftar Gambar

Gambar 1. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Aceh 2013	17
Gambar 2. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Tahun 2013	18
Gambar 3. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Tahun 2013	19
Gambar 4. Proporsi Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Listrik	20
Gambar 5. Posisi Relatif Akses Terhadap Pasar Tradisional (km)	20
Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2002 – 2013.	43
Gambar 7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe	121
Gambar 8. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe	122
Gambar 9. Anggaran Pembangunan Provinsi Aceh dan Kab/Kota	179
Gambar 10. Perbandingan Komposisi Rata-rata Anggaran Provinsi dan Kab/Kota di Aceh	180
Gambar 11. Komposisi Anggaran Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh	181
Gambar 12. Pertumbuhan Anggaran Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh	181
Gambar 13. Pertumbuhan Anggaran Pendidikan dan APS Kab/Kota di Provinsi Aceh	182
Gambar 14. Anggaran Kesehatan dan Tingkat Morbidity Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	183
Gambar 15. Proporsi Anggaran Kemiskinan Terhadap APBK Kab/Kota di Provinsi Aceh	184
Gambar 16. Anggaran Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2013-2014	185
Gambar 17. Relevansi Alokasi Anggaran Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh	186
Gambar 18. Peningkatan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Angka Kemiskinan	187
Gambar 19. Distribusi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 2014	188



Daftar Tabel

Tabel 1.	Profil Responden di Kota Banda Aceh	22
Tabel 2.	Kondisi Rumah Responden di Kota Banda Aceh	24
Tabel 3.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Banda Aceh	25
Tabel 4.	Kultural Kemiskinan di Kota Banda Aceh	26
Tabel 5.	Profil Responden di Kota Sabang	29
Tabel 6.	Kondisi Rumah Responden di Kota Sabang	32
Tabel 7.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Sabang	33
Tabel 8.	Kultural Kemiskinan di Kota Sabang	37
Tabel 9.	Profil Responden Kabupaten Aceh Besar	39
Tabel 10.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Besar	39
Tabel 11.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Besar	40
Tabel 12.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar	41
Tabel 13.	Profil Responden di Kabupaten Gayo Lues	44
Tabel 14.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Gayo Lues	45
Tabel 15.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Gayo Lues	46
Tabel 16.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues	46
Tabel 17.	Profil Responden Kabupaten Aceh Tenggara	48
Tabel 18.	Kondisi Rumah Responden Kabupaten Aceh Tenggara	49
Tabel 19.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Tenggara	50
Tabel 20.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara	51
Tabel 21.	Profil Responden di Kabupaten Bener Meriah	52
Tabel 22.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Bener Meriah	53
Tabel 23.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Bener Meriah	54
Tabel 24.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah	56
Tabel 25.	Profil Responden Miskin Kabupaten Aceh Jaya	57
Tabel 26.	Kondisi Rumah Responden Miskin Kabupaten Aceh Jaya	59
Tabel 27.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Jaya	60
Tabel 28.	Kultural Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya	62
Tabel 29.	Profil Responden Kabupaten Aceh Barat	63
Tabel 30.	Kondisi Rumah Responden Kabupaten Aceh Barat	64
Tabel 31.	Kondisi Kemiskinan Struktural Kabupaten Aceh Barat	66
Tabel 32.	Kultural Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat	67
Tabel 33.	Profil Responden di Kabupaten Nagan Raya	70
Tabel 34.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Nagan Raya	71
Tabel 35.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Nagan Raya	72
Tabel 36.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya	73
Tabel 37.	Profil Responden di Kabupaten Aceh Barat Daya	75
Tabel 38.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Barat Daya	76
Tabel 39.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Barat Daya	78
Tabel 40.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya	79
Tabel 41.	Profil Responden di Kabupaten Aceh Selatan	81
Tabel 42.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Selatan	83
Tabel 43.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Selatan	84
Tabel 44.	Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan	87
Tabel 45.	Profil Responden di Kota Subulussalam	89
Tabel 46.	Kondisi Rumah Responden di Kota Subulussalam	88
Tabel 47.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Subulussalam	90
Tabel 48.	Kultural Kemiskinan Kota Subulussalam	91
Tabel 49.	Profil Responden di Kabupaten Singkil	93
Tabel 50.	Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Singkil	94
Tabel 51.	Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Singkil	97

Tabel 52. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Singkil	98
Tabel 53. Profil Responden di Kabupaten Semeulue	99
Tabel 54. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Semeulue	100
Tabel 55. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Semeulue	101
Tabel 56. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Semeulue	102
Tabel 57. Profil Responden di Kabupaten Pidie	103
Tabel 58. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Pidie	104
Tabel 59. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Pidie	105
Tabel 60. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Pidie	106
Tabel 61. Profil Responden Kabupaten Pidie Jaya	108
Tabel 62. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Pidie Jaya	109
Tabel 63. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Pidie Jaya	110
Tabel 64. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya	111
Tabel 65. Profil Responden di Kabupaten Bireuen	112
Tabel 66. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Bireuen	113
Tabel 67. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Bireuen	114
Tabel 68. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Bireun	115
Tabel 69. Profil Responden di Kabupaten Aceh Utara	117
Tabel 70. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Utara	118
Tabel 71. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Utara	119
Tabel 72. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara	120
Tabel 73. Profil Responden di Kota Lhokseumawe	123
Tabel 74. Kondisi Rumah Responden di Kota Lhokseumawe	124
Tabel 75. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Lhokseumawe	125
Tabel 76. Kultural Kemiskinan di Kota Lhokseumawe	126
Tabel 77. Profil Responden di Kota Langsa	128
Tabel 78. Kondisi Rumah Responden di Kota Langsa	129
Tabel 79. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Langsa	130
Tabel 80. Kultural Kemiskinan di Kota Langsa	131
Tabel 81. Profil Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Timur	132
Tabel 82. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Timur	134
Tabel 83. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Timur	135
Tabel 84. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur	136
Tabel 85. Profil Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang	137
Tabel 86. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Tamiang	138
Tabel 87. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Tamiang	139
Tabel 88. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang	140
Tabel 89. Potensi Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh	144
Tabel 90. Potensi Masyarakat Miskin Kota Sabang	146
Tabel 91. Potensi Masyarakat Miskin Kota Aceh Besar	148
Tabel 92. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Gayo Lues	149
Tabel 93. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara	151
Tabel 94. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bener Meriah	152
Tabel 95. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tengah	153
Tabel 96. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Jaya	155
Tabel 97. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat	157
Tabel 98. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Nagan Raya	158
Tabel 99. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya	159
Tabel 100. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan	160
Tabel 101. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Subulussalam	161
Tabel 102. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Singkil	162
Tabel 103. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semeulue	163
Tabel 104. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie	164
Tabel 105. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie Jaya	166

Tabel 106. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bireuen	167
Tabel 107. Potensi Masyarakat di Kota Lhokseumawe	168
Tabel 108. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara	169
Tabel 109. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Langsa	171
Tabel 110. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Timur	172
Tabel 111. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang	174
Tabel 112. Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan	190
Tabel 113. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Provinsi Aceh	196
Tabel 114. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Zona Timur	202
Tabel 115. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Zona Barat Selatan	205
Tabel 116. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Tengah	212
Tabel 117. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Zona Perkotaan	219
Tabel 118. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Zona Kepulauan	224
Tabel 119. Ringkasan Masalah dan Rekomendasi Kebijakan Program Pemdampingan	235

Daftar Singkatan

ADG	= Alokasi Dana Gampong
APBK	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota
APS	= Angka Partisipasi Sekolah
BKPG	= Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong
BLU RSU	= Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum
BPS	= Badan Pusat Statistik
BUMG	= Badan Usaha Milik Gampong
FGD	= <i>Focus Group Discussion</i>
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
JKRA	= Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh
KAPET	= Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
KUBE	= Kelompok Usaha Ekonomi Bersama
KUMKM	= Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	= Mandi Cuci Kakus
MDGs	= <i>Millenium Development Goals</i>
NGO	= <i>Non-Government Organization</i>
NTP	= Nilai Tukar Petani
Otsus	= Otonomi Khusus
P2K-APBA	= Pengendalian dan Percepatan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh
PAM	= Perusahaan Air Minum
PKH	= Program Keluarga Harapan
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
RPJM	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTLH	= Rumah Tidak Layak Huni
SDM	= Sumber Daya Manusia
SKPA	= Satuan Kerja Pemerintah Aceh
TKPK	= Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
TNP2K	= Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota
UMR	= Upah Minimum Regional
UUPA	= Undang-undang Pemerintahan Aceh



PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu provinsi penerima dana transfer paling besar dari pemerintah pusat, pembangunan di Aceh belum mampu memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh anjlok dari peringkat 17 pada 2009 ke peringkat 27 pada 2010. Pada tahun 2011, Aceh tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar keenam dari 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kemiskinan Aceh mencapai 19,48 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 12,49 persen. (Badan Pusat Statistik-BPS, 2011).

Data statistik menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Aceh hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 1,01%. Capaian ini masih jauh dari target penurunan tingkat kemiskinan tahunan sebesar 2 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Aceh dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Agar target penurunan kemiskinan tercapai, maka diperlukan kebijakan dan strategi inovatif untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Tingginya angka kemiskinan mendorong Pemerintah Aceh untuk memasukkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam 10 prioritas pembangunan Aceh 2012-2017. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2012-2017, Pemerintah Aceh menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan dari 19,48 persen pada tahun 2011 menjadi 9,50 persen pada tahun 2017 sehingga mampu memenuhi capaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Sayangnya, upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya efektif. Data statistik menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Aceh hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan rata-rata sebesar 1,01%. Sebuah capaian yang masih jauh dari target penurunan tingkat kemiskinan tahunan sebesar 2 persen.

Agar target penurunan kemiskinan tercapai, diperlukan kebijakan dan strategi inovatif untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Aceh. Penelitian ini bermaksud ingin melakukan pemetaan dan penyebab kemiskinan dari perspektif multi-dimensi; ekonomi, sosial, agama, politik, dan kultural. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian kemiskinan yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi inovatif terhadap kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Aceh berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

1.2. Tujuan Kajian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat di Aceh
2. Mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang telah digunakan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Aceh baik yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah (pusat maupun pemerintah daerah) dan lembaga non-pemerintah;
3. Menganalisis efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Aceh baik yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah (pusat maupun pemerintah daerah) dan lembaga non-pemerintah;
4. Menyusun dan merumuskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan secara multidimensi yang aplikatif untuk diadopsi dalam kebijakan penanggulangan



kemiskinan yang inovatif sehingga mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Aceh.

1.3. Manfaat Kajian

1. Rekomendasi hasil penelitian ini dalam jangka panjang diharapkan menjadi kebijakan inovatif dan implementatif dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Aceh sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan ke level di bawah rata-rata nasional. Diharapkan, masyarakat Aceh akan dapat hidup makmur, sejahtera dan bermartabat sebagaimana yang dicita-citakan.
2. Sedangkan dalam jangka pendek, rekomendasi hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mereduksi tingkat kemiskinan minimal 2% pertahun sehingga tingkat kemiskinan akan mencapai 9,50 persen pada tahun 2017, seperti ditargetkan dalam RPJM 2012-2017.
3. Di samping itu, rekomendasi hasil penelitian ini juga akan menjadikan masukan penting bagi Pemerintah Aceh, khususnya Bappeda Aceh dalam menyusun *Grand Design* penanggulangan kemiskinan di Aceh. *Grand Design* penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan disusun tersebut akan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk Ekonomi, Sosial-Kultural serta Hukum dan Kelembagaan.
4. Hasil penelitian ini akan dipresentasikan di forum ilmiah dan dipublikasi dalam bentuk buku dan tulisan pada jurnal ilmiah bereputasi sehingga dapat menjadi referensi penting bagi pengambil kebijakan dan merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Kajian Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh, meliputi:

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang menggambarkan kondisi umum kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Aceh.
2. Melakukan pengumpulan data primer melalui pengamatan, wawancara, dan *FGD* tentang kondisi eksisting kemiskinan masyarakat dan strategi penanggulangan yang pernah diimplementasikan sebelumnya.
3. Menganalisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.
4. Menyusun dan merumuskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Aceh yang adaptif untuk diimplementasikan.
5. Seminar hasil penelitian strategi percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Aceh yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, LSM, akademisi dan masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian sekaligus, yaitu kualitatif dan

kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dalam menghitung frekuensi data lapangan dan mendeskripsikannya dalam suatu analisa dan interpretasi. Semua data harus melalui tes atau uji keabsahan dan keterhandalan statistik sebelum disajikan dalam tabel kategori. Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data dari responden dengan sebaran yang luas di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan memakai kuesioner sebagai instrumen alat bantu untuk mendapatkan data. Penggunaan metode kuantitatif ini dimaksudkan untuk menjangkau data yang lebih terukur untuk melihat berbagai kecenderungan dari populasi dan sampel.

Dalam kualitatif, penelitian ini mengaplikasikan teknik evaluatif dan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang mendasarkan diri pada analisis interpretatif terhadap berbagai sumber yang ada. Metode penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengutamakan metode historis, komparatif, dan studi kasus sebagai data-data yang akan diteliti. Sifat data dari penelitian kualitatif tidak besar, bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus.

Dalam metode penelitian ilmiah kualitatif, ada tiga jenis penelitian (Tan, 1997: 42-49). Pertama, penelitian yang bersifat penjelajahan atau eksploratif. Penelitian jenis ini bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum memiliki hipotesa. Jenis penelitian model ini dipilih dengan maksud untuk lebih mendalami sebuah pengetahuan sebelum melangkah pada penelitian eksplanatif atau deskriptif, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sebuah gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala tersebut dalam kerangka pengembangan hipotesa.

Kedua, penelitian yang bersifat penjelasan, menerangkan atau *explanatory* atau dalam bahasa lain disebut juga *confirmatory research*. Penelitian model ini menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa atau disebut juga *testing research*. Fokus penelitian ini terletak pada penjelasan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian yang bertujuan menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan sebab akibat yang terjadi antara variabel tersebut.

Penelitian ketiga adalah penelitian deskriptif. Penelitian jenis ini memiliki dua tujuan, yaitu; untuk mengetahui perkembangan obyek penelitian dari kontak fisik atau frekuensi fenomena sosial tertentu, dan; mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala maupun kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala maupun frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Namun, tidak berarti pelaksanaan sebuah penelitian kualitatif dari tiga dimensi tersebut di atas sifatnya mutlak terpisah satu dengan yang lainnya. Sebuah penelitian kualitatif bisa saja memiliki satu, gabungan atau keseluruhan dimensi penelitian yang ada. Sangat tergantung dari fokus permasalahan yang hendak dikaji.

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan keseluruhan tiga jenis penelitian kualitatif. Model eksploratif digunakan untuk menganalisa obyek penelitian ketiga yaitu pencarian terhadap konsep penanggulangan kemiskinan yang multi dimensi di Aceh. *Explanatory* atau *confirmatory research* digunakan untuk meneliti objek efektifitas

dan aplikasi kebijakan atau program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Model descriptive research digunakan untuk meneliti obyek penelitian strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengalalisis kebijakan yang akan dilakukan baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan dengan pendekatan SWOT. Pendekatan SWOT ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala potensi dan pembatas yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota.

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threats).

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Matriks SWOT Kearns

	Eksternal	Opportunity	Threats
Internal			
Strenght		<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
Weakness		<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk *Comparative Advantage* *Divestment/Investment* *Damage Control* *Mobilization* memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

Objek penelitian ini meliputi beberapa hal. Pertama, kebijakan, strategi dan pendekatan yang digunakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan di Aceh. Kedua, efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Aceh baik yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Ketiga, konsep penanggulangan kemiskinan multidimensi yang aplikatif untuk diadopsi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan yang inovatif sehingga mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Aceh sesuai dengan target.

Penelitian ini didisain dengan mengelompokkan wilayah penelitian ke dalam 3 (tiga) bagian. Wilayah I terdiri dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tenggara. Wilayah II terdiri dari Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang. Wilayah III terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil dan Kabupaten Simeulue.

Untuk keperluan analisis, terutama dalam hal penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat Aceh, pembagian wilayah dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada karakteristik wilayah. Sehingga sesuai karakteristik wilayah dibagi menjadi 5 wilayah yaitu wilayah Timur (Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Biireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang), Wilayah Tengah (Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara), Wilayah Barat Selatan (kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Singkil), Wilayah Perkotaan (Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam), Wilayah Kepulauan (Kabupaten Sabang dan Simeulue). Pelaksana penelitian adalah para peneliti dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, UIN Ar Raniry dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di Aceh.

1.5.1. Teknik Pengumpulan, Pencatatan dan Pengolahan Data

Dalam metode kualitatif digunakan dua metode pengumpulan data, pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer (*primary sources*) dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan masyarakat yang dianggap memahami secara konseptual maupun praktis mengenai kebijakan anggaran negara. Selanjutnya, pengumpulan data primer juga diperkuat dengan FGD dengan para narasumber di setiap Kabupaten/Kota. Pengumpulan data sekunder (*secondary sources*) dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, laporan, majalah, buletin, koran/surat-kabar dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan.

Data primer yang didapat di lapangan dalam bentuk wawancara ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan. Data ini akan dikombinasikan dengan data-data sekunder yang bersumber dari berita-berita yang ditulis media massa cetak (koran, majalah, buletin atau jurnal) serta ulasan dan opini kalangan akademisi yang tersebar di berbagai media massa, termasuk internet terkait kebijakan pemerintah dalam persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan di Aceh. Data akan dikategorisasikan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting menyangkut kemiskinan. Selanjutnya, data-data yang sejenis akan direduksi untuk mengurangi jumlah data yang terlalu banyak untuk kemudian dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu yang dianggap bisa menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil analisis akan dituliskan ke dalam laporan penelitian sederhana untuk kemudian dipresentasikan dalam suatu seminar hasil penelitian. Sumber data penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan melalui penelusuran langsung oleh peneliti ke lapangan melalui metode survey, FGD, *indepth interview*, dan wawancara. Sasaran dari sumber data primer ini disebut informan atau responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan pendapatnya secara langsung kepada peneliti baik secara verbal melalui metode interview. Sedangkan responden adalah orang-orang yang memberikan pendapat atau penilaian melalui metode angket.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview terhadap 1.800 masyarakat miskin dengan menggunakan kuisisioner. Teknik pengumpulan data menggunakan metoda purposif random sampling. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki informasi yang bermanfaat bagi topik penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan ahli dan informan umum. Informan ahli yaitu informan yang dipilih karena kriteria tertentu dan kepakaran dia dalam memahami berbagai persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu dalam soal kemiskinan. Penentuan informan ahli diupayakan bersifat subyektif mungkin guna menghindari adanya bias kepentingan pemikiran antara mereka yang menjadi kebijakan pemerintah dan yang mengkritisi atau kontra kebijakan, yaitu dengan cara perimbangan jumlah yang diwawancarai. Jumlah informan disesuaikan dengan memperhatikan kebutuhan data dalam penelitian ini. Informan yang diwawancarai merupakan representasi dari: pejabat pemerintah atau mereka yang bekerja dalam instansi pemerintahan (Kepala daerah, Bappeda, bidang ekonomi, pembangunan, sosial), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama (MPU, Pimpinan dayah, pimpinan lembaga keagamaan), tokoh pemuda, tokoh wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang karakteristik kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah dijalankan di setiap Kabupaten/Kota, maka penelitian ini juga akan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) pada setiap Kabupaten/Kota.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode antara tahun 2009 hingga 2014 atau selama lima tahun terakhir. Pemilihan waktu tersebut dilakukan karena beberapa hal. Pertama, ada keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait penanggulangan kemiskinan di Aceh sejak awal negara terbentuk sampai saat ini. Kedua,

dalam konteks tertentu, pembahasan kebijakan yang terlalu jauh masanya akan dinilai out-off date yang kurang memiliki daya manfaat dan sumbangan besar baik dalam keilmuan maupun untuk kegunaan praktek. Ketiga, diambilnya periode 2009-2014 adalah bertepatan karena periode tersebut merupakan masa paling mutakhir ketika penelitian ini dilakukan.

Analisa data sekunder merupakan penelitian berdasar data-data yang telah ada, yang diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis maupun situs internet. Analisa data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian yang akan disusun. Data yang telah diperoleh kemudian diakumulasi dan dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

Prosedur pengumpulan data dalam pendekatan penelitian kualitatif memiliki banyak cara. Pertama adalah teknik pengamatan langsung melalui survey maupun observasi. Teknik ini dilakukan sebagai studi untuk mendapatkan informasi langsung dari informan mengenai tanggapan dan sikap mereka terhadap berbagai kebijakan keuangan negara dan pembangunan kesejahteraan rakyat.

Kedua, melalui teknik wawancara bebas yang tak berstruktur. Target dari teknik adalah para informan ahli seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ketiga adalah studi dokumentasi. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik yang bersumber dari buku, majalah atau dokumen lainnya seperti yang telah dijabarkan di atas dalam sumber data sekunder dalam bentuk *library research*.

1.6. Kerangka Laporan

Laporan ini terdiri dari tujuh bab. Bab I memaparkan tentang issue dan tujuan kajian. Bab II memaparkan konsep dan kerangka strategi penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan dalam penelitian ini. Bab III menggambarkan profil kemiskinan di Provinsi Aceh. Bab IV menjelaskan potensi masyarakat miskin di Aceh. Bab V memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan program dan kegiatan. Bab VI menjelaskan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Bab VII memaparkan kesimpulan dan point-point penting tentang hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab terdahulu.



KONSEP STRATEGI

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang/keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan ini dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan karena keterbatasan potensi diri maupun karena sulitnya memperoleh akses sumberdaya ekonomi atau pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses memperoleh sumberdaya dan pelayanan dasar.

Houghton *et.all.* (2009) mendefinisikan kemiskinan sebagai istilah yang terkait dengan kesejahteraan dan kedudukan sosial. Berdasarkan kriteria ini, kemiskinan dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif, yaitu: (i) perspektif konvensional, (ii) perspektif garis kemiskinan/poverty line, dan (iii) perspektif sosial. Pandangan konvensional menyatakan bahwa sejahtera pada dasarnya apabila semua kebutuhan hidup terpenuhi. Maka, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum secara layak. Pandangan ini melihat kemiskinan dalam konteks keuangan. Kemiskinan juga bisa dilihat secara lebih khusus, misalnya konsumsi minimum dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah sederhana, raskin, atau jamkesmas. Dimensi-dimensi tersebut seringkali bisa diukur secara langsung. Pendekatan lain untuk melihat kesejahteraan (dan kemiskinan) difokuskan pada kemampuan individu dalam fungsi sosialnya. Dalam pendekatan ini, orang miskin adalah mereka yang umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah, sehingga pendapatan/pendidikan mereka tidak memadai, atau kesehatannya buruk dan merasa tidak berdaya ataupun tidak memiliki kebebasan politik.

Handler dan Hasenfeld (2007) mengemukakan dua pendekatan dalam melihat konsep kemiskinan, yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial. Pendekatan ekonomi memfokuskan pada identifikasi pendapatan yang dibutuhkan untuk membeli seperangkat barang dan jasa secara minimal yang dibutuhkan. Pendekatan sosial terkait tidak hanya pada pemenuhan aspek materi tapi juga kemampuan untuk bisa berpartisipasi secara optimal sebagai anggota masyarakat. Pendekatan sosial ini didasarkan pada prinsip moral bahwa setiap orang harus bisa memanfaatkan beragam sumber daya untuk mengembangkan kapasitas mereka dan mendapatkan kepuasan serta kehidupan yang produktif.

Winardi (2010) mengelompokkan kemiskinan dalam dua dimensi yaitu dimensi pendapatan dan dimensi non-pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan didefinisikan sebagai kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima. Sedangkan kemiskinan menurut dimensi non-pendapatan dicirikan dengan adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan, dan ketidakterwakilan serta tidak adanya kebebasan. Kemiskinan dalam bentuk pendapatan lebih mudah diukur dan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah standar kebutuhan riil minimum tertentu, atau dapat dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan relatif lebih dikarenakan distribusi pendapatan yang kurang merata. Kemiskinan relatif merupakan ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya terkait dengan

ukuran di bawah tingkat rata-rata distribusi pendapatan nasional (Todaro dan Smith, 2006).

2.2. Kemiskinan dalam Perspektif Syariah Islam

Dalam perspektif syariah Islam, definisi miskin digambarkan lebih detail dan lebih implementatif. Dalam istilah fiqh Islam, ulama berpendapat apabila disebut kata 'miskin', maka mencakup fakir dan juga miskin. Namun apabila kedua istilah fakir dan miskin dipisahkan, maka masing-masingnya memiliki batasan tersendiri. Imam Abu Abdillah Syamsuddin ibn Muhammad Al-Ghazaly (1455 – 1512M) – ketika menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat – menjelaskan: adapun fakir (dalam zakat) adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang bisa membiayai hidupnya. Adapun fakir secara umum adalah orang yang tidak punya uang di tangannya (cash on hand). Dan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang bisa membiayai hidupnya namun tidak cukup, seperti misalnya orang yang kebutuhan hidupnya adalah 10 dirham namun hanya memiliki 7 dirham saja. Berdasarkan definisi Imam Al-Ghazaly di atas, maka orang fakir adalah pengangguran yang tentu saja tidak punya penghasilan. Adapun orang miskin adalah orang yang hanya bisa memenuhi 70 persen kebutuhan hidupnya. Maka, menurut definisi ini, orang kaya adalah orang yang bisa memenuhi 100 persen kebutuhan hidupnya.

Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushaini Al-Hishniy Al-Dimasyarokatqiy Al-Syafii (2001) mendefinisikan fakir dan miskin dalam dua kelompok. Pertama, fuqara dan batasan fakir yakni orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki harta atau pekerjaan akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya, orang yang membutuhkan 10 dirham akan tetapi tidak memiliki kecuali 2 dirham. Kelompok kedua, miskin yakni mereka yang memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan 10 dirham namun hanya memiliki 7 dirham. Juga termasuk dalam kelompok miskin yakni seorang pedagang yang memiliki barang dagangan senilai/omzet satu nishab, namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia boleh menerima zakat. Namun, pada saat yang sama ia wajib menunaikan zakat atas barang dagangannya. Hal ini karena ia memiliki dua keadaan tersebut. Berdasarkan definisi Imam Al-Hishniy di atas, orang fakir itu jika hanya memiliki 20 persen harta untuk seluruh kebutuhannya. Sedangkan orang miskin itu adalah jika hanya memiliki 70 persen harta untuk memenuhi semua kebutuhannya. Menarik juga ditelisik, karena ada orang miskin tapi wajib membayar zakat. Contoh, pedagang yang omzetnya mencapai nishab, maka ia wajib menunaikan zakat meskipun pada saat yang sama ia tergolong miskin. Hal ini karena status miskin adalah satu perkara, sedangkan perdagangan adalah perkara lain pula.

2.3. Perspektif Kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir-Miskin Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam UU di atas adalah (i) kebutuhan pangan, (ii) sandang, (iii) perumahan, (iv) kesehatan, (v) pendidikan, (vi) pekerjaan, dan/atau (vii) pelayanan sosial.

Definisi dari UU No. 13 Tahun 2011 di atas mengakomodir dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif ekonomi dan perspektif sosial. Perspektif ekonomi berupa tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan perspektif sosial berupa tidak memiliki kemampuan. Perspektif pertama adalah *economic minded*, dan perspektif kedua adalah *human resources minded*.

Dalam melakukan pengukuran kemiskinan, secara umum Pemerintah Indonesia merujuk pada standar pengukuran yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak pertama kali digunakan pada tahun 1976 hingga saat ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Namun beberapa penyesuaian terus dilakukan BPS dalam menghitung batas miskin. Indikator utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

BPS (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makanannya kurang dari 2.100 kalori perkapita perhari atau setara dengan 320 kg beras perkapita/tahun di daerah pedesaan atau 420 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Dalam hal standar pengeluaran untuk makanan pada dekade 1980-an, Bank Dunia menggunakan standard mata uang dollar Amerika Serikat, yaitu 50 dolar AS untuk pedesaan dan 75 dolar AS untuk per kapita per tahun. BPS mengadopsi standar Bank Dunia dan melakukan penyesuaian dengan pola dasar konsumsi pada tahun 1971, kemudian disesuaikan dengan kenaikan harga (inflasi) dari bahan makanan pokok.

Berdasarkan definisi di atas, kemiskinan identik dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan yang bersifat sangat mendasar. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2.100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum non-makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Besarnya pengeluaran non-makanan dibedakan antara perkotaan dan pedesaan.

2.4. Jenis-jenis Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari tiga jenis : (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998).

a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan. Walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu kemiskinan turun-temurun. Kemiskinan alamiah pada umumnya terdapat di daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

b. Kemiskinan Struktural (*Structural Poverty*)

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang penyebabnya adalah struktur yang

merugikan, baik struktur negara, pemerintahan, maupun sistem kemasyarakatan. Zastrow dan Ashman (2007: 448) menyebutkan delapan penyebab kemiskinan, dan dua diantaranya adalah (i) diskriminasi ras dan jenis kelamin dan (ii) salah urus negara (miss-management resources). Berbagai sumber atau potensi karena salah urus akhirnya masyarakat menderita kemiskinan. Dua hal ini yang menyebabkan munculnya kemiskinan struktural. Masyarakat tidak mampu menembus sekat-sekat aturan dan kepentingan yang mencengkeram mereka, sehingga terhalang dari pemenuhan kebutuhan hidup.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural atau Kultural miskin adalah kemiskinan yang terjadi akibat kultur, Kultural atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan Kultural di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor Kultural seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lain. Di negara-negara industri, kemiskinan kultural juga disebabkan oleh dua sifat buruk kapitalisme, yaitu banyaknya pengangguran akibat penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi dan prinsip meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya.

Arsyad (2004) membedakan kemiskinan dalam dua jenis yaitu *chronic poverty* dan *transient poverty*. Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) diartikan sebagai kondisi dimana suatu individu tergolong miskin pada suatu waktu dan terus meningkat serta berada pada tingkat kesejahteraan yang sangat rendah dalam jangka panjang. Kemiskinan sementara (*transient poverty*) adalah kemiskinan yang terjadi pada suatu individu yang hanya bersifat sementara saja, ini terjadi karena penurunan standar hidup dalam jangka pendek.

Dibutuhkan kebijakan yang berbeda untuk menangani dua tipe kemiskinan ini. Kemiskinan kronis dapat diatasi salah satunya dengan cara meningkatkan investasi jangka panjang bagi orang miskin yang diarahkan bagi peningkatan modal fisik dan non fisik atau modal manusia. Sementara kemiskinan temporer lebih mudah ditangani dengan berbagai skema asuransi dan skema stabilitas pendapatan yang mampu memproteksi rumah tangga dari guncangan ekonomi (*economic shock*).

2.5. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) Kultural hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan

menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, Kultural hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Bagi Provinsi Aceh, kemiskinan merupakan masalah klasik. Konflik berkepanjangan selama 32 tahun lebih telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin dan rentan kemiskinan di Aceh amat tinggi. Sehingga, apabila terjadi sedikit saja guncangan yang mengganggu stabilitas ekonomi, dapat menyebabkan angka kemiskinan meningkat drastis. Bank Dunia (2008) mengelompokkan dua kelompok rentan di Aceh yang saling tumpang tindih namun berbeda yakni: kelompok yang 'miskin secara struktural' dan kelompok yang 'terguncang' oleh tsunami, yang kehilangan harta benda pribadi. Kelompok 'terguncang' relatif memiliki kapasitas produktif yang lebih baik dibandingkan kelompok 'miskin struktural', misalnya dalam hal pendidikan, keterampilan, dan Kultural kerja. Potensi yang dimiliki kelompok terguncang menjadikan mereka lebih mandiri secara ekonomi dibanding kelompok miskin struktural. Kelompok terguncang lebih mungkin untuk dapat keluar dari garis kemiskinan apabila memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi dibandingkan kelompok miskin struktural. Oleh sebab itu, perlu difikirkan strategi dan jenis investasi publik yang berbeda yang memberikan hasil paling besar dalam upaya pengurangan kemiskinan untuk berbagai kelompok tersebut.

Mengingat tipologi ini serta keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh harus memikirkan investasi publik yang mampu memberikan hasil paling besar untuk mengurangi angka kemiskinan. Kelompok 'terguncang' akan amat terbantu melalui upaya rehabilitasi aset yang hilang dan percepatan proses yang memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan kembali. Sedangkan kelompok yang 'miskin secara struktural' lebih sesuai dibantu melalui peningkatan kapasitas mereka untuk dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, misalnya sebagai tenaga kerja ataupun mengelola aset ekonomi lainnya. Upaya memperlancar konsumsi melalui pemberian pekerjaan dengan upah langsung (*cash for work*) dan bantuan dana bergulir untuk mengembalikan mata pencaharian masyarakat jelas membantu keluarga-keluarga tertentu melalui masa transisi yang sulit. Banyaknya jumlah penduduk rentan dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan membutuhkan intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran.

2.6. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Banyak kajian menunjukkan bahwa standar kemiskinan Bank Dunia kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan, terutama saat membandingkan kemiskinan dengan kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tinggi, belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. *Sen Poverty Index* (SPI) yang merupakan formula yang dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tidak mampu mengukur tingkat kesejahteraan. SPI yang lebih mendasarkan pada poverty head account ratio dan ini yang diambil dari penyebaran pendapatan per kapita (koefisien Gini) ternyata hanya mengukur kemiskinan dari tingkat pendapatan (Unicef, 2012).

Oleh sebab itu, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan di sini turut

memberi perhatian terhadap variabel non-ekonomi dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Strategi yang akan ditawarkan meliputi perencanaan fasilitasi mata pencaharian keluarga masyarakat miskin, peningkatan keterampilan keluarga dan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, peningkatan tabungan keluarga, membangun sinergitas peran swasta, pengembangan infrastruktur, kualitas hubungan sektor pendidikan dan dunia usaha, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi pengembangan ekonomi sektor riil, serta efisiensi anggaran dan tata-kelola pemerintahan yang baik.

Strategi yang diusulkan juga turut mempertimbangkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya lokal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat serta akuntabilitas pengelolaan zakat juga menjadi faktor yang turut dipertimbangkan. Sama halnya dengan melihat kemungkinan untuk pemanfaatan tabungan amal mesjid sebagai salah satu potensi masyarakat gampong untuk keluar dari rantai kemiskinan. Demikian pula halnya dengan penerahan sumberdaya masyarakat dan sektor swasta lainnya.

Alternatif strategi yang diusulkan bisa saja mengadopsi strategi yang sudah pernah dilakukan, modifikasi strategi lama, atau merupakan suatu hal yang baru. Namun, memulai sebuah pendekatan baru memberikan tantangan yang berat, terutama dalam hal penetapan kriteria prioritas rencana pelaksanaan. Kriteria yang menuntun pemilihan prioritas akan dibentuk oleh, diantaranya, komitmen yang sedang berlangsung, strategi 'quick win' dengan hasil cepat, berdampak luas dan sifat ketergantungan antar sektor.

Kebijakan dan pengelompokan indikatif untuk kolaborasi antar sektor dan pelaku terhadap hasil dan sasaran tertentu ditampilkan melalui konsultasi sektoral. Kegiatan dan anggaran terkait akan dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan dan proses evaluasi pembangunan sektor berdasarkan hasil yang diinginkan atau cakupan kemiskinan yang luas (cth: reformasi birokrasi, kredit mikro, asupan gizi anak, penyakit menular, program air bersih, produktifitas pertanian, perdagangan, komunikasi, dll.).

Strategi yang diusulkan dalam kajian ini bertujuan untuk memberikan justifikasi alternatif yang paling rasional untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Disamping itu, strategi yang diusulkan juga diharapkan dapat:

- 1) Meningkatkan kepemilikan dan keterbukaan proses pembuatan kebijakan dengan cara mengenali kebutuhan untuk mendorong dan memastikan partisipasi masyarakat.
- 2) Memberikan perhatian lebih besar terhadap isu-isu lintas sektor seperti penyakit menular (malaria, HIV-AIDS, kusta, dll.), isu gender, lingkungan, pengangguran, tata kelola pemerintahan yang baik, pekerja anak, manula, pemukiman, dan penyandang cacat.



PROFIL KEMISKINAN ACEH

3



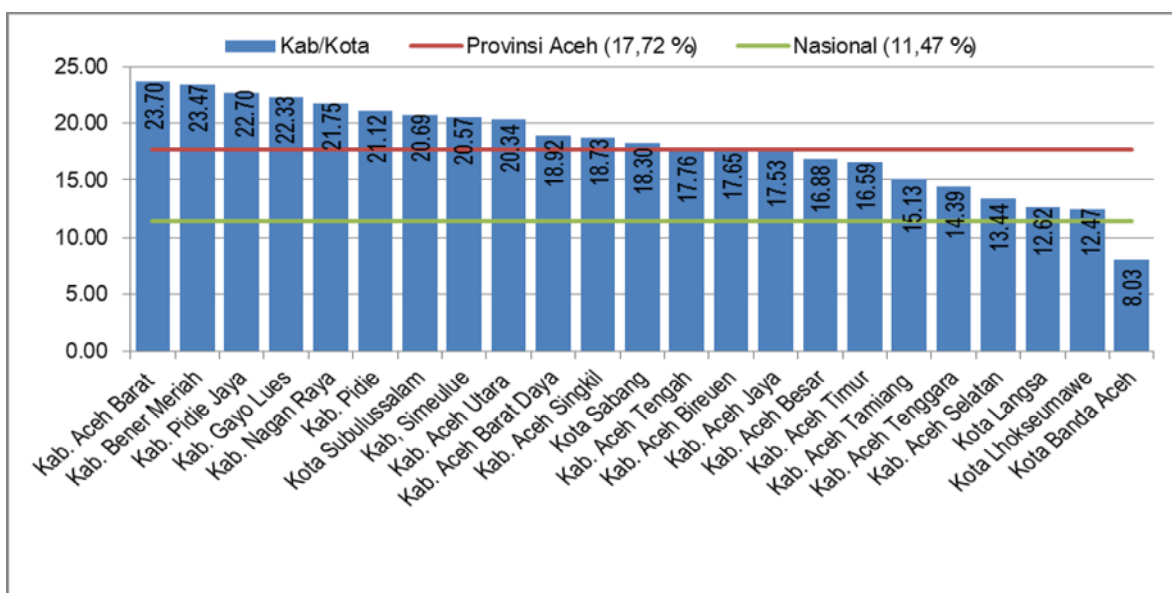
Temuan-temuan Utama

- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengurangan angka kemiskinan di Aceh tercatat hanya sebesar 0,59 persen per tahun. Capaian terbaik pada tahun 2013 sebesar 17,72 persen, namun tahun 2014, tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 18,05 persen.
- Sekitar 30 persen keluarga di wilayah pedesaan di Aceh, hidup di bawah garis kemiskinan, hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan yang kurang dari 15 persen.
- Sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh memiliki sanitasi rumah tangga lebih rendah tingkat kelayakannya dibanding rata-rata nasional (sanitasi layak di Aceh rata-rata 49,69 persen RT, nasional mencapai 60,45 persen RT).
- Kemiskinan Alamiah di Aceh ada disebabkan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga menyebabkan pendapatan rendah, akhirnya kepada rendahnya modal usaha, dan jenis pekerjaan umumnya turun temurun.
- Kemiskinan Struktural di Aceh ada disebabkan oleh kurang keterlibatan penduduk miskin dalam partisipasi dan kelembagaan, di samping itu kurang adanya transparansi bantuan, tidak tepat sasaran dan peruntukkan, serta tidak berkelanjutan.
- Kemiskinan Kultural di Aceh disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja, apatis, dan skeptis (bersikap hanya mengharapkan bantuan atau uluran tangan dermawan atau pemerintah).

3.1. Profil Singkat Kemiskinan di Aceh dan Tantangan ke Depan

Masalah kemiskinan telah menyelimuti Aceh jauh sebelum tsunami, yang diakibatkan oleh konflik berkepanjangan. Angka kemiskinan Aceh sebelum tsunami pada tahun 2004 mencapai 28,4 persen dari jumlah penduduk, jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 16,7 persen. Menurut laporan yang dirilis Bank Dunia (2008), kemiskinan di Aceh meningkat drastis akibat bencana Tsunami 26 Desember 2004, dari 28,4 persen menjadi 32,6 persen pada tahun 2005. Kemiskinan di Aceh tersebar di wilayah-wilayah yang terkena dampak tsunami maupun terimbas konflik. Namun, seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dan konflik yang dilakukan oleh BRR Aceh-Nias dan berbagai lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri, angka kemiskinan Aceh dapat ditekan menjadi 26,5 persen pada tahun 2006, 24 persen pada tahun 2008, dan 21 persen pada tahun 2009 ketika program rehabilitasi dan rekonstruksi dinyatakan selesai. Capaian ini jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sebelum tsunami.

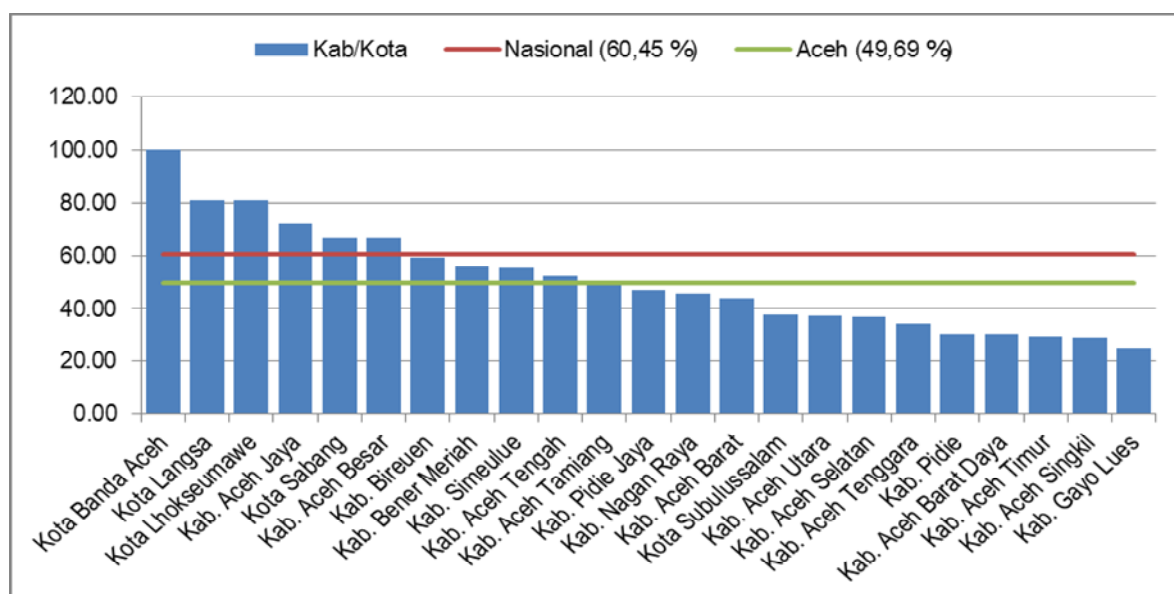
Namun, sejak BRR Aceh-Nias dibubarkan dan lembaga-lembaga donor berangsur pergi, pengurangan angka kemiskinan di Aceh berjalan lamban. **Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengurangan angka kemiskinan di Aceh tercatat hanya sebesar 0,59 persen per tahun. Capaian terbaik terjadi pada tahun 2013, dimana angka kemiskinan mencapai level 17,72 persen. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 18,05 persen.** Kondisi ini diduga diakibatkan oleh banyak faktor, antara lain oleh lemahnya manajemen pembangunan dan perilaku masyarakat miskin yang selama ini dimanjakan oleh berbagai fasilitas yang diberikan oleh lembaga donor selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.



Gambar 1. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Aceh 2013

Sumber : BPS, 2014 (diolah)

Data menunjukkan bahwa secara administratif, wilayah perkotaan (Kotamadya) memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten, terutama kabupaten pemekaran. Tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah administratif kota tercatat sebesar 14,42 persen dengan range 12,66. Sedangkan tingkat kemiskinan rata-rata di wilayah kabupaten tercatat sebesar 19,05 dengan range 10,26. Namun, terdapat lima kabupaten yang memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni: Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Besar, dan Aceh Tamiang. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam memanager pembangunan di daerahnya, khususnya di wilayah pemekaran menjadi salah satu faktor kunci pengurangan kemiskinan.



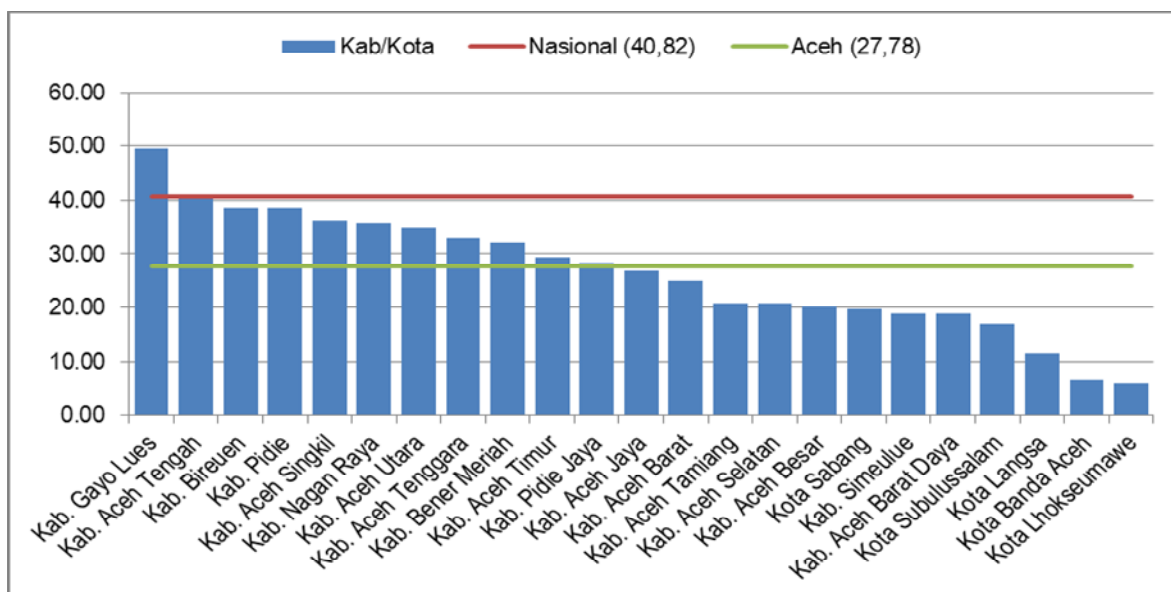
Gambar 2. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Tahun 2013

Sumber : BPS, 2014 (diolah)

Data menunjukkan bahwa sekitar 30 persen keluarga di wilayah pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan, hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan yang kurang dari 15 persen. Wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah yang berada di pedalaman pedesaan dan kabupaten yang lebih terpencil. Sementara wilayah di perkotaan seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh memiliki sanitasi rumah tangga yang lebih rendah tingkat kelayakannya dibanding rata-rata nasional. Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Aceh rata-rata sebesar 49,69 persen. Sementara di tingkat nasional, angkanya sudah mencapai 60,45 persen. Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kota Sabang tercatat memiliki rata-rata proporsi kelayakan di atas tingkat nasional. Sementara itu, Kabupaten Gayo Lues, Aceh Singkil dan Aceh Timur tercatat memiliki proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak terburuk di Aceh.

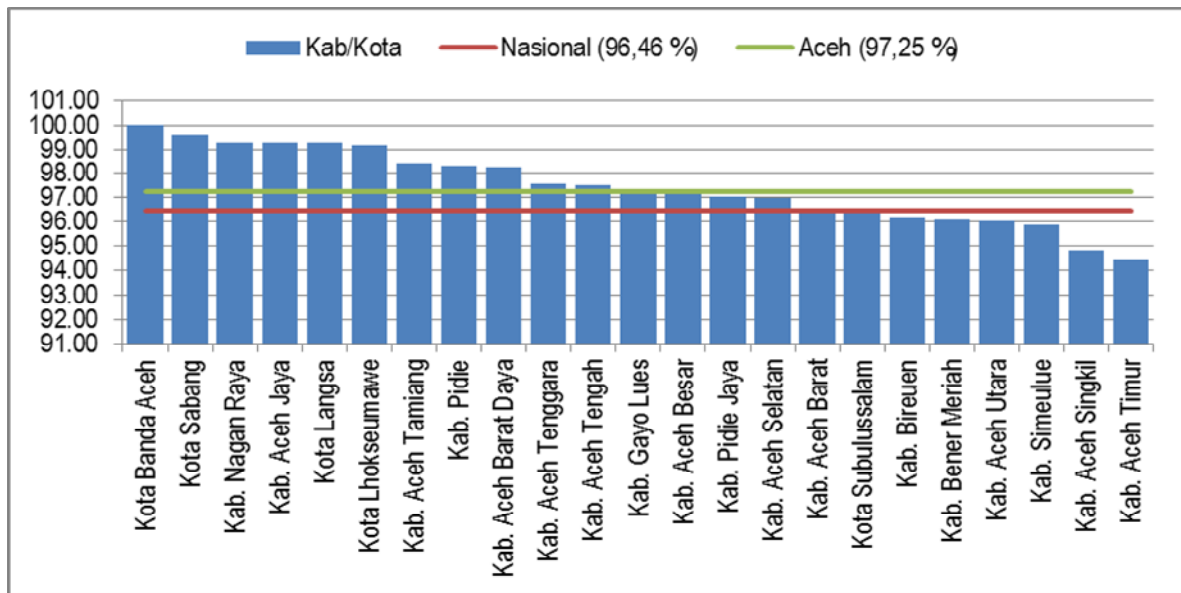
Proporsi rumah tangga di Aceh terhadap ketersediaan air layak minum rata-rata hanya mencapai 27,78 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 40,82 persen. Hanya satu kabupaten di Aceh, yakni Gayo Lues yang memiliki aksesibilitas air layak minum melampaui rata-rata nasional dengan rata-rata 49,51. Kota Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Langsa tercatat sebagai daerah yang memiliki akses air layak minum terendah dengan persentase rumah tangga rata-rata sebesar 6,04%, 6,75%, dan 11,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Tahun 2013

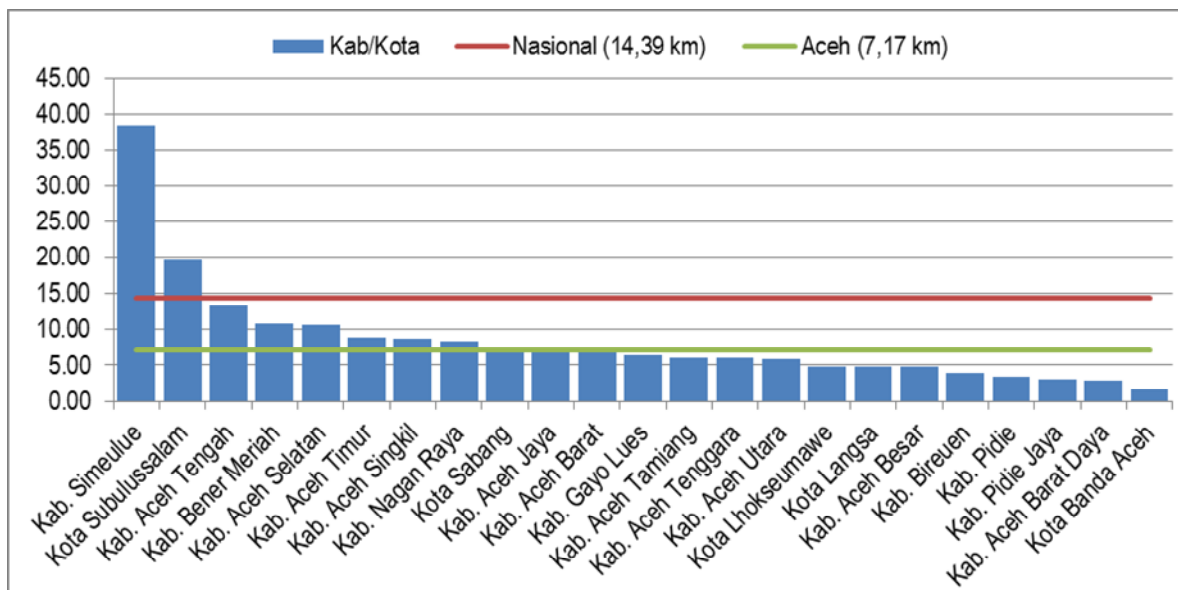
Sumber : BPS, 2014 (diolah)

Akses rumah tangga terhadap jaringan listrik di Aceh masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional masing-masing sebesar 97,25 persen dan 96,46 persen. Kota Banda Aceh tercatat memiliki akses paling baik dengan rata-rata 100 persen, diikuti Kota Sabang, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Kota Langsa. Sementara itu, Aceh Timur, Singkil, Simeulue, Aceh Utara dan Bener Meriah tercatat memiliki akses listrik yang lebih rendah dari rata-rata nasional.



Gambar 4. Proporsi Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Listrik
Sumber : BPS, 2014 (diolah)

Secara rata-rata, aksesibilitas masyarakat di Aceh terhadap pasar tradisional dua kali lebih rendah dibandingkan nasional. Rata-rata aksesibilitas masyarakat Aceh terhadap pasar tradisional adalah 7,17 km, sementara nasional mencapai 14,39 km. Meskipun demikian, terdapat dua kabupaten di Aceh yang melampaui rata-rata nasional yakni Simeulue dan Subulussalam masing-masing sejauh 38,4 km dan 19,8 km. Kota Banda Aceh tercatat sebagai daerah yang memiliki akses paling dekat terhadap pasar yakni 1,55 km. Berikutnya diraih oleh Aceh Barat Daya (2,8 km), Pidie Jaya (3,0 km), dan Pidie (3,4 km). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut .



Gambar 5. Posisi Relatif Akses Terhadap Pasar Tradisional (km)
Sumber : BPS, 2014 (diolah)

Perjanjian Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 memberikan kontribusi besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Situasi damai telah mempercepat aktifitas perekonomian masyarakat serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat miskin. PDRB Provinsi Aceh ADHB dengan minyak bumi dan gas tercatat naik signifikan dari Rp 40,37 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp 56,95 trilyun pada tahun 2005, dan terus meningkat menjadi Rp 70,75 trilyun pada tahun 2009. Angka pengangguran juga menurun secara signifikan dari sebelum tsunami pada tahun 2004, naik kembali akibat tsunami pada tahun 2005, kemudian turun secara signifikan pada tahun 2007, dan naik kembali pada tahun 2009 saat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh -Nias ditutup.

Selama lebih satu dekade pembangunan pasca damai dan tsunami di Aceh, angka kemiskinan belum sepenuhnya dapat ditekan sesuai yang direncanakan. Tingkat kemiskinan pada tahun 2015 tercatat masih berkutat pada angka 18 persen, jauh di atas target yang dicanangkan sebesar 12 persen. Angka pengangguran juga belum berubah secara signifikan, masih berada pada kisaran 7 – 10 persen dari total angkatan kerja rata-rata tiap tahunnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa program pembangunan yang dilaksanakan belum mampu menjadi pengungkit bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Beberapa asumsi awal yang mungkin terjadi antara lain: 1. Program yang dilaksanakan belum menyentuh permasalahan utama yang mengakibatkan kemiskinan itu sendiri. 2. Metode pelaksanaan program belum sesuai dengan skenario yang disusun dalam perencanaan. 3. Angka kemiskinan yang ada saat ini merupakan total kemiskinan struktural yang ada di Aceh sehingga sulit untuk menekannya lebih rendah lagi karena kendala substansial yang membutuhkan waktu lama untuk meningkatkannya.

Ketiga asumsi yang dibangun di atas memberi implikasi besar bagi masa depan pembangunan, khususnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Apabila tidak segera dievaluasi dan dicarikan solusinya, tidak mustahil pembangunan yang dilakukan hanya berjalan di tempat. Lebih parah lagi, sumber dana akan habis, sementara hasil tidak kunjung tercapai. Akibatnya, perdamaian yang sudah terbangun selama ini tidak mustahil akan terganggu dan bahkan akan muncul konflik dalam bentuk lain. Hal ini sudah terlihat saat ini dimana angka kriminalitas dan gangguan keamanan bersenjata telah mulai marak di Aceh.

3.2 Profil Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Angka kemiskinan di Kota Banda Aceh jauh lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 9,19 persen. Angka ini berhasil ditekan perlahan-lahan menjadi 9,08 persen pada Tahun 2011, 8,65 persen pada tahun 2012, dan 8,03 persen pada tahun 2013 (BPS Banda Aceh, 2014). Capaian ini melampaui target yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD 2012-2017, Pemko Banda Aceh memproyeksikan angka kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 8,58%. Pada tahun 2014, angka kemiskinan kembali turun sebesar 7,76. Pada tahun 2015 ini diproyeksikan akan terus menurun menjadi 6,57% dan pada tahun 2017 diharapkan dapat menyentuh level 4,9%.

Pencapaian penanggulangan angka kemiskinan di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program pembangunan yang pro-rakyat miskin. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh memberikan perhatian khusus melalui program kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil seperti mengembangkan usaha mikro dan kecil, adanya bantuan bergulir, dan dana hibah. Selain itu, Pemko juga memanfaatkan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyalurkan zakat dalam berbagai bentuk yang mampu menambah pendapatan sekaligus memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin. Untuk memonitor dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Kota Banda Aceh yang dipimpin Wakil Walikota dan Ketua Bappeda melakukan rapat rutin sebulan sekali.

Survey yang dilakukan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di Kota Banda Aceh adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di Kota Banda Aceh adalah warga biasa (95 persen). Namun ada 2 orang yang memiliki jabatan penting di desa yakni sebagai Geuchiek (Kepala Desa) dan Bilal Mesjid. Pendidikan responden tercatat hanya SLTA ke bawah. Usia rata-rata responden adalah 49,8 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 3 orang. Jenis mata pencaharian terbesar adalah nelayan (44 persen), pedagang (8 persen), tidak bekerja (8 persen), dan sisanya menjalani berbagai jenis profesi mulai dari tukang, buruh, becak, pembantu, sopir, kernet, parkir, pemulung, dll. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil Responden di Kota Banda Aceh

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	49,8 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3,86 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.190.750	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	65	81
	- Perempuan	15	19
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	11	14
	- SD	20	25
	- SMP	19	24
	- SMA	25	31
	- Lainnya	5	6
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	61	76
	- Belum Menikah	3	4
	- Janda/Duda	16	20
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	35	44
	- Pedagang	7	8
	- Tidak Bekerja	6	8
	- Lain-lain	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.2.1. Kemiskinan Alamiah

Tidak terdapat indikasi faktor alamiah sebagai penyebab kemiskinan di Kota Banda Aceh. Fasilitas publik dan lingkungan tempat tinggal di Kota Banda Aceh umumnya sudah sangat baik, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh diakibatkan oleh faktor alamiah. Akses ke berbagai sarana publik seperti sekolah, puskesmas, pasar, dll. dapat dikatakan sangat memadai. Informasi terhadap berbagai kebutuhan penunjang ekonomi keluarga juga tersedia luas sehingga peluang untuk kegiatan ekonomi lebih besar dibandingkan di daerah lain di Aceh.

Sebagian besar responden tinggal di rumah sendiri dan seluruhnya sudah dialiri listrik PLN. Sebagian responden menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi sudah menggunakan air PAM. Sebagian besar rumah responden memiliki tembok beton, hanya sedikit yang masih menggunakan bahan dari bambu dan hampir seluruhnya memiliki fasilitas WC sendiri. Umumnya jarak rumah responden dari jalan besar berkisar lebih dari 1 km. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kondisi Rumah Responden di Kota Banda Aceh

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	10	13
	- Sewa	6	7
	- Milik Sendiri	64	80
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	8	10
	- Tembok	72	90
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	40	50
	- PAM	40	50
	- Keduanya Sumur dan PAM	6	
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	1	1
	- Sendiri	79	99
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	10	13
	- 500 – 1 km	21	26
	- > 1 km	49	61
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tidak semua warga miskin di Kota Banda Aceh merupakan warga asli, melainkan pendatang dari berbagai kota lainnya. Hasil survey menunjukkan ada 36 persen responden (29 orang) yang bukan merupakan warga asli Banda Aceh. Mereka berasal dari beberapa kota lainnya seperti Aceh Besar, Sigli, Sabang, Langsa, Seumeulu, Meulaboh, Lhokseumawe, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, dan bahkan ada yang berasal dari Medan. Mayoritas mereka datang ke Banda Aceh dalam rangka mencari pekerjaan (21 orang). Ada juga sebagian yang datang dengan alasan pernikahan (4 orang), menumpang dan akibat konflik di masa lalu masing-masing sebanyak 2 orang.

Lebih setengah responden (51 persen) mengaku memiliki mata pencaharian utama dalam sektor perikanan dan tidak satupun dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sisanya tersebar untuk jenis mata pencaharian lain seperti supir (10 persen), lainnya (26 persen), dan sisanya tidak punya mata pencaharian. Bila dibandingkan dengan data pekerjaan responden pada tabel 1, dimana pekerjaan sebagai nelayan hanya ada 41 persen, maka berarti ada 7 persen responden yang saat ini bekerja di luar bidang mata pencaharian utamanya, seperti menjadi pembantu rumah tangga, tukang sapu, dan sopir.

Responden umumnya tidak memiliki keterampilan lain untuk dapat dijadikan alternatif penghasilan bagi keluarga, demikian pula keterampilan anggota keluarga lainnya. Hanya ada 3 orang responden yang mengaku memiliki keterampilan lainnya yang bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, yakni memasak 2 orang dan menyetir 1 orang. Selain itu, hanya ada 8 responden yang mengaku memiliki anggota keluarga yang memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sumber ekonomi keluarga, yakni keterampilan tukang (3 orang), memasak (2 orang), menjahit sandal, menjahit jala, dan mencukur rambut masing-masing 1 orang.

Minimnya keterampilan ini sejalan dengan alasan yang diakui responden dalam pilihan pekerjaannya. Sebagian besar responden mengaku menekuni pekerjaan saat ini karena alasan tidak ada pekerjaan lain (46 persen), tidak ada keterampilan lain (26 persen), pekerjaan turun-temurun (16 persen), dan sisanya karena alasan lainnya (11 persen).

3.2.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (68 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Mayoritas responden mengaku diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selain itu, 54 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun terdapat sedikit perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (50 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Ada 25 persen responden yang menjawab dengan spontan ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat perbedaan hanya 23 persen.

Tabel 3. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Banda Aceh

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	22	28
	- Kadang-kadang	25	31
	- Selalu	33	41
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	27	34
	- Kadang-kadang	21	26
	- Selalu	32	40
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	14	17
	- Kadang-kadang	43	54
	- Selalu	23	29
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa	18	22
	- Tidak pernah	38	48
	- Kadang-kadang	24	30
	- Selalu		
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	9	11
	- Beberapa elit di desa	17	21
	- Musyawarah	54	68
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	20	25
	- Kadang-kadang	40	50
	- Tidak ada	18	23
	- Tidak jawab	2	2
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan	9	11
	- Tidak pernah	23	29
	- Ada, tapi kurang transparan	43	54
	- Ada transparan	5	6
	- Tidak jawab		
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah	15	19
	- Tidak pernah	61	76
	- Kadang-kadang	4	5
	- Selalu		
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.2.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan tidak terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh. Mayoritas (51 persen) responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, ada 29 persen yang kurang percaya. Namun ada 20 persen responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah.

Sebagian besar responden (49 persen) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Namun ada 32 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Sisanya sebesar 19 persen mengaku pasrah dan tidak memiliki keinginan. Keinginan ini umumnya muncul dari dalam diri sendiri (64 persen), dari keluarga (27 persen), dan dari dorongan tokoh rujukan (9 persen). Kondisi ini sejalan dengan upaya menabung, dimana hanya 30 persen responden yang sudah mulai menabung, dan 50 persen memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya sebesar 20 persen tidak memiliki keinginan sama sekali. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kultural Kemiskinan di Kota Banda Aceh

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	16	20
	- Kurang percaya	23	29
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	41	51
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	15	19
	- Ada sedikit tapi belum memulai	39	49
	- Ada dan sudah memulai	26	32
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	5	8
	- Keluarga	18	27
	- Dari dalam diri sendiri	42	64
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	16	20
	- Ada, tapi belum memulai	40	50
	- Ada dan sudah mulai	24	30
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	36	45
	- Pernah, tapi baru memulai	28	35
	- Pernah dan sudah mulai	16	20
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dorongan responden untuk konsumsi relatif tinggi dibandingkan untuk menabung. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang ingin menabung justru bertambah kecil. Jumlah responden yang tidak pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih meningkat menjadi 45 persen.

Bandingkan dengan jumlah responden yang tidak punya keinginan untuk menabung hanya 20 persen.

3.3. Profil Kemiskinan di Kota Sabang

Angka kemiskinan di Kota Sabang mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah APBK yang signifikan, namun paradoks dibandingkan tingkat kemiskinan kota-kota lainnya di Aceh. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2007-2013), APBK Kota Sabang mengalami peningkatan sebesar 56 persen dari Rp 268.9 milyar menjadi Rp 427 milyar. Namun, angka kemiskinan hanya turun rata-rata sebesar 1.3 persen per tahun dari 27,13 persen pada tahun 2007 menjadi 25,7 persen (2008), 23,89 persen (2009), 21,68 persen (2010), 21,31 persen (2011), 20,51 persen (2012), dan 18,31 persen pada tahun 2013. Statistik juga menunjukkan, pemerintahan kota di Aceh menempati peringkat teratas IPM. Tahun 2013, Kota Sabang berada pada rangking 3 nilai IPM tertinggi (77.23) setelah Kota Banda Aceh (79) dan Kota Lhokseumawe (77.84). Sementara Kota Langsa pada rangking 4 (75.10). Tetapi dari sisi kemiskinan, kota-kota lain seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa berada pada peringkat kemiskinan terendah 1 sampai 3 di Aceh, sedangkan Sabang (18.31 persen) berada pada rangking 12, di atas rata-rata kemiskinan Aceh (18.05 persen). Ini indikasi bahwa kinerja penurunan kemiskinan Kota Sabang selama 6 tahun terakhir bergerak lambat dibandingkan peningkatan APBK. Inefisiensi dan tidak efektifnya penggunaan anggaran diakui oleh para pemangku kepentingan di Kota Sabang sebagai salah satu penyebab paradoks kemiskinan ini.

Kelompok terbesar kepala keluarga miskin di Kota Sabang berada pada usia lanjut. Sebanyak 60 persen kepala keluarga miskin yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Sedangkan 40 persen sisanya adalah perempuan, baik yang berstatus sebagai kepala keluarga maupun yang mewakili kepala keluarga pada saat wawancara. Usia rata-rata kepala keluarga miskin adalah 50,6 tahun. Hasil survey menunjukkan, terdapat 70 persen kepala keluarga miskin yang berada pada kelompok usia di atas 40 tahun. Detilnya, sebesar 25 persen kepala keluarga miskin di Kota Sabang berada pada usia 40-50 tahun. Kemudian 24 persen berada pada usia di atas 60 tahun, dan 21 persen berusia 50-60 tahun. Sedangkan kepala keluarga miskin berusia relatif muda yaitu 21-30 tahun hanya 11 persen. Kemiskinan pada usia tua tentu akan memperparah kondisi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Karena mereka yang berusia lanjut umumnya telah memiliki anggota keluarga dan tanggungan yang lebih banyak. Selain itu, survey juga menemukan bahwa 5 persen kepala keluarga miskin merupakan tokoh formal, 6 persen tokoh informal, selebihnya 89 persen warga biasa. Survey juga memperlihatkan jika 55 persen kepala keluarga miskin ini berstatus penduduk asli atau sudah lama menetap atau lahir di Kota Sabang. Sedangkan 45 persen sisanya merupakan pendatang yang sudah menjadi warga Kota Sabang.

Rata-rata keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Jumlah anggota keluarga sangat bervariasi, mulai dari yang paling sedikit 1 orang sampai kepada yang terbanyak 8 orang. Namun lebih dari 56 persen terdiri dari 2-4 orang, dan umumnya terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Terdapat 36 persen yang berjumlah 5-8 orang anggota keluarga. Sementara tidak ditemukan ada yang lebih dari 8 orang. Terdapat 8 persen yang hidup sendiri dengan berbagai alasan seperti cerai, ditinggal mati suami/istri, belum kawin, atau pisah rumah dengan anak dan anggota keluarga lainnya.

Total pendapatan kepala keluarga miskin perbulan bervariasi dan tidak menentu, serta berada di bawah upah minimum Kota (UMK) Sabang. Rata-rata pendapatan perbulan KK miskin di Sabang sebesar Rp1.016.875. Rinciannya, 46 persen KK miskin memiliki pendapatan Rp500.000 – Rp1.000.000 perbulan. Mereka yang berpenghasilan Rp1.000.000 – Rp1.500.000 perbulan berjumlah 26 persen. Sedangkan yang punya pendapatan perbulan mulai Rp1.500.000 – Rp2.000.000 berjumlah 8 persen. Tidak ada yang memiliki pendapatan bulanan di atas Rp2.000.000 atau di atas UMK. Sementara yang hidup hanya dengan pendapatan di bawah Rp500.000 perbulan berjumlah 20 persen. Rendahnya pendapatan kepala keluarga miskin ini ikut diperparah oleh banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan serta minimnya jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja.

Mayoritas kepala keluarga miskin bekerja sendiri untuk membiayai seluruh anggota keluarganya. Sebesar 60 persen kepala keluarga miskin menanggung penuh 2-4 anggota keluarga. Sedangkan 19 persen kepala keluarga lainnya menanggung 5-8 anggota keluarganya. Hanya 21 persen yang menanggung hanya satu anggota keluarga. Sementara survey menunjukkan, 70 persen kepala keluarga bekerja sendiri untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Sebesar 23 persen keluarga miskin lainnya punya 2 orang yang bekerja. Hanya 5 persen lainnya punya lebih dari 2 yang bekerja, namun umumnya juga bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan anggota keluarga lainnya umumnya adalah sebagai buruh, nelayan, dan petani. Selebihnya termasuk jual kue, bengkel, cleaning service, jual es, jual pisang goreng, jual beli besi bekas, satpam, menjahit, bekerja di kedai orang, dan lain-lain. Sementara itu juga ditemukan sebesar 3 persen keluarga miskin yang sama sekali tidak bekerja. Dalam kelompok ini termasuk janda tua yang tinggal sendiri. Dalam hal bekerja, juga sedikit sekali dari istri yang ikut bekerja karena alasan ketiadaan keterampilan juga karena faktor kultural yang cenderung menempatkan perempuan mengurus rumah saja.

Sebagian besar kepala keluarga miskin di Kota Sabang hanya tamatan SD dan survey tidak menemukan ada yang bersekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Mayoritas kepala keluarga miskin, mencapai 38 persen, hanya lulusan sekolah dasar (SD). Porsi terbanyak kedua yaitu 28 persen adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan yang menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 15 persen. Survey menemukan tidak ada yang mencapai jenjang studi perguruan tinggi. Pada sisi lain, mereka yang tidak pernah sekolah juga cukup tinggi, mencapai 20 persen. Umumnya mereka yang tidak pernah sekolah tersebut berada pada usia tua. Studi ini juga menemukan bahwa terdapat 3 persen keluarga miskin yang anaknya berada pada usia sekolah namun telah putus sekolah. Jumlahnya tentu tidak signifikan, namun masih adanya angka putus sekolah tentu akan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan pada masa akan datang. Ini menjadi indikasi bahwa rendahnya level pendidikan menyebabkan rendahnya pengetahuan, mentalitas, dan keahlian sehingga berpengaruh pada jenis pekerjaan dan akhirnya berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan.

Sebagian besar kepala keluarga miskin di Kota Sabang berstatus menikah, namun pasangannya secara umum juga tidak punya keahlian dan pekerjaan. Hanya 3 persen kepala keluarga miskin yang tidak/belum menikah. Sedangkan 71 persen lainnya berstatus menikah. Kemiskinan semakin nyata ketika dikaitkan dengan kondisi pasangan dalam rumah tangga. Suami berada dalam kondisi miskin karena berbagai alasan, seperti tidak adanya keahlian dan pekerjaan. Istri juga demikian, umumnya tidak punya keahlian dan aktifitas produktif apapun selain duduk di rumah menunggu apa yang dibawa pulang oleh suami. Demikian juga

anak-anak keluarga miskin yang umumnya juga maksimal tamatan SMA juga tidak punya keahlian dan pekerjaan. Kondisi ini semakin memperparah beban dan tanggungan keluarga. Selain itu terdapat 26 persen kelompok miskin dalam kategori duda/janda miskin. Ada beberapa yang berstatus cerai, tetapi umumnya adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Sebagian besarnya telah berusia lanjut dan tidak mampu bekerja. Hidup mereka hanya bertumpu dari santunan pemerintah (Raskin), bantuan keluarga ataupun tetangga.

Tabel 5. Profil Responden di Kota Sabang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	50,6 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3,96 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp1.016.875	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	48	60
	- Perempuan	32	40
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	16	20
	- SD	30	38
	- SMP	22	28
	- SMA	12	15
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	57	71
	- Belum Menikah	2	3
	- Janda/Duda	21	26
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Konstruksi/Bangunan	13	16
	- Perikanan/Nelayan	10	13
	- Perdagangan/Jasa (buat/jual kue, dll)	10	13
	- Pertanian Palawija	9	11
	- Perkebunan	8	10
	- Pertambangan/Galian	6	8
	- Industri/Pabrik (bata, perabot, minyak kelapa, dll)	6	8
	- Lainnya (kehutanan, peternak, angkutan, buruh, dll)	13	18
	- Tidak bekerja/Lainnya	5	6
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Perdagangan/jasa, diikuti oleh perikanan (nelayan) dan konstruksi (bangunan) merupakan sektor pekerjaan utama keluarga miskin di Kota Sabang. Sebesar 16 persen keluarga miskin bergelut dalam berbagai bentuk kegiatan perdagangan/jasa meliputi jual kue, jual beli kelapa, jual barang bekas, pedagang ikan keliling, jual rokok, jual bakso, jual sayur, jual tempe, dan jasa-jasa sejenis lainnya. Sebagian besar kepala keluarga perempuan bekerja disektor usaha perdagangan dalam bentuk buat/jual kue. Sektor pekerjaan terbanyak kedua adalah perikanan/nelayan dan konstruksi/bangunan (buruh), masing-masing 13 persen. Kemudian terdapat 11 persen kepala keluarga miskin yang bergelut di lahan pertanian sayur-sayuran dan palawija seperti kacang panjang, bayam, sawi, ubi, jagung, dan lain-lain. Sebesar

10 persen lain bekerja di perkebunan dengan komoditas antara lain: cengkeh, kakao, pinang, dan kelapa. Namun pekerjaan mereka lebih cenderung sebagai buruh kebun, daripada sebagai usaha mandiri. Sehingga secara umum pekerjaan warga miskin adalah buruh, baik dipertanian, perkebunan, dan bangunan. Dibeberapa lokasi terutama di gampong Krueng Raya keluarga miskin menjadi buruh disektor usaha galian batu dan kerikil. Di sektor industri juga demikian, misalnya di gampong le Meulee banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik batu bata.

3.3.1. Kemiskinan Alamiah

Meski tidak terlalu kuat, faktor alamiah juga ikut berkontribusi sebagai penyebab kemiskinan di Kota Sabang. Dilihat dari kondisi dan fasilitas tempat tinggal, keadaan keluarga miskin di Sabang secara umum sudah cukup baik. Hampir semua keluarga miskin tinggal bertempat tinggal dalam radius 1 Km dari jalan negara/kabupaten. Meskipun masih ditemukan ada beberapa kelompok kecil warga miskin yang hidup terisolir karena akses jalan kerumah mereka sempit dan tidak bisa dilalui roda 4, seperti di Jurong Masjid berdekatan dengan waduk Paya Seunara.

Tabel 6. Kondisi Rumah Responden di Kota Sabang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	14	17
	- Sewa	4	5
	- Milik Sendiri	59	74
	- Lainnya	3	4
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu/semi permanen/kayu kualitas rendah	41	51
	- Tembok/permanen/kayu kualitas tinggi	39	49
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur/mata air tida terlindungi/air hujan	12	15
	- Sumur/mata air terlindungi/kemasan/PAM	68	85
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	13	16
	- Sendiri	67	84
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	61	76
	- 500 – 1 km	18	23
	- > 1 km	1	1
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Survey juga menemukan, sebesar 74 persen mereka sudah memiliki rumah sendiri. Hanya 17 persen yang masih menumpang bebas, sedangkan 5 persen lainnya berstatus sewa. Dari sisi tampilan keadaan rumah, dapat dikatakan tidak terlihat adanya kemiskinan di Kota Sabang. Tidak ditemukan adanya gubuk reot. Mereka yang menempati rumah permanen dengan kualitas kayu yang bagus berjumlah 49 persen, serta yang mendiami rumah semi permanen

dengan kualitas kayu biasa sebesar 51 persen. Dari sisi sanitasi, sebesar 84 persen keluarga miskin sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri, dan 16 persen sisanya masih menggunakan WC umum. Seluruh rumah tangga miskin di Sabang telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Tetapi masih ada 15 persen yang menggunakan air dari sumur/mata air tidak terlindungi/air hujan.

Cengkeh merupakan komoditas perkebunan potensial dengan luas tanam terbesar di Sabang, di susul kelapa dan kakao. Cengkeh merupakan komoditas yang punya harga cukup tinggi, saat ini mencapai Rp110,000/Kg. Dari total luas tanam cengkeh, 1.079,55 Ha telah menghasilkan dan hanya 673 Ha yang belum menghasilkan. Sementara 239 Ha mengalami kerusakan dengan berbagai alasan. Produksi cengkeh yang mencapai 884.176,80 ton menjadi yang terbesar dibandingkan komoditas perkebunan lainnya (BPS, 2014). Selain itu, lahan perkebunan kelapa masih menjadi komoditas yang produktif. Sedangkan kakao mulai menjadi komoditas dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa komoditas kecil lain seperti pinang, kemiri, pala, dan randu. Pengembangan sektor pertanian seperti cengkeh dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di Sabang.

Meskipun kondisi alam dan tingkat kesuburan lahan pertanian/perikanan di Kota Sabang dalam 10 tahun terakhir rata-rata tidak berubah, tetapi tingkat produksinya telah banyak menurun. Sebesar 53 persen masyarakat miskin menilai bahwa tidak ada kerusakan sumberdaya alam yang berarti di Sabang dalam 10 tahun terakhir. Hanya 16 persen yang mengakui adanya kerusakan seperti pengerukan gunung serta punahnya beberapa biodata laut oleh Tsunami. Bencana alam seperti banjirpun masih dianggap dalam batas normal. Oleh sebab itu, sebesar 53 persen keluarga miskin merasakan bahwa tingkat kesuburan lahan dalam 10 tahun terakhir masih tetap sama. Hanya 26 persen yang merasakan penurunan tingkat kesuburan. Sementara 21 persen lain mengaku mengalami peningkatan kesuburan. Namun demikian, mayoritas (50 persen) mengaku mengalami penurunan tingkat produksi. Hanya 28 persen keluarga miskin yang mengalami peningkatan produksi, serta 22 persen lain memiliki tingkat produksi yang sama seperti dulu.

Menurunnya tingkat produksi pertanian/perikanan di Kota Sabang dapat dijelaskan oleh memburuknya prasarana pertanian/perikanan. Sebanyak 63 persen pemilik lahan merasakan ketidakcukupan air dalam bertani dan berkebun. Terkait dengan ini, 63 persen warga miskin pemilik lahan menilai bahwa prasarana dan kondisi teknis irigasi berada pada kondisi buruk. Sebagai contoh, di Kecamatan Paya Seunara terdapat waduk terbesar di Sabang, tapi airnya sedikit bahkan kering dimusim kemarau. Irigasinya ada tetapi airnya tidak jalan atau mengendap. Ketersediaan air bersih juga belum merata diseluruh Sabang. PDAM belum menjangkau semua desa. Sulitnya akses air menyebabkan terhambatnya produksi pertanian yang umumnya terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Sedangkan infrastruktur lain seperti jalan secara umum sudah cukup baik.

Rendahnya keahlian serta masih tradisionalnya tata cara bertani/bernelayan juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat produksi. Sebesar 87 persen masyarakat miskin mengaku tidak tersentuh atau tidak memperoleh manfaat dari pelatihan yang pernah diikuti. Sebesar 75 persen juga diketahui tidak menggunakan bibit atau benih unggul dalam usaha produksi. Sementara 40 persen juga mengaku masih tradisional dan tidak mengalami perubahan dalam tata cara bertani dan bernelayan dalam 10 tahun terakhir. Akibat rendahnya keahlian, tradisionalnya cara bertani, serta memburuknya infrastruktur dan

prasarana pertanian/perikanan, sejumlah kebutuhan masyarakat seperti sayur-sayuran dan palawija pun tidak tercukupi dan harus didatangkan dari Banda Aceh. Padahal lahan di Sabang masih cukup luas untuk memproduksi berbagai kebutuhan tersebut.

Hama babi juga menjadi salah satu faktor menurunnya hasil pertanian. Wawancara dengan masyarakat juga menemukan masalah lain seperti tingginya hama babi sebagai faktor pengganggu produksi pertanian di Sabang. Untuk menghadapi hama babi ini, masyarakat harus membuat pagar yang bagus. Bagi warga miskin, pembuatan pagar yang untuk lahan pertanian yang relatif luas akan membutuhkan biaya besar sehingga sulit untuk dipenuhi. Akibatnya, aktifitas pertanian senantiasa terganggu oleh hama babi. Masalah seperti ini ikut menyebabkan banyak warga Sabang tidak mau intensif di pertanian.

Meskipun cuaca tidak menyebabkan bencana serius, namun berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat Sabang. Selama tahun 2013 misalnya, terjadi 59 kali bencana dengan rincian 50 kali angin kencang, 8 kali kebakaran, dan 1 kali tanah longsor. Namun hanya ada 1 KK yang menjadi korban (BPBD, 2014). Meskipun minim korban, namun dapat dipastikan bencana seperti angin kencang dapat mengganggu mata pencaharian warga yang berprofesi sebagai nelayan. Situasi ini juga menyebabkan pelayaran dan pasokan barang dari Banda Aceh terganggu sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan pokok. Harga barang-barang di Sabang secara umum sudah relatif sedikit lebih mahal. Namun sebagaimana diakui oleh warga setempat, masih dalam kategori “normal” untuk sebuah daerah kepulauan. Kondisi cuaca yang kadang-kadang tidak baik tentu semakin berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga. Kondisi ini akan semakin menyulitkan masyarakat miskin.

Demam termasuk malaria masih mendominasi jenis penyakit yang diderita oleh keluarga miskin di Kota Sabang, sedangkan Puskesmas menjadi tempat berobat bagi mayoritas mereka. Diantara penyakit yang diderita warga miskin adalah demam (30 persen), malaria (12 persen), batuk (9 persen), asam urat (8), rematik (7 persen), asam lambung (6 persen), sakit kepala (5 persen), dan lainnya (23 persen). Akses warga miskin di Sabang untuk berobat cukup mudah. Sebesar 91 persen memilih berobat ke Puskesmas, 6 persen ke rumah sakit, 2 persen ke Pustu/Polindes, dan 1 persen lagi mengaku masih berhubungan dengan dukun. Dari diskusi juga diketahui, bagi masyarakat kelas menengah yang sudah punya penghasilan tetap, sakit tidak menjadi masalah besar. Apalagi sudah ada berbagai jaminan kesehatan. Namun bagi kepala keluarga miskin di Kota Sabang yang umumnya beraktifitas sebagai buruh yang mengandalkan tenaga (buruh tani, buruh kebun, buruh bangunan, dan lainnya), walaupun ada jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), penyakit punya pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup anggota keluarga.

3.3.2. Kemiskinan Struktural

Survey menemukan beberapa indikasi kuatnya permasalahan struktural terkait kemiskinan di Kota Sabang. Prosentase kepala keluarga miskin yang mengaku tidak pernah terundang dalam rapat perencanaan pembangunan desa lebih tinggi (38 persen), dibandingkan yang mengaku kadang-kadang terundang (35 persen), dan selalu diundang (28 persen).

Tabel 7. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Sabang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	20	25
	- Kadang-kadang	24	30
	- Selalu	36	45
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	30	38
	- Kadang-kadang	28	35
	- Selalu	22	28
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	13	16
	- Kadang-kadang	30	38
	- Selalu	37	46
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	24	30
	- Kadang-kadang	49	61
	- Selalu	7	9
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	27	34
	- Beberapa elit di desa	47	59
	- Musyawarah	6	8
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	15	19
	- Kadang-kadang	55	69
	- Tidak ada	10	13
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	3	4
	- Ada, tapi kurang transparan	35	44
	- Ada transparan	42	53
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	6	8
	- Kadang-kadang	59	74
	- Selalu	15	19
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Indikasi lainnya terlihat dari rendahnya pelibatan masyarakat miskin dimana 61 persen menilai tidak selalu terundang dalam pengambilan keputusan desa. Hanya 6 persen saja yang mengaku dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal lain terlihat dari persepsi masyarakat miskin terhadap sistem distribusi bantuan dari pemerintah, sebesar 59 persen menilai bahwa itu hanya melibatkan sejumlah elit desa saja. Mayoritas masyarakat miskin inipun (74 persen) mengaku tidak selalu menerima bantuan. Ini diakui karena sifat bantuan sendiri yang peruntukannya tergantung program dan segmen masyarakat. Sedangkan untuk yang sifatnya rutin seperti Raskin, mereka mengaku selalu menerimanya. Meskipun

demikian, sebesar 69 persen masyarakat miskin juga menilai kadang-kadang masih ada perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi. Sebesar 19 persen mengaku tegas ada perbedaan pemberian bantuan, dan hanya 13 persen yang menilai tidak ada perbedaan. Masyarakat Sabang menilai bahwa warga dari desa asal Walikota terpilih misalnya, memiliki akses yang mudah serta menikmati bantuan lebih banyak dari lainnya.

Walaupun terdapat beberapa indikasi persoalan struktural, masyarakat miskin menilai bahwa pemerintah desa masih memiliki sejumlah kinerja yang baik. Pada aspek pertanggungjawaban misalnya, 53 persen warga miskin mengaku pimpinan desa sudah melakukannya secara transparan. Hanya 4 persen saja yang mengaku sebaliknya. Terkait dengan rapat program bantuan ekonomi, mayoritas (45 persen) masyarakat miskin juga menilai bahwa pemerintah desa selalu mengundang mereka. Hanya 30 persen yang menilai bahwa mereka kadang-kadang saja diundang. Sedangkan 25 persen lagi mengaku tidak pernah terundang. Pada sisi lain, partisipasi masyarakat miskin sendiri cukup tingkat dalam rapat desa. Sebesar 46 persen mengaku selalu hadir jika diundang. Sedangkan 38 persen mengaku tidak selalu hadir. Hanya 16 persen yang tidak pernah hadir.

Terdapat ketimpangan kepemilikan lahan antara orang kaya dan orang miskin di Kota Sabang, namun tidak ada perbedaan signifikan untuk jenis rumah yang dimiliki. Dari sisi kepemilikan lahan terindikasi adanya ketimpangan. Sejumlah orang kaya memiliki lahan yang sangat luas. Tanah yang luas ini umumnya mereka miliki dari warisan keluarga. Sedangkan dari bentuk rumah yang dimiliki, hampir tidak ada perbedaan baik dari segi bentuk dan besarnya antara orang kaya dan miskin. Rumah-rumah di Sabang baik orang kaya maupun miskin hampir seluruhnya berbentuk bangunan permanen dan semi permanen.

Bantuan ekonomi yang tidak tepat sasaran serta tidak adanya pendampingan menjadi indikasi penyebab ekonomi masyarakat miskin tidak berkembang. Survey menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat miskin (60 persen) mengakui jika bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Ada bantuan yang jumlahnya terlalu sedikit sehingga cenderung tidak bisa digunakan. Ada juga yang bantuannya terlalu banyak sehingga kelebihannya juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Hanya 23 persen yang mengaku bantuan telah sesuai, sedangkan 18 persen lainnya merasakan bantuan ekonomi tersebut sama sekali tidak sesuai kebutuhan. Selain bantuan yang tidak selalu tepat sasaran dan tidak tepat jumlah, tidak adanya pendampingan menjadi faktor krusial lainnya penyebab tidak efektifnya bantuan ekonomi. Hanya 4 persen warga miskin yang mengaku mendapatkan pendampingan dan sampai saat ini aktif dalam aktifitas ekonomi. Sedangkan 39 persen pernah mendapat pendampingan namun tidak aktif lagi. Selebihnya, 58 persen keluarga miskin lainnya tidak pernah mendapat pendampingan sama sekali. Lemahnya SDM, minimnya pelatihan dan penyuluhan, serta tidak adanya pendampingan semakin memperparah keberhasilan berbagai bantuan ekonomi.

Disamping memiliki tingkat efektifitas yang beragam, sejumlah program dan bantuan ekonomi dari pemerintah Kota Sabang dinilai dapat melunturkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. FGD dengan berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dipemerintahan memberi pandangan terhadap berbagai bantuan ekonomi. Bantuan dalam bentuk benih/bibit (cengkeh, pala, coklat, sayur, ternak, dan lainnya) dan alat/peralatan (boat, becak, mesin jahit, becak, kios, gerobak, kawat bronjong, dan lainnya) untuk berbagai kelompok dan individu memiliki tingkat efektifitas yang berbeda. Bantuan peralatan untuk

banyak kelompok ekonomi diketahui banyak menemui kegagalan. Banyak alat yang dijual untuk individu yang ada dalam kelompok itu sendiri. Dari hasil diskusi diketahui, bantuan untuk kelompok-kelompok yang muncul dadakan umumnya gagal. Sementara bantuan untuk Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) yang telah lama terbentuk dinilai lebih berhasil. Bantuan lain dari pemerintah berbentuk pelatihan (menjahit, perbengkelan, computer, las, fiber, dan lainnya). Tetapi minimnya pendampingan menjadi salah satu faktor penyebab tidak berhasilnya bantuan-bantuan tersebut. Disamping itu, masyarakat juga menerima berbagai jenis bantuan sosial seperti beasiswa untuk anak sekolah sebesar Rp2 juta/tahun. Meskipun cukup bermanfaat, namun memasukkan anak dari keluarga mampu sebagai penerima manfaat beasiswa dianggap tidak tepat sasaran. Demikian juga dengan bantuan dana kematian sebesar Rp5 juta/kematian, dinilai ikut melunturkan nilai-nilai sosial dan saling menyumbang dalam masyarakat. Bantuan lainnya adalah biaya rujukan berobat ke provinsi dari pemerintah Kota Sabang yang jumlahnya berbeda antar orang (sekitar Rp500.000). Bantuan ini mendorong orang sakit untuk mencari rujukan ke provinsi, padahal masih bisa ditangani oleh pelayanan kesehatan di Sabang. Selain itu warga juga menerima bantuan dari Baitul Mal, serta berbagai paket aspirasi dewan. Namun lemahnya sumberdaya dan tidak adanya pendampingan menyebabkan efektifitas bantuan menjadi tidak maksimal. Program dan bantuan ekonomi dari pemerintah Provinsi juga dinilai memiliki tingkat efektifitas yang beragam. Bantuan dari pemerintah provinsi meliputi bantuan rumah dhuafa. Bantuan ini sangat membantu warga miskin, meskipun penerimanya juga dinilai masih diintervensi oleh berbagai kepentingan. Beasiswa untuk anak yatim dan anak nelayan juga sangat membantu. Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) cukup bermanfaat, walaupun ditemukan ada penggunaan yang tidak efektif oleh pihak desa.

Berbagai bantuan sosial sebenarnya cukup potensial untuk mengembangkan ekonomi kelompok miskin. Tetapi ketiadaan pendampingan kembali dinilai sebagai penyebab bansos ini diragukan kemanfaatannya. Tahun ini masyarakat Sabang juga menerima banyak bantuan bibit dari provinsi seperti cengkeh. Meskipun relevan dengan kebutuhan petani, namun belum dapat dinilai efektifitasnya karena belum ada hasil. Sejumlah program dan bantuan ekonomi dari Pemerintah Pusat dinilai cukup efektif. Bantuan yang diterima keluarga miskin dari Pemerintah Pusat meliputi berbagai jenis bantuan langsung masyarakat (BLM) seperti bantuan beras (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil, balita, dan siswa. Program-program ini dinilai cukup efektif meskipun permasalahan data menyebabkan penerima manfaatnya mencakupi warga yang mampu. Seperti kasus Raskin, seharusnya hanya warga yang benar-benar miskin yang menerimanya. Tetapi kenyataannya, banyak warga yang mampu ikut menikmati bantuan ini sebagai akibat pemerataan dan membesarnya data orang miskin di level desa. Sehingga jatah Raskin untuk orang yang benar-benar miskin menjadi sedikit. Selain itu ada bantuan penguatan infrastruktur dan ekonomi desa melalui PNPM/P2KP yang dinilai telah banyak memberikan manfaat. Adanya pendamping/fasilitator dipandang sebagai penyebab program ini berhasil. Dibiidang sosial terdapat sejumlah program dan bantuan uang yang dianggap sangat membantu kelompok tertentu seperti Asistensi Lanjut Usia Telantar (ASLUT) dan bantuan untuk penyandang cacat berat (ODKB). Dibiidang pertanian ada bantuan Kawasan Mandiri Pangan yang dianggap telah membantu pengembangan kelompok tani. Program rehab rumah dari PU Pusat juga dianggap jenis bantuan yang cukup bermanfaat bagi warga miskin.

Minimnya kelembagaan ekonomi ikut mengakibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berjalan maksimal. Secara umum tidak ditemukan adanya kelembagaan ekonomi masyarakat yang memadai di desa-desa di Kota Sabang. Kecuali di beberapa desa, masih terdapat kelompok simpan pinjam yang digerakkan oleh PNPM/P2KP. Lembaga seperti PKK di beberapa tempat diakui mampu menggerakkan aktifitas ekonomi bagi sejumlah perempuan. Namun tidak ada kelembagaan ekonomi khusus yang memberdayakan berbagai kelompok miskin. Selain jumlah dan keaktifannya yang semakin menurun, keberadaan koperasi juga dinilai belum memberi manfaat berarti bagi kelompok miskin. Ini terbukti dari rendahnya akses masyarakat miskin terhadap microfinance.

Akses masyarakat miskin Kota Sabang terhadap keuangan mikro sangat kecil. Hanya 5 persen dari KK miskin yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh modal kerja. Setengah dari jumlah tersebut meminjam dari bank. Sedangkan sisanya ke koperasi dan lembaga keuangan lainnya (seperti kelompok simpan pinjam). Setengah dari keluarga miskin yang pernah meminjam modal pada berbagai lembaga keuangan tersebut memiliki persepsi bahwa prosedur peminjaman uang tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Sedangkan 25 persen mengaku sulit, dan 25 persen lainnya merasa mudah. Jumlah pinjaman modal usaha di berbagai lembaga keuangan juga bervariasi. Hasil studi menunjukkan bahwa setengah dari KK miskin yang pernah meminjam pada lembaga keuangan meminjam lebih dari 70 persen dari total kebutuhan modal usaha. Setengah lagi memiliki jumlah pinjaman dibawah 30 persen dari keperluan modal usaha.

Disamping infrastruktur atau fasilitas pariwisata yang belum semuanya baik, penerima manfaat pariwisata di Kota Sabang juga tidak merata. Kota Sabang terkenal sebagai destinasi wisata paling populer di Aceh. Tahun 2013 misalnya (BPS, 2014), tercatat ada 3.382 turis asing dan 401.224 turis lokal yang berkunjung ke Pulau Weh. Namun hanya sebagian masyarakat yang tinggal di pesisir tertentu dari Kota Sabang yang memperoleh manfaat lebih dari sektor pariwisata ini. Desa-desa yang memiliki aktifitas pariwisata seperti Iboih dalam beberapa kurun waktu ini telah berubah menjadi desa yang memiliki aktifitas ekonomi yang tinggi dan mampu mengeluarkan mayoritas masyarakatnya dari kemiskinan. Sementara gampong pertanian dan perkebunan lainnya relatif tidak terkait dengan aktifitas jasa pariwisata. Lemahnya infrastruktur ekonomi dan pariwisata ikut menjadi penyebab pariwisata di Sabang tidak memberikan nilai lebih bagi percepatan ekonomi. Bahkan desa pariwisata terkenal seperti Iboih pun belum memiliki infrastruktur PDAM untuk air bersih, sehingga bisnis menjadi terganggu.

3.3.3. Kemiskinan Kultural

Survey juga menemukan tingginya indikasi Kultural sebagai salah satu penyebab kemiskinan di Kota Sabang. Mayoritas masyarakat miskin (49 persen) masih memiliki keraguan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah. Sebesar 46 persen meyakini bahwa itu tergantung usaha, bukan pada nasib. Sementara hanya 5 persen saja yang benar-benar yakin itu sebagai nasib yang tidak dapat diubah. Indikasi ini didukung oleh lemahnya Kultural menabung. Mayoritas keluarga miskin (46 persen) menyatakan ada keinginan untuk menabung, tetapi belum memulainya. Hanya 16 persen yang sudah memulai. Sedangkan 38 persen tidak ada keinginan untuk itu. Walaupun prosentase keinginan menabung cukup tinggi, tetapi dorongan untuk konsumtif lebih tinggi. Ini terlihat dari mayoritas masyarakat miskin (56 persen) yang berkemauan untuk menggunakan uang untuk berbagai pengeluaran

seandainya mereka memiliki penghasilan lebih.

Disisi lain, kemauan dan semangat untuk keluar dari kemiskinan sudah ada namun belum dilaksanakan. Sebesar 51 persen memiliki hasrat untuk merubah diri menjadi lebih baik, tetapi belum dilakukan. Hanya 34 persen yang sudah memulai untuk merubah diri dengan berbagai tindakan dan usaha. Sedangkan 15 persen lainnya tidak ada keinginan sama sekali untuk merubah diri dan umumnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. Diantara mereka yang berkeinginan memperbaiki hidup ini umumnya memiliki sumber motivasi dari diri sendiri (58 persen). Sementara 40 lainnya termotivasi oleh keluarga. Sedangkan yang terinspirasi oleh tokoh-tokoh rujukan sangat sedikit, hanya 3 persen.

Tabel 8. Kultural Kemiskinan di Kota Sabang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	4	5
	- Kurang percaya	39	49
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	37	46
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	12	15
	- Ada sedikit tapi belum memulai	41	51
	- Ada dan sudah memulai	27	34
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	2	3
	- Keluarga	32	40
	- Dari dalam diri sendiri	46	58
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	30	38
	- Ada, tapi belum memulai	37	46
	- Ada dan sudah mulai	13	16
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	45	56
	- Pernah, tapi baru memulai	27	34
	- Pernah dan sudah mulai	8	10
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hasil FGD memperkuat berbagai indikasi tingginya kemiskinan kultural di Kota Sabang. Perilaku malas diakui oleh semua informan sebagai salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan kultural di Kota Sabang. Sebagai contoh, hampir semua warga punya tanah tetapi tidak digarap. Sikap malas untuk bertani dan berkebun ini semakin diperparah oleh memburuknya infrastruktur (buruknya irigasi dan ketiadaan suplai air untuk pertanian) serta tingginya hama babi. Ada juga warga yang kerjanya hanya menghabiskan warisan yang ada, bukan terus bekerja. Walaupun miskin, namun masih bisa makan. Ini melahirkan sikap santai. Konon lagi ada yang hidupnya merasa cukup nyaman karena masih ada orang tua yang memberi mereka makan. Disamping itu, masyarakat sudah termanjakan

dengan berbagai bantuan. Bantuan pemerintah dianggap sebagai hadiah cuma-cuma. Jika mendengar ada bantuan, semua merasa diri miskin. Masyarakat juga ikut dimanjakan oleh sifat murah hati Walikota yang memberi tanpa pendampingan. Sementara itu ada juga yang kaya karena warisan. Sebagian mereka mempunyai banyak uang setelah pembebasan lahan untuk waduk, juga perluasan lahan Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS) di berbagai lokasi. Namun setelah aset terjual, uang juga habis. Hal serupa juga terjadi pada warga miskin yang dulu memiliki perkebunan cengkeh. Ketika cengkeh sudah tidak maju akibat perubahan iklim dan faktor lainnya, mereka menjual tanah sehingga sekarang sudah tidak punya aset lagi. Di sejumlah desa, kondisi ini diperparah oleh narkoba yang semakin meningkat dan mengarah pada perilaku kriminal lainnya seperti mencuri, dll.

3.4. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

Rata-rata usia responden berada pada usia produktif yaitu 48.1 tahun. Jika ditinjau dari sisi pendidikan, 50 persen responden hanya mampu menamatkan tingkat Sekolah Dasar, sedangkan sisanya sebagian besar hanya mampu menamatkan sekolah menengah. Dengan tingkat pendidikan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun responden berada pada usia produktif, namun karena tingkat pendidikannya tergolong rendah, maka sebagian besar responden hanya mampu bekerja pada pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik seperti buruh tani (42.5 persen), nelayan (11.3 persen), buruh pabrik batubata (5 persen).

Tabel 9. Profil Responden di Kabupaten Aceh Besar

No	Variabel	Jumlah	%
1	Usia rata-rata	48,1Tahun	
2	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.055.000	
4	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	53	66
	- Perempuan	27	34
	Jumlah	80	100
5	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	4	5
	- SD	40	50
	- SMP	19	23,8
	- SMA	16	20
	- Perguruan Tinggi	1	1,2
	- Lainnya	0	
	Jumlah	80	100
6	Status		
	- Menikah	47	58,8
	- Belum Menikah	4	5
	- Janda/Duda	29	36,2
	Jumlah	80	100
7	Pekerjaan		
	- Buruh tani	34	42,5
	- Nelayan	9	11,3
	- Pedagang	6	7,5
	- Buruh pabrik batubata	4	5
	- Tidak Bekerja	2	2,5
	- Lain-lain	25	31,2
	Jumlah	80	100

Umumnya responden berstatus menikah dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga rata-rata 4 orang. Dengan jumlah tanggungan kepala keluarga ini mendorong responden untuk berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kondisi ini juga merupakan salah satu alasan responden bekerja sebagai buruh, baik buruh tani, buruh pabrik batubata dan lainnya yang hanya membutuhkan tenaga fisik.

3.4.1. Kemiskinan Alamiah

Tabel 10 di bawah ini menunjukkan bahwa 95 persen masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar tinggal di rumah sendiri, meskipun 65 persen di antaranya masih dalam kondisi rumah dengan jenis bambu. Beberapa masyarakat (35 persen) dengan jenis rumah dalam kondisi permanen, umumnya merupakan rumah bantuan korban tsunami, yaitu masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

Tabel 10. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Besar

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	2	2,5
	- Sewa	2	2,5
	- Milik Sendiri	76	95
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	52	65
	- Tembok	28	35
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	68	85
	- PAM	12	15
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	22	27,5
	- Sendiri	58	72,5
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	22	27,5
	- 500 – 1 km	20	25
	- > 1 km	38	47,5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Ditinjau dari sumber air bersih masyarakat, 85 persen berasal dari sumur, dan hanya 15 persen dari PAM. Masyarakat yang sumber air bersih berasal dari sumur, umumnya masyarakat dengan jarak rumah lebih dari 500 meter dari jalan, sehingga masih sulit dijangkau oleh PDAM. Selain kondisi ini, masyarakat juga masih enggan mengeluarkan biaya untuk keperluan air PAM. Menurut mereka, masih terlalu banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi dalam keluarga. Air bersih masih dapat dipenuhi dari air sumur yang mereka punya. Namun jika ditinjau dari fasilitas WC, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat

mulai menyadari untuk memiliki WC dirumah sendiri. Meskipun 22.7 persen diantaranya masih memanfaatkan WC umum.

3.4.2. Kemiskinan Struktural

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam setiap kegiatan rapat, baik rapat bantuan ekonomi dan perencanaan pembangunan desa, masyarakat selalu diundang untuk menghadiri rapat, namun hanya 32.5 persen yang selalu hadir. Sementara sisanya hanya hadir jika ada kesempatan diantara aktivitas ekonomi yang rutin mereka kerjakan. Bahkan 15 persen diantaranya tidak pernah hadir sama sekali.

Ditinjau dari sisi adanya keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan, memperlihatkan bahwa 58 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hanya elit desa saja yang berperan dalam pemberian keputusan, khususnya keputusan dalam pemberian bantuan baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Kondisi ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat, contohnya dalam pemberian bantuan raskin. Menurut pendapat beberapa masyarakat, bantuan raskin diberikan untuk semua warga desa, tanpa memperhatikan kaya atau miskin. Sementara yang lebih membutuhkan adalah masyarakat miskin. Menurut pendapat elit desa, kondisi ini tidak dapat dihindari. Karena jika bantuan hanya diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat golongan ekonomi menengah keatas tidak mau dilibatkan dalam kegiatan gotong royong atau kegiatan kebersamaan di desa. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi elit desa untuk mengambil keputusan. Akibat dari kondisi tersebut sebagian besar (53.8 persen) masyarakat miskin menyatakan bahwa tidak pernah ada pertanggungjawaban yang transparan yang dilakukan elit desa terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat.

Tabel 11. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Besar

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	9	11,5
	- Kadang-kadang	14	17,5
	- Selalu	57	71
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	8	10
	- Kadang-kadang	11	13,8
	- Selalu	61	76,2
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	12	15
	- Kadang-kadang	42	52,5
	- Selalu	26	32,5
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa	58	72,5
	- Tidak pernah	14	17,5
	- Kadang-kadang	8	10
	- Selalu		
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	4	5
	- Beberapa elit di desa	65	81,3
	- Musyawarah	11	13,7
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	8	10
	- Kadang-kadang	61	76,3
	- Tidak ada	11	13,7
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	43	53,8
	- Ada, tapi kurang transparan	22	27,5
	- Ada transparan	15	18,7
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	14	17,5
	- Kadang-kadang	58	72,5
	- Selalu	8	10
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.4.3. Kemiskinan Kultural

Tabel 12 di bawah ini menunjukkan bahwa 66.2 persen masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar tidak percaya bahwa kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk diubah, karena mereka meyakini bahwa kemiskinan dapat diubah dengan adanya usaha. Namun 7.5 persen masyarakat miskin di wilayah Aceh Besar masih percaya bahwa kemiskinan sulit untuk diubah. Umumnya masyarakat yang mempercayai kondisi ini adalah masyarakat yang sudah berusia tidak produktif, dan tidak mempunyai lahan untuk berusahatani.

Tabel 12. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	6	7,5
	- Kurang percaya	21	26,3
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	53	66,2
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	0	0
	- Ada sedikit tapi belum memulai	80	100
	- Ada dan sudah memulai	0	0
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	4	5
	- Keluarga	13	16,3
	- Dari dalam diri sendiri	63	78,7
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	24	30
	- Ada, tapi belum memulai	50	62,5
	- Ada dan sudah mulai	6	7,5
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih	24	30
	- Tidak pernah	53	66,3
	- Pernah, tapi baru memulai	3	3,7
	- Pernah dan sudah mulai		
	Jumlah	80	100

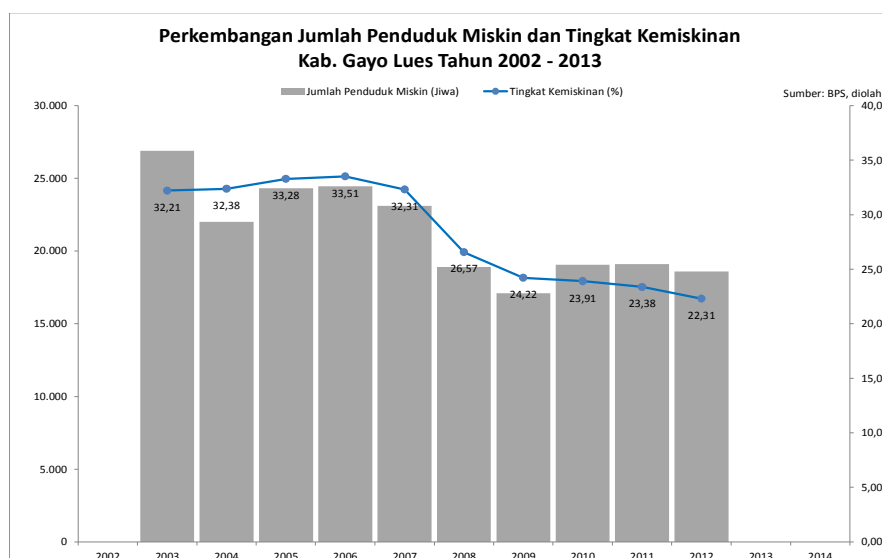
Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Berkaitan dengan kondisi tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 100 persen masyarakat punya sedikit keinginan dan semangat untuk merubah diri, namun hingga saat ini masih belum memulai. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat pasrah dengan kondisi ekonomi yang diterima, karena kondisi ini telah berlangsung secara turun temurun dalam keluarga mereka. Namun demikian keinginan dan semangat untuk merubah diri cukup besar timbul dalam diri mereka. Sebanyak 78.7 persen yakin bahwa perubahan hanya dapat dilakukan jika ada niat dalam diri untuk merubah kondisi ekonomi, dan 16.3 persen responden menyatakan keinginan untuk merubah kondisi ekonomi ini karena adanya dukungan keluarga.

Dengan kondisi ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, maka 30 persen masyarakat miskin tidak ada keinginan untuk menabung. Sementara 62.5 persen mempunyai keinginan untuk menabung, namun belum memulai. Hal ini berkaitan dengan pemikiran masyarakat untuk menabung jika ada penghasilan yang berlebih, dimana 66.3 persen responden menyatakan bahwa mereka ada keinginan untuk menabung jika ada kelebihan pendapatan, namun masih belum memulai.

3.5. Profil Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues

Angka kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2013 berada di peringkat ke empat tertinggi di Aceh yaitu sebesar 22.31%, sedikit lebih baik dibandingkan Pidie Jaya 24,50%, Bener Meriah 24,35% dan Kabupaten Aceh Barat 22,76%. Posisi ini jauh melampaui rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional, masing-masing sebesar 18.58% dan 11.66%. Walaupun posisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues berada di atas rata-rata nasional dan provinsi, namun perkembangan tingkat kemiskinan setiap tahunnya mengalami penurunan yang signifikan.



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2002 – 2013.

Data menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Gayo Lues serius dalam menanggulangi kemiskinan daerah, ditambah peran serta masyarakat dan partisipasi berbagai stakeholder bersinergi untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir telah turun dari 32,21% Tahun 2003 menjadi 22,31% Tahun 2012.

Survey yang dilakukan di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di Kabupaten Gayo adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues adalah petani (78%) dan buruh tani (5%), sementara sisanya adalah di sektor jasa, ibu rumah tangga, dan lain-lain..Mayoritas responden tidak sekolah (33%), dengan pendidikan SD (29%) dan SMP (25%), serta SMA (13%).Usia rata-rata responden adalah 47 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 3 orang. Dari jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki (64%) dan perempuan (36%), 67% berstatus menikah dan 33% berstatus janda/duda. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Profil Responden di Kabupaten Gayo Lues

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	47 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3 Orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp.828.067	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	51	64
	- Perempuan	29	36
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	25	33
	- SD	22	29
	- SMP	19	25
	- SMA	10	13
	- Perguruan Tinggi	-	-
	- Lainnya	-	-
	Jumlah	76	100
6.	Status		
	- Menikah	50	67
	- Belum Menikah	-	-
	- Janda/Duda	25	33
	Jumlah	75	100
7.	- Pekerjaan		
	- Petani	62	78
	- Buruh Tani	4	5
	- Jasa	3	4
	- IRT	2	
	- Lain-lain	9	11
	Jumlah	80	98

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.5.1. Kemiskinan Alamiah

Sebagian besar masyarakat miskin di Gayo Lues (59%) tinggal dengan cara menumpang di rumah orang lain. Sebagian kecil (4%) memiliki kemampuan untuk menyewa dan hanya 38% yang tinggal di rumah sendiri dengan kondisi bangunan seluruhnya hanya terbuat dari bambu (tidak ada yang memiliki rumah permanen/tembok semen). Sebagian besar responden (94%) menggunakan air sumur atau mata air tidak terlindungi untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya 6% yang sudah menggunakan mata air yang terlindungi/PAM. Tidak ada satu pun responden (%) yang diwawancarai memiliki fasilitas WC sendiri, dimana seluruhnya (100%) tergantung pada fasilitas WC umum/sungai. Umumnya jarak rumah responden dari jalan besar berkisar lebih dari 1 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Gayo Lues

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	47	59
	- Sewa	3	4
	- Milik Sendiri	30	38
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	80	100
	- Tembok	-	-
	Jumlah	80	100
3.	Sumber Air Bersih		
	- Sumur atau Mata Air tak terlindungi	76	94
	- Mata Air terlindungi	4	6
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	80	100
	- Sendiri	-	-
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	6	7
	- 500 – 1 km	6	7
	- > 1 km	68	86
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.5.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (73%) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Mayoritas responden mengaku selalu diundang dalam rapat program bantuan (48%) maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selain itu, 54 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan.

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun mayoritas responden tidak selalu hadir dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan desa. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh sistem pengambilan keputusan hanya kadang-kadang melibatkan warga miskin, bahkan mayoritas responden (55%) mengaku terdapat perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi antara masyarakat miskin dan tidak miskin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Gayo Lues

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	9	11
	- Kadang-kadang	33	41
	- Selalu	38	48
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	20	24
	- Kadang-kadang	50	61
	- Selalu	10	15
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	6	8
	- Kadang-kadang	45	57
	- Selalu	29	35
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	9	11
	- Kadang-kadang	41	51
	- Selalu	30	38
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	18	21
	- Beberapa elit di desa	5	6
	- Musyawarah	59	73
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	44	55
	- Kadang-kadang	28	35
	- Tidak ada	7	9
	- Tidak jawab	1	1
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	8	10
	- Ada, tapi kurang transparan	35	46
	- Ada transparan	53	54
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	10	12
	- Kadang-kadang	46	61
	- Selalu	24	28
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.5.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan tidak terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues. Mayoritas (42%) responden kurang percaya, bahkan 24% responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Namun demikian terdapat 33%

responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah.

Mayoritas responden (79 persen) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Namun ada 18% responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Hanya 3% yang mengaku pasrah dan tidak memiliki keinginan. Keinginan ini umumnya muncul dari dalam diri sendiri (73%), dari keluarga (21%), dan dari dorongan tokoh rujukan (6%). Kondisi ini juga ditunjukkan keinginan menabung responden, dimana 91% memiliki keinginan namun belum memulainya, 8% responden sudah mulai menabung, dan hanya 1% tidak memiliki keinginan sama sekali. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	26	33
	- Kurang percaya	33	42
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	19	24
	Jumlah	78	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	2	3
	- Ada sedikit tapi belum memulai	62	79
	- Ada dan sudah memulai	14	18
	Jumlah	78	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	5	6
	- Keluarga	16	21
	- Dari dalam diri sendiri	56	73
	Jumlah	77	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	1	1
	- Ada, tapi belum memulai	68	91
	- Ada dan sudah mulai	6	8
	Jumlah	75	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	1	1
	- Pernah, tapi baru memulai	56	75
	- Pernah dan sudah mulai	18	24
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dorongan responden untuk keluar dari kemiskinan adalah tinggi. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang pernah menabung, walau baru memulai mencapai 75%, yang pernah dan sudah memulai mencapai 24%, dan hanya 1% yang berperilaku konsumtif atau tidak pernah menabung.

3.6. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara

Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2013 telah dapat diturunkan menjadi 14,39%, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh yang berada pada angka 17,72%. Capaian ini tidak terlepas dari banyaknya program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sektor perkebunan, terutama

perkebunan kakao yang luas arealnya dan produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu target yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 adalah penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya secara bertahap.

Survey yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per bulan responden kurang dari Rp. 700.000. Pendapatan ini jauh lebih rendah dari upah minimum, juga tergolong sangat rendah bila dikaitkan dengan usia rata-rata responden yang masih tergolong usia produktif (43,7 tahun). Namun, pendapatan yang rendah ini agak kurang selaras dengan sudah rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Tabel 17. Profil Responden di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	43,7 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3,8 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp. 698.700	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	53	66,25
	- Perempuan	27	33,75
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	13	16,25
	- SD	28	35
	- SMP	15	18,75
	- SMA	21	26,25
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	3	3,75
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	61	76,25
	- Belum Menikah	1	1,25
	- Janda/Duda	18	22,5
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- IRT	5	6,25
	- Pedagang	7	8,75
	- Petani	41	51,25
	- Buruh tani / buruh bangunan	21	26,25
	- Lain-lain	6	7,5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.6.1. Kemiskinan Alamiah

Walaupun lebih dari setengah (51%) responden di Aceh Tenggara sudah memiliki rumah sendiri, keadaan rumahnya masih sangat memprihatinkan, karena hanya terbuat dari tepas dengan lantai tanah. Sebagian besar responden (sekitar 87%) masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan hanya sebagian kecil yang sudah menggunakan air PAM. Responden yang memiliki fasilitas WC sendiri masih sangat sedikit (baru sekitar 3%), sedangkan selebihnya menggunakan fasilitas WC umum/bersama. Umumnya jarak rumah

responden dari jalan besar berkisar antara 0,5 sampai 1 km. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	22	27,50
	- Sewa	11	13,75
	- Milik Sendiri	41	51,25
	- Lainnya	6	7,50
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	80	100
	- Tembok		0
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	70	87,5
	- PAM	9	11,25
	- Keduanya Sumur dan PAM	1	1,25
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	76	96,15
	- Sendiri	4	3,85
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	27	3,75
	- 500 – 1 km	30	37,50
	- > 1 km	20	25,00
	- lainnya	3	3,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Bila dilihat dari segi pekerjaan, lebih dari setengah responden (lebih dari 51%) adalah petani dan lebih dari seperempat (26%) adalah buruh tani atau buruh bangunan. Pekerjaan responden yang lainnya adalah pedagang (8%), ibu rumah tangga (7%) dan lain lain. Pendidikan responden, secara umum juga masih relatif rendah, lebih dari 16% tidak pernah menamatkan SD, sedangkan yang sekolah sampai ke SMA, hanya sekitar 18%.

Pekerjaan responden di sektor pertanian dan sebagai buruh tani (lebih dari tiga perempat) sangat berkontribusi pada rendahnya pendapatan, apalagi sebagian besar responden petani juga hanya memiliki lahan pertanian yang sempit. Rata-rata, responden tidak memiliki kebun, yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan. Pekerjaan sebagai buruh tani atau buruh bangunan, secara umum juga mengindikasikan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bekerja disektor lain. Beberapa responden mengaku pernah mengikuti training, namun keterampilannya belum cukup untuk mendirikan usaha sendiri. Modal usaha juga menjadi salah satu kendala utama dalam memulai usaha baru. Kelompok simpan pinjam yang ada di desa tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan modal dari para masyarakat miskin.

3.6.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya masalah struktural pada kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan sebagian besar responden (57%) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Mayoritas responden mengaku diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa.

Tabel 19. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	33	41,25
	- Kadang-kadang	35	43,75
	- Selalu	12	15,00
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	29	36,71
	- Kadang-kadang	38	48,10
	- Selalu	13	15,19
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	22	26,76
	- Kadang-kadang	38	49,30
	- Selalu	20	23,94
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	39	50,00
	- Kadang-kadang	32	39,74
	- Selalu	9	10,26
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	22	27,50
	- Beberapa elit di desa	12	15,00
	- Musyawarah	46	57,50
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	32	40
	- Kadang-kadang	17	21,25
	- Tidak ada	27	33,75
	- Tidak jawab	4	5
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	12	15
	- Ada, tapi kurang transparan	34	42,5
	- Ada transparan	31	38,75
	- Tidak jawab	3	3,75
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	35	44,87
	- Kadang-kadang	42	53,85
	- Selalu	1	1,28
	Jumlah	78	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Namun demikian, sebagian responden (50 persen) menyatakan masyarakat miskin tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa. Sedangkan dalam pendistribusian bantuan di desa, hanya sepertiga yang menyatakan tidak ada perlakuan yang berbeda. Mayoritas responden beranggapan bahwa petanggungjawaban aparat desa ada tetapi kurang transparan, sedangkan yang beranggapan tidak transparan hanya 15%. Hampir setengah dari responden (45%) mengaku belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah maupun non pemerintah. Namun mayoritas responden (53%) menyatakan kadang-kadang menerima bantuan.

3.6.3. Kemiskinan Kultural

Indikasi tidak adanya masalah kemiskinan kultural (Kultural) terlihat dengan jelas pada hasil survey yang dilakukan. Lebih setengah dari responden (51%) tidak percaya bahwa kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk diubah, walaupun mereka percaya perlu adanya usaha untuk merubah kemiskinan tersebut. Sekitar 25% responden kurang percaya kalau kemiskinan adalah nasib. Namun ada sekitar 23% responden yang percaya sekali bahwa kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk bisa dirubah. Hasil Survey selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	18	23,08
	- Kurang percaya	21	25,64
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	41	51,28
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	13	15,38
	- Ada sedikit tapi belum memulai	49	61,54
	- Ada dan sudah memulai	18	23,08
	Jumlah	78	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	4	5,00
	- Keluarga	21	27,50
	- Dari dalam diri sendiri	54	67,50
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	4	5,00
	- Ada, tapi belum memulai	62	77,50
	- Ada dan sudah mulai	14	17,50
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan		
	- Tidak pernah	29	36,25
	- Pernah, tapi belum memulai	39	48,73
	- Pernah dan sudah mulai	12	15,00
	Jumlah	78	100,00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Mayoritas responden (63%) punya sedikit keinginan untuk merubah keadaan dirinya, walaupun belum memulai. Sedangkan yang tidak punya keinginan untuk merubah diri ada sekitar 15%. Ini konsisten dengan (mendekati) jumlah responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib. Hal yang menggembirakan adalah ada sekitar 23% responden yang punya keinginan kuat untuk berubah dan sudah memulainya. Mayoritas (63%) menyatakan bahwa semangat dan keinginan untuk berubah datang dari mereka sendiri.

Jumlah responden yang punya keinginan untuk menabung walaupun belum memulai cukup tinggi (78%). Namun ketika ditanyakan apakah akan betul-betul menabung apabila punya penghasilan lebih, jumlahnya menyusut menjadi hanya 50%. Adapun jumlah responden yang tidak pernah berfikir untuk menabung jika ada kesempatan masih cukup besar (37%). Sedangkan yang sudah memulai menabung hanya sebagian kecil saja (12%). Ini merupakan salah satu indikasi bahwa keinginan untuk menabung ketika mereka punya kesempatan masih sangat kurang, yang tentu saja akan mempengaruhi cara pengelolaan keuangan mereka dalam jangka panjang.

3.7. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah

Angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2013 telah dapat diturunkan menjadi 23,47 % dari tahun 2012 sebesar 24,50%, walaupun masih jauh di atas rata-rata Provinsi Aceh yang berada pada angka 17,72%.

Tabel 21. Profil Responden di Kabupaten Bener Meriah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	43 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.190.750	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	65	81
	- Perempuan	15	19
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	13	16
	- SD	21	26
	- SMP	19	24
	- SMA	25	31
	- Perguruan Tinggi	2	3
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	61	76
	- Belum Menikah	3	4
	- Janda/Duda	16	20
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Petani	35	44
	- Pedagang	7	8
	- Tidak Bekerja	6	8
	- Lain-lain	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Capaian ini tidak terlepas dari banyaknya program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Salah satu sektor yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Bener Meriah adalah sektor perkebunan, terutama perkebunan kopi rakyat. Survey yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata per bulan responden mencapai Rp. 1.190.750. Pendapatan ini masih jauh lebih rendah dari upah minimum provinsi.

3.7.1. Kemiskinan Alamiah

Walaupun secara mayoritas (88%) responden di Bener Meriah sudah memiliki rumah sendiri, keadaan rumahnya masih sangat memprihatinkan, karena hanya terbuat dari tepas dengan lantai tanah. Sebagian besar responden (50 %) masih menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi sudah menggunakan air PAM. Responden yang memiliki fasilitas WC sendiri telah mencapai lebih dari 90 persen. Sementara hanya sebagian kecil saja yang masih menggunakan fasilitas WC umum/bersama. Umumnya jarak rumah responden dari jalan besar berkisar lebih dari 1 km.

Tabel 22. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Bener Meriah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	10	12
	- Sewa	-	-
	- Milik Sendiri	70	88
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	19	24
	- Tembok	61	76
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	40	50
	- PAM	34	42
	- Keduanya Sumur dan PAM	6	8
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	4	5
	- Sendiri	76	95
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m		
	- 500 – 1 km	12	15
	- > 1 km	68	85
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa faktor alami bukan merupakan faktor penyebab kemiskinan utama di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi ini dapat dipahami, bahwa kondisi alam di kabupaten Bener Meriah sangat mendukung untuk berkembangnya sector pertanian secara baik. Terutama untuk pengembangan komoditas perkebunan kopi dan hortikultura.

3.7.2. Kemiskinan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan hanya 30% responden mendapatkan undangan rapat atau informasi mengenai pelaksanaan rapat desa mengenai program bantuan ekonomi. Sementara hanya 4 % responden yang tidak pernah mendapatkan informasi mengenai undangan rapat program bantuan ekonomi di desanya.

Tabel 23. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Bener Meriah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	4	5
	- Kadang-kadang	46	58
	- Selalu	30	37
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	8	10
	- Kadang-kadang	27	34
	- Selalu	45	56
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	1	1
	- Kadang-kadang	72	90
	- Selalu	7	9
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	1	1
	- Kadang-kadang	75	94
	- Selalu	4	5
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	1	1
	- Beberapa elit di desa	38	48
	- Musyawarah	41	51
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	20	25
	- Kadang-kadang	60	75
	- Tidak ada	-	-
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah		
	- Ada, tapi kurang transparan	61	76
	- Ada transparan	19	24
	- Tidak jawab		
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	2	3
	- Kadang-kadang	75	94
	- Selalu	3	4
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tetapi ironisnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap persoalan desa sangat kecil. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa hanya 9 % saja masyarakat yang selalau hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh perangkat desa, sedangkan 70 % masyarakat yang menjadi responden menjawab kadang-kadang hadir dalam rapat dan kadang-kadang juga mereka tidak bisa ikut hadir dikarenakan berbagai macam alasan salah satunya bentroknnya jadwal rapat dengan agenda yang lain selanjutnya.

Konsekuensi di atas berdampak bahwa keterlibatan masyarakat miskin dalam hal pengambilan keputusan menjadi sangat rendah. Untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial antar sesama masyarakat diperlukan peran aktif dari perangkat desa untuk dapat melibatkan semua masyarakat desa dalam hal pengambilan keputusan.

Hasil penelitian untuk sistem distribusi bantuan dari pemerintah menunjukkan 51% putusan penetapan penerima bantuannya diputuskan secara musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan perangkat desa bukan dengan cara diputuskan sendiri oleh kepala desa dan juga beberapa elit di desa tersebut. Dari 80 orang responden yang diwawancarai, 75 % menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat, sedangkan sisanya 25 % menyatakan kadang-kadang ada perbedaan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan hampir semua responden menyatakan bahwa perangkat desa tidak cukup transparan dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan sehingga kondisi ini menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada perangkat desa tentang penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan bantuan yang ada. .

Melihat fenomena dan temuan di atas menunjukkan bahwa, sebenarnya faktor struktural bukan merupakan faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Tetapi masyarakat sendiri yang menciptakan kondisi struktural ini menyebabkan kemiskinan masyarakat.

3.7.3. Kemiskinan Kultural

Indikasi tidak adanya masalah kemiskinan kultural (Kultural) terlihat dengan jelas pada hasil survey yang dilakukan. Lebih setengah dari responden tidak percaya bahwa kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk diubah, walaupun mereka percaya perlu adanya usaha untuk merubah kemiskinan tersebut. Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa mayoritas responden memiliki upaya yang kuat untuk merubah keadaan dirinya. Kondisi ini tentunya mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat miskin memiliki keinginan yang kuat untuk dapat merubah kondisi hidup mereka. Secara rinci kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	1	1
	- Kurang percaya	24	30
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	55	69
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	-	-
	- Ada sedikit tapi belum memulai	22	28
	- Ada dan sudah memulai	58	72
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	6	8
	- Keluarga	27	34
	- Dari dalam diri sendiri	47	58
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	-	-
	- Ada, tapi belum memulai	31	39
	- Ada dan sudah mulai	49	61
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	2	3
	- Pernah, tapi baru memulai	49	61
	- Pernah dan sudah mulai	29	36
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.8. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Jaya

Secara geografis semua kecamatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Jalur sepanjang pantai juga merupakan tempat pemukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah pemukiman yang jauh dari pantai. Jaringan jalan yang menyusuri pinggir pantai yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota-kota di bagian barat dan selatan provinsi ini menjadi faktor yang sangat mendukung bagi penduduk untuk membangun pemukiman sepanjang pantai. Pusat-pusat perdagangan dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya pun pada umumnya berlokasi di kota-kota kecamatan yang berada disepanjang pantai wilayah ini.

Untuk melihat kondisi kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, maka dilakukan sebuah penelitian mengenai kondisi kemiskinan yang berada di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya dengan mengambil sampel dua Kecamatan dan empat desa di dua kecamatan tersebut. Sebelum menentukan kecamatan mana yang akan dipilih peneliti harus terlebih melihat data sekunder dan berdiskusi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya tentang kecamatan mana yang penduduk miskinnya paling banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 dan hasil diskusi dengan kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya maka ditetapkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Teunom.

Tabel 25. Profil Responden Miskin Kabupaten Aceh Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	48,8 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 632.000	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	58	72
	- Perempuan	22	28
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	23	29
	- SD	31	39
	- SMP	19	24
	- SMA	7	9
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	64	80
	- Belum Menikah	1	1
	- Janda/Duda	15	19
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	23	28,75
	- Petani	32	40
	- Pedagang	0	0
	- Buruh Tani	20	25
	- Wiraswasta	0	0
	- Ibu Rumah Tangga	5	6,25
	- Tidak Bekerja	0	0
	- Lain-lain	0	0
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Pertimbangan lainnya adalah karena Kecamatan Darul Hikmah dapat mewakili daerah pesisir dan Kecamatan Teunom mewakili daerah pertanian dan perkebunan. Di Kecamatan Darul Hikmah diambil dua desa yaitu Desa Patek dan Blang Dalam sedangkan di Kecamatan Teunom desa yang di ambil yaitu desa Desa Tanoh Anoe dan Blang Baroe. Jumlah responden yang akan dilakukan wawancara adalah sebanyak 80 orang. Data profil responden miskin yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 25.

3.8.1. Kemiskinan Alamiah

Pendapatan rata-rata perbulan setiap kepala keluarga yang ada diwilayah penelitian masih tergolong kecil yaitu sebesar Rp632.000. Dilihat dari rata-rata pendapatan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada diwilayah penelitian tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang seperti kita ketahui semakin hari bahan kebutuhan pokok semakin meningkat harganya. Penelitian ini mengambil sampel 72% laki-laki dan 28% perempuan yang ada di desa Patek, Blang Dalam, Desa Tanoh Anoe dan Blang Baroe dengan pertimbangannya adalah laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumah tangga dan masyarakat sehingga kemiskinan

yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan politik. Kecenderungan peningkatan keterlibatann perempuan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kondisi perempuan, walaupun perbaikan tersebut terjadi secara tidak terarah dan tidak merata. Di balik perbaikan kondisi tersebut, permasalahan yang dihadapi perempuan adalah makin beratnya beban kerja perempuan, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Dari 80 responden dalam penelitian ini 39% berpendidikan Sekolah Dasar (SD), tidak sekolah sebanyak 29%, sebanyak 24% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sisanya 9% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penelitian ini tidak ditemukan responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT). Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat di daerah tersebut sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga akan berdampak kepada terjadinya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan. Status responden dalam penelitian ini terdiri dari 80% telah menikah, 19% Janda/Duda dan 1 % responden berstatus belum menikah.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari 80 responden sebanyak 40% berprofesi sebagai petani, 28,75% berprofesi sebagai nelayan, 25 % berprofesi sebagai buruh tani dan sisanya 6, 25 % berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Untuk profesi pedagang, wiraswasta, dan yang tidak bekerja tidak ditemukan pada responden di wilayah penelitian ini. Tanaman yang ditanam oleh Responden yang berprofesi sebagai petani yaitu seperti padi, karet, kelapa sawit, nilam dan tanaman palawija. Ada beberapa kendala yang dihadapi petani di daerah penelitian dalam menjalankan usaha taninya misalnya seperti, banyaknya hama babi, sistem irigasi yang belum optimal, jalan usaha tani yang belum ada, serta kurangnya tenaga penyuluh yang memberikan informasi yang berkaitan masalah yang dihadapi oleh petani. Selain kendala atas petani juga mengeluhkan masalah rendahnya harga beberapa komoditas seperti harga gabah yang rendah ketika terjadi panen dan harga tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Menurut petani hal ini akan menyebabkan kerugian petani di karenakan hasil yang mereka peroleh tidak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan. Dampak harga suatu komoditas diyakini oleh petani sangat berpengaruh terhadap motivasi mereka untuk melakukan usahatani, hal ini menyebabkan banyaknya lahan produktif yang dibiarkan mengganggu tidak dimanfaatkan oleh petani dikarenakan harga komoditas pada saat ini masih rendah.

Responden yang berprofesi sebagai nelayan yang ada di wilayah penelitian mengeluhkan beberapa kendala hal yang mereka hadapai saat ini seperti: mahalnya harga bahan bakar minyak jenis solar, sering terjadi bencana alam seperti badai yang menyebabkan mereka tidak bisa melaut, dangkalnya kuala, banyaknya nelayan dari luar wilayah mereka yang menggunakan pukat harimau sehingga mengakibatkan nelayan kecil seperti mereka sulit mendapatkan ikan di karenakan mereka kalah bersaing dengan mereka. Disamping itu, pekerjaan menjadi nelayan bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Dari 80 responden yang dilakukan penelitian sebanyak 98,75% tinggal di rumah sendiri, sednagkan 1,25% responden tinggal dirumah sewa. Hasil penelitian menunjukkan 51,25% Jenis bangunan responden adalah menggunakan papan kualitas rendah atau menggunakan

bambu sedangkan 48,75% jenis bangunan responden menggunakan tembok. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 97,5% responden menggunakan air sumur dan sisanya 2,5% mereka menggunakan air PDAM. Ada beberapa Responden yang berada di wilayah pesisir seperti di Kecamatan Darul Hikmah mereka umumnya mengkonsumsi air PDAM, mereka harus membeli air tersebut di karenakan ditempat mereka tidak tersedia air bersih yang berasal dari sumur.

Fasilitas MCK yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat 66% masyarakat mempunyai fasilitas MCK sendiri dan sisanya sebanyak 34% tidak mempunyai fasilitas MCK. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai MCK biasanya mereka memanfaatkan MCK milik bersama. Dari 80 responden dalam penelitian ini sebanyak 50% mereka mempunyai jarak rumah >1Km dari jalan besar, 40% jarak rumahnya 500-1 Km sedangkan sisanya 10% hanya mempunyai jarak rumah dengan jalan besar <500 Km. Jarak rumah dari jalan besar sangat berpengaruh terhadap jalannya perekonomian masyarakat tersebut, semakin dekat masyarakat dengan jalan besar maka semakin besar peluang untuk jalannya berkembangnya perekonomian masyarakat tersebut. Untuk melihat kondisi rumah keluarga miskin secara lengkap akan disajikan pada Tabel 26 berikut ini.

Tabel 26. Kondisi Rumah Responden Miskin Kabupaten Aceh Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	0	0
	- Sewa	1	1,25
	- Milik Sendiri	79	98,75
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	41	51,25
	- Tembok	39	48,75
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	78	97,5
	- PAM	2	2,5
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	27	34
	- Sendiri	53	66
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	8	10
	- 500 – 1 km	32	40
	- > 1 km	40	50
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.8.2. Kemiskinan Struktural

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 40% responden mendapatkan undangan rapat atau informasi mengenai pelaksanaan rapat desa mengenai program bantuan ekonomi. 36% responden menjawab kadang-kadang mereka mendapatkan informasi mengenai rapat dan

kadang-kadang mereka tidak mendapatkan informasi sedangkan sisanya 24% responden tidak pernah tidak mendapatkan informasi mengenai undangan rapat program bantuan ekonomi di desanya. Selanjutnya untuk keterlibatan masyarakat desa dalam hal mendapatkan informasi undangan rapat perencanaan pembangunan desa bisa dikatakan sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 40% masyarakat mendapat informasi mengenai rapat tersebut.

Tabel 27. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	19	24
	- Kadang-kadang	29	36
	- Selalu	32	40
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	19	24
	- Kadang-kadang	29	36
	- Selalu	32	40
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	17	21
	- Kadang-kadang	51	64
	- Selalu	12	15
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	13	16
	- Kadang-kadang	39	49
	- Selalu	28	35
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	13	16
	- Beberapa elit di desa	30	38
	- Musyawarah	37	46
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	0	0
	- Kadang-kadang	16	20
	- Tidak ada	64	80
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	16	20
	- Ada, tapi kurang transparan	24	30
	- Ada transparan	40	50
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	10	13
	- Kadang-kadang	44	55
	- Selalu	26	33
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan 21% masyarakat tidak hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh perangkat desa, 15% masyarakat selalu hadir dalam rapat yang dibuat

oleh perangkat desa sedangkan 64% masyarakat yang menjadi responden menjawab kadang-kadang hadir dalam rapat dan kadang-kadang juga mereka tidak bisa ikut hadir dikarenakan berbagai macam alasan salah satunya bentroknya jadwal rapat dengan agenda yang lain selanjutnya.

Hasil penelitian dalam hal melibatkan masyarakat miskin dalam hal pengambilan keputusan menunjukkan 16% masyarakat merasa tidak dilibatkan, 49% dilibatkan sedangkan 35% merasa dirinya selalu dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan. Untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik sosial antar sesama masyarakat diperlukan peran aktif dari perangkat desa untuk dapat melibatkan semua masyarakat desa dalam hal pengambilan keputusan. Hasil penelitian untuk sistem distribusi bantuan dari pemerintah menunjukkan 46% putusan penetapan penerima bantuannya diputuskan secara musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dengan perangkat desa bukan dengan cara diputuskan sendiri oleh kepala desa dan juga beberapa elit di desa tersebut.

Dari 80 orang responden yang diwawancarai, 64 orang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat, sedangkan sisanya 16 orang menyatakan kadang-kadang ada perbedaan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 40% responden menyatakan bahwa perangkat desa sudah transparan dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan sehingga masyarakat tidak timbul kecurigaan kepada perangkat desa tentang penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan bantuan yang ada. Kondisi Kemiskinan Struktural Miskin secara lengkap akan disajikan pada Tabel 27.

3.8.3. Kemiskinan Kultural

Berdasarkan hasil penelitian 59% masyarakat menyatakan bahwa tidak percaya kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah. Kondisi Kultural kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 28.

Menurut masyarakat jika seseorang ingin keluar dari kemiskinan maka dia bisa merubahnya dengan cara berdoa, berusaha dan bekerja. Disisi lain 41% masyarakat kurang percaya kondisi kemiskinan itu bisa dirubah. Menurut mereka kemiskinan adalah nasib dan itu tidak bisa dirubah. Hasil penelitian menunjukkan 55% masyarakat ada sedikit punya keinginan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik, tetapi semua mereka belum memulai hal tersebut. Munculnya sumber semangat keinginan untuk berubah dalam penelitian ini dari dalam diri sendiri yaitu sebesar 96%. Berpikir dan punya keinginan untuk menabung sudah ada tapi mereka belum memulainya karena mereka merasa belum cukup pendatannya untuk menabung.

Tabel 28. Kultural Kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	0	0
	- Kurang percaya	33	41
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	47	59
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	0	0
	- Ada sedikit tapi belum memulai	55	69
	- Ada dan sudah memulai	25	31
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	3	4
	- Dari dalam diri sendiri	77	96
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	0	
	- Ada, tapi belum memulai	56	70
	- Ada dan sudah mulai	24	30
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	3	4
	- Pernah, tapi baru memulai	55	69
	- Pernah dan sudah mulai	22	28
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.9. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat

Hasil Survey yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa terdapat indikasi masalah kemiskinan secara alamiah di Kabupaten Aceh Barat. Meskipun Kecamatan Sama Tiga disebutkan sebagai Kecamatan yang berbasis nelayan, namun hanya sekitar 6,25 % responden yang benar-benar bermatapencaharian sebagai nelayan.

Mata pencaharian utama responden adalah petani padi sawah dan perikanan yaitu sebanyak 72,50 % dari total responden, dengan luas lahan sawahnya rata-rata 0,28 Ha. Selain bertani dan perikanan serta nelayan mereka juga ada yang sebagai pedagang dan penjahit/swasta, masing-masing sebesar 8,75 %. Responden umumnya tidak memiliki keterampilan lain untuk dapat dijadikan alternatif penghasilan bagi keluarga, demikian pula keterampilan anggota keluarga lainnya.

Ada juga yang mengaku memiliki keterampilan lainnya yang bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, yakni sebagai *baby sitter*, tukang bangunan dan tukang kayu (lain-lain) sebanyak 3,75 %, sedangkan usaha ternak hanya dilakukan secara sambilan dalam skala usaha yang masih sangat kecil. Minimnya keterampilan ini sejalan dengan alasan yang diakui responden dalam pilihan pekerjaannya. Sebagian besar responden mengaku menekuni pekerjaan saat ini karena alasan tidak ada pekerjaan lain (57,5 %), tidak ada keterampilan lain (3,75 %), pekerjaan turun-temurun (17,5 %), dan sisanya karena alasan lainnya (6,25 %).

Pendidikan responden tercatat SLTA ke bawah, hanya ada satu orang (1,25%) yang tamat S1, kebanyakan responden adalah tamat SD yakni 37,5 % sedangkan tamat SMP dan SMA masing-masing sebanyak 22,5 %. Selebihnya adalah yang tidak sekolah yakni sebanyak 16,25 %. Umur responden di daerah penelitian rata-rata adalah 46,40 tahun yang secara umum dapat digolongkan sebagai umur produktif, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jumlah anggota rumah tangga responden rata-rata sebanyak 4 orang, sedangkan pendapatan responden rata-rata sebesar Rp 1.036.875 per bulan, berarti masih jauh dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yakni Rp2.100.000 per bulan dan dapat dikatakan termasuk golongan miskin. Adapun profil responden secara terinci di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 29 di bawah ini

Tabel 29. Profil Responden Kabupaten Aceh Barat

No	Variabel	Jumlah	%
1	Usia rata-rata	46,4 Tahun	
2	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3,9 Orang	
3	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.036.875	
4	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	32	40
	b. Perempuan	48	60
	Jumlah	80	100
5	Pendidikan		
	a. Tidak sekolah	13	16,25
	b. SD	30	37,5
	c. SMP	18	22,5
	d. SMA	18	22,5
	e. Perguruan Tinggi	1	1,25
	f. Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6	Status		
	a. Menikah	63	78,75
	b. Belum Menikah	2	2,5
	c. Janda/Duda	15	18,75
	Jumlah	80	100
7	Pekerjaan		
	a. Nelayan	5	6,25
	b. Pedagang	7	8,75
	c. Petani dan perikanan	58	72,5
	d. Swasta/menjahit	7	8,75
	e. Lainnya (Peternak, Baby Sister dan Tukang Kayu)	3	3,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.9.1. Kemiskinan Alamiah

Hampir seluruh responden (92,5%) tinggal di rumah sendiri dan seluruhnya sudah mendapatkan fasilitas listrik PLN. Sebagian besar responden (72,5%) sudah menggunakan air

PAM untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi (27,5%) menggunakan air sumur. Sebagian besar rumah responden (52,5%) masih menggunakan bahan dari bambu dan sebagian lagi (47,5%) memiliki tembok beton, dan sebagian besar responden (72,5%) menggunakan fasilitas WC, namun sebagian kecil memiliki fasilitas WC sendiri. Sebagian besar responden (75%) jarak rumah mereka dengan jalan besar dibawah 500 m dan 25 % lagi berkisar antara 500meter sd 1 km.

Hasil survey menunjukkan bahwa hampir semua warga miskin (81,25%) di Kabupaten Aceh Barat merupakan warga asli, hanya sebagian kecil (18,75%) sebagai pendatang dari berbagai Kabupaten lainnya, seperti Teunom, Aceh Besar, Sigli, Singkil, Seumeulu, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan bahkan ada yang berasal dari Medan. Mayoritas mereka datang ke Aceh Barat dalam rangka mencari pekerjaan. Ada juga sebagian yang datang dengan alasan pernikahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat, ada indikasi disebabkan oleh alamiah terutama pada pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga menyebabkan pendapatan rendah, dan diikuti oleh rendahnya modal usaha, serta diperparah dengan kondisi sanitasi rumah yang kurang baik. Namun, infrastruktur desa relatif lebih baik seperti adanya arus listrik dan sarana telekomunikasi di desa serta dukungan perbankan, sangat memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan alamiahnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Kondisi Rumah Responden Kabupaten Aceh Barat

No	Variabel	Jumlah	%
1	Status Kepemilikan rumah		
	a. Numpang	4	5
	b. Sewa	-	-
	c. Mili Sendiri	74	92,5
	d.Lainnya	2	2,5
	Jumlah	80	100
2	Jenis Bangunan		
	a. Bambu	42	52,5
	b. Tembok	38	47,5
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	a. Sumur	22	27,5
	b. PAM	58	72,5
	c. Keduanya Sumur dan PAM		
	Jumlah	80	100
4	Fasilitas WC		
	a. Umum	58	72,5
	b. Sendiri	22	27,5
	Jumlah	80	100
5	Jarak rumah dari jalan besar		
	a. < 500 m	60	75
	b. 500 m - 1 km	20	25
	c. > 1 km	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan hasil FGD dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Aceh Barat (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan alamiah (Natural) adalah sebagai berikut:

- Infrastruktur yang kurang memadai seperti irigasi teknis, pupuk/benih unggul, jalan aspal, pasar representatif, gudang, transportasi/alat angkut, mesin-mesin produksi, dan sebagainya.
- Pasar hasil-hasil produksi pertanian yang tidak terjamin, sehingga petani paling sering mengalami kerugian.
- Lahan pertanian yang masing sangat bergantung pada irigasi alam (tadah Hujan), demikian juga para nelayan, factor alam yaitu ombak besar paling sering menjadi penghambat bagi mereka untuk melaut. Di samping itu, belum ada kemampuan untuk pengadaan boat yang ukuran sedang bagi nelayan,
- Tidak mampu membiayai anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
- Tidak mempunyai modal untuk menempa keahlian/ atau keterampilan,
- Mata pencaharian mereka tidak dapat berubah karena sudah menjadi turun temurun dan tidak mempunyai keterampilan lain,
- Ketidakmampuan untuk mendirikan rumah yang lebih baik.

3.9.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat sedikit indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini ditunjukkan oleh pengakuan hanya sebagian kecil responden (28,75%) yang menyatakan bahwa sistem pendistribusian bantuan pemerintah dilakukan dengan musyawarah. Disisi lain 46,25% dari responden juga mengaku bahwa mereka diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, 38,75% responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan, selebihnya 46,25% mengaku ada pertanggungjawaban tetapi kurang transparan. Untuk kondisi kemiskinan stuktural dapat dilihat pada Tabel 31.

Meskipun terindikasi sedikit masalah kemiskinan struktural namun disisi lain terdapat hal yang positif, seperti dalam hal pengambilan keputusan di desa, sebanyak 72,5% responden mengaku bahwa masyarakat miskin selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Demikian juga dalam hal pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat miskin, hampir seluruh responden (96,25%) mengaku tidak terdapat perbedaan antar sesama masyarakat miskin.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa terdapat indikasi kemiskinan yang disebabkan oleh struktural di Kabupaten Aceh Barat, hal ini dilihat dari sebagian respoden kurang dilibatkan partisipasi mereka dalam kelembagaan, di samping itu kurang adanya transparansi pertanggungjawaban bantuan dari pimpinan desa. Hal ini tentunya diperlukan perubahan sikap dari pimpinan desa agar dapat melibatkan semua unsur komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 31. Kondisi Kemiskinan Struktural Kabupaten Aceh Barat

No	Variabel	Jumlah	%
1	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	a. Tidak pernah	1	1,25
	b. Kadang-kadang	32	40
	c. Selalu	47	58,75
	Jumlah	80	100
2	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	a. Tidak pernah	4	5
	b. Kadang-kadang	39	48,75
	c. Selalu	37	46,25
	Jumlah	80	100
3	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	a. Tidak pernah	-	-
	b. Kadang-kadang	45	56,25
	c. Selalu	35	43,75
	Jumlah	80	100
4	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	a. Tidak pernah	8	10
	b. Kadang-kadang	14	17,5
	c. Selalu	58	72,5
	Jumlah	80	100
5	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	a. Oleh Kepala desa saja	57	71,25
	b. Beberapa elit di desa	-	-
	c. Musyawarah	23	28,75
	Jumlah	80	100
6	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	a. Ada	3	3,75
	b. Kadang-kadang	-	-
	c. Tidak ada	77	96,25
	d. Tidak Jawab	-	-
	Jumlah	80	100
7	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	a. Tidak pernah	12	15
	b. Ada, tapi kurang transparan	37	46,25
	c. Ada transparan	31	38,75
	e. Tidak Jawab	-	-
	Jumlah	80	100
8	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	a. Tidak pernah	12	15
	b. Kadang-kadang	43	53,75
	c. Selalu	25	31,25
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan hasil FGD dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Aceh Barat (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan alamiah struktural adalah sebagai berikut:

- Kurangnya melibatkan orang miskin atau utusan mereka dalam rapat perencanaan dan pemberian bantuan
- Mekanisme atau perhitungan yang diterima oleh semua orang miskin dalam membuat kategori atau spesifikasi penerima bantuan masih belum optimal, sehingga orang miskin dapat merasa menunggu giliran bantuan untuknya.
- Kurangnya transparansi dalam pemberian bantuan baik bersifat keuangan, jenis bantuan, jangka waktu, dan lainnya.

3.9.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan terdapat indikasi masalah Kultural/kultur terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Hanya 20% responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah. Sebanyak 46,25% responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya, sementara itu ada 28,75% yang kurang percaya terhadap semboyan tersebut. Namun ada Sebagian besar responden (56,25%) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Hal ini disebabkan belum adanya dukungan dari pihak lain.

Tabel 32. Kultural Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	20	25
	- Kurang percaya	23	28,75
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	37	46,25
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	3	3,75
	- Ada sedikit tapi belum memulai	45	56,25
	- Ada dan sudah memulai	32	40
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	1	1,25
	- Dari dalam diri sendiri	79	98,75
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	9	11,25
	- Ada, tapi belum memulai	57	71,25
	- Ada dan sudah mulai	14	17,50
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	23	28,75
	- Pernah, tapi baru memulai	52	65
	- Pernah dan sudah mulai	5	6,25
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Namun ada 40 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Sisanya sebesar 3,75 persen mengaku pasrah dan tidak memiliki keinginan sama sekali untuk merubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Keinginan ini semua umumnya muncul dari

dalam diri mereka sendiri (98,75%), dari keluarga (1,25%), dan dari dorongan tokoh rujukan tidak ada sama sekali. Kondisi ini sejalan dengan upaya menabung, dimana 71,25% responden memiliki keinginan untuk menabung namun belum memulainya, sementara 17,50% responden sudah memulainya, dan Sisanya sebesar 11,25% tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menabung.

Berdasarkan hasil survey di atas, dapatlah disimpulkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat, sebagian responden miskin disebabkan oleh karena sifat kultural pada dirinya. Namun demikian, sifat kultural ini masih dapat diubah, bilamana ada perhatian dari pihak-pihak lain terutama Pemerintah dan swasta melalui bantuan infrastruktur, modal usaha dan bimbingan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat memberikan motivasi kepada penduduk miskin dengan pengawasan dan evaluasi berbasis bisnis. Sifat bantuan tidak harus hibah, tetapi dapat diberikan secara bergulir (revolving) dan terikat, sehingga mereka akan bersikap mandiri dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil FGD dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Aceh Barat (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan kultural adalah sebagai berikut:

- Kurang kreatif, lebih bersifat pasif dalam menunggu bantuan. dan tidak termotivasi untuk bangkit merubah keadaan diri menjadi lebih baik.
- Kurangnya kreatifitas dalam kegiatan yang bersifat ekonomi produktif (minimnya usaha-usaha) yang dapat meningkatkan pendapatan.
- Waktu yang tersedia dihabiskan dengan cuma-cuma (duduk-duduk di kedai kopi/warung) dan nonton berdiam diri di rumah.
- Bantuan pemerintah yang diberikan adakalanya disalahgunakan dan tidak sebagaimana mestinya (bantuan produktif menjadi konsumtif).
- Bagi yang tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan pembagian, dapat menimbulkan kerawanan sosial (kecemburuan).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di empat desa sampel dari dua kecamatan sampel yakni Desa Puuk dan Desa Keude Tanjong di Kecamatan Kaway XVI, serta Desa Suak Timah dan Desa Lhok Bubon di Kecamatan Sama Tiga, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehidupan dan keadaan sosial masyarakat di desa berjalan dengan baik, adanya sikap solidaritas antar sesama sangat baik. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan antara lain majlis taklim oleh kaum bapak, pengajian wirid Yasin dan PKK oleh kaum ibu, kegiatan olah raga dan memperingati hari-hari besar Islam oleh kaum pemuda.
2. Keadaan perekonomian masyarakat desa sangat ditentukan oleh peranserta masyarakat dalam mengembangkan usaha keluarga mereka masing-masing, dimana sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, perikanan, pedagang/jualan warung, penjahit dan sebagian kecil lainnya sebagai peternak, pertukangan, perbengkelan, dan sebagainya.
3. Jika dilihat dari kebutuhan rumah tangga rata-rata penduduk desa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun sangat terbatas. Namun ada juga sebagian masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat di Republik ini.

4. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pekerja musiman sebagai petani, dan bahkan ada yang tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu (sulit mendapat pekerjaan karena tidak ada keahlian, PHK, sakit-sakitan, dan sebagainya), yang juga memerlukan mendapat penanganan pemerintah daerah dan pusat.
5. Hubungan pemerintah dengan masyarakat desa terjalin dengan baik, ditandai dengan adanya administrasi desa yang baik serta berfungsinya struktur pemerintahan desa. Salah satunya adalah adanya kegiatan penyusunan RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) yang didasarkan kepada musyawarah dan mufakat desa.
6. Tingkat kemiskinan di desa harus menjadi fokus dari pemerintah mengingat angka kerawanan kemiskinan tertinggi dapat mencapai sekitar 45 persen dari total penduduk. Kerawanan ini dapat dikurangi melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh warga miskin adalah melalui akses permodalan ke LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan kelompok SP (Simpan Pinjam).
7. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk warga miskin adalah tetap memberikan bantuan bahan sembako terutama beras, dan bantuan lainnya. Namun yang paling penting adalah memberikan pembinaan serta pendampingan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka yang disertai dengan modal usaha sekaligus dengan penanganan pemasarannya sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama di bidang usaha ekonomi kreatif dan produktif.

Upaya penanggulangan kemiskinan struktural di Kabupaten Aceh Barat telah dilakukan secara baik beberapa tahun terakhir ini, namun belum memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penyebab berikut yang menjadi pembelajaran:

1. Bantuan pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran karena persyaratan yang membuat kaum miskin tergeser sebagai peserta penerima bantuan dan adanya intervensi dari pihak tertentu.
2. Bentuk rencana bantuan pengentasan kemiskinan masih bersifat topdown sehingga pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan si penerima, akibatnya banyak bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
3. Sistem bantuan berbentuk hibah sehingga kelompok sasaran menjadi tergantung dengan bantuan, hal ini menjadikan bantuan tersebut sulit untuk digerakkan.
4. Tidak adanya pendampingan yang ahli terhadap bantuan yang digulirkan, dan sering tidak berada di tempat, serta harus melayani wilayah yang sangat luas (kecamatan) dengan jumlah orang yang didampingi terlalu banyak.
5. Masih adanya sistem dan struktur sosial yang kurang berpihak kepada kelompok miskin (misalnya sistem upah yang rendah dan diskriminatif untuk perempuan, bagi hasil yang timpang untuk petani penggarap, dan sebagainya).
6. Belum adanya jaminan pasar hasil-hasil pertanian yang menguntungkan para petani, sehingga mereka tidak termotivasi untuk berusaha secara lebih produktif.
7. Mereka belum memiliki kemampuan melihat peluang-peluang bisnis (usaha) yang tersedia.

3.10. Profil Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

3.10.1. Kemiskinan Alamiah

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang masih tergolong miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten pemekaran yang masih memerlukan banyak pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor. Namun demikian, pembangunan dan perbaikan terus dilakukan, dan sudah terlihat cukup nyata untuk fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat.

Survey yang dilakukan di kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di kabupaten Nagan Raya adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di kabupaten Nagan Raya adalah warga biasa. Pendidikan responden pun masih tergolong rendah, yaitu hanya 2 orang (2,5 persen) yang melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Usia rata-rata responden adalah 46,06 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 5 orang. Jenis mata pencaharian terbesar adalah petani (38,75 persen), nelayan (12,5 persen), tidak bekerja (12,5 persen), dan sisanya menjalani berbagai jenis profesi yaitu penjual jamu, bidan tradisional, pembuat udang sabee, dll. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Profil Responden di Kabupaten Nagan Raya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	46,06 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	5 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.523.125	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	43	53,75
	- Perempuan	37	46,25
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	5	6,25
	- SD	44	55
	- SMP	14	17,5
	- SMA	15	18,75
	- Perguruan Tinggi	2	2,5
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	62	77,5
	- Belum Menikah	1	1,25
	- Janda/Duda	17	21,25
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Petani	31	38,75
	- Nelayan	10	12,5
	- Pedagang	7	8,75
	- Tidak Bekerja	10	12,5
	- Lain-lain	22	27,5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hampir semua warga miskin di kabupaten Nagan Raya merupakan warga asli. Persentase terbesar (38,75 persen) mengaku memiliki mata pencaharian utama dalam sektor pertanian.

Sisanya tersebar untuk jenis mata pencaharian lain seperti nelayan (12,5 persen), lainnya (27,5 persen), dan sisanya tidak punya mata pencaharian.

Responden dari desa pesisir umumnya memiliki keterampilan lain untuk dapat dijadikan alternatif penghasilan bagi keluarga, demikian pula keterampilan anggota keluarga lainnya. Hal ini disebabkan banyak kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk warga daerah pesisir mengingat warga daerah pesisir di kabupaten Nagan Raya umumnya merupakan janda korban tsunami sehingga harus memiliki keterampilan agar mampu menafkahi anak-anak. Beberapa keterampilan yang umum adalah membuat sapu lidi, membuat udang sabee, membuat tas, dll. Namun demikian, warga dari daerah pertanian umumnya tidak memiliki keterampilan lain selain bertani.

Tabel 34. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Nagan Raya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	14	17,5
	- Sewa	1	1,25
	- Milik Sendiri	61	76,25
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	21	26,25
	- Tembok	55	68,75
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	31	38,75
	- PAM	49	61,25
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	19	23,75
	- Sendiri	61	76,25
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	9	11,25
	- 500 – 1 km	32	40
	- > 1 km	35	43,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Minimnya keterampilan ini sejalan dengan alasan yang diakui responden dalam pilihan pekerjaannya. Sebagian besar responden mengaku menekuni pekerjaan saat ini karena alasan tidak ada pekerjaan lain (35 persen), tidak ada keterampilan lain (3,75 persen), dan pekerjaan turun-temurun (66,25 persen).

3.10.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di kabupaten Nagan Raya. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan responden (37 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Mayoritas responden mengaku diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selain itu, 65 persen responden mengaku ada pertanggung jawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun terdapat sedikit perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (39 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Ada 34 persen responden yang menjawab tidak ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab ada perbedaan hanya 2 persen.

Tabel 35. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Nagan Raya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	6	7,3
	- Kadang-kadang	7	8,75
	- Selalu	73	91,25
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	0	0
	- Kadang-kadang	11	13,75
	- Selalu	69	86,25
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	0	0
	- Kadang-kadang	19	23,75
	- Selalu	61	76,25
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	1	1,25
	- Kadang-kadang	42	52,5
	- Selalu	37	46,25
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	0	0
	- Beberapa elit di desa	36	45
	- Musyawarah	44	55
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	2	2,5
	- Kadang-kadang	39	48,75
	- Tidak ada	34	42,5
	- Tidak jawab	5	6,25
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	1	1,25
	- Ada, tapi kurang transparan	27	33,75
	- Ada transparan	52	65
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	9	11,35
	- Kadang-kadang	52	65
	- Selalu	19	23,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.10.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan tidak terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di kabupaten Nagan Raya. Mayoritas (51 persen) responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, ada 29 persen yang kurang percaya. Namun ada 20 persen responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah.

Sebagian besar responden (45 persen) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Namun ada 35 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Keinginan ini umumnya muncul dari keluarga (47,5 persen), dari dalam diri sendiri (36,25 persen), dan dari dorongan tokoh rujukan (22,5 persen). Kondisi ini tidak sejalan dengan upaya menabung, dimana hanya 3,75 persen responden yang sudah mulai menabung, dan 83,75 persen memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya sebesar 12,5 persen tidak memiliki keinginan sama sekali. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	0	0
	- Kurang percaya	58	72,5
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	22	27,5
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	0	0
	- Ada sedikit tapi belum memulai	45	56,25
	- Ada dan sudah memulai	35	43,75
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	18	22,5
	- Keluarga	38	47,5
	- Dari dalam diri sendiri	29	36,25
	Jumlah	88	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	10	12,5
	- Ada, tapi belum memulai	67	83,75
	- Ada dan sudah mulai	3	3,75
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	14	17,5
	- Pernah, tapi baru memulai	64	80
	- Pernah dan sudah mulai	2	2,5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dorongan responden untuk konsumsi relatif tinggi dibandingkan untuk menabung. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang ingin menabung justru bertambah kecil. Jumlah responden yang tidak pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih meningkat menjadi 17,5 persen.

3.11. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh, tepatnya pada 3°34'24" - 4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur. Kabupaten Abdya adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan disahkan melalui UU No.4 Tahun 2002 dengan Ibukotanya adalah Blangpidie. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Abdya dibagi menjadi 9 kecamatan, 23 mukim, dan 152 desa atau gampong. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Abdya, sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya. Luas wilayah Kabupaten Abdya adalah seluas 1.882,05 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Abdya pada tahun 2014 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Abdya berjumlah 138.140 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 68.625 jiwa dan perempuan sebanyak 69.512 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,73. Laju pertumbuhan penduduk periode 2011 – 2013 adalah sebesar 1,86 persen per tahun. Sedangkan jumlah rumah tangga di kabupaten ini berjumlah 31.313 RT dan jumlah kepala keluarga sebanyak 42.112 KK dengan kata lain ada sebanyak 10,799 KK tinggal bersama KK lainnya dalam satu rumah tangga. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 73 jiwa per km², di mana penduduk terpadat berada di Kecamatan Susoh yakni mencapai 1.204 jiwa per km², sedangkan yang terjarang berada di Kecamatan Jeumpa yakni hanya 28 jiwa per km².

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Abdya pada tahun 2013 sebesar 5,10 persen menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 5,25 persen. Angka pertumbuhan ekonomi wilayah ini berada di bawah angka rerata pertumbuhan ekonomi Aceh 5,7 persen di tahun 2013 dan 6,06 persen di tahun 2012. Struktur ekonomi di Kabupaten Abdya lebih didominasi oleh sektor tersier yakni mencapai 51,4 persen di tahun 2013, sementara sektor sekunder hanya sebanyak 18,75 persen, dan sektor primer sebesar 29,81 persen. Sementara, pendapatan total daerah Abdya pada tahun 2014 adalah berjumlah 738,39 milyar rupiah terbagi atas pendapatan asli daerah sebesar 59,5 milyar rupiah (8,1 persen), berasal dari dana perimbangan sebesar 497,46 milyar rupiah (67,4 persen), dan pendapatan lainnya sebesar 181,4 milyar rupiah (24,6 persen). Dengan demikian belanja daerah ini lebih banyak berasal dari dana perimbangan terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Jumlah penduduk miskin (menurut BPS) di Kabupaten Abdya pada tahun 2013 adalah berjumlah 25.700 jiwa atau sebanyak 18,92 persen dari total penduduk. Dari persentase orang miskin tersebut terdapat sebanyak 2,64 persen yang dikategorikan ke dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan dan sebanyak 0,63 persen masuk ke dalam Indeks Keparahan Kemiskinan atau kaum duafa (poorest). Sedangkan angka garis kemiskinan di wilayah Abdya pada tahun 2013 adalah 283.117 rupiah per kapita per bulan berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh sebesar 348.172 rupiah per kapita per bulan. Dengan demikian keadaan ekonomi orang miskin di Abdya lebih sulit dibanding dengan rerata wilayah lainnya di Aceh.

3.11.1. Kemiskinan Alamiah

Hasil penelitian lapangan terhadap sampel 80 responden penduduk miskin di Abdya, memperlihatkan bahwa usia rata-rata responden adalah 51 tahun. Umur terendah adalah 26 tahun sedangkan tertinggi berumur 90 tahun. Jumlah anggota keluarga rata-rata sebanyak 3

orang, terendah belum mempunyai anggota keluarga dan tertinggi sebanyak 8 orang anggota keluarga. Pendapatan rata-rata per bulan 588.750 rupiah, terendah tidak mempunyai pendapatan, dan tertinggi 1.750.000 rupiah. Pendidikan yang ditamatkan umumnya SD dan SMP, hanya seorang yang berpendidikan SMA. Pekerjaan tetap umumnya adalah sebagai petani, selebihnya bekerja tidak tetap, dan bahkan tidak bekerja. Data absolut dan persentase profil 80 responden, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Profil Responden Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	51,02 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	3,01 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 588.750	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	41	51,25
	- Perempuan	39	48,75
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	29	36,25
	- SD	49	61,25
	- SMP	1	1,25
	- SMA	1	1,25
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	50	62,50
	- Belum Menikah	1	1,25
	- Janda/Duda	29	36,25
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	5	6,30
	- Petani	30	37,50
	- Menjahit	2	2,50
	- IbuRumahTangga	16	20,00
	- Tidak Bekerja	7	8,80
	- Lain-lain	20	25,00
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sisi lain, status kepemilikan rumah kebanyakan atau 80 persen adalah rumah milik sendiri, namun jenis bangunan rumah umumnya adalah bambu yakni 81,25 persen responden. Ada sebanyak 15 persen responden yang menumpang sama keluarganya (tidak memiliki rumah). Sumber air minum seluruhnya berasal dari sumur, dan WC/jamban keluarga yang digunakan kebanyakan adalah WC umum, hanya 15 persen responden yang mempunyai WC sendiri. Jarak rumah ke jalan negara umumnya adalah di atas 1 km. Data kondisi rumah responden, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 38.

Fasilitas komunikasi yang ada di desa pada umumnya adalah menggunakan jaringan HP, sumber penerangan utama adalah listrik PLN. Penduduk miskin di wilayah Abdy umumunya adalah penduduk asli, hanya 20 persen penduduk pendatang. Kebanyakan dari mereka (92,5 persen) adalah berstatus masyarakat biasa bukan sebagai tokoh formal atau informal. Jika anggota keluarga miskin sakit, pada pada umumnya berobat ke puskesmas (72,5 persen).

Hampir semua responden (98,75 persen) tidak mempunyai keahlian sehingga tidak ada perubahan/mengganti terhadap pekerjaan yang ditekuni.

Tabel 38. Kondisi Rumah Responden Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	12	15,00
	- Sewa	2	2,50
	- Milik Sendiri	64	80,00
	- Lainnya	2	2,50
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	65	81,25
	- Tembok	15	18,75
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	80	100,00
	- PAM	0	0
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	0
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	68	85,00
	- Sendiri	12	15,00
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	24	30,00
	- 500 – 1 km	5	6,25
	- > 1 km	51	63,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Lahan sawah/pekarangan/kebun/lading yang dimiliki umumnya (81,25 persen) belum bersertifikat, diperoleh pada umumnya dari hasil jual-beli. Jenis komoditi yang diusahakan dalam lahan pertanian umumnya adalah bahan pangan seperti padi, jagung, dan lainnya ditanam di desa mereka berada. Sementara bagi nelayan, mereka umumnya tidak memiliki lahan pertanian, adakalanya menggarap lahan orang lain bila sedang tidak melaut. Lahan pertanian yang digarap pada umumnya produktivitas tidak meningkat bahkan cenderung menurun karena kurangnya penggunaan teknologi modern (benih, pupuk, dan sebagainya). Namun demikian, belum terjadi kerusakan lahan pertanian selama 10 tahun terakhir ini (kondisi lahan biasa saja). Umumnya modal usaha pertanian umumnya diperoleh dari bank, dengan prosedur yang tidak sulit. tetapi dari. Jumlah yang dipinjam berkisar antara 30 – 70 persen dari modal yang dibutuhkan. Lahan sawah pada umumnya diairi irigasi teknis dan semi teknis dengan debit air yang mencukupi. Kondisi bangunan fisik irigasi dalam keadaan relatif baik. Sebanyak 57,5 persen petani belum pernah mengikuti pelatihan usaha tani. Sebanyak 33,75 persen responden mengatakan tidak ada perubahan bercocok tanam selama 10 tahun terakhir ini, dan 12,5 persen mengatakan ada perubahan sedikit.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Abdy, ada disebabkan oleh alamiah terutama pada pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga menyebabkan pendapatan rendah, akhirnya kepada rendahnya modal usaha, serta diperparah dengan kondisi sanitasi rumah yang kurang baik. Namun, infrastruktur desa

relatif seperti adanya air irigasi, arus listrik dan sarana telekomunikasi di desa serta dukungan perbankan, sangat memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari kemiskinan alamiahnya.

Berdasarkan hasil *FGD* dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Abdy (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, PP, dan KS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan alamiah (Natural) sebagai berikut:

- Tidak ada kemampuan untuk mendirikan rumah yang lebih baik (semi permanen),
- Lahan pertanian sewa karena ketiadaan lahan warisan, dan sebagian sudah dijual. Di samping itu, belum ada kemampuan untuk pengadaan boat yang ukuran sedang bagi nelayan,
- Tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
- Tidak mempunyai modal untuk menempa keahlian/keterampilan,
- Mata pencaharian tidak dapat berubah karena sudah turun temurun dan tidak mempunyai keterampilan lain,

Infrastruktur yang kurang memadai seperti irigasi teknis, pupuk/benih unggul, jalan aspal, pasar representatif, gudang, transportasi/alat angkut, mesin-mesin produksi, dan sebagainya.

3.11.2. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural dapat dilihat azas demokrasi dan pemerataan terhadap sumberdaya ekonomi, partisipasi dan kelembagaan. Variabel kemiskinan struktural antara lain berkaitan dengan bantuan ekonomi untuk masyarakat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, ketimpangan aset ekonomi antara si kaya dengan miskin, dan sebagainya.

Tabel 39 menunjukkan bahwa ada sebanyak 52,5 persen responden selalu ada diundang untuk menghadiri rapat program bantuan ekonomi di desa dan 37,5 persen ada diundang menghadiri rapat perencanaan desa. Hanya sekitar 40 persen responden yang mengatakan bahwa mereka selalu terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Namun demikian sistem distribusi bantuan dari pemerintah selalu di musyawarahkan dijawab sebanyak 85 persen responden. Akan tetapi pertanggung-jawaban pimpinan desa terhadap bantuan-bantuan untuk orang miskin kurang transparan dijawab sebanyak 51,25 persen responden. Ini berarti bahwa aparat desa hendaknya memberikan laporan pertanggung jawaban secara transparan kepada semua stakeholders, agar tidak terjadi konflik internal di desa.

Dapatlah disimpulkan bahwa terdapat kemiskinan yang disebabkan oleh *structural* di Kabupaten Abdy yakni dilihat dari sebagian respoden kurang dilibatkan dalam partisipasi dan kelembagaan, di samping itu kurang adanya transparansi pertanggungjawaban bantuan dari pimpinan desa. Hal ini tentunya diperlukan perubahan sikap dari pimpinan agar dapat melibatkan semua unsur komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam program penanggulangan kemiskinan di wilayah Abdy.

Tabel 39. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	7	8,75
	- Kadang-kadang	31	38,75
	- Selalu	42	52,50
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	18	22,50
	- Kadang-kadang	28	35,00
	- Selalu	34	42,50
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	24	30,00
	- Kadang-kadang	24	30,00
	- Selalu	32	40,00
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	0	0
	- Beberapa elit di desa	12	15,00
	- Musyawarah	68	85,00
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	9	11,25
	- Kadang-kadang	40	50,00
	- Tidak ada	31	38,75
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	1	1,25
	- Ada, tapi kurang transparan	41	51,25
	- Ada transparan	38	47,50
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	56	70,00
	- Kadang-kadang	23	28,75
	- Selalu	1	1,25
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan hasil *FGD* dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Abuya (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, PP, dan KS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan struktural sebagai berikut:

- Kurangnya melibatkan orang miskin atau utusan mereka dalam rapat perencanaan dan pemberian bantuan
- Mekanisme atau perhitungan yang diterima oleh semua orang miskin dalam membuat kategori atau spesifikasi penerima bantuan masih belum optimal, sehingga orang miskin dapat merasa menunggu giliran bantuan untuknya.
- Kurangnya transparansi dalam pemberian bantuan baik bersifat keuangan, jenis bantuan, jangka waktu, dan lainnya.

3.11.3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural berasal dari individu dan keluarga si miskin itu sendiri, antara lain berpikiran bahwa miskin disebabkan oleh nasib. Kurangnya keinginan untuk merubah diri sendiri (adanya rasa malas untuk berusaha, pasrah kepada keadaan, dan sebagainya), menyebabkan si miskin itu akan tetap menjadi miskin dalam jangka panjang bahkan selamanya. Oleh karena itu perlu perubahan dari diri sendiri untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Tabel 40. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	6	7,50
	- Kurang percaya	46	57,50
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	28	35,00
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	9	11,25
	- Ada sedikit tapi belum memulai	64	80,00
	- Ada dan sudah memulai	5	6,25
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	29	36,25
	- Dari dalam diri sendiri	51	63,75
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	12	15,00
	- Ada, tapi belum memulai	58	72,50
	- Ada dan sudah mulai	10	12,50
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	46	57,50
	- Pernah, tapi baru memulai	23	28,75
	- Pernah dan sudah mulai	11	13,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel 40 memperlihatkan kondisi kemiskinan kultural di Kabupaten Abdya, di mana hanya 7,5 persen responden yang sangat percaya bahwa kemiskinan itu sulit untuk diubah. Ada sebanyak 80 persen responden berkeinginan sedikit untuk merubah diri tetapi belum dimulai karena tidak adanya sokongan dari berbagai pihak. Bahkan ada sebanyak 11,25 persen responden tidak ada keinginan untuk merubah diri (pasrah kepada keadaan dirinya).

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa di Kabupaten Abdya, sebagian responden miskin disebabkan oleh sifat kultural pada dirinya. Namun demikian, sifat kultural ini dapat diubah bilamana pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat melakukan perubahan memotivasi diri tentunya dengan sokongan infrastruktur, peralatan, modal, dan keterampilan yang harus diberikan kepada penduduk miskin dengan pengawasan dan evaluasi berbasis kinerja. Sifat bantuan tidak harus hibah, tetapi dapat diberikan secara bergulir (revolving) dan terikat, sehingga mereka tidak bersikap hanya mengharapkan bantuan atau uluran tangan dermawan atau pemerintah.

Berdasarkan hasil *FGD* dengan instansi/dinas pemerintah terkait di Kabupaten Abdya (Bappeda, TKPKD, Sosnakertrans, BPM, PP, dan KS, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan) antara lain dapat disimpulkan penyebab kemiskinan Kultural sebagai berikut:

- Kurang adanya motivasi diri, lebih bersifat menunggu bantuan.
- Kurangnya kreatifitas bersifat ekonomi produktif (minimnya usaha-usaha) yang dapat meningkatkan pendapatan.
- Waktu yang tersedia dihabiskan dengan cuma-cuma (duduk-duduk di kedai kopi/warung) dan berdiam diri di rumah.
- Bantuan yang diberikan adakalanya tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- Bagi yang tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan pembagian, dapat menimbulkan kerawanan sosial (kecemburuan).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di empat desa sampel dari dua kecamatan sampel yakni Desa Ie Mirah dan Pante Rakyat di Kecamatan Babahrot dan Desa Padang Panjang dan Pulau Kayu di Kecamatan Susoh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadaan sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di desa berjalan dengan baik, adanya sikap solidaritas sesama sangat berjalan dan dipelihara dengan baik. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan antara lain majlis taklim oleh kaum bapak, pengajian wirid Yasin, PKK dan lainnya oleh kaum ibu, kegiatan olah raga, memperingati hari-hari besar Islam dan lainnya oleh kaum pemuda.
2. Hubungan pemerintah dengan masyarakat desa terjalin dengan baik, ditandai dengan adanya administrasi desa yang baik serta berfungsinya struktur pemerintahan desa. Salah satunya adalah adanya kegiatan penyusunan RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) yang didasarkan kepada musyawarah dan mufakat desa.
3. Kondisi perekonomian desa tidak terlepas dari peran masyarakat dalam berusaha mengembangkan perekonomian keluarga masing-masing sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang, pertukangan, perbengkelan, jualan/warung, dan sebagainya.
4. Jika dilihat dari kebutuhan rumah tangga rata-rata penduduk desa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun terbatas. Namun ada juga sebagian masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat.
5. Sebagian masyarakat bekerja sebagai pekerja musiman, pekerja tidak tetap (mokok-mokok/serabutan), dan bahkan ada yang tidak bekerja/ sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu (PHK, sakit-sakitan, dan sebagainya), yang juga memerlukan penanganan oleh pemerintah daerah dan pusat.
6. Tingkat kemiskinan di desa harus menjadi fokus dari pemerintah mengingat angka kerawanan kemiskinan tertinggi dapat mencapai sekitar 40 persen dari total penduduk. Kerawanan ini dapat dikurangi melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh warga miskin adalah melalui akses permodalan ke LKM dan kelompok SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan).
7. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk warga miskin adalah tetap memberikan bantuan bahan sembako terutama beras, dan bantuan lainnya. Namun yang paling penting adalah memberikan pelatihan ketrampilan beserta modal usaha dan pemasarannya sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama di bidang usaha ekonomi kreatif dan produktif.

3.12. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

Penelitian ini diawali dengan memilih 2 kecamatan dan masing-masing di dalam kecamatan tersebut dipilih 2 gampong yang diantaranya terdapat gampong berbasis pertanian dan gampong berbasis nelayan. Selanjutnya pada setiap gampong dipilih sebanyak 20 responden yang diwawancarai secara mendalam. Responden yang terpilih seluruhnya berjumlah 80 orang, yang berasal dari Kecamatan Pasie Raja yaitu Gampong Sineubok yang berbasis pertanian dan Gampong Ladang Tuha yang berbasis nelayan, serta Kecamatan Sawang yaitu Gampong Blang Gelinggang yang berbasis pertanian dan Gampong Sawang Sa yang berbasis nelayan. Namun meskipun Ladang Tuha dan Sawang Sa disebutkan sebagai gampong yang berbasis nelayan, hanya sebanyak 27,5% responden yang berasal dari kedua gampong tersebut yang sungguh-sungguh bermata pencaharian sebagai nelayan. Profil responden miskin di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Profil Responden Miskin di Kabupaten Aceh Selatan

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	48,49 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 838.125	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	61	76,25
	- Perempuan	19	23,75
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	4	5,0
	- SD	34	42,5
	- SMP	30	37,5
	- SMA	12	15,0
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	6
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	61	76,25
	- Belum Menikah	0	0
	- Janda/Duda	19	23,75
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	14	17,5
	- Pedagang	6	7,5
	- Petani	56	70
	- Lain-lain	4	4,0
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Mata pencaharian utama responden adalah petani padi sawah dengan luas lahan garapan rata-rata sebesar 1412 m². Tidak ditemukan adanya responden yang berusahatani hortikultura dan membuka kebun, dengan alasan responden tidak memiliki lahan garapan dan modal kerja. Namun demikian, para responden mengaku pernah menjadi tenaga upahan pada usahatani tersebut yang diusahakan pihak lain. Sedangkan usaha ternak hanya dilakukan secara sambilan dalam skala usaha yang masih sangat kecil sekali. Responden dan keluarga responden hampir tidak memiliki keterampilan lainnya yang bisa dijadikan sebagai

sumber penghasilan. Hanya ditemukan 2 responden yang memiliki keterampilan tambahan sebagai tukang, dan 2 responden lainnya sebagai pandai besi yang telah digeluti secara turun temurun.

Umur rata-rata responden di daerah penelitian adalah 48,49 tahun yang secara umum dapat dikatakan bahwa responden masih dalam kisaran berumur produktif, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Hanya didapati 6 responden (7,5%) yang berumur ≥ 65 tahun, dan 16 responden (20%) yang berumur antara 55 sampai dengan 65 tahun.

Sebagaimana halnya dengan kebanyakan perempuan di perdesaan Kabupaten Aceh Selatan, mereka hanya bekerja dengan tujuan untuk membantu usaha yang digeluti suaminya. Namun ketika suaminya telah tiada atau karena faktor-faktor lain yang menyebabkan suaminya tidak dapat mencari nafkah, maka perempuan di daerah penelitian mengambil peran bertindak sebagai penopang tulang punggung keluarganya. Hal ini sangat kontras sekali terlihat setelah statusnya berubah menjadi janda.

3.12.1. Kemiskinan Alamiah

Ditinjau dari performance perwilayahannya diketahui bahwa Kabupaten Aceh Selatan bukanlah daerah yang terisolasi dan berkondisi alam minim, hal ini dapat dilihat dari semua gampong sudah terhubung dengan jalan beraspal, mudah dijangkau, dan mudah diakses dengan berbagai sarana transportasi darat dan laut. Penduduk dalam gampong umumnya berdomisili berdekatan dengan jalan besar provinsi, serta bukan pula dikategorikan sebagai wilayah dengan kondisi alam yang tandus dan gersang. Akan tetapi, kelompok warga miskin di wilayah ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara ekonomi. Bila disimak dari segi pendapatan rata-rata sebesar Rp 838.125,-/bulan, kelihatannya mereka tidak memiliki kemungkinan adanya peluang untuk memperoleh faktor-faktor produksi dalam bentuk kepemilikan aset dengan semata-mata mengandalkan kekuatan mereka sendiri.

Fasilitas komunikasi yang ada di gampong-gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Selatan untuk menginformasikan berbagai hal untuk warga gampong adalah papan pengumuman dan Mik yang berada di Meunasah dan di Mesjid. Mik digunakan untuk mengumumkan tentang berbagai hal, diantaranya termasuk urusan kematian, rapat-rapat gampong, *kheunduri* (makan bersama dalam upacara adat dan keagamaan), pengambilan bantuan raskin, dan sebagainya. Sebanyak 55% warga miskin juga telah menggunakan fasilitas HP (*handphone*) sebagai alat komunikasi. Penggunaan air bersih bagi warga masih mengandalkan air sumur gali, air sungai, dan air hujan. Jenis bangunan tempat tinggal warga miskin umumnya ber dinding papan dari jenis kayu seadanya yang berkualitas rendah, dan sebahagian besar diantaranya berbentuk semi permanen dengan lantai terbuat dari semen kasar. Ada diantaranya juga tidak memiliki kamar sebagai pembatas tempat tidur antara anak dan orang tua. Namun bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah yang dinyatakan sebagai korban tsunami, telah mendiami rumah permanen sebagai hasil dari bantuan tsunami. Kondisi rumah responden secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 42. Pada tabel tersebut tersirat bahwa tidak semua korban tsunami mendapat bantuan rumah, terutama kelompok miskin sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang dikarenakan mereka tidak memiliki tanah untuk dapat didirikan rumah bantuan.

Tabel 42. Kondisi Rumah Responden Miskin di Kabupaten Aceh Selatan

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	4	5
	- Sewa	0	0
	- Milik Sendiri	76	95
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	77	96,25
	- Tembok	3	3,75
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	80	100
	- PAM	0	0
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	54	67,50
	- Sendiri	26	32,50
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	26	32,50
	- 500 – 1 km	25	31,25
	- > 1 km	29	36,25
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.12.2. Kemiskinan Struktural

Ada rumah tangga yang ditemui di Kabupaten Aceh Selatan yang terpuruk di dalam kemiskinan dan telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat keluar dari belenggu kemiskinannya, ternyata mereka tidak memiliki kemampuan yang berarti. Hal ini dikarenakan adanya sistem dan struktur sosial yang tidak menyediakan ruang kesempatan yang memungkinkan orang miskin untuk dapat bekerja. Rumah tangga miskin tersebut sebelumnya memiliki lahan garapan yang diperoleh dari warisan. Namun karena adanya suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, tanah sebagai lahan garapan tersebut terpaksa digadaikan dengan emas dalam jumlah tertentu. Selama emas yang dipinjami tersebut belum didapati untuk menebus tanahnya, maka selama itu pula tanah tersebut tetap menjadi milik orang lain.

Ironisnya ketika tanah yang telah digadaikan tersebut digarapnya, maka sistem yang berlaku di gampong mengharuskan dia harus berbagi hasil dengan orang yang menggadai tanahnya. Hal ini berlangsung terus menerus selama-lamanya, sebelum dia dapat mengembalikan emas untuk menebus kembali tanahnya, selama itu pula hasil produksinya harus dibagi dengan orang yang menggadai tanahnya. Meskipun bila dijumlahkan nilai riil setoran bagi hasil yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut telah melebihi nilai emas yang dipinjaminya. Kondisi kemiskinan structural di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Kondisi Kemiskinan Strukturan di Kabupaten Aceh Selatan

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	16	20
	- Kadang-kadang	0	0
	- Selalu	64	80
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	12	15
	- Kadang-kadang	4	5
	- Selalu	64	80
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	18	22,50
	- Kadang-kadang	17	21,25
	- Selalu	45	56,25
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah		
	- Kadang-kadang	4	5,00
	- Selalu	11	13,75
	Jumlah	65	81,25
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	1	1,25
	- Beberapa elit di desa	16	20,00
	- Musyawarah	63	78,75
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	62	77,50
	- Kadang-kadang	18	22,50
	- Tidak ada	0	0
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	0	0
	- Ada, tapi kurang transparan	16	20,00
	- Ada transparan	64	80,00
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	0	0
	- Kadang-kadang	19	23,75
	- Selalu	61	76,25
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Informasi tentang keberadaan berbagai bantuan untuk gampong selalu dikomunikasikan melalui Mik di meunasah dan di mesjid serta pada papan pengumuman dalam gampong, sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas. Hal ini membuat masyarakat gampong tahu persis terhadap sistem distribusinya dan juga merangsang masyarakat dari gampong-gampong tetangga sudah berjaga-jaga terhadap giliran distribusi bantuan serupa di gampongnya. Seiring dengan berakhirnya proses bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi

tsunami, berbagai bantuan dari pihak pemerintah dan *NGO (Non-Government Organization)* yang diterima masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan berangsur-angsur semakin berkurang. Bahkan sekarang ini bantuan dari pihak *NGO* telah terhenti sama sekali. Sedangkan bantuan dari pihak pemerintah setempat, mereka masih tetap menerima beberapa program pengentasan kemiskinan yang digulirkan secara periodik, diantaranya adalah bantuan beras miskin (*raskin*) dan bantuan dana simpan pinjam perempuan (*SPP*). Undangan rapat-rapat berbagai aktivitas di gampong, baik berupa rapat bantuan ekonomi, *kheunduri*, urusan kematian, dan berbagai rapat-rapat gampong lainnya juga lazimnya diumumkan melalui papan pengumuman dan Mik yang berada di Meunasah.

Penggolongan dan ciri kelompok miskin dalam gampong-gampong di Kabupaten Aceh Selatan telah memiliki patron yang sangat kontras dan ditetapkan di tiap-tiap gampong secara cukup jelas dengan musyawarah gampong, yang dipilah menjadi kelompok fakir dan kelompok miskin. Besarnya berbagai bantuan dan zakat yang disalurkan dalam gampong dibedakan dengan memperhatikan penggolongan kelompok tersebut. Lazimnya besar bantuan yang diberikan untuk kelompok yang termasuk ke dalam golongan fakir lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan untuk kelompok miskin.

Hasil *focus group discussion (FGD)* yang dilakukan di daerah penelitian ditemui beberapa fenomena sebagai berikut: Pertama, adanya keterbatasan orang miskin dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung berbagai kesempatan yang produktif. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan kelompok miskin (misalnya buruh tani, buruh nelayan, serta mereka yang tidak terampil dan tidak berpendidikan) dengan sumber-sumber yang tersedia. Sehingga buruh tani, buruh nelayan, dan pekerja kasar tersebut selamanya akan tetap menjadi buruh tani, buruh nelayan, dan pekerja kasar karena tidak ada kesempatan dan kemampuan mereka untuk keluar dari belenggu tersebut. Kedua, kelompok sasaran kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pengentasan kemiskinan yang tepat bagi mereka. Sehingga berbagai bantuan tidak bergerak ke arah yang produktif dan pada umumnya program bantuan kemiskinan tersebut tidak berkelanjutan. Ketiga adalah kurang adanya kegiatan dalam bentuk praktik peningkatan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang ada di gampong.

Upaya penanggulangan kemiskinan struktural di Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan secara sistematis beberapa tahun terakhir ini, namun belum memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penyebab yang dapat menjadi pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan pengentasan kemiskinan karena adanya intervensi dari pihak tertentu.
- 2) Bentuk bantuan pengentasan kemiskinan direncanakan secara topdown sehingga pada umumnya tidak sesuai dengan kebutuhan si penerima, akibatnya banyak bantuan tersebut dijual untuk keperluan lain.
- 3) Sistem bantuan berbentuk hibah sehingga kelompok sasaran menjadi tergantung dengan bantuan, hal ini menjadikan bantuan tersebut sulit untuk digerakkan.
- 4) Tidak adanya pendampingan terhadap bantuan yang digulirkan, bila ada pendamping kemampuannya sangat terbatas, dan sering tidak berada di tempat, serta harus melayani wilayah yang sangat luas (kecamatan) dengan jumlah orang yang didampingi terlalu banyak.

- 5) Masih adanya sistem dan struktur sosial yang kurang berpihak kepada kelompok miskin (misalnya sistem upah yang rendah dan diskriminatif untuk perempuan, bagi hasil yang timpang untuk petani penggarap, dan sebagainya).

Ada fenomena yang ditemui di lapangan adalah mereka yang lahir dari golongan buruh tani dan buruh nelayan, maka selamanya mereka tetap menjadi buruh tani dan buruh nelayan tanpa ada kemampuan mereka untuk dapat keluar dari belenggu kemiskinannya sebagai buruh tani dan buruh nelayan. Hal ini yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak untuk memberikan pendidikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang berbasis potensi wilayah dan dilengkapi juga dengan bantuan permodalan (kredit lunak), dan pendampingan.

3.12.3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang bersumber dari dalam diri masyarakat sebagai akibat dari gaya hidup, Kultural, sikap dan perilaku. Di Kabupaten Aceh Selatan keadaan seperti ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang konsumtif misalnya terlihat banyak waktu dihabiskan di warung kopi, duduk di rangkang, dan berbagai tempat yang berdekatan dengan persimpangan jalan sambil merokok dan minum kopi. Pola hidup ketika panen yang konsumtif dan boros serta upacara adat, misalnya perkawinan, kelahiran, dan bahkan kematian yang dibiayai di luar kemampuan sehingga harus berhutang atau menggadaikan aset yang diperolehnya dari warisan orang tua turut menjerumuskan mereka ke dalam keterpurukan kemiskinan ini.

Hasil *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan di daerah penelitian ditemui beberapa fenomena kemiskinan kultural sebagai berikut:

- a) Mereka tidak memiliki kemampuan melihat peluang-peluang yang tersedia.
- b) Bersikap apatis dan sulit mengikuti petunjuk yang hasilnya tidak dapat mereka peroleh dengan cepat.
- c) Adanya kecurigaan dijadikan sebagai objek sehingga kurang merespon usaha-usaha dan metode dari pihak luar yang membantunya, namun bantuan keuangan dan saprodi diupayakan dapat diperolehnya dengan berbagai cara.
- d) Kelihatannya mereka seperti tidak tahu apa yang harus dikerjakan pada hari ini karena tidak memiliki kemauan untuk melihat peluang-peluang yang tersedia dalam pengembangan diri.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan, namun ditemukan beberapa kendala yang bersumber dari fenomena yang bersumber dari dalam diri masyarakat sebagai akibat dari gaya hidup, Kultural, sikap dan perilaku ini, yang dapat menjadi pembelajaran sebagai berikut:

- a) Kebiasaan mereka yang lamban dan konsumtif misalnya terlihat banyak waktu dihabiskan di warung kopi dan duduk di *rangkang* sambil merokok dan minum kopi.
- b) Bantuan pengentasan kemiskinan banyak dijual untuk keperluan yang konsumtif dengan berbagai alasan.
- c) Adanya sikap pasrah terhadap lingkungan kemiskinan sehingga kurang merespon berbagai upaya yang membantunya keluar dari belenggu kemiskinan.
- d) Segala sesuatu ingin cepat menghasilkan, mudah menyerah, dan kurang memiliki etos kerja

- e) Terlilit hutang karena pola hidup ketika panen yang konsumtif dan boros
 f) Tidak mau belajar untuk mengatur keuangan dan mengorganisir usaha, sehingga dalam berbagai hal harus selalu diperintah pihak lain.
 g) Tidak memiliki kemauan untuk belajar baik dari pengalaman orang lain, dan tidak memiliki keberanian untuk mencoba suatu usaha yang memberi harapan untuk maju.
 Informasi-informasi penting tentang kemiskinan kultural dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	0	0
	- Kurang percaya	20	25
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	60	75
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	0	0
	- Ada sedikit tapi belum memulai	20	25
	- Ada dan sudah memulai	60	75
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	20	25
	- Dari dalam diri sendiri	60	75
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	6	7,5
	- Ada, tapi belum memulai	54	67,5
	- Ada dan sudah mulai	20	25,0
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	6	7,50
	- Pernah, tapi baru memulai	47	58,75
	- Pernah dan sudah mulai	27	33,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.13. Profil Kemiskinan di Kota Subulussalam

3.13.1. Kemiskinan Alamiah

Responden pada penelitian ini rata-rata berumur 44 tahun, dimana 72,5% adalah laki-laki dan 27,5% perempuan. Rata-rata responden memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang. Pendidikan terakhir para responden umumnya sekolah dasar, 12,5% SMP, 8,75% SMA, 2,5% Perguruan tinggi, 2,5% pendidikan formal lainnya dan 22,5% tidak sekolah. Secara umum status para responden adalah menikah, hanya 1,25% yang belum menikah dan 8,75% berstatus duda atau janda. Pekerjaan yang paling dominan para responden adalah Petani atau Berkebun dan Buruh.

Tabel 45. Profil Responden di Kota Subulussalam

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	44 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	5 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.361.250	
3.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	58	72,5
	- Perempuan	22	27,5
	Jumlah	80	100
4.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	18	22,5
	- SD	41	51,25
	- SMP	10	12,5
	- SMA	7	8,75
	- Perguruan Tinggi	2	2,5
	- Lainnya	2	2,5
	Jumlah	80	100
5.	Status		
	- Menikah	72	90
	- Belum Menikah	1	1,25
	- Janda/Duda	7	8,75
	Jumlah	80	100
6.	Pekerjaan		
	- Petani/Berkebun	22	27,5
	- Pedagang	3	3,75
	- Buruh	19	23,75
	- Nelayan	6	7,5
	- Tidak Bekerja	3	3,75
	- Lain-lain	27	33,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Ditinjau dari kondisi alamiah, umumnya responden memiliki rumah sendiri, hanya 2,5% yang tinggal di rumah sewa dan 13,8% menumpang di rumah sanak famili. Jenis bangunan rumah yang ditempati responden umumnya terbuat dari bamboo atau kayu hanya 35% yang memiliki rumah dengan bangunan tembok. Sumber air bersih masih sangat minim, umumnya para responden menggunakan air sumur, hanya 17,5% responden yang telah dapat menikmati air PAM. Hampir setengah dari responden belum memiliki fasilitas WC sendiri. Fasilitas jalan yang cukup baik dan menjangkau desa-desa perdalaman menjadikan jarak rumah-rumah penduduk dekat dengan akses jalan besar, jarak seluruh rumah responden kurang dari 1 Km.

Tabel 46. Kondisi Rumah Responden di Kota Subulussalam

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	11	13,8
	- Sewa	2	2,5
	- Milik Sendiri	67	83,8
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	52	65
	- Tembok	28	35
	Jumlah	80	100
3.	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	66	82,5
	- PAM	14	17,5
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	39	48,8
	- Sendiri	41	51,3
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	50	62,5
	- 500 – 1 km	30	37,5
	- > 1 km	0	0
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.13.2. Kemiskinan Struktural

Setengah responden mengaku selalu diundang dalam rapat program bantuan ekonomi di desa, dan umumnya juga selalu diundang dalam rapat perencanaan pembangunan desa, serta selalu hadir dalam acara rapat. Kebanyakan responden merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Namun dalam kegiatan distribusi bantuan dari pemerintah diputuskan secara musyawarah. Dalam pemberian bantuan ekonomi kebanyakan responden merasa kadang-kadang dibedakan dimana masyarakatrakat yang lebih membutuhkan mendapat porsi yang lebih besar. Para responden umumnya merasa pertanggung jawaban pimpinan di desa selalu ada namun dirasa masih kurang transparan. Lebih dari setengah responden merasa selalu menerima bantuan setiap ada bantuan dari pemerintah maupun non pemerintah.

Tabel 47. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Subulussalam

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	15	18,75
	- Kadang-kadang	22	27,5
	- Selalu	43	53,75
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	16	20
	- Kadang-kadang	25	31,25
	- Selalu	39	48,75
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	14	17,5
	- Kadang-kadang	26	32,5
	- Selalu	40	50
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	18	22,5
	- Kadang-kadang	37	46,25
	- Selalu	25	31,25
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	16	20
	- Beberapa elit di desa	30	37,5
	- Musyawarah	34	42,5
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	17	21,25
	- Kadang-kadang	37	46,25
	- Tidak ada	26	32,5
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	9	11,25
	- Ada, tapi kurang transparan	58	72,5
	- Ada transparan	13	16,25
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	32	40
	- Kadang-kadang	41	51,25
	- Selalu	7	8,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.13.3. Kemiskinan Kultural

Umumnya responden kurang percaya bahwa kondisi kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah. Kebanyakan reponden memiliki semangat untuk merubah diri, namun belum memulai karena tidak memiliki modal dan kurangnya kesempatan. Sumber keinginan merubah diri dari dalam diri sendiri. 61,25% responden memiliki keinginan untuk menabung namun karena kesulitan ekonomi umumnya mereka belum memulai. 28,75 responden

mengaku tidak ada keinginan untuk menabung karena merasa tidak pernah memiliki kelebihan penghasilan. 41,25% dari responden mengaku pernah berfikir untuk menabung jika memiliki penghasilan lebih. Namun 50% dari responden tidak pernah berfikir untuk menabung dan hanya 8,75% dari responden yang pernah berfikir untuk menabung dan sudah memulai.

Tabel 48. Kultural Kemiskinan Kota Subulussalam

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	6	7,5
	- Kurang percaya	45	56,25
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	29	36,25
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	2	2,5
	- Ada sedikit tapi belum memulai	64	80
	- Ada dan sudah memulai	14	17,5
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	1	1,25
	- Keluarga	33	41,25
	- Dari dalam diri sendiri	46	57,5
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	23	28,75
	- Ada, tapi belum memulai	49	61,25
	- Ada dan sudah mulai	8	10
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	40	50
	- Pernah, tapi baru memulai	33	41,25
	- Pernah dan sudah mulai	7	8,75
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.14. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil

Singkil merupakan daerah pemekaran dari Aceh Selatan. Melalui persetujuan dengan surat keputusan nomor: 135/232/1995, tanggal 24 Mei 1995 dan diteruskan dengan proses administrasi perjuangan jadi kabupaten digerakkan oleh PP Bupati wilayah Singkil Makmursyah Putra, keluarlah UU No. 14 tahun 1999 tanggal 24 April 1999, berdirilah Kabupaten Aceh Singkil. Pada tahun 2007, melalui UU No. 8 tahun 2007, Kabupaten Singkil dimekarkan menjadi terbentuknya Kota Subulussalam (Vohry, 2013).

Ketika penelitian ini dilakukan di Singkil, ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai kemiskinan di kabupaten ini. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang ditunjukkan atas dasar konstan 2000 selama kurun waktu 2010-2013 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Singkil menyentuh angka 5,3 persen dimana pada beberapa tahun sebelumnya berkisar di angka 4 persen (BAPPEDA Singkil, 2014: 34). Dalam bidang kemiskinan disebutkan bahwa pada tahun 2013, persentasi penduduk miskin di Aceh Singkil sebesar 18,73 persen mengalami peningkatan dibandingkan

tahun 2012 sebesar 17,92 persen. Adapun tahun-tahun sebelumnya angka kemiskinan di Aceh Singkil mengalami penurunan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan sebanyak 21,06 persen. Tahun 2010 angka kemiskinan mencapai 19,39 persen. Adapun tahun 2011 angka kembali menurun pada 18,93 persen. Sementara pada tahun 2012, angka menurun lagi hingga pada 17,92 persen. Karena itu, angka kemiskinan ini berbandingan terbalik dengan peningkatan ekonomi di wilayah Aceh Singkil.

Dapat juga dilaporkan bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Aceh Singkil terdapat penduduk dengan klasifikasi Keluarga Pra-Sejahtera sebanyak 7.734 KK (26,81 persen), Keluarga Sejahtera I sebanyak 7.018 (24,33 persen), Keluarga Sejahtera III sebanyak 8.720 KK (30,23 persen), Keluarga Sejahtera III sebanyak 4.516 KK (15,65 persen) dan keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 860 KK (2,98 persen). Jika kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dikategorikan sebagai penduduk miskin, maka pada tahun 2013 terdapat jumlah keluarga miskin di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 14,752 KK atau 51,14 persen dari jumlah seluruh keluarga yang di kabupaten ini.

Singkil telah mengalami perubahan dari daerah yang menghasilkan kayu ke daerah yang menghasilkan minyak kelapa Sawit. Salah seorang responden menuturkan bahwa, pada tahun 1980-an, Singkil menjadi daerah destinasi para pengusaha kayu dari berbagai negara. Masyarakat dikawasan pesisir sungai cenderung bekerja sebagai kuli untuk mengikat kayu yang dibawa melalui aliran Sungai Singkil. Saat itu, profesi yang paling terhormat adalah bekerja untuk perusahaan kayu, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga, kemakmuran warga Singkil menjadi begitu penting sebagai memori kolektif masyarakat setempat. Dalam hal ini, Sadri Ondang Jaya (2015: 203) mengatakan:

Ribuan ton hasil bumi, diangkut melalui Sungai Singkil dibawah ke Bandar Singkil. Kemudian dijual kepada pedagang Asia, Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang telah melabuhkan kapalnya di sana. Sungai Singkil telah menjadi sarana transportasi utama dalam lalu lintas perdagangan antarbangsa.

Namun, ketika kayu sudah mulai dibabat, maka Singkil menjadi kawasan sebagai penyedia CPO di provinsi Aceh. Beberapa perusahaan ternama membuka lahan kelapa Sawit di Singkil. Inilah perubahan kehidupan masyarakat Singkil, dari daerah penghasil kayu, menjadi daerah penghasil CPO.

Gambaran di atas tentu memperlihatkan bahwa ada fenomena dari “balok kayu” ke “truck CPO” di Singkil. Perubahan tersebut, tentu saja tidak dinikmati oleh masyarakat Singkil. Karena perusahaan-perusahaan di atas, lebih banyak dioperasikan dari luar Aceh. Sehingga, tanah-tanah di Singkil sudah begitu banyak dikuasai oleh perusahaan kelapa Sawit. Sebagai contoh, salah satu perusahaan terbesar di Singkil adalah PT. Socfindo yang berdasarkan akta No.5 tanggal 3 Mei, pemerintah Indonesia melepaskan 30% sahamnya kepada Socfin S.A sehingga saham pemerintah Indonesia dibawah kementerian BUMN hanya 10 % saja (Ondang Jaya, 2015).

Sementara tanah di kawasan Kec. Singkil yang berdekatan dengan areal sungai dan pesisir laut, sangat memperhatikan. Karena mereka tinggal di rawa-rawa dan sebagian tanah rumah mereka telah amblas hampir 1 meter setelah dilanda Tsunami pada tahun 2004. Menurut catata, dari 193 kampung di Singkil, hampir separuh di antaranya berada di pinggir

sungai. Dari sejak hilir hingga ke hulu sungai. Kampung-kampung itu berjajar, seirama dengan kelokan alur bantaran sungai. Ada beberapa kampung di antaranya Kampung Kayu Menang, Kilangan, Teluk Ambun, Teluk Rumbia, Siti Ambia, Rantau Gedang, Seluk Aceh, Pemuka, Ladang Bisik hingga ke Runding (Ondang Jaya, 2015: 208). Dalam hal ini, peneliti telah menyusuri wilayah perkampungan di aliran Sungai dari Kampung Kilangan ke Rantau Gedang.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perubahan kehidupan, baik di kawasan yang menjadi lahan sawit dan kawasan pesisir di Kec. Singkil. Namun, sebagaimana terlihat dalam Tabel 50, bahwa hampir 96 persen, warga Singkil tinggal berdekatan dengan jalan raya. Di kawasan non-pesisir, hampir semua rumah berada di pinggir jalan raya. Bahkan mereka tidak memiliki lagi ruang publik, karena semua kawasan perumahan mereka sudah ada perkebunan sawit. Inilah yang terjadi di kawasan Singkil, sehingga warna kemiskinan lebih banyak terlihat dari aspek kultural. Karena tanah-tanah di sekitar mereka sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Kelapa Sawit. Di Kecamatan Suro, yang menjadi objek penelitian ini, misalnya, pendudukan hampir rata-rata merupakan petani, sebagaimana terlihat dalam Tabel 49.

Adapun di kawasan pesisir, hampir semua penduduk tinggal hampir dekat jalan raya, namun terkadang mereka tinggal di rawa. Dua kampung yang menjadi objek peneliti di kawasan perbukitan, hampir semua rumah mereka berada di pinggir jalan. Karena itu, dalam penelitian dijumpai jarak rumah penduduk dengan jalan raya hampir semuanya (97 %) berada dibawah 500 meter. Hal ini memunculkan kemiskinan alami dan kultural. Sebab, mereka tidak memiliki wilayah atau tanah garapan. Hal yang sama juga dijumpai pada kawasan Kec. Singkil, dimana hampir semua masyarakatnya tinggal tidak jauh dari jalan raya dan di atas rawa-rawa. Potret ini menyiratkan adanya kemiskinan alami dan kultural yang amat mencuat di Kabupaten Aceh Singkil.

Pencapaian penanggulangan angka kemiskinan di Singkil tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program pembangunan yang pro-rakyat miskin. Sekretaris Bappeda Singkil Aceh menyampaikan bahwa Kabupaten Singkil selalu memiliki program-program menyentuh lapisan masyarakat miskin. Tidak hanya itu, sebagai Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Provinsi Aceh, peneliti juga telah mensurvey beberapa kawasan yang pernah dibantu oleh Baitul Mal Kabupaten Singkil dan Baitul Provinsi, melalui program fakir uzur. Baitul Mal selalu menyerahkan bantuan, terutama pada kelompok fakir dan miskin. Hanya saja, dari penelusuran yang dilakukan, jumlahnya tidaklah mencukupi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.

3.14.1. Kemiskinan Alamiah

Survey yang dilakukan di Singkil menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di Singkil adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di Kota Banda Aceh adalah warga biasa (95 persen). Namun ada 2 orang yang memiliki jabatan penting di desa yakni sebagai Geuchiek (Kepala Desa) dan Bilal Mesjid. Pendidikan responden tercatat hanya SLTA ke bawah. Usia rata-rata responden adalah 42,258 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4,7 orang. Jenismata pencaharian terbesar adalah nelayan (9 persen), pedagang (11 persen), petani (23 persen), swasta (10 persen), dan sisanya (48 persen) merupakan mereka yang bekerja secara serabutan, atau memiliki profesi yang sama sekali

tidak menjanjikan, seperti pemecah batu, kuli bangunan, atau memang sebagai pengangguran. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49. Profil Responden di Kabupaten Singkil

No	Variabel	Jumlah	%
1	Usia rata-rata	42,25 Tahun	
2	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4,7 Orang	
3	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp1.046.909	
4	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	67	84
	b. Perempuan	13	16
	Jumlah	80	100
5	Pendidikan		0
	a. Tidak sekolah	14	18
	b. SD	28	35
	c. SMP	19	24
	d. SMA	16	20
	e. Perguruan Tinggi	2	3
	f. Lainnya	1	1
	Jumlah	80	100
6	Status		
	a. Menikah	65	81
	b. Belum Menikah	1	1
	c. Janda/Duda	14	18
	Jumlah	80	100
7	Pekerjaan		
	a. Nelayan	7	9
	b. Pedagang	9	11
	c. Petani	18	23
	d. Swasta	8	10
	e. Lainnya	38	48
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sebagian besar responden tinggal di rumah sendiri dan seluruhnya sudah dialiri listrik PLN. Sebagian responden menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi sudah menggunakan air PAM. Mengenai air PAM, di desa Pangkalan Sulampi dan Suro Baru, merupakan hasil kreasi masyarakat setempat, bukan dari pemerintah. Hanya yang di Kec. Singkil yang dialiri oleh air PAM yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagian besar rumah responden didirikan dari bambu (78 persen), hampir seluruhnya memiliki fasilitas WC sendiri. Umumnya jarak rumah responden dari jalan besar berkisar kurang dari 1 km. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2. Hanya saja, kondisi rumah di kawasan yang dekat dengan Sungai Singkil dan pesisir cukup memprihatinkan, karena mereka tinggal di atas air atau rawa-rawa. Pemerintah, menurut informan, pernah merekolasi rumah-rumah

tersebut, namun kebanyakan mereka menolak atau kembali lagi ke rumah semula, karena mereka tidak cocok tinggal di daratan. Selain alasan tersebut, mereka juga menyebutkan bahwa mereka tidak disediakan mata pencaharian, ketika pindah ke tempat baru.

Hampir semua warga miskin di Singkil merupakan warga asli, bukan pendatang dari berbagai kota lainnya. Hasil survey menunjukkan ada lebih 50 persen responden yang merupakan warga asli Singkil. Mayoritas mereka memang berasal dari Singkil. Sehingga, mereka tidak memiliki saingan dengan para pendatang. Karena itu, pekerja yang mereka tempuh adalah pekerjaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Dari Singkil dalam ragam pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kemiskinan alami, struktural, dan kultural. Informan menyebutkan bahwa, mereka tidak memiliki ketrampilan atau keahlian yang dapat bersaing, dikarenakan oleh jalur pendidikan yang mereka tidak tempuh, hingga mencapai sarjana. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa orang tua tidak mau mengirimkan anak-anak mereka studi lanjut, dikarenakan kekurangan dalam bidang pembiayaan. Tidak mengejutkan ketika ada program BIDIK MISI atau pemberian beasiswa kepada beberapa keluarga yang kurang mampu, disinyalir sebagai langkah untuk mengubah status dan pola kehidupan mereka, di kemudian hari. Program inilah yang selalu diinginkan oleh para informan, baik di Suro maupun di kecamatan Singkil.

Tabel 50. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Singkil

No	Variabel	Jumlah	%
1	Status Kepemilikan rumah		
	a. Numpang	8	10
	b. Sewa	5	6
	c. Milik Sendiri	67	84
	Jumlah	80	100
2	Jenis Bangunan		
	a. Bambu	78	98
	b. Tembok	2	3
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	a. Sumur	30	38
	b. PAM	50	63
	c. Keduanya Sumur dan PAM	0	0
	Jumlah	80	100
4	Fasilitas WC		
	a. Umum	34	43
	b. Sendiri	46	58
	Jumlah	80	100
5	Jarak rumah dari jalan besar		
	a. < 500 m	77	96
	b. 500 - 1 km	0	0
	c. > 1 km	3	4
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hampir setengah responden (48 persen) mengaku memiliki mata pencaharian yang tidak membuat mereka mapan. Para informan menuturkan bahwa mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh harian atau buruh lepas di perkembunan Kelapa Sawit. Bila dibandingkan dengan data pekerjaan responden pada tabel 1, nelayan (9 persen), pedagang (11 persen), petani (23 persen), swasta (10 persen), dan sisanya (48 persen) merupakan mereka yang bekerja secara serabutan, atau memiliki profesi yang sama sekali tidak menjanjikan, seperti pemecah batu, kuli bangunan, atau memang sebagai pengangguran.

Responden umumnya tidak memiliki keterampilan lain untuk dapat dijadikan alternatif penghasilan bagi keluarga, demikian pula keterampilan anggota keluarga lainnya. Hanya ada beberapa orang responden yang mengaku memiliki keterampilan lainnya yang bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, yakni berjualan, sebagai buruh lepas,. Selain itu, hanya ada 8 responden yang mengaku memiliki anggota keluarga yang memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sumber ekonomi keluarga, yakni keterampilan tukang (3 orang), memasak (2 orang), menjahit sandal, menjahit jala, dan mencukur rambut masing-masing 1 orang.

3.14.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Singkil. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (68 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Mayoritas responden mengaku kadang-kadang diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selain itu, 41 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan tidak dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 51 berikut.

Kemiskinan struktural di Singkil, juga dipicu oleh perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (29 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Ada 29 persen responden yang menjawab dengan spontan ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat perbedaan hanya 20 persen. Hal ini menyiratkan bahwa bahwa ada indikasi kuat mengenai perbedaan distribusi bantuan. Walaupun ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa keputusan distribusi bantuan dilakukan melalui musyawarah (55 persen).

Tabel 51. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Singkil

No	Variabel	Jumlah	%
1	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	a. Tidak pernah	24	30
	b. Kadang-kadang	34	43
	c. Selalu	22	28
	Jumlah	80	100
2	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	a. Tidak pernah	24	30
	b. Kadang-kadang	36	45
	c. Selalu	20	25
	Jumlah	80	100
3	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	a. Tidak pernah	10	13
	b. Kadang-kadang	38	48
	c. Selalu	32	40
	Jumlah	80	100
4	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan		
	a. Tidak pernah	3	4
	b. Kadang-kadang	54	68
	c. Selalu	23	29
	Jumlah	80	100
5	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	a. Oleh Kepala desa saja	8	10
	b. Beberapa elit di desa	28	35
	c. Musyawarah	44	55
	Jumlah	80	100
6	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	a. Ada	23	29
	b. Kadang-kadang	23	29
	c. Tidak ada	16	20
	d. Tidak Jawab	18	23
	Jumlah	80	100
7	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara		
	a. Tidak pernah	1	1
	b. Ada, tapi kurang transparan	33	41
	c. Ada transparan	32	40
	e. Tidak Jawab	14	18
	Jumlah	80	100
8	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non		
	a. Tidak pernah	17	21
	b. Kadang-kadang	58	73
	c. Selalu	5	6
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.14.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan tidak terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Singkil. Mayoritas (63 persen) responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, ada 34 persen yang kurang percaya. Namun ada 4 persen responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (49 persen) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Namun ada 32 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Sisanya sebesar 19 persen mengkapasrah dan tidak memiliki keinginan. Keinginan ini umumnya muncul dari dalam diri sendiri (64 persen), dari keluarga (27 persen), dan dari dorongan tokoh rujukan (9 persen). Kondisi ini sejalan dengan upaya menabung, dimana hanya 30 persen responden yang sudah mulai menabung, dan 50 persen memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya sebesar 20 persen tidak memiliki keinginan sama sekali.

Tabel 52 menunjukkan bahwa dorongan responden untuk konsumsi relatif tinggi dibandingkan untuk menabung. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang ingin menabung justru bertambah kecil. Jumlah responden yang pernah berfikir untuk menabung, namun baru dimulai jika punya penghasilan lebih meningkat menjadi 45 persen. Bandingkan dengan jumlah responden yang tidak punya keinginan untuk menabung hanya 28 persen.

Tabel 52. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Singkil

No	Variabel	Jumlah	%
1	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	a. Percaya sekali	3	4
	b. kurang percaya	27	34
	c. tidak percaya namun harus ada usaha	50	63
	Jumlah	80	100
2	Keinginan dan semangat merubah diri		
	a. Tidak ada keinginan	3	4
	b. Ada sedikit tapi belum emulai	39	49
	c. Ada dan sudah memulai	38	48
	Jumlah	80	100
3	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	a. Dorongan dari tokoh rujukan	5	6
	b. Keluarga	12	15
	c. Dari dalam diri sendiri	63	79
	Jumlah	80	100
4	Keinginan untuk menabung		
	a. Tidak ada	4	5
	b. Ada, tapi belum memulai	54	68
	c. Ada dan sudah memulai	22	28
	Jumlah	80	100
5	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	a. Tidak pernah	22	28
	b. Pernah, tapi baru memulai	36	45
	c. Pernah dan sudah mulai	22	28
	Jumlah	80	100

Profil Kemiskinan di Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi astronomi antara 02° 15' 03"- 02° 55' 04" Lintang Utara dan 95° 40' 15" -96°30' 45" Bujur Timur. Hampir 78,51 persen atau 106 desa dari keseluruhan 138 desa di kabupaten ini merupakan desa pesisir.

Desa pesisir ini lebih dominan ditemui di Kecamatan Simeulue Timur, disamping Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teupah Barat. Sementara desa bukan pesisir (dataran) paling banyak terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah. Kecamatan Siemeulu Timur terdiri atas 17 desa. Beberapa desa yang dianggap pekerjaan utamanya adalah nelayan. Desa-desa tersebut adalah Suka Karya, Suka Makmur, Amaiteng Malia dan Air Dingin. Lokasi lain yang dipilih adalah Kecamatan Simeulu Cut yang terdiri atas 8 desa, pekerjaan utama di Kecamatan tersebut adalah petani. Beberapa desa dipilih sebagai lokasi kajian, yaitu desa Sibuluh, dan Amarabu. Simeulue Tengah terdiri atas 16 desa, diantaranya dijadikan lokasi penelitian yaitu Lakubang, Kampung Air, Wan Surip dan Lembaga.

Tabel 53. Profil Responden di Kabupaten Simeulue

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	51,8 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 993.125	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	56	70
	- Perempuan	24	30
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	11	13,75
	- SD	45	56,25
	- SMP	15	8,75
	- SMA	9	11,25
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	57	71,25
	- Belum Menikah	0	0
	- Janda/Duda	23	28,75
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	12	15
	- Petani	35	43,75
	- Buruh	10	12,5
	- Lain-lain	19	23,75
	- Tidak bekerja	4	5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Usia rata-rata responden adalah 51,8 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata setiap rumah 4 orang. Data menunjukkan penghasilan rata-rata Rp. 993.125 perbulan. Keadaan ini jelas tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Biaya hidup yang tinggi di Siemeulu telah menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Sebagian kebutuhan didatangkan dari daratan Aceh



dan Sumatera Utara melalui laut dan udara sehingga harganya bertambah mahal.

Dari 80 orang responden, 56 orang atau 70 % adalah laki-laki. Yang cukup menyedihkan, 13,75 % tidak bersekolah, 56,25 % hanya tamat Sekolah Dasar, 8,75 % tamat Sekolah Menengah Pertama, dan hanya 11,25 % yang lulus Sekolah Menengah Atas. Tidak ada satu orangpun yang lulus Perguruan Tinggi. Walaupun demikian diantara responden menyadari bahwa rendahnya pendidikan yang pernah mereka tempuh mempengaruhi status miskin yang mereka alami, karenanya diantara responden ada yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan bagi anaknya sampai ke perguruan tinggi.

Semua responden sudah pernah menikah, yang mana 23 orang 28,75% sudah menjadi janda dan 57 orang dalam status masih dalam hubungan pernikahan. Sebahagian besar adalah memiliki mata pencaharian sebagai petani 35,75% (43,75 orang), 15% nelayan, 12,5% buruh, 23,75% melakukan pekerjaan lain seperti jualan, menarik becak, supir, dan mejadi pembantu rumah tangga. 5% responden tidak bekerja. Pertanyaan penting yang harus mendapat perhatian dan jala kleluar adalah kenapa mereka miskin, apakah karena kondisi alamiah, struktur masyarakat atau karena persoala Kultural.

3.14.4. Kemiskinan Alamiah

Tabel 54 dapat memberi gambaran mengenai kondisi rumah responden dan fasilitas dasar untuk mendukung kehidupan mereka. Kondisi rumah miskin di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Kondisi Rumah Responden Miskin di Kabupaten Simeulue

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	8	10
	- Sewa	6	7,5
	- Milik Sendiri	64	80
	- Lainnya	2	2,5
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	76	95
	- Tembok	4	5
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	69	86,25
	- PAM	11	13,75
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	26	32,5
	- Sendiri	54	67,5
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	-	-
	- 500 – 1 km	80	100
	- > 1 km	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hasil wawancara dan survey 64 keluarga (82,5%) memiliki rumah sendiri, akan tetapi 95% menghuni rumah yang terbuat dari papan denga fasilitas yang sangat sederhana. 86,25%

belum mendapat air PDAM. Mereka masih mengadakan sumber air terbuka seperti air sumur, air tadah hujan, atau air sungai yang tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan. Namun demikian, 67,5 % responden sudah memiliki WC sendiri. Karena Simeulu merupakan wilayah pulau, maka sebahagian besar pemukiman adalah dekat dengan jalan lingkar mengelilingi pula tersebut. Sehingga jarak tempuh kejalan lingkar rata-rata 500 meter sampai 2000 meter.

3.14.5. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Simeulu dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Simeulu

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	25	31,25
	- Kadang-kadang	25	31,25
	- Selalu	30	37,5
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	26	32,5
	- Kadang-kadang	25	31,25
	- Selalu	29	36,25
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	15	18,75
	- Kadang-kadang	38	47,5
	- Selalu	27	33,75
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	26	32,5
	- Kadang-kadang	23	28,75
	- Selalu	31	38,75
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	9	11,25
	- Beberapa elit di desa	22	27,5
	- Musyawarah	49	61,25
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	38	47,5
	- Kadang-kadang	12	15
	- Tidak ada	30	37,5
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	21	26,25
	- Ada, tapi kurang transparan	25	31,25
	- Ada transparan	32	40
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	25	31,25
	- Kadang-kadang	33	41,25
	- Selalu	22	27,5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (49 orang /61,25 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah. Responden

mengaku diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, tingkat transparansi agak rendah, hanya 40 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 55 berikut ini.

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun terdapat sedikit perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (15 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Yang miris, 47,5 persen responden yang menjawab dengan spontan ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat perbedaan 37,5 persen.

3.14.6. Kemiskinan Kultural

Hasil survey juga menunjukkan tidak terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Simeulue. Mayoritas (67,5 persen) responden tidak percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, ada 30 persen yang kurang percaya. Hanya 2 persen responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 56.

Tabel 56. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Simeulue

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	2	2,5
	- Kurang percaya	24	30
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	54	67,5
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	1	1,25
	- Ada sedikit tapi belum memulai	38	47,5
	- Ada dan sudah memulai	41	51,25
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	6	7,5
	- Keluarga	21	26,25
	- Dari dalam diri sendiri	53	66,25
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	6	7,5
	- Ada, tapi belum memulai	63	78,75
	- Ada dan sudah mulai	11	13,75
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	7	8,75
	- Pernah, tapi baru memulai	57	71,25
	- Pernah dan sudah mulai	16	20
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sebagian besar responden (51,25 persen) memiliki keinginan untuk merubah diri namun sudah memulainya. Sebanyak 47,5 persen responden yang memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya hanya 1 responden atau sebesar 1,25 persen mengaku pasrah dan tidak memiliki keinginan. Keinginan ini umumnya muncul dari dalam diri sendiri (66,25 persen), dari keluarga (26,25 persen), dan dari dorongan tokoh rujukan (7,5 persen). Kondisi ini tidak begitu sejalan dengan upaya menabung, dimana hanya 13,75 persen responden yang sudah mulai menabung, dan 78,75 persen memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya sebesar 7,5 persen tidak memiliki keinginan sama sekali. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dorongan responden untuk menabung. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang ingin menabung sangat tinggi. Jumlah responden yang ingin menabung dan sudah memulai jika mendapat penghasilan lebih mencapai 71,25 persen. Bandingkan dengan jumlah responden yang tidak punya keinginan untuk menabung hanya 8,75 persen.

3.15. Profil Kemiskinan di Kabupaten Pidie

Profil responden pada penelitian ini terdiri dari 21% laki-laki dan 79% perempuan dengan usia rata-rata 47 tahun. Sebanyak 53% responden mempunyai status pendidikan tidak sekolah dan hanya 1% saja yang mengenyam pendidikan hingga sampai perguruan tinggi. Semua responden telah menikah dengan pekerjaan terbanyak sebagai pekerja anyaman (52%) dan petani/buruh tani (35%). Jumlah rata-rata anggota keluarga yang tinggal di rumah responden sebanyak 4 orang.

Tabel 57. Profil Responden di Kabupaten Pidie

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	47,03 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 471.250	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	17	21
	- Perempuan	63	79
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	42	53
	- SD	28	35
	- SMP	9	11
	- SMA	0	0
	- Perguruan Tinggi	1	1
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	38	48
	- Belum Menikah	0	0
	- Janda/Duda	42	52
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Pekerja anyaman	42	52
	- Petani/buruh tani	28	35
	- Nelayan	6	8
	- Lain-lain	3	4
	- Tidak Bekerja	1	1
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Keadaan tersebut diatas tidak dapat digeneralisasi sebagai potret profil masyarakat miskin di Pidie. Kondisi tersebut karena desain penentuan sampel tidak menggunakan desain *probability sampling* namun lebih menggunakan desain *quota sampling*. Pendapatan rata-rata yang sangat rendah dapat disebabkan karena mayoritas sampel adalah wanita yang sangat terbatas dalam pencarian nafkah, sementara pendapatan dari anggota keluarga lainnya tidak diinformasikan. Kondisi tingkat pendidikan yang rendah sebagai dapat berkontribusi sebagai salah satu komponen penunjang kemiskinan.

3.15.1. Kemiskinan Alamiah

Status kepemilikan rumah sebanyak 92% milik responden sendiri dengan jenis bangunan sebanyak 99% hanya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah yang tidak mempunyai fasilitas WC sendiri. Sumber air sehari-hari yang digunakan oleh responden 97% merupakan sumur atau mata air tak terlindungi/sungai/air hujan. Jarak rumah semua responden menuju jalan besar mencapai lebih dari 1 kilometer.

Tabel 58. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Pidie

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	6	8
	- Sewa	0	0
	- Milik Sendiri	74	92
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah	79	99
	- Tembok/kayu berkualitas tinggi	1	1
	Jumlah	80	100
3.	Sumber Air Bersih		
	- Sumur atau mata air tak terlindungi/sungai/air hujan	78	97
	- Air kemasan/ledeng/pompa/sumur atau mata air terlindungi	2	3
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	80	100
	- Sendiri	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	0	0
	- 500 – 1 km	0	0
	- > 1 km	80	100
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hampir seluruh masyarakat miskin memiliki rumah sendiri. Rumah tersebut biasanya adalah rumah milik keluarga. Namun demikian, kondisi rumah yang ditinggali cukup memprihatinkan. Kondisi fasilitas jamban sangat memprihatinkan dimana semua masyarakat miskin tidak memiliki jamban sendiri. Pada beberapa titik, WC umum yang dimiliki ternyata bukanlah WC umum yang difahami selama ini namun masyarakat membuang hajatnya di area tertentu seperti di semak dan sebagainya. Kondisi tersebut selain merupakan implikasi kemiskinan namun juga sangat berpotensi untuk menyebabkan berkembangnya penyakit di tengah masyarakat. Pemahaman yang rendah tentang kesehatan dan konsis ekonomi yang

tidak mendukung adalah dua faktor yang cukup berpengaruh pada hal tersebut.

3.15.2. Kemiskinan Struktural

Sebanyak 81% responden selalu menghadiri undangan rapat yang diadakan di desa dengan rincian 77% selalu menghadiri undangan rapat program bantuan ekonomi di desa dan undangan rapat perencanaan pembangunan desa. Sistem distribusi bantuan dari pemerintah telah 90% dilaksanakan dengan sistem musyawarah dan telah melibatkan responden (berstatus masyarakat miskin) dalam pengambilan keputusan.

Tabel 59. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Pidie

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	6	8
	- Kadang-kadang	12	15
	- Selalu	62	77
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	8	10
	- Kadang-kadang	10	13
	- Selalu	62	77
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	8	10
	- Kadang-kadang	7	9
	- Selalu	65	81
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	1	1
	- Kadang-kadang	16	20
	- Selalu	63	79
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	8	10
	- Beberapa elit di desa	0	0
	- Musyawarah	72	90
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	43	54
	- Kadang-kadang	0	0
	- Tidak ada	37	46
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	7	9
	- Ada, tapi kurang transparan	0	0
	- Ada transparan	73	91
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	43	54
	- Kadang-kadang	37	46
	- Selalu	0	0
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sebanyak 54% responden menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi dengan frekuensi 54% responden yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah/non pemerintah. Pertanggungjawaban pimpinan desa menurut responden sudah dilakukan secara transparan (91%).

Meskipun beberapa aspek dalam proses pemberian bantuan oleh sebagian besar responden dianggap baik, sesuatu yang bertolak belakang terjadi ketika lebih banyak responden menyatakan merasakan adanya perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mungkin masyarakat tidak begitu puas dalam pengambilan keputusan rapat, namun informasi yang diperoleh sangat terbatas. Perhatian pemerintah juga terlihat dianggap masyarakat sangat rendah, dimana bantuan dari pemerintah dianggap tidak pernah atau kadang-kadang.

3.15.3. Kemiskinan Kultural

Sebanyak 60% responden merasa bahwa kemiskinan yang mereka alami bukan merupakan suatu nasib dan bisa dirubah dengan usaha. Kebanyakan dari responden (60%) masih memiliki angan-angan saja untuk mulai melakukan usaha perubahan dalam hidupnya dan hanya 16% saja yang telah memulai melakukan usaha untuk merubah nasib hidupnya. Sumber keinginan dan semangat untuk merubah nasib hidup sebanyak 77% berasal dari diri sendiri termasuk keinginan untuk menabung yang masih dalam angan-angan responden (79%). Namun ironisnya sebanyak 95% responden tidak pernah mempunyai angan-angan untuk menabung jika mempunyai penghasilan lebih.

Tabel 60. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Pidie

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	18	22
	- Kurang percaya	14	18
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	48	60
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	19	24
	- Ada sedikit tapi belum memulai	48	60
	- Ada dan sudah memulai	13	16
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	18	23
	- Dari dalam diri sendiri	62	77
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	8	10
	- Ada, tapi belum memulai	63	79
	- Ada dan sudah mulai	9	11
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	76	95
	- Pernah, tapi baru memulai	4	5
	- Pernah dan sudah mulai	0	0
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Hampir setengah masyarakat percaya bahwa kemiskinan adalah nasib. Hal tersebut tidak baik karena akan mendorong masyarakat menjadi pasif dan kurang mau berupaya kuat. Hal tersebut tampak dengan hanya sedikit masyarakat yang kemudian punya keinginan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dorongan yang besar dari berbagai tokoh dan pemerintah penting guna meningkatkan semangat untuk keluar dari kemiskinan.

3.16. Profil Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, merupakan permasalahan alam yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, hal ini disebabkan karena hulu sungai seperti sungai Krueng Kala yang daerah penyangganya berada diluar kewenangan Pemkab Pidie Jaya, melainkan dibawah kewenangan Pemkab Pidie. Kondisi rawan bencana ini diperparah oleh akibat perilaku masyarakatnya yang masih membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai serta masih maraknya terjadi penebangan pohon di kawasan penyangga sungai.

Ilustrasi secara geografis dan terkait dengan kondisi alam di Kabupaten Pidie Jaya, maka terdapat beberapa asumsi seperti halnya perilaku masyarakat, ketersediaan air bagi kebutuhan kehidupan dan terkait sektor pertanian yang berkorelasi dengan perekonomian masyarakat, serta indikasinya terhadap kemiskinan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Kegiatan survei lapangan dalam rangka Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Aceh, yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu dengan berkoordinasi bersama Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dan perangkat pemerintahan yang terkait. Dalam hal ini pelaksanaan survei dilakukan pada 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Tringgadeng Pante Raja. Jumlah sampel yang telah ditentukan sebanyak 80 sampel dari 4 desa. Berikut desa-desa yang dipilih di Kecamatan Meureudu adalah Desa Kudrang dan Desa Pulo U yang merupakan daerah pertanian dan juga merupakan lumbung padi Kabupaten Pidie Jaya. Sementara di Kecamatan Tringgadeng, dua desa yang terpilih sebagai sampel survei yaitu Desa Meue dan Desa Keude Tringgadeng yang merupakan daerah pesisir (desa Nelayan) dengan mata pencaharian utama penduduknya sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil survey di dua kecamatan diperoleh gambaran secara umum bahwa rata-rata penduduk miskin berusia 52 tahun. Pendapatan rata-rata perbulan penduduk hanya sekitar Rp 861.000 dengan jumlah keluarga rata-rata empat orang, hal ini bermakna konsumsi perorang perbulan sekitar Rp 200.000 perbulan. Tingkat pendidikan masyarakat juga masih rendah, sebagian besar hanya menamatkan SD dan bahkan sekitar 23% penduduk di dua kecamatan yang disurvei tidak memperoleh layanan pendidikan. Pekerjaan yang dimiliki di sektor non formal (jasa: tukang, buruh tani, penarik becak, pedagang kios, buruh cuci) dan mereka berasal dari keluarga miskin. Sebagian penduduk miskin berada pada masa produktif (kisaran umur 30 sampai dengan 50 tahun) terutama pada desa Keude Tringgadeng dan sebagian lainnya telah memasuki usia senja. Dari data yang diperoleh juga (Tabel 61) terlihat bahwa 35 responden dari keluarga miskin adalah janda (beberapa responden adalah korban konflik).

Tabel 61. Profil Responden di Kabupaten Pidie Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	52,98 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 861.875	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	45	56
	- Perempuan	35	44
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	18	23
	- SD	33	41
	- SMP	9	11
	- SMA	20	25
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	46	58
	- Belum Menikah	0	0
	- Janda/Duda	34	42
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Buruh Cuci	6	7
	- Petani/buruh tani	30	37
	- Nelayan	15	19
	- Tukang	3	5
	- Pedagang Kecil	13	16
	- Buruh Rumah Tangga	4	5
	- Lain-lain	9	11
	- Tidak Bekerja	-	-
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.16.1. Kemiskinan Alamiah

Masyarakat miskin di dua kecamatan lokasi survey, sebagian besar telah memiliki rumah meskipun hampir 85% kondisi rumah terbuat dari bambu/ pelepah rumbia atau kayu berkualitas rendah. Penduduk miskin hampir seluruhnya mengkonsumsi air sumur yang tidak terlindungi atau bersumber dari air hujan dan sungai. Di lihat dari sisi sanitasi, 65% dari penduduk miskin masih menggunakan fasilitas WC umum dan hanya sekitar 35% saja yang menggunakan fasilitas WC sendiri. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk memiliki akses yang mudah untuk menuju ke sentra perdagangan karena hampir seluruh penduduk miskin tinggal tidak jauh dari akses jalan raya yang merupakan faktor pendukung terhadap siklus perputaran ekonomi yang lebih baik.

Tabel 62. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Pidie Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	9	11
	- Sewa	4	5
	- Milik Sendiri	66	83
	- Lainnya	1	1
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah	58	73
	- Tembok/kayu berkualitas tinggi	22	27
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur atau mata air tak terlindung/sungai/air hujan	79	98
	- Air kemasan/ledeng/pompa/sumur atau mata air terlindung	1	2
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	52	65
	- Sendiri	28	35
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	39	49
	- 500 – 1 km	39	49
	- > 1 km	2	2
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.16.2. Kemiskinan Struktural

Berdasarkan hasil survei yang ditampilkan pada tabel berikut, penduduk miskin di dua kecamatan memiliki partisipasi yang relative terbatas. Hanya 30% dari total responden menyatakan selalu diundang dalam rapat program bantuan ekonomi desa. Hal ini tidak jauh berbeda dengan partisipasi masyarakat miskin yang rendah dalam rapat perencanaan pembangunan desa. Salah satu isu yang mendasar dalam konteks kemiskinan struktural adalah keterlibatan yang masih rendah dalam proses pengambilan keputusan di desa.

Sistem distribusi program bantuan pemerintah hampir sebagian besar didasarkan pada hasil musyawarah meskipun masih terdapat diskriminasi dalam proses penyaluran bantuan. Tingkat transparansi masih rendah, bahkan hampir 40% responden menilai pertanggung jawaban pimpinan desa tidak pernah dilakukan. Frekuensi bantuan yang tidak konsisten dan tidak berkelanjutan juga menjadi isu lain dalam hal kemiskinan struktural di Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 63. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Pidie Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	28	35
	- Kadang-kadang	28	35
	- Selalu	24	30
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	34	43
	- Kadang-kadang	16	20
	- Selalu	30	37
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	10	12
	- Kadang-kadang	29	37
	- Selalu	41	51
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	15	18
	- Kadang-kadang	32	40
	- Selalu	33	42
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	21	26
	- Beberapa elit di desa	8	10
	- Musyawarah	51	64
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	37	46
	- Kadang-kadang	21	26
	- Tidak ada	22	28
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	30	38
	- Ada, tapi kurang transparan	18	22
	- Ada transparan	32	40
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	8	10
	- Kadang-kadang	64	80
	- Selalu	8	10
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.16.3. Kemiskinan Kultural

Dari segi harapan untuk merubah nasib menjadi lebih baik, beberapa responden sangat pisimis dapat dilakukan, hal ini karena mereka adalah petani penggarap (buruh tani) dan juga buruh nelayan (bukan pemilik boat), sehingga untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi terasa sangat berat. Meskipun demikian, keinginan untuk keluar dari

lingkaran kemiskinan sangat kuat karena secara kultural hampir seluruh responden menyatakan tidak percaya jika kemiskinan adalah nasib yang sulit untuk dirubah. Motivasi mereka untuk merubah keadaan yang miskin juga cukup kuat, 99% dari responden termotivasi untuk merubah dirinya. Bahkan yang menjadi faktor pendorong utama adalah bersumber dari semangat diri sendiri, hanya 29% saja berasal dari dorongan faktor luar. Adanya semangat menabung yang cukup tinggi juga menjadi faktor positif untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tabel 64. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	1	1
	- Kurang percaya	34	43
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	45	56
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	1	1
	- Ada sedikit tapi belum memulai	70	88
	- Ada dan sudah memulai	9	11
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	1	1
	- Keluarga	22	28
	- Dari dalam diri sendiri	57	71
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	1	1
	- Ada, tapi belum memulai	62	78
	- Ada dan sudah mulai	17	21
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	29	36
	- Pernah, tapi baru memulai	42	53
	- Pernah dan sudah mulai	9	11
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.17. Profil Kemiskinan di Kabupaten Bireuen

Pada tahun 1999 Bireun menjadi Kabupaten tersendiri setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten Induk, tepatnya tanggal 12 Oktober 1999, melalui Undang-Undang nomor 48 tahun 1999. Kabupaten Bireun terletak pada jalur Banda Aceh – Medan yang diapit oleh tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara, sehingga menjadikan Bireun sebagai daerah transit yang maju.

Kabupaten Bireun termasuk wilayah agraris. Sebanyak 52,2 persen wilayahnya adalah didominasi oleh sektor pertanian, kondisi itu pula yang membuat 33,05 persen penduduknya bekerja di sektor agraris. Secara geografis wilayah Kabupaten Bireun terletak pada titik koordinat 4°54" - 5°21" Lintang Utara dan 96°20" - 97°21" Bujur Timur. Sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Bireun dibagi menjadi 17 kecamatan, 75 mukim, dan 609 desa atau gampong. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Bireun, di sebelah utara berbatasan

dengan Selat Malaka, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah dan sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya. Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah ±1.901,21 km².

Tinjauan kondisi dan aplikasi kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Bireun dalam rangka Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Aceh, yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama Bappeda Kabupaten Bireun serta perangkat pemerintahan yang terkait, menghasilkan beberapa data kajian sebagai bahan dasar penentu kebijakan dimasa yang akan datang, berikut tampilan perolehan data tersebut:

Tabel 65. Profil Responden di Kabupaten Bireuen

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	49,8 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.190.750	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	65	81
	- Perempuan	15	19
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	11	14
	- SD	20	25
	- SMP	19	24
	- SMA	25	31
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	5	6
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	61	76
	- Belum Menikah	3	4
	- Janda/Duda	16	20
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	35	44
	- Pedagang	7	8
	- Tidak Bekerja	6	8
	- Lain-lain	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.17.1. Kemiskinan Alamiah

Berdasarkan Tabel 66 untuk kemiskinan alamiah/ natural dari 80 responden yang disurvei pada dua kecamatan yaitu Jangka dan Kuala Raja dan empat desa meliputi Pante Ranup, Pante Peusangan, Kuala Raja, Krueng Juli Barat di Kabupaten Bireun usia rata-rata responden 49,5 tahun. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa tingkat usia tersebut termasuk usia produktif. Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah 4 orang dengan pendapatan rata-rata masyarakat miskin Rp.1. 190.750,-

Mayoritas penduduk miskin yang disurvei di daerah Bireun adalah 81 % laki-laki dan dari segi pendidikan sudah terkategori baik hal ini disebabkan karena 31 % SMA, sedangkan yang tidak sekolah sekitar 14 %. Jika ditilik dari segi pendidikan maka potensi kemiskinan

masyarakat di Kabupaten Bireun sangat mungkin untuk dientaskan karena sebagian masyarakatarakt berpendidikan SMP dan SMA. Dari data yang telah diperoleh di indikasikan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi masyarakat memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan terdapat juga yang tidak bekerja sejumlah 8 %. Sedangkan sebesar 76 % masyarakat miskin di Kabupaten Bireun telah menikah dan hanya 4 % yang belum menikah.

Tabel 66. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Bireuen

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	10	13
	- Sewa	6	7
	- Milik Sendiri	64	80
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah	8	10
	- Tembok/kayu berkualitas tinggi	72	90
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur atau mata air tak terlindung/sungai/air hujan	40	50
	- Air kemasan/ledeng/pompa/sumur atau mata air terlindung	40	50
	Jumlah	80	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	1	1
	- Sendiri	79	99
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	10	13
	- 500 – 1 km	21	26
	- > 1 km	49	61
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan Tabel 66 kepemilikan rumah masyarakat miskin di Kabupaten Bireun adalah milik sendiri, hanya 7 % menyewa dan 13 % menumpang pada saudara atau keluarga. Jenis bangunan yang dominan adalah tembok permanen (80 %). Hal ini terjadi disebabkan banyaknya bantuan dari NGO dan pemerintah untuk rehab-rekon rumah pasca tsunami. Penggunaan sumber air bersih masyarakat Bireun sudah bernilai baik, hal ini berdasarkan data masyarakat miskin di Kabupaten Bireun, yaitu sudah 50 % menggunakan air PAM dan selebihnya menggunakan sumur dengan kualitas air yang layak pakai. Untuk fasilitas MCK masyarakat miskin di Bireun sudah sangat baik karena 99 % memiliki WC sendiri. Dilihat dari jarak posisi rumah ke jalan raya tergolong jauh karena 61 % > berjarak 1 km. Akses ke jalan raya sangat menentukan masyarakat miskin mengentaskan kemiskinannya karena akan berkorelasi dengan pasar, sebagai salah satu faktor yang akan menggeliatkan perekonomian masyarakat miskin khususnya dalam menjual hasil dari kegiatan melaut dan bertani.

3.17.2. Kemiskinan Struktural

Berdasarkan Tabel 67 dapat diindikasikan kemiskinan struktural itu terjadi terkait dengan partisipasi masyarakat miskin itu sendiri dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebesar 28% masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan rapat program bantuan ekonomi desa.

Tabel 67. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Bireuen

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	22	28
	- Kadang-kadang	25	31
	- Selalu	33	41
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	27	34
	- Kadang-kadang	21	26
	- Selalu	32	40
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	14	17
	- Kadang-kadang	43	54
	- Selalu	23	29
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	18	22
	- Kadang-kadang	38	48
	- Selalu	24	30
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	9	11
	- Beberapa elit di desa	17	21
	- Musyawarah	54	68
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	20	25
	- Kadang-kadang	40	50
	- Tidak ada	18	23
	- Tidak jawab	2	2
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	9	11
	- Ada, tapi kurang transparan	23	29
	- Ada transparan	43	54
	- Tidak jawab	5	6
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	15	19
	- Kadang-kadang	61	76
	- Selalu	4	5
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Namun demikian sekitar 41% selalu berpartisipasi dan sisanya terkadang hadir dan terkadang juga tidak. Partisipasi masyarakat miskin dalam program perencanaan pembangunan desa termasuk tinggi dan mencapai \pm 40%. Namun masyarakat miskin belum dilibatkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan di desa (38% indikasi keterlibatan), hal ini bisa saja berkorelasi dengan kehadiran rapat di desa juga sepenuhnya tidak di ikuti oleh masyarakat miskin (\pm 54% indikasi kehadiran). Selain itu secara struktural distribusi bantuan dari pemerintah seperti Raskin, JKA dan bentuk bantuan lainnya sudah baik dan 68 % setiap

problema dalam kehidupan bermasyarakat diputuskan dengan bermusyawarah. Meskipun sudah dimusyawarahkan terdapat juga perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi (indikasi keadilan 50%). Bahkan secara tegas 20% responden menjawab dugaan berat adanya perbedaan dalam penyaluran bantuan ekonomi kepada yang berhak.

Selanjutnya berdasarkan survey yang dilakukan pertanggung jawaban aparat desa dalam penyaluran bantuan, 54% responden menjawab sudah dipertanggung jawabkan secara transparan. Hanya 11% responden menjawab tidak dilakukan pertanggung jawaban secara transparan, dan hanya 5% dari masyarakat miskin yang selalu menerima bantuan secara rutin dari pemerintah. Ironisnya dalam hal ini mencapai 19% tidak pernah menerima bantuan dan yang menjawab kadang-kadang menerima bantuan sebesar 76%. Hal tersebut mengartikan frekuensi bantuan untuk masyarakat miskin belum dilakukan secara adil dan berkesinambungan.

3.17.3. Kemiskinan Kultural

Pada tabel berikut ini akan dijelaskan mengenai Kultural kemiskinan yang teraplikasi di daerah Kabupaten Bireun khususnya kawasan target pengambilan sampel dalam rangka Kajian Pengentasan Kemiskinan. Kemiskinan Kultural terjadi di Kabupaten Bireun. Berdasarkan Tabel 68 sebanyak 20% responden percaya dan menjawab kondisi kemiskinan adalah akibat nasib dan sulit dirubah, namun demikian sebanyak 51% menjawab tidak percaya dan harus ada perlawanan untuk merubah nasib menjadi ke arah yang lebih baik.

Tabel 68. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Bireun

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	16	20
	- Kurang percaya	23	29
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	41	51
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	15	19
	- Ada sedikit tapi belum memulai	39	49
	- Ada dan sudah memulai	26	32
	Jumlah	80	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	5	8
	- Keluarga	18	27
	- Dari dalam diri sendiri	42	64
	Jumlah	65	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	16	20
	- Ada, tapi belum memulai	40	50
	- Ada dan sudah mulai	24	30
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	36	45
	- Pernah, tapi baru memulai	28	35
	- Pernah dan sudah mulai	16	20
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Ada keinginan untuk merubah diri dan meninggalkan kemiskinan yang telah memKultural walau masih sedikit dan bahkan belum memulai (indikasi 49%). Sebanyak 32% responden di Kabupaten Bireun sudah mulai merubah diri dan ingin keluar dari kemiskinan. Semangat perubahan itu yang lebih dipicu atau ditimbulkan oleh kesadaran dan keinginan sendiri (64%). Dilihat dari keinginan untuk semangat menabung sebanyak 50% responden memiliki keinginan tapi belum memulai. Sebanyak 20% masyarakat miskin tidak ada keinginan menabung karena memang tidak memiliki penghasilan yang memadai. Namun demikian 20% responden sudah mulai menabung dan 45% tidak pernah serta 35% baru memulai.

3.18. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara terletak di pesisir Timur propinsi Aceh. Berbatasan dengan kabupaten Bireuen di sebelah Barat, dengan selat Malaka di sebelah Utara, dengan kabupaten Aceh Timur di sebelah Timur, dengan kabupaten Bener Meriah di sebelah Selatan. Kabupaten ini memiliki luas daerah sebesar 3.296,86 km² yang tersebar dalam 27 kecamatan dan 852 desa/gampong. Berdasarkan data statistik tahun 2012, kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk sebanyak 541.878 jiwa.

Penelitian di kabupaten ini dilakukan pada empat desa; Meunasah Prie kecamatan Tanah Pasir, Blang Adoe kecamatan Kuta Makmur, Blang cut kecamatan Sawang dan Alue Keurinyai kecamatan Dewantara. Dengan melibatkan 80 responden yang tersebar di seluruh desa tersebut, berikut hasil tabulasi/rangkuman Identitas responden dan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan kepada mereka melalui kuisioner.

Sebanyak 80 responden yang tersebar diseluruh desa yang telah disebutkan di atas memiliki latar pendidikan yang paling dominan sekolah dasar (58%). Responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 23%, SMA sebanyak 10%, dan masih ada responden yang tidak berpendidikan formal dan sebanyak 3 orang berpendidikan sarjana.

Responden pendidikan ini lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 72% dan perempuan sebesar 28% dengan status perkawinan 74% telah menikah, belum menikah sebesar 3% serta berstatus janda/duda sebesar 24%. Secara umum rata-rata usia para responden tersebut adalah 46,9 tahun dan setiap keluarga memiliki 4 orang jumlah tanggungan secara rata-rata. Sebagian besar responden memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga dari bertani (86%). Jenis usaha yang mereka tekuni lainnya adalah buruh harian dan dagang.

Tabel 69. Profil Responden di Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	46,9 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp1.190.750	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	58	72
	- Perempuan	22	28
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	6	8
	- SD	46	58
	- SMP	18	23
	- SMA	8	10
	- Perguruan Tinggi	1	1
	- Lainnya	-	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	59	74
	- Belum Menikah	2	3
	- Janda/Duda	19	24
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Buruh	1	0,94
	- PNS	-	-
	- Guru/Dosen	1	0,94
	- IRT	2	2,81
	- Tidak Bekerja	1	0,94
	- Pedagang	2	1,88
	- Petani	70	86,88
	- Pegawai Swasta/Honor	0	-
	- Pensiunan	0	-
	- Tukang/Wiraswasta	3	3,75
	- Sopir	1	0,94
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.18.1. Kemiskinan Alamiah

Data hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di wilayah Aceh Utara sebahagian besar (91%) tinggal/menetap dirumah milik sendiri. Sebanyak 8% masih menumpang dan hanya 1% menetap dirumah yang mereka sewa. Kondisi rumah yang mereka tempati tersebut sebahagian besar (73%) dengan kualitas bangunan kurang baik yaitu dari bahan bambu/rumbia/kayu, Sementara 27% lainnya sudah tinggal dirumah berjenis tembok/beton, dengan kata lain mereka tinggal dirumah yang layak huni.

Sarana/fasilitas air bersih yang mereka miliki sebahagian besarnya adalah air sumur (89%)

dan selebihnya menggunakan fasilitas air bersih PAM (11%). Selain sarana air bersih untuk kebutuhan kebersihan diri adalah fasilitas WC. Sebagian besar responden memiliki fasilitas WC sendiri yaitu sebesar 59%. Sementara yang masih menggunakan fasilitas WC umum sebanyak 41%. Letak desa tempat lokasi penelitian ini semua jauh dari jalan utama. Dengan demikian jarak rumah responden dengan jalan utama juga lebih dari 1 km. Rincian data kondisi rumah responden disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 70. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	25	8
	- Sewa	5	1
	- Milik Sendiri	290	91
	Jumlah	320	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	233	73
	- Tembok	87	27
	Jumlah	320	100
3.	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	285	89
	- PAM	35	11
	- Keduanya Sumur dan PAM		
	Jumlah	320	100
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	130	41
	- Sendiri	190	59
	Jumlah	320	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	1	0,31
	- 500 – 1 km	0	0
	- > 1 km	319	99,69
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.18.2. Kemiskinan Struktural

Tatanan masyarakat di kabupaten Aceh Utara khususnya di lokasi penelitian ini sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari data keterlibatan masyarakat dalam perencanaan berbagai program bantuan ekonomi. Mereka selalu diundang oleh aparatur desa dalam rapat desa. Dan mereka juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sejenis serta dalam pengambilan keputusan. Pendistribusian bantuan dalam lingkungan desa selalu dilakukan melalui musyawarah, walaupun masih ditemukan perbedaan dalam hal pembagian.

Sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan non pemerintah yang tidak selalu ada telah didistribusikan melalui musyawarah. Dalam pendistribusiannya masih ditemukan perbedaan khususnya untuk bantuan di bidang ekonomi. Disamping itu, responden juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban berbagai program bantuan telah

dilakukan secara transparan, walau masih ditemukan beberapa kegiatan yang tidak dilakukan pertanggungjawab kepada masyarakat.

Tabel 71. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel	Jumlah	%
1	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	1	0,31
	- Kadang-kadang	14	4,38
	- Selalu	305	95,31
	Jumlah	320	100
2	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	1	0,31
	- Kadang-kadang	13	4,06
	- Selalu	306	95,63
	Jumlah	320	100
3	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	0	0
	- Kadang-kadang	136	42,5
	- Selalu	184	57,5
	Jumlah	320	100
4	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	0	
	- Kadang-kadang	4	1,25
	- Selalu	316	98,75
	Jumlah	320	100
5	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	1	0,31
	- Beberapa elit di desa	80	25,00
	- Musyawarah	239	74,69
	Jumlah	320	100
6	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	86	26,88
	- Kadang-kadang	133	41,56
	- Tidak ada	101	31,56
	Jumlah	320	100
7	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	5	1,56
	- Ada, tapi kurang transparan	5	1,56
	- Ada transparan	310	96,88
	Jumlah	320	100
8	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	0	0
	- Kadang-kadang	275	86
	- Selalu	45	14
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah memang tidak sering, namun demikian pertanggungjawaban oleh pihak aparat desa selalu ada dan disampaikan kepada masyarakat. Beberapa respon masyarakat menyatakan masih ada kegiatan yang tidak dipertanggungjawabkan secara transparan. Tabel berikut ini adalah tampilan data yang berhubungan dengan kondisi kemiskinan struktural di kabupaten Aceh Utara.

3.18.3. Kemiskinan Kultural

Keyakinan masyarakat akan perubahan kondisi ekonomi yang sedang mereka alami sangat tinggi. Mereka yakin keinginan yang besar serta usaha yang gigih akan mampu mengangkat mereka dari kemiskinan dan sebahagian dari mereka sudah dan sedang berusaha melakukan usaha tersebut.

Paradigma menabung di masyarakat masih menganut paradigma lama, dimana menabung hanya dilakuka njika ada sisa penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga menabung bagi mereka sebuah hal yang jauh dari keseharian mereka. Bahkan mereka tidak memahami pentingnya menabung bagi kehidupan mereka. Hal ini terlihat dari jawaban mereka yang tidak ingin menabung walaupun memiliki kelebihan dari penghasilannya.

Tabel 72. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara

No.	Variabel	Jumlah	%
1	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	1	0,31
	- Kurang percaya	17	5,31
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	302	94,38
	Jumlah	320	100
2	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	3	1
	- Ada sedikit tapi belum memulai	32	10
	- Ada dan sudah memulai	285	89
	Jumlah	320	100
3	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	35	11
	- Keluarga	7	2
	- Dari dalam diri sendiri	278	87
	Jumlah	320	100
4	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	0	0
	- Ada, tapi belum memulai	248	78
	- Ada dan sudah mulai	72	23
	Jumlah	320	100
5	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	155	48
	- Pernah, tapi baru memulai	73	23
	- Pernah dan sudah mulai	92	29
	Jumlah	320	100

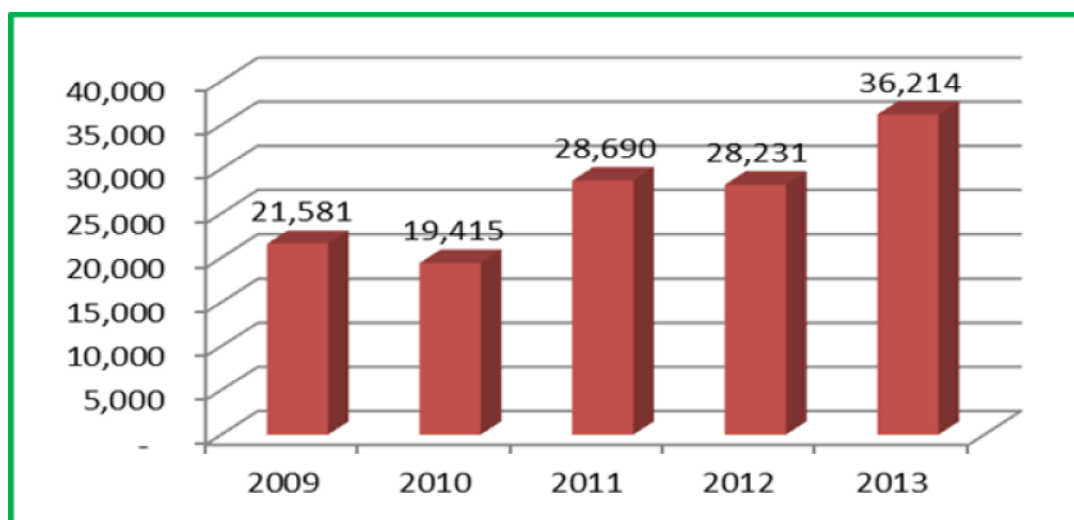
Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.19. Profil Kemiskinan di Kota Lhokseumawe

Sejarah terbentuknya kota Lhokseumawe telah dimulaipada masa penjajahan Belanda, namun secara resmi pembentukan kota Lhokseumawe sebagai sebuah kota madya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, menjadi bukti otentik bahwa KOTIF Lhokseumaw telah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Lhokseumawe yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan yaitu : Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat. Pada tahun 2006 kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan.

Kota Lhokseumawe terletak di pesisir Timur propinsi Aceh. Berbatasan dengan kabupaten Aceh Utara di sebelah di sebelah Barat, Selatan dan Timur, dengan selat Malaka di sebelah Utara. Kota ini memiliki luas daerah sebesar 181,06 km² yang tersebar dalam 4 kecamatan dan 68 desa/gampong. Berdasarkan data statistik tahun 2012, Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 179.807 jiwa.

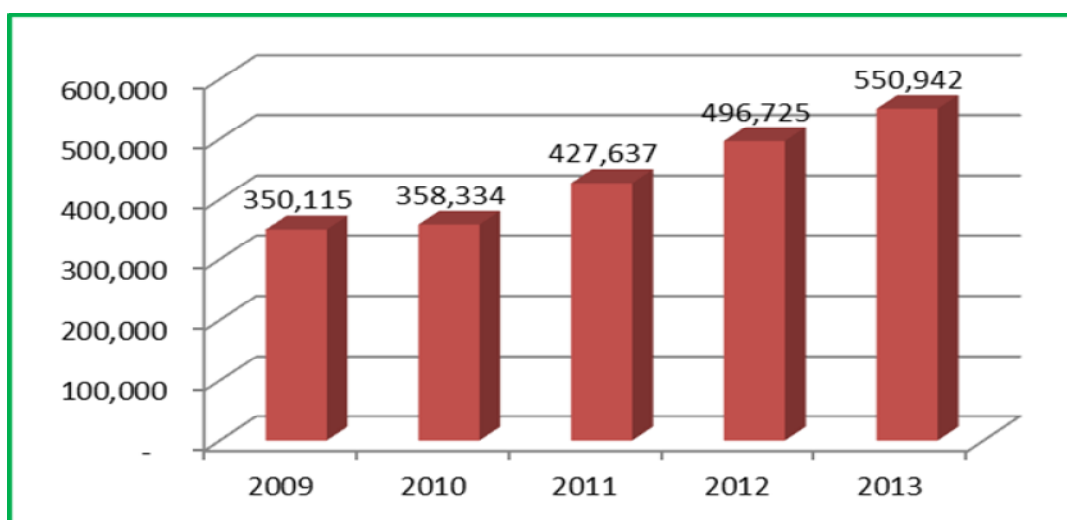
Sumberdaya finansial yang dimiliki oleh semua daerah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pusat-Daerah (DPPD). Maksimalisi penggunaan sumber anggaran tersebut salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut disajikan data PAD, DPPD Kota Lhokseumawe sejak tahun 2009 sampai 2013.



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe (2014)

Gambar 7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe

Sumber daya finansial kota Lhokseumawe terutama dari PAD terlihat terus meningkat sejak tahun 2009, walaupun fluktuasi pada beberapa tahun masih saja terjadi. Pemerintah kota akan terus mengumpulkan dana dari PAD dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Demikian juga halnya dengan sumber dari pemerintah pusat yang digunakan untuk menutupi kebutuhan yang tidak tertanggunglangi oleh PAD. Jumlah dana transfer pusat juga terlihat meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2009.



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe (2014)

Gambar 8. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe

Pengambilan data penelitian di Kota Lhokseumawe dilakukan di 4 (empat) desa yaitu: desa Pusong Baru dan Uteun Bayi yang terletak di kecamatan Banda Sakti. Desa Rayeuk Kareung, kecamatan Blang Mangat serta desa Cot Trieng kecamatan Muara Satu. Dengan melibatkan 320 responden yang tersebar di seluruh desa tersebut, berikut hasil tabulasi/rangkuman Identitas responden dan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan kepada mereka melalui kuisioner.

Keseluruhan responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 320 orang terdiri dari 257 berjenis kelamin laki-laki dan 63 perempuan. Rata-rata usia mereka adalah 43,5 tahun. Mereka memiliki tingkat pendidikan tertinggi pada Sekolah Menengah Atas (32%), bahkan masih ada responden yang tidak memiliki pendidikan formal sebanyak 24 orang (8%). Sebagian besar responden telah menikah (89%) dan 11% berstatus Janda/Duda. Mereka secara rata-rata memiliki 4 (empat) orang anggota keluarga dalam rumah.

Untuk menghidupi anggota keluarga, para kepala keluarga dari kelompok responden memiliki berbagai jenis mata pencaharian dan yang paling dominan adalah bertani sebanyak 118 orang (37%) dan nelayan sebanyak 56 orang (18%) serta buruh serabutan sebanyak 39 orang (12%). Dengan mata pencaharian tersebut mereka memiliki rata-rata pendapatan per bulannya sebesar Rp1.182.053 yang mereka gunakan untuk memnuhi kebutuhan keluarga mereka. Secara rinci profil responden di Kota Lhokseumawe disajikan pada Tabel 73.

Tabel 73. Profil Responden di Kota Lhokseumawe

No.	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	43,5 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	1 182 053	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	257	80
	- Perempuan	63	20
	Jumlah	320	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	24	8
	- SD	97	30
	- SMP	97	30
	- SMA	102	32
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	320	100
6.	Status		
	- Menikah	284	89
	- Belum Menikah	1	0
	- Janda/Duda	35	11
	Jumlah	320	100
7.	Pekerjaan		
	- Buruh	39	12
	- Nelayan	56	18
	- IRT	20	6
	- Tidak Bekerja	12	4
	- Pedagang	24	8
	- Petani	118	37
	- Tukang bangunan	10	3
	- Jasa Transportasi	24	8
	- Jasa Lainnya	5	2
	- Lainnya	12	4
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.19.1. Kemiskinan Alamiah

Data hasil survey ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di wilayah kota Lhokseumawe sebanyak 75% telah memiliki rumah sendiri sementara 17% masih menyewa dan 8% lainnya menumpang pada rumah saudara atau rumah orang lain. Namun demikian 94% dari rumah yang ditempati oleh para responden adalah rumah dengan jenis bangunan BUKAN tembok atau dari bahan bambu, pelepah rumbiah atau kayu dengan kualitas rendah, dan hanya 6% yang menempati rumah dengan jenis bangunan beton/tembok atau kayu dengan kualitas baik.

Tabel 74. Kondisi Rumah Responden di Kota Lhokseumawe

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	25	8
	- Sewa	54	17
	- Milik Sendiri	241	75
	Jumlah	320	100
2.	- Jenis Bangunan		
	- Bambu	300	94
	- Tembok	20	6
	Jumlah	320	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	164	51
	- PAM	156	49
	- Keduanya Sumur dan PAM	-	-
	Jumlah	320	100
4.	- Fasilitas WC		
	- Umum	154	48
	- Sendiri	166	52
	Jumlah	320	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	8	2,50
	- 500 – 1 km	2	0,63
	- > 1 km	310	96,88
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sarana/fasilitas air bersih yang mereka miliki sebahagian besarnya adalah air sumur (51%) dan selebihnya menggunakan fasilitas air bersih PAM (49%). Selain sarana air bersih, fasilitas WC yang tersedia di lokasi mereka tinggal juga masih banyak yang menggunakan fasilitas WC umum (48%), namun demikian jumlah responden yang menggunakan WC sendiri juga tidak jauh berbeda dengan pengguna fasilitas umum tersebut (52%). Letak rumah para responden dengan jalan besar sebahagian besar berjarak diatas 1 km (96%), hanya 2 rumah responden yang memiliki jarak tempuh daru rumah mereka ke jalan besar antara 0,5 – 1 km. Untuk lebih rinci hasil tabulasi data responden disajikan pada tabel berikut ini.

3.19.2. Kemiskinan Struktural

Keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program ekonomi ditingkat desa masih belum dilibatkan secara penuh. Namun demikian dapat dikategorikan penglibatan masyarakat dalam perencanaan dan sosialisasi informasi masih dalam kategori sedang, dikarenakan masih ditemukan masyarakat yang tidak diundang walaupun jumlahnya tidak teralalu besar. Penglibatan mereka dalam pengambilan keputusan juga telah dilakukan dengan baik. Hanya sebahagian kecil responden menjawab tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di desa mereka.

Sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan non pemerintah yang tidak selalu ada telah didistribusikan melalui musyawarah. Dalam pendistribusiannya masih ditemukan perbedaan khususnya untuk bantuan di bidang ekonomi. Disamping itu, responden juga menyatakan bahwa pertanggungjawaban berbagai program bantuan telah dilakukan secara transparan, walau masih ditemukan beberapa kegiatan yang tidak dilakukan pertanggungjawab kepada masyarakat.

Tabel 75. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Lhokseumawe

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	102	32
	- Kadang-kadang	115	36
	- Selalu	103	32
	Jumlah	320	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	93	29
	- Kadang-kadang	126	39
	- Selalu	101	32
	Jumlah	320	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	30	9
	- Kadang-kadang	180	56
	- Selalu	110	34
	Jumlah	320	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di		
	- Tidak pernah	73	23
	- Kadang-kadang	147	46
	- Selalu	100	31
	Jumlah	320	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	53	17
	- Beberapa elit di desa	61	19
	- Musyawarah	206	64
	Jumlah	320	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	165	52
	- Kadang-kadang	118	37
	- Tidak ada	37	12
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	320	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara		
	- Tidak pernah	86	27
	- Ada, tapi kurang transparan	126	39
	- Ada transparan	108	34
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	320	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	105	33
	- Kadang-kadang	189	59
	- Selalu	26	8
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.19.3. Kemiskinan Kultural

Masyarakat merasa sangat yakin bahwa kemiskinan yang sedang mereka hadapi dapat berubah walaupun membutuhkan kerja keras dan usaha. Namun demikian masih ditemukan sebahagian kecil responden (8%) yang tidak memiliki keinginan atau semangat untuk melakukan tindakan merubah kondisi ekonomi yang sedang mereka jalani saat ini. Sebahagian besar lainnya menyatakan memiliki keinginan dan semangat untuk berubah berasal dari diri mereka sendiri disamping keluarga dan pribadi yang mereka anggap sebagai tokoh.

Upaya melakukan perubahan status ekonomi seseorang, faktor kebiasaan menabung menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Responden penelitian ini juga menyatakan keinginan mereka untuk menabung namun belum memulainya (69%), dan 25% menyatakan sudah memulai kegiatan menabung. Sementara 8% menyatakan tidak punya keinginan untuk menabung dikarenakan berbagai alasan salah satunya adalah tidak punya uang lebih untuk ditabung. Alasan tersebut sebenarnya tidak tepat dan hanya alasan yang dicari-cari, yang lebih tepat adalah mereka belum memiliki keinginan untuk menabung dan memiliki pola hidup yang konsumtif.

Tabel 76. Kultural Kemiskinan di Kota Lhokseumawe

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	20	6
	- Kurang percaya	194	61
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	106	33
	Jumlah	320	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	27	8
	- Ada sedikit tapi belum memulai	143	45
	- Ada dan sudah memulai	150	47
	Jumlah	320	100
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	20	6
	- Keluarga	105	33
	- Dari dalam diri sendiri	195	61
	Jumlah	320	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	27	8
	- Ada, tapi belum memulai	214	67
	- Ada dan sudah mulai	79	25
	Jumlah	320	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	34	11
	- Pernah, tapi baru memulai	231	72
	- Pernah dan sudah mulai	55	17
	Jumlah	320	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.20. Profil Kemiskinan di Kota Langsa

Dinamika kemiskinan Kota Langsa menjadi presenden tersendiri di Provinsi Aceh, khususnya bagi pemerintah dan terkait kehidupan sosial masyarakatnya. Dalam hal ini dapat di ulas data hasil survey lapangan yang telah diperoleh dari responden dalam rangka Kajian Pengentasan Kemiskinan Aceh.

Angka kemiskinan di Kota Langsa lebih tinggi bila dibandingkan angka penduduk miskin di Provinsi Aceh, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, angka kemiskinan di Kota Langsa tercatat sebesar 16,25 persen. Angka ini pada tahun 2008 naik signifikan menjadi 17,97 persen walaupun lebih tinggi dari rata-rata nasional (15,42%) dan lebih rendah dari rata-rata Aceh (23,55%), dan perlahan-lahan turun menjadi 13,97 persen pada tahun 2013 (TNP2K, 2013). Kenaikan angka kemiskinan Kota Langsa tahun 2008 diakibatkan Berbagai kemungkinan, seperti dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa. Upaya pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam RPJM Kota Langsa adalah jangka menengah ke depan, kebijakan dan implementasi pembangunan yang *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* yang akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat.

Pencapaian penanggulangan angka kemiskinan di Kota Langsa tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program pembangunan yang pro-rakyat miskin. Bappeda Kota Langsa menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) dalam upaya penanggulangan kemiskinan memberikan perhatian khusus melalui program kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti mengembangkan usaha mikro dan kecil, adanya bantuan bergulir, dan dana hibah. Selain itu, Pemko juga memanfaatkan Baitul Mal Kota Langsa untuk menyalurkan zakat dalam berbagai bentuk yang mampu menambah pendapatan sekaligus memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin. Selain itu terdapat program dari Kementerian Sosial yaitu Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) melalui penyaluran bantuan keluarga miskin yang dikhususkan kepada anak usia sekolah dasar. Untuk merencanakan dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Langsa yang dipimpin Wakil Walikota dan Ketua Bappeda membentuk pokja dengan dinas dinas lainnya melakukan rapat untuk membahas perencanaan dan kegiatan.

Hasil survei yang dilakukan di Kota Langsa menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di Kota Langsa adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di Kota Langsa adalah warga biasa (100 persen). Pendidikan responden mayoritas tamat SD, kemudian SMP dan SMA. tercatat hanya SLTA ke bawah. Usia rata-rata responden adalah 49,8 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 orang. Jenis mata pencaharian terbesar adalah sektor jasa seperti tukang, becak, pembantu, sopir, kernet (40 persen), buruh (35 persen), pedagang (12,5 persen), dan nelayan (8 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 77. Profil Responden di Kota Langsa

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	49,8 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp 1.279.747	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	77	3
	- Perempuan	77	3
	Jumlah	80	100
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	3	4
	- SD	37	46
	- SMP	22	28
	- SMA	18	23
	- Perguruan Tinggi	0	0
	- Lainnya	0	0
	Jumlah	80	100
6.	Status		
	- Menikah	74	94
	- Belum Menikah	1	1
	- Janda/Duda	4	5
	Jumlah	80	100
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	8	10
	- Pedagang	10	12,5
	- Buruh	28	35
	- Petani	2	2,5
	- Lain-lain/Jasa	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

3.20.1. Kemiskinan Alamiah

Mayoritas responden tinggal di rumah sendiri dan seluruhnya sudah dialiri listrik PLN. Penyediaan air bersih responden menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagiannya lagi sudah menggunakan air PAM. Sebagian besar rumah responden memiliki tembok kayu, hanya sedikit yang masih menggunakan bahan tembok semen dan hampir seluruhnya memiliki fasilitas WC sendiri. Mayoritas responden (50 persen) memiliki jarak rumah lebih dari 1 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 78.

Keluarga miskin di Kota Langsa mayoritas (89 persen) merupakan warga asli. Hasil survei menunjukkan ada 71 responden yang bukan merupakan warga Langsa, dalam hal ini mereka sudah turun temurun tinggal di Langsa walaupun datang dari kampung lainnya. Sebagian kecil (11 persen) merupakan warga pendatang, dari Jawa, Aceh Utara dan Sumatra Utara. Ada juga sebagian yang datang dengan alasan pernikahan, pindah karena konflik di masa lalu.

Tabel 78. Kondisi Rumah Responden di Kota Langsa

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	10	13
	- Sewa	6	7
	- Milik Sendiri	64	80
	Jumlah	80	100
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	53	66
	- Tembok	27	34
	Jumlah	80	100
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	59	74
	- PAM	21	26
	- Keduanya Sumur dan PAM	0	
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	32	40
	- Sendiri	48	60
	Jumlah	80	100
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	34	43
	- 500 – 1 km	6	7
	- > 1 km	40	50
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Mayoritas responden (40 persen) mengaku memiliki mata pencaharian utama dalam sektor jasa. Sektor jasa ini antara lain sebagai tukang, becak, pembantu, sopir, kernet, Urutan kedua mata pencaharian adalah buruh (35 persen), umumnya untuk kecamatan dengan areal pertanian mata pencaharian merupakan buruh tani, di perkotaan maka pekerjaan merupakan buruh angkut dan buruh pertukangan. Responden yang mewakili daerah pesisir yang bekerja sebagai nelayan dan petani tambak tergolong kecil, hanya 8 orang (10 persen), sisanya penduduk pesisir ini bermata pencaharian buruh dan jasa. Ketidakmampuan dalam kepemilikan SDA dan peralatan tangkap bagi masyarakat pertanian dan pesisir menjadi permasalahan bagi keluarga miskin di daerah tersebut.

Responden umumnya tidak memiliki keterampilan lain untuk dapat dijadikan alternatif penghasilan bagi keluarga, demikian pula keterampilan anggota keluarga lainnya. Hanya ada 2 orang responden yang mengaku memiliki keterampilan di bidang kekhususan yang bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, yakni masing-masing memasak dan pertukangan 1 orang. Minimnya keterampilan ini sejalan dengan alasan yang diakui responden dalam pilihan pekerjaannya. Sebagian besar responden mengaku menekuni pekerjaan saat ini karena alasan tidak ada pekerjaan lain (88 persen), tidak ada keterampilan lain (5 persen), pekerjaan turun-temurun (3 persen), dan sisanya karena alasan lainnya (5 persen).

3.20.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Langsa. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (48 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah.

Tabel 79. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kota Langsa

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	60	75
	- Kadang-kadang	18	23
	- Selalu	2	2
	Jumlah	80	100
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	21	34
	- Kadang-kadang	58	26
	- Selalu	1	40
	Jumlah	80	100
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	80	100
	- Kadang-kadang	0	0
	- Selalu	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	19	24
	- Kadang-kadang	61	76
	- Selalu	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	26	32
	- Beberapa elit di desa	16	20
	- Musyawarah	38	48
	Jumlah	80	100
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	28	35
	- Kadang-kadang	26	32,5
	- Tidak ada	26	32,5
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	8	10
	- Ada, tapi kurang transparan	27	34
	- Ada transparan	45	56
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	30	37,5
	- Kadang-kadang	34	42,5
	- Selalu	16	20
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Mayoritas responden mengaku tidak terlibat dalam rapat program bantuan ekonomi desa (60 persen). Demikian halnya dalam rapat perencanaan pembangunan desa mereka (58 persen) kadang-kadang hadir. Selain itu, 45 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban yang transparan dalam distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 79 di atas. Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun terdapat sedikit perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (50 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Ada 25 persen responden yang menjawab dengan spontan ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat perbedaan hanya 23 persen.

3.20.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survei juga menunjukkan terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Langsa. Mayoritas (38 persen) responden kurang percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, ada 31 persen yang percaya. Namun ada 31 persen responden yang percaya bahwa kemiskinan adalah nasib yang sulit dirubah.

Tabel 80. Kultural Kemiskinan di Kota Langsa

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	25	31
	- Kurang percaya	30	38
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	25	31
	Jumlah	80	100
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	6	7,5
	- Ada sedikit tapi belum memulai	72	90
	- Ada dan sudah memulai	2	2
	Jumlah	80	99,5
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	0	0
	- Keluarga	9	11
	- Dari dalam diri sendiri	71	89
	Jumlah	80	100
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	19	23
	- Ada, tapi belum memulai	59	74
	- Ada dan sudah mulai	2	3
	Jumlah	80	100
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	60	75
	- Pernah, tapi baru memulai	16	20
	- Pernah dan sudah mulai	4	5
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sebagian besar responden (90 persen) memiliki sedikit keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Hanya terdapat ada 2 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya. Sisanya sebesar 7,5 persen mengaku pasrah dan tidak memiliki

keinginan. Walaupun memiliki sedikit keinginan untuk merubah hidup, umumnya responden memiliki keinginan dari dalam diri sendiri (89 persen) untuk berubah dan dari keluarga (11 persen), namun tidak ada dorongan dari tokoh rujukan. Kondisi ini sejalan dengan upaya menabung, dimana hanya 3 persen responden yang sudah mulai menabung, dan 74 persen memiliki keinginan namun belum memulainya. Sisanya sebesar 23 persen tidak memiliki keinginan sama sekali. Berdasarkan Tabel 80 menunjukkan bahwa dorongan responden untuk konsumsi relatif tinggi dibandingkan untuk menabung. Ketika ditanya jika memiliki penghasilan lebih, jumlah responden yang ingin menabung justru bertambah kecil. Jumlah responden yang tidak pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih meningkat menjadi 75 persen. Disisi lain responden yang sudah mulai menabung sangat kecil dari seluruh sampel hanya 5 persen saja.

3.21. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

Angka kemiskinan di Kabuapten Aceh Timur lebih tinggi bila dibandingkan angka penduduk miskin di Provinsi Aceh, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur tercatat sebesar 22,89 persen. Angka ini pada tahun 2011 turun signifikn menjadi 16,59 persen walaupun lebih tinggi dari rata-rata nasional (15,42%) dan lebih rendah dari rata-rata Aceh (17,60%).

Tabel 81. Profil Responden di Kabupaten Aceh Timur

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	47,27 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp. 1.145.000	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	53	66,25
	- Perempuan	27	33,75
	Jumlah	80	100,00
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	18	22,50
	- SD	36	45,00
	- SMP	13	16,25
	- SMA	11	13,75
	- Perguruan Tinggi	1	1,25
	- Lainnya	1	1,25
	Jumlah	80	100,00
6.	Status		
	- Menikah	62	77,50
	- Belum Menikah	0	-
	- Janda/Duda	18	22,50
	Jumlah	80	100,00
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	36	45,00
	- Petani	37	46,25
	- Buruh	7	8,75
	- Lain-lain	-	-
	Jumlah	80	100,00

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Upaya pengurangan angka kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam RPJM Kabupaten Aceh Timur adalah jangka menengah ke depan, kebijakan dan implementasi pembangunan yang *pro growth*, *pro job* dan *pro-poor* yang akan sangat bermanfaat dan memberikan efek pengganda bagi kesinambungan pendapatan masyarakat. Profil responden di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada Tabel 81.

Pencapaian penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur tidak terlepas dari adanya kebijakan dan program pembangunan yang pro-rakyat miskin. Bappeda Kabupaten Aceh Timur menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan memberikan perhatian khusus melalui program kegiatan pemberdayaan ekonomi, seperti mengembangkan usaha mikro dan kecil, adanya bantuan bergulir, dan dana hibah. Selain itu, Pemkab juga memanfaatkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk menyalurkan zakat dalam berbagai bentuk yang mampu menambah pendapatan sekaligus memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin. Selain itu terdapat program dari Kementerian Sosial yaitu Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) melalui penyaluran bantuan keluarga miskin yang dikhususkan kepada anak usia sekolah dasar. Untuk merencanakan dan mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin Wakil Bupati dan Ketua Bappeda membentuk pokja dengan dinas dinas lainnya melakukan rapat untuk membahas perencanaan dan kegiatan.

Hasil survei yang dilakukan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa secara finansial dan non-finansial, masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur adalah lemah. Mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur adalah warga biasa (100 persen). Pendidikan responden mayoritas tamat SD dan tidak sekolah, kemudian SMP dan SMA. Usia rata-rata responden adalah 47,27 tahun dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 4 orang. Jenis mata pencaharian terbesar adalah sector pertanian (petani dan nelayan).

3.21.1. Kemiskinan Alamiah

Responden di Kabupaten Aceh Timur mayoritas masyarakatnya memiliki rumah sendiri. Kondisi rumah responden di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada Tabel 82.

Tabel 82. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Timur

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	13	16,25
	- Sewa	4	5,00
	- Milik Sendiri	63	78,75
	Jumlah	80	100,00
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	68	85,00
	- Tembok	12	15,00
	Jumlah	80	100,00
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	66	82,50
	- PAM	14	17,50
	- Keduanya Sumur dan PAM		
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	44	55,00
	- Sendiri	36	45,00
	Jumlah	80	100,00
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	9	11,25
	- 500 – 1 km	6	7,50
	- > 1 km	65	81,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel 82 memperlihatkan bahwa akses masyarakat miskin ke jalan besar relative cukup jauh. Kondisi ini dapat berdampak padadua sisi yaitu sisi input dan output. Dari sisi input akan berdampak pada tingginya biaya usahatani yang mereka harus keluarkan dan dari sisi output, penerimaan yang mereka terima dari hasil usahatani menjadi lebih rendah.

3.21.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Langsa. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (48 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah.

Meskipun hanya sebagian kecil saja responden mengaku tidak terlibat dalam rapat program bantuan ekonomi desa (30 persen). Demikian halnya dalam rapat perencanaan pembangunan desa mereka (26,25 persen) kadang-kadang hadir. Tetapi sebagian besar responden mengatakan bahwa pertanggungjawaban yang transparan dalam distribusi bantuan yang dilakukan dengan cara kurang transparan.

Tabel 83. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Timur

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	24	30,00
	- Kadang-kadang	15	18,75
	- Selalu	41	51,25
	Jumlah	80	100,00
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	21	26,25
	- Kadang-kadang	18	22,50
	- Selalu	41	51,25
	Jumlah	80	100,00
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	15	18,50
	- Kadang-kadang	26	32,75
	- Selalu	39	48,50
	Jumlah	80	100,00
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	15	18,50
	- Kadang-kadang	26	32,75
	- Selalu	39	48,50
	Jumlah	80	100,00
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	11	13,75
	- Beberapa elit di desa	14	17,50
	- Musyawarah	55	68,75
	Jumlah	80	100,00
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	30	37,50
	- Kadang-kadang	18	22,50
	- Tidak ada	12	40,00
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100,00
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	17	21,25
	- Ada, tapi kurang transparan	16	20,00
	- Ada transparan	47	58,75
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100,00
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	26	32,50
	- Kadang-kadang	41	51,25
	- Selalu	13	16,25
	Jumlah	80	100,00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun sesungguhnya kemiskinan structural ini terjadi dengan sangat “rapi”.di tambah lagi dengan sebagai besar responden mengatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pendistribusian bantuan. Sebagian responden (50 persen) mengaku kadang-kadang ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Ada 25 persen responden yang menjawab dengan spontan ada perbedaan dalam distribusi bantuan. Sedangkan yang menjawab tidak terdapat perbedaan hanya 23 persen.

3.21.3. Kemiskinan Kultural

Hasil survei juga menunjukkan terdapat indikasi masalah Kultural terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Mayoritas (61,25 persen) responden kurang percaya bahwa kondisi kemiskinan merupakan nasib yang sulit untuk dirubah, namun harus ada usaha untuk merubahnya. Sementara itu, hanya sebagian kecil saja (16,25 persen) yang mengatakan bahwa kemiskinan ini adalah sesuatu yang sulit dirubah.

Tabel 84. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	13	16,25
	- Kurang percaya	18	22,50
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	49	61,25
	Jumlah	80	100.00
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	6	7,50
	- Ada sedikit tapi belum memulai	42	52,50
	- Ada dan sudah memulai	32	40,00
	Jumlah	80	100.00
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	6	7,50
	- Keluarga	16	20,00
	- Dari dalam diri sendiri	58	72,50
	Jumlah	80	100.00
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	10	12,50
	- Ada, tapi belum memulai	58	72,50
	- Ada dan sudah mulai	12	15,00
	Jumlah	80	100.00
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	37	46,25
	- Pernah, tapi baru memulai	29	36,25
	- Pernah dan sudah mulai	14	17,50
	Jumlah	80	100.00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sebagian besar responden (52,50 persen) memiliki keinginan untuk merubah diri namun belum memulainya. Hanya terdapat ada 40 persen responden yang memiliki keinginan dan sudah memulainya, walaupun proses dan pencapaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sisanya sebesar 7,5 persen mengaku pasrah dan tidak memiliki keinginan. Walaupun memiliki sedikit keinginan untuk merubah hidup, secara umum responden memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk merubah/ memperbaiki kondisi hidup yang ada selama ini. Tetapi Kondisi ini, baru dalam tahap “keinginan”, sementara untuk

menjalankannya masih perlu dorongan dan fasilitas dari eksternal (pemerintah). Berdasarkan Tabel 84 menunjukkan bahwa dorongan responden untuk konsumsi relatif tinggi dibandingkan untuk menabung. Hal ini dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi mereka baru dalam tahap untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarganya.

3.22. Profil Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang

Karakteristik penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang bila ditinjau dari kewilayahan dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu penduduk perdesaan dan penduduk perkotaan. Mata pencaharian kepala keluarga penduduk miskin di perdesaan umumnya adalah perkebunan, pertanian tanaman padi dan palawija serta perikanan tangkap sedangkan mata pencarian penduduk miskin di perkotaan mayoritas adalah di bidang transportasi, perdagangan serta tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Tabel 85. Profil Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Usia rata-rata	46,09 Tahun	
2.	Jumlah rata-rata anggota keluarga di rumah	4 orang	
3.	Pendapatan rata-rata per bulan	Rp. 1.130.000	
4.	Jenis Kelamin		
	- Laki-laki	61	76.25
	- Perempuan	19	23.25
	Jumlah	80	100.00
5.	Pendidikan		
	- Tidak Sekolah	11	13.75
	- SD	44	55.00
	- SMP	14	17.50
	- SMA	8	10.00
	- Perguruan Tinggi	2	2.50
	- Lainnya	1	1.25
	Jumlah	80	100.00
6.	Status		
	- Menikah	75	93.75
	- Belum Menikah	0	-
	- Janda/Duda	5	6.25
	Jumlah	80	100.00
7.	Pekerjaan		
	- Nelayan	34	42.50
	- Petani	40	50.00
	- Buruh	6	7.50
	- Lain-lain	-	-
	Jumlah	80	100.00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Permasalahan kemiskinan di perdesaan disebabkan oleh akses sarana dan prasarana transportasi yang masih minim sehingga hasil perkebunan dan pertanian masyarakat yang ada dipedesaan sulit untuk diangkut keluar untuk dipasarkan sedangkan permasalahan di perkotaan adalah masih minimnya lapangan pekerjaan, modal serta keterampilan kepala keluarga sehingga menyulitkan mereka untuk memiliki pekerjaan tetap.

Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu kawasan padat penduduk dan kawasan yang tidak padat penduduk.

Kepadatan penduduk sering menimbulkan berbagai macam permasalahan kemiskinan oleh karena keterbatasan akses yang dimiliki oleh masyarakat disebabkan daya dukung lingkungan sudah tidak bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Tabel 85 di atas memperlihatkan bahwa, rata-rata responden pada usia produktif. Tetapi sayangnya, kurang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai (lebih dari 60 % hanya berpendidikan SD). Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada cara berpikir dan pekerjaan yang ditekuni. Sehingga alternative pekerjaan menjadi sangat sulit. Pada akhirnya akan berdampak pada tingkat pendapatan yang mereka peroleh (jauh masih dibawah UMP).

3.22.1. Kemiskinan Alamiah

Mayoritas masyarakat miskin di lokasi penelitian telah memiliki rumah sendiri. Tetapi kepemilikan rumah ini hanya sebatas untuk tempat bernaungnya keluarga. Karena kondisi rumah di lokasi penelitian lebih dari 70 persen dalam kondisi yang sangat memprihatikan. Tetapi walaupun demikian pada umumnya mereka telah memilikifasilitas WC sendiri dan sumber air minum yang relative layak untuk dikonsumsi, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 86. Kondisi Rumah Responden di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Status kepemilikan rumah		
	- Numpang	10	12.50
	- Sewa	3	3.75
	- Milik Sendiri	67	83.75
	Jumlah	80	100.00
2.	Jenis Bangunan		
	- Bambu	57	71.25
	- Tembok	23	28.75
	Jumlah	80	100.00
3	Sumber Air Bersih		
	- Sumur	74	92.50
	- PAM	6	7.50
	- Keduanya Sumur dan PAM	6	7.50
4.	Fasilitas WC		
	- Umum	19	23.75
	- Sendiri	61	76.25
	Jumlah	80	100.00
5.	Jarak rumah dari jalan besar		
	- < 500 m	0	0
	- 500 – 1 km	0	0
	- > 1 km	80	100.00
	Jumlah	80	100.00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Tabel 86 memperlihatkan bahwa akses masyarakat miskin ke jalan besar relative cukup jauh. Kondisi ini dapat berdampak padadua sisi yaitu sisi input dan output. Dari sisi input akan berdampak pada tingginya biaya usahatani yang mereka harus keluarkan dan dari sisi output, penerimaan yang mereka terima dari hasil usahatani menjadi lebih rendah.

3.22.2. Kemiskinan Struktural

Hasil survey menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah struktural terhadap kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mayoritas responden (lebih dari 50 persen) tentang sistem pendistribusian bantuan pemerintah yang dilakukan dengan musyawarah.

Tabel 87. Kondisi Kemiskinan Struktural di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Undangan rapat program bantuan ekonomi di desa		
	- Tidak pernah	27	33.75
	- Kadang-kadang	17	21.25
	- Selalu	36	45.00
	Jumlah	80	100.00
2.	Undangan rapat perencanaan pembangunan desa		
	- Tidak pernah	26	32.50
	- Kadang-kadang	15	18.75
	- Selalu	36	45.00
	Jumlah	80	100.00
3.	Selalu hadir kalau diundang rapat di desa		
	- Tidak pernah	14	17.50
	- Kadang-kadang	18	22.50
	- Selalu	48	60.00
	Jumlah	80	100.00
4.	Pelibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan di desa		
	- Tidak pernah	38	47.50
	- Kadang-kadang	14	17.50
	- Selalu	28	35.00
	Jumlah	80	100.00
5.	Sistem distribusi bantuan dari pemerintah		
	- Oleh kepala desa saja	23	28.75
	- Beberapa elit di desa	11	13.75
	- Musyawarah	46	57.50
	Jumlah	80	100.00
6.	Perbedaan dalam pemberian bantuan ekonomi		
	- Ada	15	18.75
	- Kadang-kadang	21	26.25
	- Tidak ada	44	55.00
	Jumlah	80	100.00
7.	Pertanggungjawaban pimpinan desa dilakukan secara transparan		
	- Tidak pernah	31	38.75
	- Ada, tapi kurang transparan	17	21.25
	- Ada transparan	32	40.00
	Jumlah	80	100.00
8.	Frekuensi penerimaan bantuan dari pemerintah/non pemerintah		
	- Tidak pernah	35	43.75
	- Kadang-kadang	38	47.50
	- Selalu	7	8.75
	Jumlah	80	100.00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Mayoritas responden mengaku diundang dalam rapat program bantuan maupun rapat perencanaan pembangunan desa. Selain itu, 40 persen responden mengaku ada pertanggungjawaban distribusi bantuan yang dilakukan dengan transparan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 83.

Meski tidak ada indikasi permasalahan struktural, namun kettidakterlibatan masyarakat dalam ikut memutuskan di desa masih relative tinggi (40 %). Kondisi ini diperparah dengan partisipasi masyarakat yang cukup rendah untuk memenuhi undangan kepala desa dalam musyawarah pembangunan desa. Menurut pengakuan mereka, rendahnya partisipasi masyarakat miskin di lokasi penelitian terjadi karena keterbatasan waktu yang mereka miliki. Artinya ketika mereka ikut rapat di desa, maka kesempatan mereka untuk mencari nafkah menjadi berkurang. Sehingga masyarakat miskin tidak memiliki pilihan. Dengan kata lain kemiskinan structural ini terjadi, lebih cenderung karena muncul dari masyarakat miskin itu sendiri.

3.22.3. Kemiskinan Kultural

Survey juga menemukan tingginya indikasi Kultural sebagai salah satu penyebab kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Mayoritas masyarakat miskin (53 persen) masih memiliki keyakinan bahwa kemiskinan dapat dirubah dengan usaha. Sementara 27 persen yang benar-benar yakin itu sebagai nasib yang tidak dapat diubah. Indikasi ini didukung oleh lemahnya Kultural menabung. Mayoritas keluarga miskin (55 persen) menyatakan ada keinginan untuk menabung, tetapi belum memulainya. Hanya 12 persen yang sudah memulai. Sedangkan 32 persen tidak ada keinginan untuk itu. Walaupun prosentase keinginan menabung cukup tinggi, tetapi dorongan untuk konsumtif lebih tinggi. Ini terlihat dari mayoritas masyarakat miskin (56 persen) yang berkemauan untuk menggunakan uang untuk berbagai pengeluaran seandainya mereka memiliki penghasilan lebih.

Tabel 88. Kultural Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Kondisi kemiskinan adalah nasib dan sulit untuk dirubah		
	- Percaya sekali	22	27.50
	- Kurang percaya	15	18.75
	- Tidak percaya namun harus ada usaha	43	53.75
	Jumlah	80	100.00
2.	Keinginan dan semangat merubah diri		
	- Tidak ada keinginan	11	13.75
	- Ada sedikit tapi belum memulai	39	48.75
	- Ada dan sudah memulai	30	37.50
	Jumlah	80	100.00
3.	Sumber keinginan dan semangat untuk berubah		
	- Dorongan dari tokoh rujukan	11	13.75
	- Keluarga	37	46.25
	- Dari dalam diri sendiri	32	40.00
	Jumlah	80	100.00
4.	Keinginan untuk menabung		
	- Tidak ada	26	32.50
	- Ada, tapi belum memulai	44	55.00
	- Ada dan sudah mulai	10	12.50
	Jumlah	80	100.00
5.	Pernah berfikir untuk menabung jika punya penghasilan lebih		
	- Tidak pernah	24	30.00
	- Pernah, tapi baru memulai	39	48.75
	- Pernah dan sudah mulai	14	17.50
	Jumlah	80	100.00

Sumber : Hasil Penelitian (2015).

Disisi lain, kemauan dan semangat untuk keluar dari kemiskinan sudah ada namun belum dilaksanakan. Sebesar 48 persen memiliki hasrat untuk merubah diri menjadi lebih baik, tetapi belum dilakukan. Hanya 37 persen yang sudah memulai untuk merubah diri dengan berbagai tindakan dan usaha. Sedangkan 13 persen lainnya tidak ada keinginan sama sekali untuk merubah diri dan umumnya adalah mereka yang sudah berusia lanjut. Diantara mereka yang berkeinginan memperbaiki hidup ini umumnya memiliki sumber motivasi dari diri sendiri (40 persen). Sementara 46 lainnya termotivasi oleh keluarga. Sedangkan yang terinspirasi oleh tokoh-tokoh rujukan sangat sedikit, hanya 13 persen.

Hasil FGD memperkuat berbagai indikasi tingginya kemiskinan kultural di Kabupaten Aceh Tamiang. Perilaku malas diakui oleh semua informan sebagai salah satu tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan kultural di Kabupaten Aceh Tamiang. Sikap malas untuk bertani dan berkebun ini semakin diperparah oleh memburuknya infrastruktur (buruknya irigasi dan ketiadaan suplai air untuk pertanian) serta tingginya hama babi. Disamping itu, masyarakat sudah termanjakan dengan berbagai bantuan. Bantuan pemerintah dianggap sebagai hadiah cuma-cuma. Jika mendengar ada bantuan, semua merasa diri miskin.



POTENSI MASYARAKAT MISKIN DI ACEH

4

Temuan-temuan Utama

- Potensi sumberdaya manusia yang berkualitas masih sangat kurang karena rendahnya tingkat pendidikan. Namun, kesiapan mereka untuk diberikan pendidikan dan latihan kerja serta kewirausahaan merupakan potensi yang sangat mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Potensi sumberdaya alam yang tersedia terutama lahan yang masih ada walaupun bukan milik sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha dan membuka usaha baru di bidang pertanian, peternakan, perikanan darat, dan perkebunan rakyat.
- Potensi sumberdaya kelautan masih terbuka luas untuk dimanfaatkan oleh nelayan miskin dengan menyediakan alat tangkap yang lebih baik serta lebih terjangkau untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan laut
- Potensi kegotongroyongan masih melekat merupakan potensi yang kuat untuk membuat program yang bersifat 'proyek bersama' dengan meningkatkan penyuluhan dan pengawasan dari pihak berwenang.

4.1. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Banda Aceh

Secara umum, masyarakat miskin di Banda Aceh tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Tabel 89 berikut ini memperlihatkan potensi masyarakat miskin di Kota Banda Aceh.

Tabel 89. Potensi Masyarakat Miskin Kota Banda Aceh

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	94
	- Ada, memasak	4	4,8
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, buruh bangunan	-	-
	- Ada, lainnya	-	-
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	89
	- Pernah dua kali	2	2
	- Pernah lebih dua kali	3	4
	- Tidak jawab	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	50	63
	- Ada tapi kurang	19	24
	- Ada dan aktif	6	7
	- Tidak jawab	5	6
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	20	25
	- Kurang yakin	25	31
	- Yakin	32	40
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	21	26
	- Berusaha dulu baru pasrah	23	29
	- Selalu berusaha keras	36	45
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	2	3
	- Ada, tapi sulit	36	45
	- Ada harapan dan selalu berusaha	42	53
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Dari 80 orang responden, hanya ada 5 orang (6 persen) yang memiliki keterampilan lain selain dari profesi saat ini, yakni menyetir, memasak, dan membuat kue. Juga ada 7 orang responden yang anggota keluarganya memiliki keterampilan seperti menjahit, memasak, mencukur rambut, dan tukang bangunan.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya pelatihan dan penyuluhan yang diterima responden. Terdapat 89 persen responden yang mengaku tidak pernah mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha. Selain itu, 63 persen responden mengaku tidak pernah memperoleh penyuluhan. Sisanya mengaku pernah memperoleh penyuluhan tetapi merasa kurang (24 persen), dan hanya 8 persen yang merasa memperoleh cukup penyuluhan dan aktif.

Namun demikian, mayoritas responden memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat terhadap usaha yang dijalannya saat ini. Sebanyak 40 persen responden yakin bahwa usaha yang ditekuninya saat ini bisa merubah hidupnya lebih baik. Sisanya sebesar 35 persen merasa ragu dan 25 persen tidak yakin. Selain itu, ada 45 persen responden yang merasa perlu berusaha lebih keras lagi dalam meningkatkan mata pencahariannya.

4.2. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Sabang

Sebagian besar kepala keluarga miskin di Kota Sabang tidak memiliki pekerjaan sampingan/keterampilan lainnya, dan ini menjadi indikasi rendahnya potensi pengembangan ekonomi saat ini. Sebesar 73 persen kepala keluarga miskin hanya terfokus pada pekerjaan utama seperti menjadi nelayan atau buruh diberbagai sektor usaha (bangunan, pertanian, perkebunan, dan lainnya) tanpa keterampilan atau pekerjaan sampingan lain. Hanya 10 persen yang punya pekerjaan sampingan membuat dan menjual kue. Juga terdapat 4 persen keluarga miskin yang berusaha memanfaatkan lahan untuk aktifitas pertanian, menanam sayur yang sifatnya musiman. Sementara 4 persen lain menjadi supir, termasuk supir truck angkutan batu dan kerikil. Sedangkan 3 persen kepala keluarga miskin lain memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh diberbagai sektor usaha seperti kontruksi/bangunan, galian, batu bata, dan lainnya.

Minimnya jumlah warga miskin yang mengikuti pelatihan dan penyuluhan juga menjadi indikasi lain rendahnya potensi untuk pengembangan ekonomi saat ini. Survey menunjukkan, 94 persen keluarga miskin tidak pernah mengikuti pelatihan terkait peningkatan produktifitas usaha. Sementara 5 persen diketahui pernah beberapa kali mengikutinya. Hanya 1 persen saja yang mengaku pernah lebih dari lima kali ikut serta dalam berbagai jenis pelatihan. Demikian juga dengan keikutsertaan dalam berbagai jenis penyuluhan, 59 persen tidak pernah mengikutinya. Sedangkan 34 persen pernah mengikutinya namun merasa belum cukup. Hanya 8 persen saja yang pernah ikut penyuluhan dan merasakan manfaat dari kegiatan dan pengetahuan tersebut.

Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya keyakinan warga miskin di Kota Sabang bahwa mata pencaharian yang ditekuni saat ini bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Sebesar 13 persen warga miskin sama sekali tidak yakin terhadap aktifitas ekonomi yang sedang digeluti saat ini dapat mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan. Sementara mayoritas warga miskin lainnya, yaitu 48 persen, juga kurang percaya bahwa pekerjaan saat ini dapat membawa diri dan keluarga lebih baik dimasa akan datang. Namun

demikian, 40 persen lainnya merasa yakin akan potensi dari pekerjaan mereka sekarang.

Survei juga menemukan, walaupun ada motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan lebih banyak lagi, namun umumnya tidak punya harapan bahwa masa depan akan lebih baik dari sekarang. Terdapat 35 persen masyarakat miskin di Kota

Tabel 90. Potensi Masyarakat Miskin Kota Sabang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	58	73
	- Ada, memasak	8	10
	- Ada, menyetir	3	4
	- Ada, buruh bangunan	3	4
	- Ada, lainnya	8	11
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	75	94
	- Pernah beberapa kali	4	5
	- Pernah lebih dari lima kali	1	1
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	47	59
	- Ada tapi kurang	27	34
	- Ada dan aktif	6	8
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik	10	13
	- Tidak yakin	38	48
	- Kurang yakin	32	40
	- Yakin		
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi	26	33
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	26	33
	- Berusaha dulu baru pasrah	28	35
	- Selalu berusaha keras		
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	21	26
	- Ada, tapi sulit	45	56
	- Ada harapan dan selalu berusaha	14	18
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Sabang yang selalu berusaha lebih keras guna memperoleh pendapatan lebih besar. Sementara yang memiliki kemauan berusaha terlebih dahulu sebelum bersikap pasrah memiliki proporsi 33 persen. Demikian juga dengan mereka yang total pasrah pada berapapun penghasilan yang diperoleh juga sebesar 33 persen. Meskipun jumlah mereka yang punya motivasi untuk bekerja lebih maksimal lagi cukup banyak, total 66 persen, tetapi umumnya mereka tidak yakin bahwa masa depan mereka bisa lebih baik dari sekarang. Namun 56 persen meyakini akan adanya perubahan dimasa depan walaupun sulit.

Masyarakat miskin memiliki motivasi untuk ikut pelatihan namun menuntut adanya uang saku. Wawancara dengan masyarakat miskin juga menemukan bahwa mereka masih punya potensi untuk maju dengan adanya kemauan untuk mengikuti pelatihan. Namun bagi mayoritas mereka ketersediaan uang saku/pengganti transport menjadi motif utama. Beberapa pengalaman menunjukkan, jika sudah pernah sekali ikut pelatihan namun tidak mendapatkan uang, maka lain kali tidak bersedia untuk ikut lagi. Ini diakibatkan pengalaman-pengalaman terdahulu pasca tsunami yang selalu mendapatkan uang ketika mengikuti berbagai pelatihan. Setiap ada pelatihan selalu muncul pertanyaan, “ada dikasih uang?”. Namun sebagian masyarakat miskin lainnya meminta penyediaan uang pengganti transport sebagai kompensasi bagi keluarga yang ditinggalkan selama pelatihan.

4.3. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Besar

Tabel 91 memperlihatkan 70 persen responden tidak memiliki keterampilan lain selain mata pencaharian pokok yang mereka geluti, dan 72.5 persen responden menyatakan bahwa anggota keluarganya tidak mempunyai ketrampilan. Kondisi ini disebabkan anggota keluarga mereka masih dalam usia sekolah.

Untuk meningkatkan produktivitas hasil usaha tani, seharusnya masyarakat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) yang berkembang saat ini. Perkembangan iptek ini dapat diperoleh dari pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait. Namun, 75 persen responden tidak pernah mengikuti penyuluhan dan 65 persen tidak pernah mengikuti pelatihan. Kondisi ini terjadi karena responden masih menganggap bahwa pelatihan dan penyuluhan hanya menghabiskan waktu mereka untuk berusahatani atau melaut. Sehingga sistem berusaha tani dan nelayan yang mereka jalani saat ini, masih menggunakan sistem yang telah dilakukan oleh orangtua mereka secara turun temurun. Akibatnya 82.5 persen responden kurang yakin bahwa mata pencaharian yang mereka tekuni dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Namun demikian 50 persen responden yakin bahwa pendapatan yang akan diterima akan berubah jika ada usaha. Jika tidak berubah, baru mereka pasrah menerima kondisi tersebut. Tabel 91 juga memperlihatkan bahwa 80 persen responden mempunyai harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik pada masa depan. Kondisi ini bertentangan dengan sikap mereka yang tidak bersedia untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Sehingga sulit bagi mereka untuk merubah kondisi ekonomi yang mereka hadapi saat ini.

Tabel 91. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Besar

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	56	70
	- Ada, menjual kue	3	3,8
	- Ada, menyetir	2	2,5
	- Ada, buruh bangunan	5	6,2
	- Ada, dll	14	17,5
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	58	72,5
	- Ada, buruh tani	15	18,8
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, dll	6	7,5
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	60	75
	- Pernah dua kali	17	21,3
	- Pernah lebih dua kali	3	3,7
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	52	65
	- Ada tapi kurang	25	31,3
	- Ada dan aktif	3	3,7
	- Tidak jawab		
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	4	5
	- Kurang yakin	66	82,5
	- Yakin	10	12,5
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	14	17,5
	- Berusaha dulu baru pasrah	40	50
	- Selalu berusaha keras	26	32,5
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	7	8,7
	- Ada, tapi sulit	64	80
	- Ada harapan dan selalu berusaha	9	11,3
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

4.4. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Gayo Lues

Secara umum, masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Dari responden yang mayoritas petani, 58% kurang yakin mata pencaharian yang ditekuni dapat merubah hidup lebih baik, hanya 28% yang yakin, bahkan 15% tidak yakin sama sekali. Walaupun mayoritas responden selalu berusaha keras (44%) dan berusaha dulu baru pasrah (52%), serta hanya 4% yang pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima, 27% responden yakin ada

harapan dan selalu berusaha untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, 59% yakin ada walau sulit dan hanya 15% yang tidak yakin ada harapan.

Sayangnya harapan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Kabupaten Gayo Lues belum mendapat sentuhan-sentuhan untuk perbaikan, dimana mayoritas 97% responden mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha hanya 3% yang pernah mengikuti lebih dari 2 kali, bahkan 83% responden mengaku walaupun ada memperoleh penyuluhan namun kurang aktif, hanya 13% yang ada dan aktif dan 4% tidak ada sama sekali. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 92. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Gayo Lues

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	77	96,25
	- Pernah dua kali	3	3,75
	- Pernah lebih dua kali	-	-
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
2.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	3	3,75
	- Ada tapi kurang	66	82,50
	- Ada dan aktif	11	13,75
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
3.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	12	15,00
	- Kurang yakin	45	56,25
	- Yakin	23	28,75
	Jumlah	78	100
4.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	3	3,75
	- Berusaha dulu baru pasrah	42	52,50
	- Selalu berusaha keras	35	43,75
	Jumlah	75	100
5.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	12	15
	- Ada, tapi sulit	46	57,50
	- Ada harapan dan selalu berusaha	22	27,50
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.5. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara

Secara umum, masyarakat miskin di Aceh Tenggara (94%) tidak memiliki keterampilan individu (selain profesinya saat ini, yaitu sebagian besar sebagai petani dan buruh tani)

sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Hanya ada 5 orang (6 persen) yang memiliki keterampilan lain selain dari profesi saat ini, yakni memasak dan menyetir. Selain itu, jumlah anggota keluarganya yang memiliki keterampilan seperti menjahit, memasak, mencukur rambut, dan tukang bangunan juga sangat sedikit (hanya 9% dari total responden). Keadaan tersebut tentu menyulitkan mereka dalam menggali sumber ekonomi untuk menambah penghasilan keluarga.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya jumlah responden yang pernah ikut pelatihan dan penyuluhan (hanya sekitar 12%). Sedangkan sebagian besarnya (85% responden) mengaku tidak pernah memperoleh atau mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha. Sementara itu, 67 persen responden mengaku tidak pernah mendapat/mengikuti penyuluhan. Sisanya mengaku pernah memperoleh penyuluhan tetapi merasa kurang (20 persen), dan hanya 2 persen yang merasa memperoleh cukup penyuluhan dan aktif.

Responden yang memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat terhadap usaha yang dijalannya saat ini juga sangat sedikit (hanya sekitar 15). Selebihnya tersebar merata antara tidak yakin dan kurang yakin. Namun demikian, sebagian besar responden tidak pasrah pada keadaan yang mereka hadapi. Sebanyak 39% responden menyatakan mereka berusaha keras agar dapat merubah keadaan, sedangkan 29% menyatakan mereka berusaha keras kemudian baru pasrah, dan 30% menyatakan pasrah terhadap keadaan mereka saat ini. Jumlah responden yang berpandangan pesimis dan optimis terhadap masa depan yang lebih baik tersebar merata, masing-masing ada sekitar 45%. Hasil survey selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 93.

Pada kegiatan diskusi terfokus dengan aparat desa, terungkap bahwa rata-rata masyarakat miskin yang ada di desa mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini dikarenakan mereka tidak punya keterampilan (faktor SDM) dan sarana serta modal untuk berusaha (faktor sumberdaya dan Modal). Masyarakat miskin, kadang-kadang juga sulit diajak untuk ikut pelatihan (tanpa kompensasi) karena umumnya waktu mereka habis tersedot untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan/upah harian.

Menurut peserta FGD, beberapa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya beberapa program pengentasan kemiskinan adalah kurang tepat sasaran, penerima tidak disiapkan untuk mengelola bantuan dengan cermat, sehingga tidak bisa berkembang menjadi usaha yang produktif. Pengawasan dan pendampingan juga sangat lemah sehingga penerima bantuan tidak mendapat pengarahan yang optimal.

Tabel 93. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	94
	- Ada, memasak	4	4,8
	- Ada, menyetir	1	1,2
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	68	85
	- Pernah dua kali	6	7,5
	- Pernah lebih dua kali	4	5
	- Tidak jawab	2	2,5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	54	67,5
	- Ada tapi kurang	16	20
	- Ada dan aktif	3	3,75
	- Tidak jawab	7	8,75
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	35	43,75
	- Kurang yakin	34	42,50
	- Yakin	11	13,75
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	24	30,00
	- Berusaha dulu baru pasrah	24	30,00
	- Selalu berusaha keras	32	40,00
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	7	8,75
	- Ada, tapi sulit	37	46
	- Ada harapan dan selalu berusaha	36	45,57
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.6. Potensi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bener Meriah

Secara umum, masyarakat miskin di Kabupaten Bener Meriah tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Dari responden yang mayoritas petani, 42 persen kurang yakin mata pencaharian yang ditekuni dapat merubah hidup lebih baik, hanya 13 persen yang yakin, bahkan 43 persen tidak yakin sama sekali. Walaupun mayoritas responden selalu berusaha keras (40 persen) dan berusaha dulu baru pasrah (30 persen), serta hanya 30 yang pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima, 42% responden yakin ada harapan dan selalu berusaha untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, 13% yakin ada walau sulit dan mayoritas (43 persen) yang tidak yakin ada harapan.

Tabel 94. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bener Meriah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	94
	- Ada, memasak	4	4,8
	- Ada, menyetir	1	1,2
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	68	85
	- Pernah dua kali	6	7,5
	- Pernah lebih dua kali	4	5
	- Tidak jawab	2	2,5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	54	67,5
	- Ada tapi kurang	16	20
	- Ada dan aktif	3	3,75
	- Tidak jawab	7	8,75
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	35	43,75
	- Kurang yakin	34	42,50
	- Yakin	11	13,75
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	24	30,00
	- Berusaha dulu baru pasrah	24	30,00
	- Selalu berusaha keras	32	40,00
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	7	8,75
	- Ada, tapi sulit	37	46
	- Ada harapan dan selalu berusaha	36	45,57
	Jumlah	80	100

Sayangnya harapan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Kabupaten Bener Meriah belum mendapat sentuhan-sentuhan untuk perbaikan, dimana mayoritas 85 persen responden mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan produktivitas usaha hanya 7 persen yang pernah mengikuti lebih dari 2 kali.

4.7. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 95 berikut ini memperlihatkan 70 persen responden tidak memiliki keterampilan lain selain mata pencaharian pokok yang mereka geluti, dan 72.5 persen responden menyatakan bahwa anggota keluarganya tidak mempunyai ketrampilan. Kondisi ini disebabkan anggota keluarga mereka masih dalam usia sekolah.

Tabel 95. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tengah

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	56	70
	- Ada, menjual kue	3	3,8
	- Ada, menyetir	2	2,5
	- Ada, buruh bangunan	5	6,2
	- Ada, dll	14	17,5
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	58	72,5
	- Ada, buruh tani	15	18,8
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, dll	6	7,5
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	60	75
	- Pernah dua kali	17	21,3
	- Pernah lebih dua kali	3	3,7
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	52	65
	- Ada tapi kurang	25	31,3
	- Ada dan aktif	3	3,7
	- Tidak jawab		
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	4	5
	- Kurang yakin	66	82,5
	- Yakin	10	12,5
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	14	17,5
	- Berusaha dulu baru pasrah	40	50
	- Selalu berusaha keras	26	32,5
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	7	8,7
	- Ada, tapi sulit	64	80
	- Ada harapan dan selalu berusaha	9	11,3
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Untuk meningkatkan produktivitas hasil usaha tani, seharusnya masyarakat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (iptek) yang berkembang saat ini. Perkembangan iptek ini dapat diperoleh dari pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh instansi-instansi terkait. Namun, 75 persen responden tidak pernah mengikuti penyuluhan dan 65 persen tidak pernah mengikuti pelatihan. Kondisi ini terjadi karena responden masih menganggap bahwa pelatihan dan penyuluhan hanya menghabiskan waktu mereka untuk berusahatani atau melaut. Sehingga sistem berusaha tani dan nelayan yang mereka jalani saat ini, masih menggunakan sistem yang telah dilakukan oleh orangtua mereka secara turun temurun. Akibatnya 82.5 persen responden kurang yakin bahwa mata pencaharian yang mereka tekuni dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik.

Namun demikian 50 persen responden yakin bahwa pendapatan yang akan diterima akan berubah jika ada usaha. Jika tidak berubah, baru mereka pasrah menerima kondisi tersebut. Tabel 95 juga memperlihatkan bahwa 80 persen responden mempunyai harapan untuk merubah hidup menjadi lebih baik pada masa depan. Kondisi ini bertentangan dengan sikap mereka yang tidak bersedia untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Sehingga sulit bagi mereka untuk merubah kondisi ekonomi yang mereka hadapi saat ini.

4.8. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Jaya

Hasil penelitian menunjukkan 55% masyarakat di wilayah penelitian tidak punya keterampilan lain untuk melakukan sesuatu yang diharapkan dapat merubah hidupnya menjadi lebih baik. Sebanyak 48% masyarakat sudah pernah beberapa kali memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha namun hal ini tidak mereka aplikasikan dan terapkan dalam aktivitas usaha yang mereka jalani saat ini padahal masyarakat pernah juga mengikuti beberapa kegiatan penyuluhan yang disampaikan oleh dinas terkait.

Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 73% masyarakat kurang yakin pekerjaan yang mereka tekuni sekarang bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik. 24% masyarakat yakin pekerjaan yang mereka tekuni sekarang bisa merubah hidupnya sedangkan sisanya 4% tidak yakin akan pekerjaannya bisa menolongnya keluar dari kemiskinan. Masyarakat punya keinginan untuk selalu berusaha dengan keras dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Potensi Masyarakat kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 96.

Tabel 96. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	44	55
	- Ada, menjual kue	4	5
	- Ada, menyetir	8	10
	- Ada, buruh bangunan	6	7,5
	- Ada, dll	18	22,5
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	32	40
	- Pernah beberapa kali	48	60
	- Sering (lebih dari 5 kali)	0	0
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	30	38
	- Kadang-kadang	46	58
	- Sering	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	3	4
	- Kurang yakin	58	73
	- Yakin	19	24
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	0	0
	- Berusaha dulu baru pasrah	39	49
	- Selalu berusaha keras	41	51
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	1	1
	- Ada, tapi sulit	60	75
	- Ada harapan dan selalu berusaha	19	24
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.9. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang tertera pada tabel di bawah, dapat dijelaskan bahwa potensi diri masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Barat dapat mendukung pengurangan tingkat kemiskinannya. Data yang tertera pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa 87,5 % responden tidak atau belum ada keterampilan, selebihnya memiliki sedikit keterampilan, berupa pertukangan sebesar 6,25%, sebagai penjahit 3,75% dan 2,5% sebagai perbengkelan. Sebagian besar responden (53,75%) belum pernah memperoleh pelatihan cara untuk meningkatkan produktivitas usaha, dan ada yang pernah mendapat pelatihan sebanyak dua kali yaitu sebesar 13,75% responden, selebihnya sebanyak 32,50% pernah mendapatkan lebih dari dua kali. Sebahagian besar responden (57,50%) tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan. Sedangkan sebagian lagi ada yang mengikuti meskipun kurang aktif yakni sebesar 35,00%, sementara yang aktif hanya sebesar 7,50%. Kebanyakan dari responden (60,00%) merasa kurang yakin bahwa matapencaharian yang mereka tekuni selama ini dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Namun demikian, ada sebanyak

35,00 persen responden merasa yakin bahwa usahanya dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik bila mendapatkan penyuluhan dan keterampilan. Hanya 5,00% saja dari responden yang merasa tidak yakin bahwa usahanya dapat membuat kehidupannya menjadi lebih baik.

Tabel 97. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	70	87,50
	- Ada, perbengkelan	2	2,50
	- Ada, menjahit	3	3,75
	- Ada, pertukangan	5	6,25
	Jumlah	80	100,00
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	43	53,75
	- Pernah dua kali	11	13,75
	- Pernah lebih dua kali	26	32,50
	Jumlah	80	100,00
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	46	57,50
	- Ada tapi kurang	28	35,00
	- Ada dan aktif	6	7,50
	Jumlah	80	100,00
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	4	5,00
	- Kurang yakin	48	60,00
	- Yakin	28	35,00
	Jumlah	80	100,00
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	6	7,50
	- Berusaha dulu baru pasrah	66	82,50
	- Selalu berusaha keras	8	10,00
	Jumlah	80	100,00
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	4	5,00
	- Ada, tapi sulit	46	57,50
	- Ada harapan dan selalu berusaha	30	37,50
	Jumlah	80	100,00

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan keterampilan terhadap pekerjaan yang mereka geluti selama ini, pada akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas hasil kerja mereka. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 82,50 % responden selalu berusaha untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepasrahan hidup yang dialami selama ini tidak meningkatkan pendapatan dirinya. Tetapi, ada harapan untuk bisa berubah ke arah lebih baik tetapi sulit, dijawab sebanyak 57,50 % responden. Oleh karena itu setelah diberikan ketrampilan dan penyuluhan, dilengkapi dengan pembinaan secara terus menerus, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari kemiskinannya,

asalkan mereka memperoleh pembinaan dan pendampingan secara konsisten serta teratur dari pihak Pemerintah terkait atau lembaga swasta, sehingga dapat merubah sikap dan perilaku mereka dari kurang yakin menjadi sangat yakin terhadap pekerjaannya bahwa dapat merubah kehiduannya menjadi lebih baik.

4.10. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Nagan Raya

Secara umum, masyarakat miskin di kabupaten Nagan Raya tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Dari 80 orang responden, hanya ada 7 orang (8,75 persen) yang memiliki keterampilan lain selain dari profesi saat ini, yakni tukang becak, buruh, mengayam tikar, membuat daun atap, dan membuat kue.

Tabel 98. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Nagan Raya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	73	91,25
	- Ada, memasak (buat kue)	2	2,25
	- Ada, Buruh	2	2,25
	- Ada, Lainnya	3	4,25
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	80	100
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	48	60
	- Pernah dua kali	12	15
	- Pernah lebih dua kali	1	1,25
	- Tidak Jawab	19	23,75
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	75	93,75
	- Ada tapi kurang	4	5
	- Ada dan aktif	1	1,25
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	1	1,25
	- Kurang yakin	78	97,5
	- Yakin	1	1,25
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	1	1,25
	- Berusaha dulu baru pasrah	60	75
	- Selalu berusaha keras	19	23,75
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	2	2,5
	- Ada, tapi sulit	67	83,75
	- Ada harapan dan selalu berusaha	11	13,75
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya pelatihan dan penyuluhan yang diterima responden. Terdapat 60 persen responden yang mengaku tidak pernah mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha. Selain itu, 93,75 persen responden mengaku

tidak pernah memperoleh penyuluhan. Sisanya mengaku pernah memperoleh penyuluhan tetapi merasa kurang (5 persen), dan hanya 1,25 persen yang merasa memperoleh cukup penyuluhan dan aktif.

Namun demikian, mayoritas responden memiliki motivasi dan keyakinan meski tidak terlalu kuat terhadap usaha yang dijalannya saat ini. Sebanyak 97,5 persen responden kurang yakin bahwa usaha yang ditekuninya saat ini bisa merubah hidupnya lebih baik. Sisanya sebesar 1,25 persen merasa ragu dan 1,25 persen yakin. Selain itu, ada 75 persen responden yang merasa perlu berusaha lebih keras lagi sebelum pasrah dalam meningkatkan mata pencahariannya.

4.11. Potensi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang tertera di Tabel 99, dapat dilihat potensi dari dalam diri masyarakat miskin yang dapat mendukung pengurangan tingkat kemiskinan di daerah ini. Data yang tertera di tabel tersebut memperlihatkan bahwa 92 persen responden tidak atau belum ada keterampilan, demikian pula keluarganya juga tidak mempunyai keterampilan. Seluruh responden belum pernah memperoleh pelatihan cara untuk meningkatkan produktivitas usaha, dan 76 persen responden tidak pernah mengikuti penyuluhan. Keterampilan seperti membuat kerajinan tangan dan pertukangan hanya terbatas dimiliki oleh 1-2 orang saja.

Namun demikian, ada sebanyak 47,5 persen responden merasa yakin usahanya dapat berubah ke arah yang lebih baik bila mendapatkan penyuluhan dan keterampilan. Oleh karena itu perlu diberikan pendidikan keterampilan dan penyuluhan terhadap jenis pekerjaan yang digeluti saat ini. Pendidikan ketrampilan dan penyuluhan ini akan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Hal ini disahuti oleh sebanyak 33,75 persen responden selalu berusaha keras untuk melepaskan dirinya dari kemiskinan. Namun demikian, ada sebanyak 43,75 persen merasa kurang yakin mata pencaharian yang ditekuni selama ini biasa merubah dirinya ke arah lebih baik, dan bahkan ada sebanyak 8,75 persen yang tidak yakin. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kepasrahan hidup yang dialami selama ini tidak meningkatkan pendapatan dirinya. Tetapi, ada harapan untuk bisa berubah ke arah lebih baik tetapi sulit, dijawab sebanyak 45 persen responden. Oleh karena itu setelah diberikan ketrampilan dan penyuluhan, dilengkapi dengan pembinaan secara terus menerus, sehingga dapat menghasilkan keamanan pendapatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Abdy mempunyai kurang potensi untuk melepaskan diri dari kemiskinannya. Hal ini dapat dilihat dari hanya sebagian responden yang merasa yakin lahan/bidang usahanya akan berubah. Namun demikian, sebagiannya lagi merasa yakin akan dapat merubah nasibnya mereka bila diberikan keterampilan, penyuluhan, dan sebagainya.

Tabel 99. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden		
	- Tidak ada	74	92,50
	- Ada, nelayan (menjala, bulu pancing)	3	3,75
	- Ada, memasak	1	1,25
	- Ada, kerajinan tangan	1	1,25
	- Ada, pertukangan	1	1,25
	Jumlah	80	100
1.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	80	100,00
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	80	100,00
	- Pernah dua kali	0	0
	- Pernah lebih dua kali	0	0
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	76	95,00
	- Ada tapi kurang	2	2,50
	- Ada dan aktif	2	2,50
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	7	8,75
	- Kurang yakin	35	43,75
	- Yakin	38	47,50
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	30	37,50
	- Berusaha dulu baru pasrah	21	26,25
	- Selalu berusaha keras	27	33,75
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	6	7,50
	- Ada, tapi sulit	36	45,00
	- Ada harapan dan selalu berusaha	38	47,50
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.12. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Selatan

Potensi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 100. Tabel 100 memperlihatkan bahwa kelompok miskin di Kabupaten Aceh Selatan pada prinsipnya memiliki harapan kehidupan yang lebih baik di masa depan dan sangat yakin bahwa mata pencaharian yang digeluti sekarang ini dapat merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Namun keinginan untuk dapat keluar dari belenggu kemiskinannya terkendala dengan ketidakmampuan sumberdaya.

Semua responden dan keluarga responden sama sekali tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mendongkrak pendapatan keluarganya. Oleh sebab itu, dengan maksud untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan, perlu dilakukan program pendidikan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang berbasis potensi lokal dan perwilayahan. Program tersebut perlu dilengkapi juga dengan bantuan permodalan

(kredit lunak), dan pendampingan. Perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk menggulirkan bantuan permodalan, sehingga bantuan produktif tersebut tidak berubah atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif. Sedangkan pendampingan diperlukan untuk merubah sikap dan perilaku, meskipun diakui bahwa merubah gaya hidup, sikap, dan perilaku masyarakat tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan pendampingan juga diharapkan akan menumbuhkan Kultural hemat, produktif, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

Tabel 100. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Selatan

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	93,7
	- Ada, Tukang	3	3,8
	- Ada, Guru Ngaji	2	2,5
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	80	100
	- Ada, memasak	0	0
	- Ada, jahit sandal	0	0
	- Ada, jahit jala	0	0
	- Ada, cukur rambut	0	0
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	88,7
	- Pernah dua kali	9	11,3
	- Pernah lebih dua kali	0	0
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	70	87,5
	- Ada tapi kurang	10	12,5
	- Ada dan aktif	0	0
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	0	0
	- Kurang yakin	0	0
	- Yakin	80	100
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	2	2,5
	- Berusaha dulu baru pasrah	70	87,5
	- Selalu berusaha keras	8	0
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	0	0
	- Ada, tapi sulit	0	0
	- Ada harapan dan selalu berusaha	80	100
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.13. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Subulussalam

Sebanyak 97,5% responden tidak memiliki ketrampilan alternatif selain ketrampilan yang berkaitan dengan profesi mereka saat ini. Anggota keluarga juga sebagian besar tidak memiliki ketrampilan. 88,75% dari responden tidak pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktifitas usaha. 96,25% dari responden tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan. Lebih dari setengah responden kurang yakin mata pencaharian yang ditekuni saat ini bisa merubah hidup lebih baik. Sekitar 76,25% dari responden mengaku berusaha dahulu baru pasrah dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, 62,5% responden merasa memiliki harapan kehidupan yang lebih baik di masa depan namun sulit untuk dapat mewujudkannya.

Tabel 101. Potensi Masyarakat Miskin Kota Subulussalam

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	78	97,5
	- Ada, memasak	1	1,25
	- Ada, menyetir	1	1,25
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	88,75
	- Pernah dua kali	6	7,5
	- Pernah lebih dua kali	3	3,75
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	77	96,25
	- Ada tapi kurang	2	2,5
	- Ada dan aktif	1	1,25
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	11	13,75
	- Kurang yakin	53	66,25
	- Yakin	16	20
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	7	8,75
	- Berusaha dulu baru pasrah	61	76,25
	- Selalu berusaha keras	12	15
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	6	7,5
	- Ada, tapi sulit	50	62,5
	- Ada harapan dan selalu berusaha	24	30
	Jumlah	80	100

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

4.14. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Singkil

Secara umum, masyarakat miskin di Singkil tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya.

Tabel 102. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Singkil

No	Variabel	Jumlah	%
1	Ketrampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	73	92,50
	- Ada, memasak	4	4,25
	- Ada, Menyetir	3	3,25
	Jumlah	80	100
2	Ketrampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada		
	- Ada, memasak		
	- Ada, Menyetir		
	- Ada, jahit sandal		
	- Ada, jahit jala		
	- Ada, cukur rambut		
Jumlah	-	-	
3	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	58	73
	- Pernah dua kali	5	6
	- Pernah lebih dua kali	8	10
	- Tidak jawab	9	11
Jumlah	80	100	
4	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	10	13
	- Ada tapi kurang	38	48
	- Ada dan Aktif	16	20
	- Tidak jawab	16	20
Jumlah	80	100	
5	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	6	8
	- Kurang yakin	25	31
	- Yakin	49	61
Jumlah	80	100	
6	Pasrah ada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	1	1
	- Berusaha dulu baru pasrah	9	11
	- Selalu berusaha keras	70	88
Jumlah	80	100	
7	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	1	1
	- Ada, tapi sulit	31	39
	- Ada harapan dan selalu berusaha	48	60
Jumlah	80	100	

Sumber: Hasil Penelitian (2015)

Dari 80 orang responden, hanya ada 7 orang (8 persen) yang memiliki keterampilan lain selain dari profesi saat ini, yakni menyetir, memasak, dan membuat kue. Juga ada 8 orang responden yang anggota keluarganya memiliki keterampilan seperti menjahit, memasak, mencukur rambut, dan tukang bangunan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya pelatihan dan penyuluhan yang diterima responden.

Terdapat 73 persen responden yang mengaku tidak pernah mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha. Selain itu, 73 persen responden mengaku tidak pernah memperoleh penyuluhan. Sisanya mengaku pernah memperoleh penyuluhan tetapi merasa kurang (48 persen). Namun demikian, mayoritas responden memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat terhadap usaha yang dijalannya saat ini. Sebanyak 61 persen responden yakin bahwa usaha yang ditekuninya saat ini bisa merubah hidupnya lebih baik. Sisanya sebesar 31 persen merasa ragu dan 8 persen tidak yakin. Selain itu, ada 80 persen responden yang merasa perlu berusaha lebih keras lagi dalam meningkatkan mata pencahariannya.

4.15. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Simeulue

Terdapat 81,3 persen responden yang mengaku tidak pernah mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha. Potensi masyarakat miskin Kabupaten Semeulue dapat dilihat pada Tabel 103.

Tabel 103. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Semeulue

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	65	81,3
	- Pernah dua kali	7	8,8
	- Pernah lebih dua kali	8	10
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	59	73,8
	- Ada tapi kurang	17	21,3
	- Ada dan aktif	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	11	13,3
	- Kurang yakin	44	55
	- Yakin	25	31,3
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	2	2,5
	- Berusaha dulu baru pasrah	16	20
	- Selalu berusaha keras	62	77,5
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	5	6,3
	- Ada, tapi sulit	32	40
	- Ada harapan dan selalu berusaha	43	53,7
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Hasil penelitian dan survey 73,75 persen responden mengaku tidak pernah memperoleh penyuluhan. Sisanya mengaku pernah memperoleh penyuluhan tetapi merasa kurang (21,25 persen), dan hanya 5 persen yang merasa memperoleh cukup penyuluhan dan aktif. Hanya 31,3 persen responden yakin bahwa usaha yang ditekuninya saat ini bisa merubah hidupnya lebih baik. Memprihatinkan, sisanya sebesar 55 persen merasa ragu dan 13,3 persen tidak yakin. Selain itu, ada 775 persen responden yang merasa perlu berusaha lebih keras lagi dalam meningkatkan mata pencahariannya.

4.16. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie

Kebanyakan responden (94%) mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai keterampilan apapun termasuk anggota keluarga lainnya (91%). Mereka mengaku tidak pernah memperoleh pelatihan dalam meningkatkan produktivitas usaha (89%) dan tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan (63%).

Tabel 104. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Pidie

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	94
	- Ada, memasak	4	4,8
	- Ada, menyetir	1	1,2
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	89
	- Pernah dua kali	2	2
	- Pernah lebih dua kali	3	4
	- Tidak jawab	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	50	63
	- Ada tapi kurang	19	24
	- Ada dan aktif	6	7
	- Tidak jawab	5	6
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	20	25
	- Kurang yakin	25	31
	- Yakin	32	40
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	21	26
	- Berusaha dulu baru pasrah	23	29
	- Selalu berusaha keras	36	45
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	2	3
	- Ada, tapi sulit	36	45
	- Ada harapan dan selalu berusaha	42	53
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Sebanyak 40% responden yakin bahwa pekerjaan/mata pencaharian yang selama ini mereka tekuni dapat merubah nasib hidup mereka menjadi lebih baik dan sebanyak 45% responden selalu berusaha keras dan lebih keras lagi berapapun pendapatan yang akan mereka terima nantinya. Mereka (53%) mengaku bahwa dalam usahanya akan selalu ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan dan mau untuk selalu berusaha.

Sangat disayangkan dimana masyarakat yang diwawancarai hanya memiliki keterampilan yang sangat terbatas. Di sisi yang lain, masyarakat mengaku akan berusaha lebih keras, dan tidak hanya pasrah saja. Dukungan dari pemerintah yang sifatnya non materiil seperti pentingnya ditingkatkan. Sangat sulit bagi masyarakat miskin memperoleh pelatihan keterampilan pada kondisi yang digambarkan di atas. Sementara itu bantuan yang sifatnya materiil akan sulit dipergunakan bila kemampuan mengelola sumberdaya tersebut dalam bentuk pelatihan keterampilan masyarakat tidak diberikan.

4.17. Potensi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie Jaya

Rendahnya keterampilan hidup (*life skills*) menjadi isu utama yang menjadikan potensi masyarakat miskin di dua kecamatan yang disurvei sangat rendah. Kondisi ini semakin buruk karena anggota keluarga lainnya juga tidak memiliki keterampilan hidup. Keikutsertaan masyarakat miskin pada program-program pelatihan keterampilan hidup masih terbatas, hanya 32% responden yang pernah mengikuti program tersebut dengan frekuensi yang berbeda-beda. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan juga masih terbatas. Sebagian besar masyarakat tidak/ kurang yakin dengan mata pencaharian saat ini untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Namun, meskipun demikian masyarakat miskin yang disurvei memiliki motivasi untuk berubah dan memiliki harapan besar untuk mengubah keadaan yang dialami saat ini.

Untuk generasi selanjutnya para responden mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, bahwa generasi penerus mereka harus memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh kesejahteraan. Dari hasil petikan wawancara didapat keterangan yaitu minimal satu dari anak mereka harus menjadi lebih baik, hal ini terlihat dari banyaknya anak dari responden yang pergi merantau ke Malaysia sebagai TKI dengan harapan dapat merubah nasib menjadi lebih baik.

Hasil wawancara/FGD dengan perangkat desa, menggambarkan bahwa, kemiskinan diakibatkan oleh rendahnya tingkat ketrampilan/ keahlian, dan bantuan langsung yang diberikan pemerintah tidak memiliki dampak signifikan dalam merubah penghasilan. Serta kurangnya sarana prasarana pendukung yang memadai, baik dari program pengentasan kemiskinan ataupun pada sarana pendukung lainnya.

Tabel 105. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Pidie Jaya

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	93
	- Ada, memasak/membuat kue	2	3
	- Ada, kerajinan tangan	2	3
	- Ada, montir	1	1
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	80	100
	- Ada, memasak	0	0
	- Ada, menyetir	0	0
	- Ada, jahit sandal	0	0
	- Ada, jahit jala	0	0
	- Ada, cukur rambut	0	0
	Jumlah		
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	55	68
	- Pernah dua kali	6	8
	- Pernah lebih dua kali	19	24
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	57	71
	- Ada tapi kurang aktif	23	29
	- Ada dan aktif	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	10	12
	- Kurang yakin	36	45
	- Yakin	34	43
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	11	14
	- Berusaha dulu baru pasrah	24	30
	- Selalu berusaha keras	45	56
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	10	12
	- Ada, tapi sulit	38	48
	- Ada harapan dan selalu berusaha	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

4.18. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bireun

Potensi masyarakat Kabupaten Bireun perlu ditingkatkan baik melalui penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan data Tabel 5 sebanyak 94 % masyarakat miskin di Kabupaten Bireun tidak memiliki keterampilan, hanya 4,8 % memiliki keterampilan memasak dan 1,2 % ahli sebagai pengemudi kendaraan (sopir). Jika ditilik dari keterampilan anggota keluarga sebanyak 91% tidak memiliki keterampilan, memasak 4 %, dan menyetir, jahit jala, jahit sandal dan memasak masing-

masing sebesar 1,2%. Upaya meningkatkan keterampilan tersebut perlu dilakukan karena sebanyak 89% masyarakat tidak pernah menerima pelatihan, hanya sebanyak 2% pernah aktif 2 kali dan 4 persen responden mengikuti pelatihan lebih dari 2 kali. Kegiatan penyuluhan juga perlu ditingkatkan karena sebanyak 64% masyarakat miskin tidak pernah mengikuti penyuluhan. Namun demikian ada 24% responden pernah mengikuti penyuluhan tetapi masih dikategorikan kurang memadai. Selanjutnya sebanyak 7% masyarakat miskin mengikuti penyuluhan tetapi tidak berpartisipasi secara aktif.

Tabel 106. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bireun

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	94
	- Ada, memasak	4	4,8
	- Ada, menyetir	1	1,2
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	3	4
	- Ada, menyetir	1	1,2
	- Ada, jahit sandal	1	1,2
	- Ada, jahit jala	1	1,2
	- Ada, cukur rambut	1	1,2
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	89
	- Pernah dua kali	2	2
	- Pernah lebih dua kali	3	4
	- Tidak jawab	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	50	63
	- Ada tapi kurang	19	24
	- Ada dan aktif	6	7
	- Tidak jawab	5	6
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	20	25
	- Kurang yakin	25	31
	- Yakin	32	40
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	21	26
	- Berusaha dulu baru pasrah	23	29
	- Selalu berusaha keras	36	45
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	2	3
	- Ada, tapi sulit	36	45
	- Ada harapan dan selalu berusaha	42	53
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik diyakini oleh 40 % responden. Sebaliknya 25 % pasrah dan merasa tidak yakin dapat lepas dari jeratan kemiskinan dan 31 % merasa kurang yakin. Jika ditilik dari usaha dan kerja keras sebanyak 45 % masyarakat sudah berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan, 26 % pasrah dan tidak berusaha serta 29 % ingin berusaha dulu tetapi kalau tidak berhasil akan pasrah. Selanjutnya harapan untuk keluar dari garis kemiskinan diinginkan oleh 53 % responden, 45 % menjawab memiliki harapan walau sulit dan hanya 3 % sama sekali tidak memiliki harapan untuk dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

4.19. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Lhokseumawe

Potensi masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 107 berikut ini.

Tabel 107. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Lhokseumawe

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	77	96,25
	- Ada, memasak	1	1,25
	- Ada, buruh	-	-
	- Ada, lainnya	2	2,19
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	44	55
	- Pernah dua kali	29	36
	- Pernah lebih dua kali	7	9
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	34	43
	- Ada tapi kurang	41	51
	- Ada dan aktif	5	6
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	17	21
	- Kurang yakin	42	53
	- Yakin	21	26
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	10	13
	- Berusaha dulu baru pasrah	31	39
	- Selalu berusaha keras	38	48
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	16	20
	- Ada, tapi sulit	45	56
	- Ada harapan dan selalu berusaha	19	24
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Keahlian pribadi yang dapat mendatangkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe sangatlah rendah. Sebagian besar mereka tidak

memiliki keahlian untuk bertahan hidup. Hasil survey menyebutkan bahwa 94% lebih masyarakat tidak memiliki keterampilan pribadi (*lifeskill*) dan tidak ada anggota keluarga lain yang juga memiliki keterampilan tertentu. Hal ini yang menjadi pemicu utama kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Penaggulangi hal tersebut, beberapa pelatihan telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan 36% responden menyatakan pernah mengikuti pelatihan produktivitas usaha sebanyak dua kali, dan 9% menyatakan pernah ikut lebih dari dua kali, dan 55% menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan keterampilan apapun.

4.20. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara

Potensi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Utara akan disajikan pada Tabel 108.

Tabel 108. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	72	90,00
	- Ada, memasak	-	-
	- Ada, buruh	8	10,00
	- Ada, lainnya	-	-
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	54	68
	- Pernah dua kali	5	6
	- Pernah lebih dua kali	21	26
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	66	83
	- Ada tapi kurang	12	15
	- Ada dan aktif	2	1
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	2	2
	- Kurang yakin	18	22
	- Yakin	61	76
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	4	5
	- Berusaha dulu baru pasrah	6	8
	- Selalu berusaha keras	70	87
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	1	0,94
	- Ada, tapi sulit	10	13,13
	- Ada harapan dan selalu berusaha	69	85,94
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Minimnya keterampilan berusaha dari responden membuat mereka berpotensi untuk berada dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Lebih dari 90% mengakui tidak memiliki keterampilan apapun untuk dapat mendatangkan pendapatan bagi kehidupannya. Keterampilan yang ditemukan selama penelitian adalah membuat atap dari daun rumbia, tukang kayu/batu dan membuat kue.

Kontribusi pemerintah kabupaten untuk menambah keterampilan mereka telah dilakukan namun masih sangat terbatas. Pengakuan para responden bahwa 68% menyatakan tidak pernah mendapat/mengikuti pelatihan keterampilan hidup. Sementara hanya 26% yang menyebutkan pernah mengikuti pelatihan. Masyarakat mengaku optimis dengan usaha yang sedang mereka lakukan saat ini akan mampu merubah kehidupan mereka dimasa depan (76%). Dan mereka juga menyakatan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik nantinya.

4.21. Potensi Masyarakat Miskin di Kota Langsa

Mayoritas masyarakat miskin di Kota Langsa tidak memiliki keterampilan individu sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi keluarganya. Sebanyak 80 responden, hanya ada 17 orang (20 persen) yang memiliki keterampilan lain selain dari profesi saat ini, yakni menyetir dan pertukangan. Disisi lain terdapat 7 orang responden (9 persen) yang anggota keluarganya memiliki keterampilan seperti memasak dan menjahit jala.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan minimnya pelatihan dan penyuluhan yang diterima responden. Terdapat 89 persen responden yang mengaku tidak pernah mengikuti program pelatihan peningkatan produktifitas usaha, dipihak lain responden aktif dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan diluar pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha (99 persen). Berdasarkan informasi kegiatan penyuluhan yang paling dominan diikuti adalah di bidang kesehatan. Belum adanya pelatihan ketrampilan yang diberikan khusus oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keahlian.

Mayoritas responden kurang yakin dalam hal keyakinan yang kuat terhadap usaha yang dijalannya saat ini dapat merubah hidup. Sebanyak 78,7 persen responden kurang yakin bahwa usaha yang ditekuninya saat ini bisa merubah hidupnya lebih baik. Sisanya sebesar 12,5 persen merasa yakin dan 8,8 persen tidak yakin. Selain itu, 81,2 persen responden beranggapan bahwa memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan. Selengkapny dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Walaupun responden memiliki ketidakyakinan terhadap diri mereka, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas (90 persen) responden menyadari bahwa faktor utama dimasa datang yang akan mendorong mereka untuk keluar dari kemiskinan adalah faktor pendidikan. Mayoritas responden tersebut memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka kejenjang minimal tingkat SMA dan beberapa responden hingga pendidikan tinggi.

Tabel 109. Potensi Masyarakat Miskin Kota Langsa

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	63	80
	- Ada, pertukangan	15	18
	- Ada, menyetir	2	2
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	73	91
	- Ada, memasak	2	3
	- Ada, jahit jala	5	6
	Jumlah	80	100
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	71	89
	- Pernah dua kali	2	2
	- Pernah lebih dua kali	3	4
	- Tidak jawab	4	5
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	0	0
	- Ada tapi kurang	1	1
	- Ada dan aktif	79	99
	- Tidak jawab	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	7	8,8
	- Kurang yakin	63	78,7
	- Yakin	10	12,5
	Jumlah	80	100
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	54	23,8
	- Berusaha dulu baru pasrah	23	73,7
	- Selalu berusaha keras	3	2,5
	Jumlah	80	100
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	0	0
	- Ada, tapi sulit	65	81,2
	- Ada harapan dan selalu berusaha	15	18,8
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

4.22. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Timur

Rendahnya keterampilan hidup (*life skills*) menjadi isu utama yang menjadikan potensi masyarakat miskin di dua kecamatan yang disurvei sangat rendah. Kondisi ini semakin buruk karena anggota keluarga lainnya juga tidak memiliki keterampilan hidup. Keikutsertaan masyarakat miskin pada program-program pelatihan keterampilan hidup masih terbatas, hanya 32% responden yang pernah mengikuti program tersebut dengan frekuensi yang berbeda-beda.

Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan juga masih terbatas.

Sebagian besar masyarakat tidak/ kurang yakin dengan mata pencaharian saat ini untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. Namun, meskipun demikian masyarakat miskin yang disurvei memiliki motivasi untuk berubah dan memiliki harapan besar untuk mengubah keadaan yang dialami saat ini.

Tabel 110. Potensi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Timur

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	75	93
	- Ada, memasak/membuat kue	2	3
	- Ada, kerajinan tangan	2	3
	- Ada, montir	1	1
	Jumlah	80	100
2.	Keterampilan anggota keluarga		
	- Tidak ada	80	100
	- Ada, memasak	0	0
	- Ada, menyetir	0	0
	- Ada, jahit sandal	0	0
	- Ada, jahit jala	0	0
	- Ada, cukur rambut	0	0
	Jumlah		
3.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	55	68
	- Pernah dua kali	6	8
	- Pernah lebih dua kali	19	24
	Jumlah	80	100
4.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	57	71
	- Ada tapi kurang aktif	23	29
	- Ada dan aktif	0	0
	Jumlah	80	100
5.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih baik		
	- Tidak yakin	10	12
	- Kurang yakin	36	45
	- Yakin	34	43
		Jumlah	80
6.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha keras lagi		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	11	14
	- Berusaha dulu baru pasrah	24	30
	- Selalu berusaha keras	45	56
		Jumlah	80
7.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	10	12
	- Ada, tapi sulit	38	48
	- Ada harapan dan selalu berusaha	32	40
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Untuk generasi selanjutnya para responden mempunyai harapan masa depan yang lebih baik, bahwa generasi penerus mereka harus memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh kesejahteraan. Dari hasil petikan wawancara didapat keterangan yaitu minimal satu dari anak mereka harus menjadi lebih baik, hal ini terlihat dari banyaknya anak dari responden yang pergi merantau ke Malaysia sebagai TKI dengan harapan dapat merubah nasib menjadi lebih baik.

Hasil wawancara/FGD dengan perangkat desa, menggambarkan bahwa, kemiskinan diakibatkan oleh rendahnya tingkat keterampilan/ keahlian, dan bantuan langsung yang diberikan pemerintah tidak memiliki dampak signifikan dalam merubah penghasilan. Serta kurangnya sarana prasarana pendukung yang memadai, baik dari program pengentasan kemiskinan ataupun pada sarana pendukung lainnya.

4.23. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang

Minimnya keterampilan berusaha dari responden membuat mereka berpotensi untuk berada dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Lebih dari 90% mengakui tidak memiliki keterampilan apapun untuk dapat mendatangkan pendapatan bagi kehidupannya. Keterampilan yang ditemukan selama penelitian adalah membuat atap dari daun rumbia, tukang kayu/batu dan membuat kue.

Kontribusi pemerintah kabupaten untuk menambah keterampilan mereka telah dilakukan namun masih sangat terbatas. Pengakuan para responden bahwa 68% menyatakan tidak pernah mendapat/mengikuti pelatihan keterampilan hidup. Sementara hanya 32% yang menyebutkan pernah mengikuti pelatihan. Masyarakat mengaku optimis dengan usaha yang sedang mereka lakukan saat ini akan mampu merubah kehidupan mereka dimasa depan (86%). Dan mereka juga menyakatan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik nantinya.

Tabel 111. Potensi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Tamiang

No	Variabel	Jumlah	%
1.	Keterampilan responden lainnya		
	- Tidak ada	72	90,00
	- Ada, memasak	-	-
	- Ada, buruh/ tukang	8	10,00
	- Ada, lainnya	-	-
	Jumlah	80	100
2.	Pernah memperoleh pelatihan cara meningkatkan produktivitas usaha		
	- Tidak pernah	54	68
	- Pernah dua kali	5	6
	- Pernah lebih dua kali	21	26
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
3.	Sering mengikuti kegiatan penyuluhan		
	- Tidak pernah	66	83
	- Ada tapi kurang	12	15
	- Ada dan aktif	2	1
	- Tidak jawab	-	-
	Jumlah	80	100
4.	Keyakinan mata pencaharian yang ditekuni bisa merubah hidup lebih		
	- Tidak yakin	2	2
	- Kurang yakin	18	22
	- Yakin	61	76
	Jumlah	80	100
5.	Pasrah pada berapapun pendapatan yang diterima atau berusaha		
	- Pasrah pada apa yang diperoleh	4	5
	- Berusaha dulu baru pasrah	6	8
	- Selalu berusaha keras	70	87
	Jumlah	80	100
6.	Apakah memiliki harapan kehidupan lebih baik di masa depan		
	- Tidak ada	1	0,94
	- Ada, tapi sulit	10	13,13
	- Ada harapan dan selalu berusaha	69	85,94
	Jumlah	80	100

Sumber : Hasil Penelitian (2015)



EFEKTIVITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH

5

Temuan-temuan Utama

- Dana yang dialokasikan belum efektif digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Aceh.
- Efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir ini cenderung kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan Aceh.
- Angka kemiskinan tertinggi di Aceh umumnya berada di kabupaten pemekaran dengan konsentrasi terbesar di kawasan pedesaan yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani.
- Keberhasilan program pengembangan pertanian masih belum paralel dengan upaya pengurangan kemiskinan.
- Komposisi APBD di beberapa kabupaten/kota di Aceh selama tiga tahun terakhir belum sepenuhnya berpihak terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
- Tidak terdapat sinergisitas antar kabupaten/kota dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- Anggaran pembangunan Povinsi Aceh (APBA) dan 23 kab/kota di Aceh (APBK) pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 13,5 persen dan 31 persen, namun komposisi APBA dan APBK untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh masih belum proporsional.
- Sebagian besar APBK dan APBA 2013-2014 belum relevan terhadap prioritas wilayah.
- Komposisi anggaran belum sepenuhnya disusun sebagai insentif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.
- Komposisi anggaran penanggulangan kemiskinan yang variatif antara dinas/lembaga di masing-masing kabupaten/kota menggambarkan bahwa distribusi peran dan tanggung jawab pengentasan kemiskinan masih variatif antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya.
- Komposisi anggaran kurang memiliki relevansi dengan permasalahan kemiskinan yang ada di masing-masing daerah.

Angka kemiskinan tertinggi di Aceh umumnya berada di kabupaten pemekaran dengan konsentrasi terbesar di kawasan pedesaan yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Aceh idealnya difokuskan pada program-program pembangunan sektor pertanian di pedesaan. Sejauh ini, Pemerintah Aceh telah menjadikan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas sebagai prioritas utama. Telah banyak program-program pertanian yang diluncurkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani. Sistem agribisnis yang mengintegrasikan subsistem hulu-hilir, pemasaran dan penunjang yang dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing juga telah diterapkan. Hasilnya, produksi dan produktivitas pertanian meningkat khususnya komoditi padi yang meningkat tiap tahunnya.

Namun, keberhasilan program pengembangan pertanian masih belum paralel dengan upaya pengurangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani tidak menurun signifikan, bahkan menunjukkan peningkatan pada tahun 2014 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula bila dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani yang sangat fluktuatif. Bahkan, subsektor Peternakan menunjukkan NTP pada Januari 2012 (99,76) di bawah 100 dengan tahun dasar 2007. Artinya kesejahteraan peternak di Aceh awal tahun 2012 tidak lebih baik dibandingkan tahun 2007.

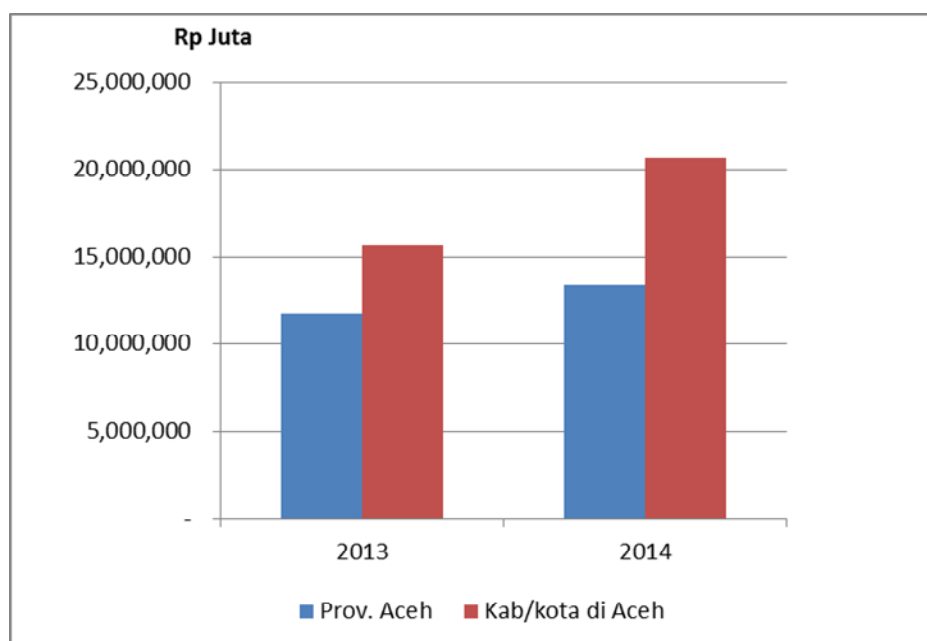
5.1. Analisis Anggaran Belanja Kab/Kota untuk Penanggulangan Kemiskinan

Analisis anggaran belanja kab/kota untuk penanggulangan kemiskinan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi manajemen dan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor (urusan pemerintah) yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Metodologi dalam analisis anggaran belanja untuk penanggulangan kemiskinan ini meliputi empat komponen, antara lain: komposisi anggaran belanja, gap belanja, relevansi alokasi anggaran, dan efektifitas anggaran terhadap capaian indikator utama.

5.1.1. Analisis Komposisi Anggaran Belanja

Anggaran pembangunan dan belanja Povinsi Aceh (APBA) dan 23 kab/kota di Aceh (APBK) pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 13,5 persen dan 31 persen. Total anggaran Provinsi Aceh naik dari Rp 11,8 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 13,4 triliun pada tahun 2014. Sementara itu, total anggaran pembangunan kabupaten/kota di Aceh meningkat drastis dari Rp 15,7 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 20,7 triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2013, hanya ada dua kabupaten di Aceh yang memiliki anggaran di atas Rp 1 triliun yakni Aceh Utara (Rp 1,36 triliun) dan Bireuen (Rp 1,03 triliun). Namun, pada tahun 2014, terdapat tujuh kabupaten/kota yang memiliki anggaran dengan jumlah lebih dari Rp 1 triliun yakni, Aceh Utara (Rp 1,75 triliun), Aceh Timur (Rp 1,31 triliun), Bireuen (Rp 1,26 triliun), Pidie (Rp 1,25 triliun), Aceh Besar (Rp 1,18 triliun), Banda Aceh (Rp 1,11 triliun) dan Aceh Tengah (Rp 1,0 triliun). Kota Sabang tercatat sebagai daerah dengan anggaran pembangunan terkecil sebesar Rp 567,8 miliar, diikuti Kabupaten Simeulue, Singkil, dan Gayo Lues masing-masing sebesar Rp 600,8 miliar, Rp 632,8 miliar, dan Rp 701,6 miliar. Pertumbuhan anggaran terbesar diraih oleh Kabupaten Aceh Timur yakni sebesar 48 persen. Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Pidie jaya, Bener Meriah dan Aceh Tenggara masing-masing sebesar 46, 43, dan 41 persen.

Sebaliknya, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen tercatat mengalami pertumbuhan anggaran terendah, masing-masing sebesar 17,2 dan 18,7 persen.

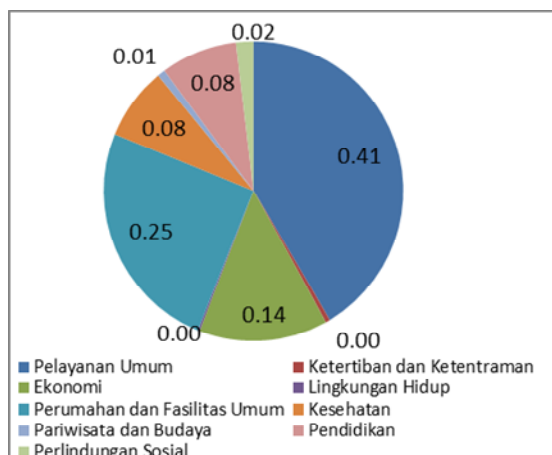


Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 (diolah)

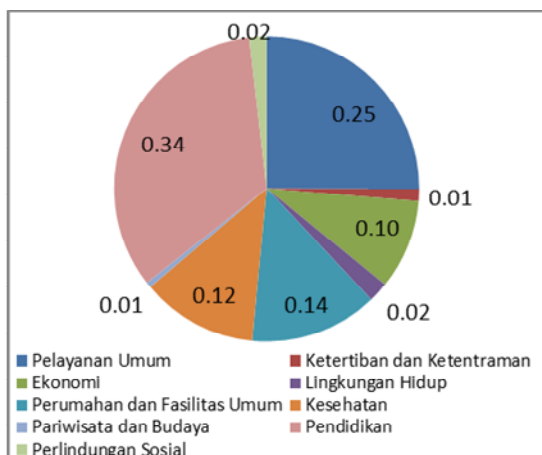
Gambar 9. Anggaran Pembangunan Provinsi Aceh dan Kab/Kota di Aceh

Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan, komposisi APBA dan APBK di Aceh masih belum proporsional. Secara rata-rata, anggaran Provinsi Aceh lebih didominasi oleh fungsi pelayanan umum (41%), perumahan dan fasilitas umum (25%), serta ekonomi (14%). Sedangkan anggaran Kab/kota lebih didominasi oleh fungsi pendidikan (34%), pelayanan umum (25%), serta perumahan dan fasilitas umum (14%). Sebaliknya, proporsi untuk fungsi perlindungan sosial, pariwisata dan Kultural, serta lingkungan hidup relatif sama kecilnya antara provinsi dan kab/kota masing-masing 1% dan 2%. Komposisi ini mengindikasikan adanya perbedaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kab/Kota di Aceh. Di sisi lain, terdapat persamaan dalam hal minimnya perhatian untuk fungsi perlindungan sosial, pariwisata dan Kultural, serta lingkungan hidup yang notabene bersentuhan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh.

Proporsi Anggaran Provinsi Aceh 2013-2014



Proporsi Anggaran Kab/Kota di Aceh 2013-2014

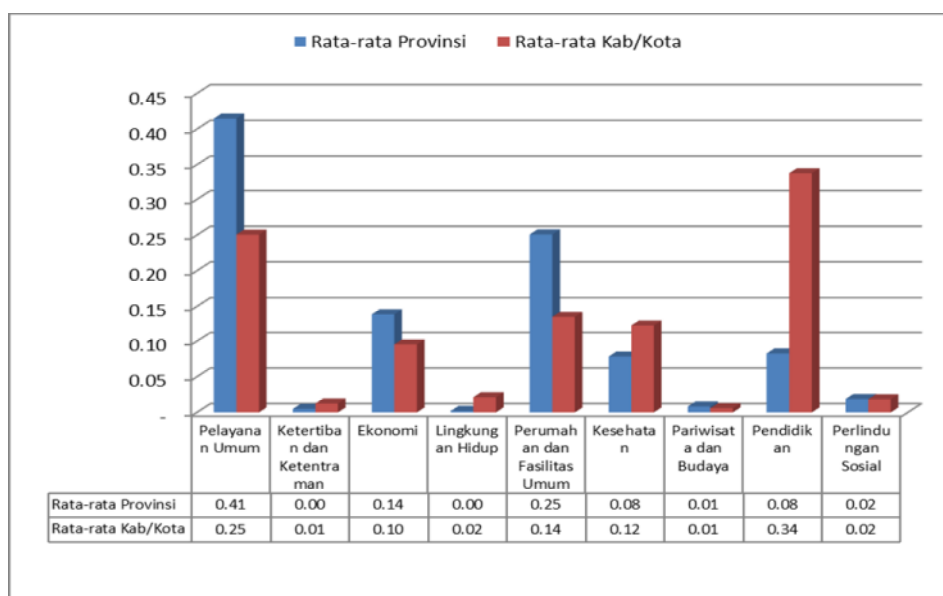


Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 (diolah)

Gambar 10. Perbandingan Komposisi Rata-rata Anggaran Provinsi dan Kab/Kota di Aceh

Komposisi APBA dan APBK di Aceh menggambarkan kesenjangan fungsi anggaran yang akhirnya akan berdampak terhadap efektifitas pencapaian tujuan pembangunan. Rata-rata, alokasi anggaran pelayanan umum serta perumahan dan fasilitas umum menghabiskan lebih setengah anggaran pembangunan daerah (66 persen). Sementara itu, anggaran pendidikan dan kesehatan yang notabene sudah ditetapkan oleh undang-undang masing-masing sebesar 20 dan 10 persen, keduanya hanya diplotkan masing-masing sebesar 8 persen. Di sisi lain, anggaran ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, pariwisata dan Kultural, serta perlindungan sosial hanya diplotkan sebesar 3 persen.

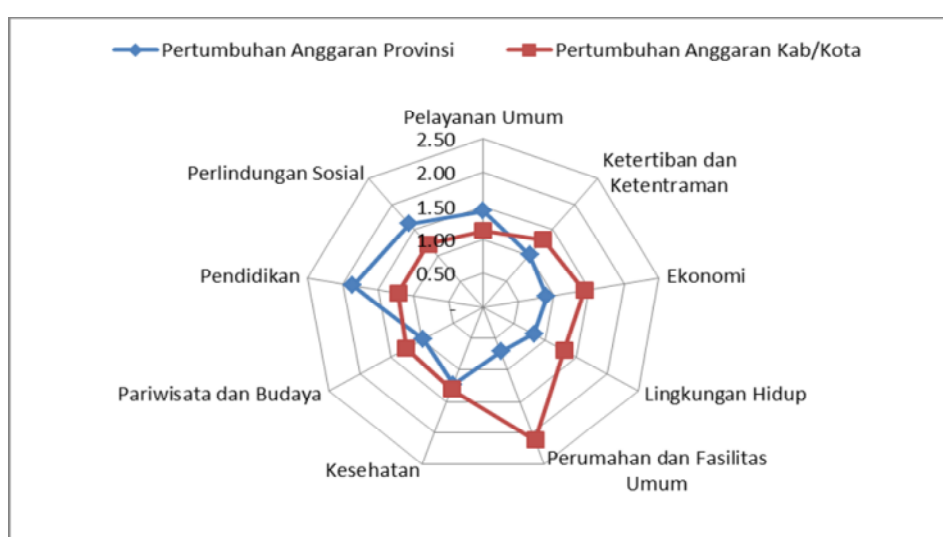
Senada dengan anggaran provinsi, komposisi anggaran kab/kota juga didominasi oleh beberapa sektor saja, yakni pendidikan (34 persen), pelayanan umum (25 persen), serta perumahan dan fasilitas umum (14 persen). Selanjutnya diikuti oleh fungsi kesehatan dan ekonomi masing-masing sebesar 12 persen dan 10 persen. Besarnya proporsi anggaran ketiga sektor pertama pada APBK di atas mereduksi peluang untuk dapat mengoptimalkan anggaran terhadap fungsi-fungsi lainnya seperti lingkungan hidup, pariwisata dan Kultural, serta perlindungan sosial. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa komposisi anggaran kab/kota di Aceh masih lebih baik dibandingkan anggaran provinsi mengingat gapnya relatif lebih kecil dan penempatan anggaran pendidikan dan kesehatan yang sudah melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 (diolah)

Gambar 11. Komposisi Anggaran Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh

Ketimpangan komposisi anggaran belum mampu ditutupi oleh naiknya anggaran pembangunan di Aceh pada tahun 2014. Pertumbuhan APBA dan APBK dalam dua tahun terakhir tidak serta merta memperbaiki komposisi yang ada. Kenaikan anggaran provinsi Aceh yang terbesar terjadi untuk sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan pelayanan umum, masing-masing sebesar 1,86 persen, 1,62 persen, serta 1,44 persen. Namun kenaikan ini tidak banyak merubah komposisi karena memiliki perbedaan porsi anggaran yang cukup besar pada tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada APBK dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada fungsi perumahan dan fasilitas umum (2,12 persen), ekonomi (1,44 persen), dan ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup, dan kesehatan masing-masing sebesar 1,3 persen. (Gambar 12).



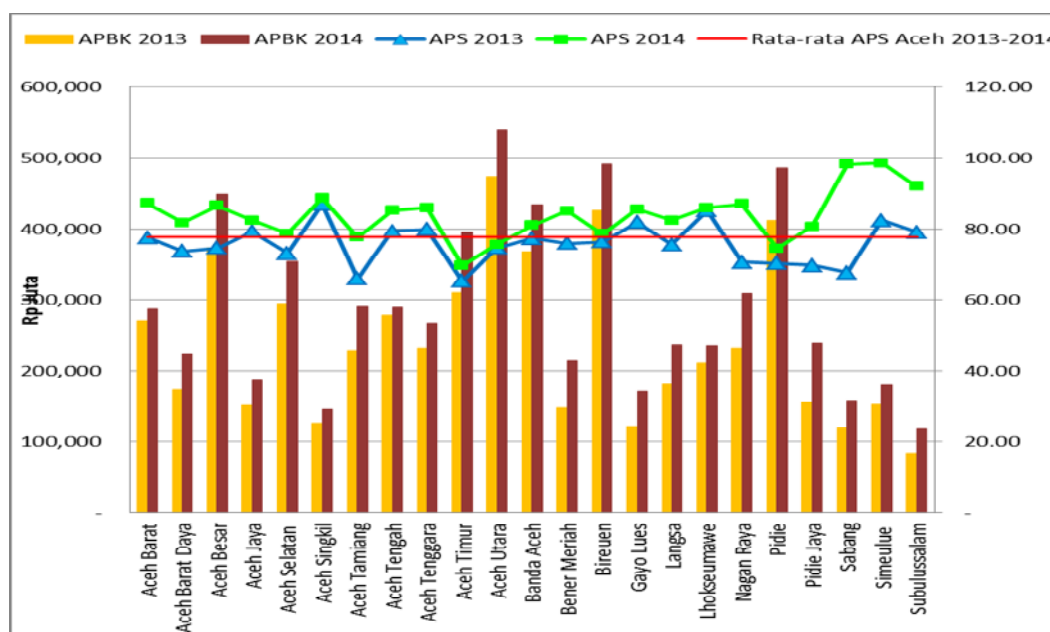
Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 (diolah)

Grafik 12. Pertumbuhan Anggaran Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh

Gambar 12 di atas memperlihatkan arah pertumbuhan anggaran yang konvergen antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Pertumbuhan APBA relatif lebih besar untuk fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan pelayanan umum. Sedangkan pertumbuhan APBK relatif condong ke fungsi perumahan dan fasulititas umum, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas pengembangan fungsi anggaran antara provinsi dan kabupaten. Di sisi lain, kondisi ini tampak baik dalam rangka meminimalisir kesenjangan antar fungsi anggaran yang terjadi antara APBA dan APBK.

5.1.2 Analisis Relevansi dan Efektifitas Pencapaian Indikator Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran kabupaten/kota di Aceh (APBK) dan anggaran Provinsi Aceh (APBA) tahun 2013-2014 masih belum relevan terhadap prioritas wilayah. Hal ini dapat dilihat dari disparitas alokasi anggaran terhadap prioritas sektor, misalnya pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, ada 9 Kab/kota yang memiliki angka partisipasi sekolah (APS) tahun 2013-2014 di bawah APS rata-rata provinsi sebesar 77,75¹. Tiga di antaranya justru memiliki anggaran pendidikan yang jauh lebih besar dibanding rata-rata anggaran pendidikan Kab/Kota lainnya, yakni Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie. Sebaliknya, ada 6 kab/kota dengan anggaran pendidikan yang paling minim di bawah rata-rata kab/kota, justru memiliki tingkat APS di atas rata-rata provinsi, yakni Subulussalam, Simeulue, Singkil, Gayo Lues, Lhokseumawe, dan Aceh Jaya. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan anggaran pendidikan Provinsi Aceh yang jauh melampaui anggaran kab/kota yang naik drastis dari Rp 738,2 miliar menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2014, namun hanya memiliki APS rata-rata sebesar 77,75. Selengkapnya pada Gambar 13.



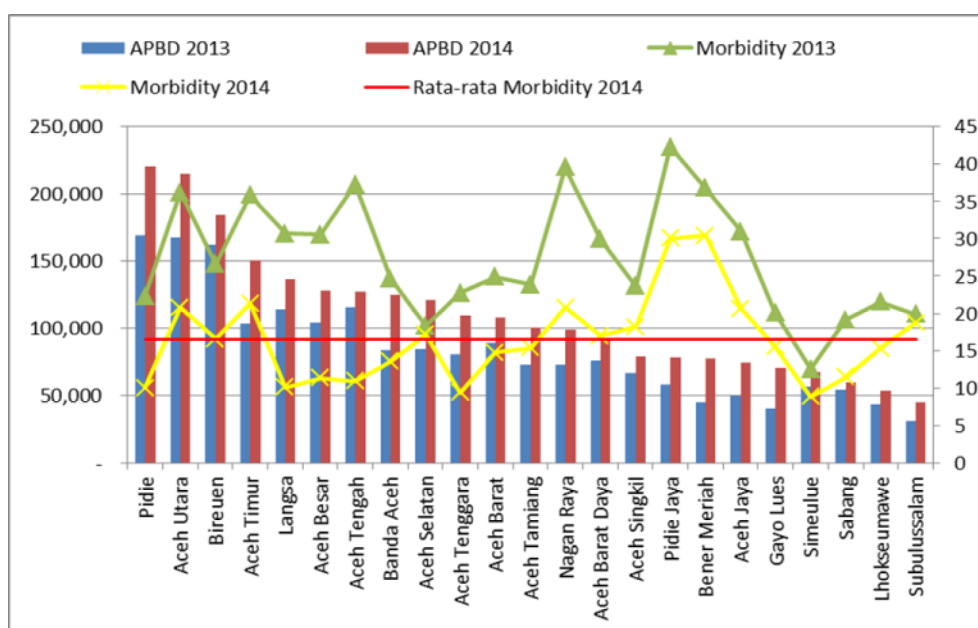
Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 dan BPS Aceh 2015 (diolah)

Gambar 13. Pertumbuhan Anggaran Pendidikan dan APS Kab/Kota di Aceh

¹ Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2013-2014 total laki-laki dan perempuan usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Aceh, BPS Aceh, 2015.

Gambar 13 di atas memperlihatkan disparitas anggaran pendidikan Provinsi Aceh dan kab/kota, APS provinsi, serta APS Kab/kota pada tahun 2013-2014. Kondisi ini menggambarkan bahwa prioritas fungsi anggaran terhadap pendidikan masih bervariasi antar satu kab/kota dengan kab/kota lainnya. Kondisi ini sekaligus menggambarkan keragaman efektifitas fungsi anggaran dalam sektor pendidikan.

Hal yang sama juga terlihat untuk anggaran kesehatan, dimana anggaran yang disusun belum sepenuhnya relevan dengan permasalahan kesehatan di masing-masing wilayah. Hal ini ditunjukkan dari variasi penetapan anggaran kesehatan antara daerah dengan tingkat morbidity (angka kesakitan) yang berbeda-beda. Data menunjukkan bahwa anggaran kesehatan di semua kab/kota meningkat secara signifikan dengan rata-rata sebesar 30 persen dari Rp 84,3 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 109,7 milyar pada tahun 2014. Namun, hanya 12 kab/kota yang mampu menurunkan tingkat morbidity di bawah rata-rata. Angka morbidity yang paling rendah justru diraih oleh Simeulue yang memiliki anggaran kesehatan terkecil keempat di Aceh. Sebaliknya, Aceh Utara yang memiliki anggaran kesehatan terbesar kedua, justru memiliki tingkat morbidity lebih besar dari rata-rata provinsi sebesar 20,8 persen. Selengkapnya pada Gambar 14.



Sumber : Departemen Keuangan RI, 2015 dan BPS Aceh 2015 (diolah)

Gambar 14. Anggaran Kesehatan dan Tingkat Morbidity Kab/Kota di Aceh

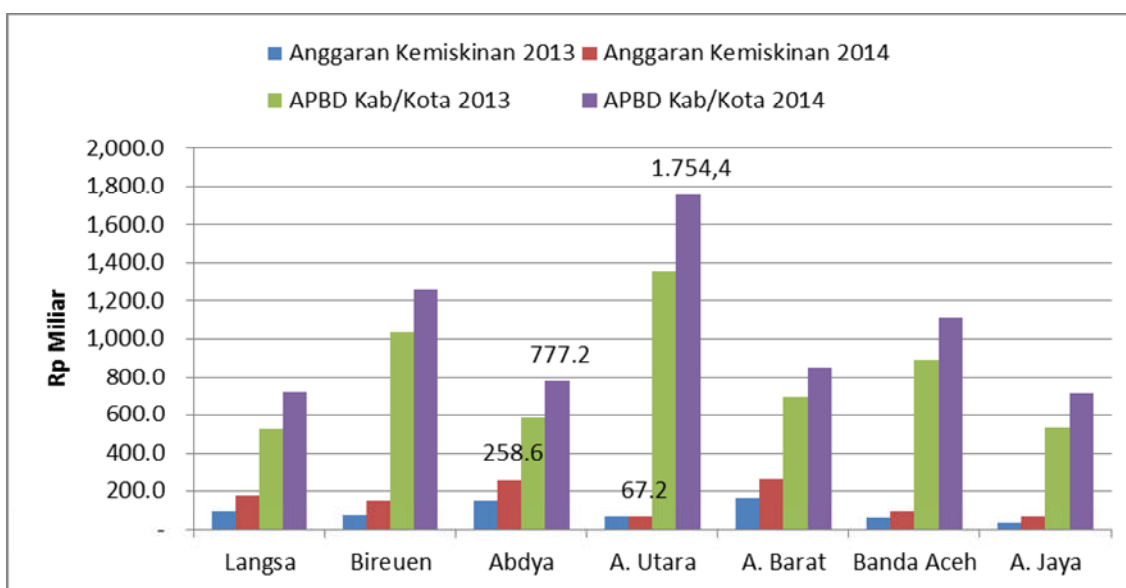
Gambar 14 di atas memperlihatkan disparitas anggaran kesehatan di kab/kota di Aceh, serta inkonsistensi dengan capaian tingkat morbidity di masing-masing daerah. Grafik menunjukkan bahwa anggaran yang besar belum tentu akan menekan angka morbiditas, sebaliknya daerah dengan anggaran kesehatan yang sedikit justru dapat menekan angka morbiditas. Kondisi ini menggambarkan disparitas kinerja anggaran terhadap capaian bidang kesehatan, serta adanya prioritas fungsi anggaran terhadap sektor kesehatan yang masih bervariasi antar satu kab/kota dengan kab/kota lainnya.

5.1.3 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab/kota di Aceh

Anggaran kemiskinan kab/kota² di Aceh tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen, namun proporsinya terhadap APBK mengalami penurunan sebesar -1,76 persen. Data menunjukkan bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan kab/kota di Aceh sangat bervariasi dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 94,7 miliar per tahun. Proporsi anggaran kemiskinan dari anggaran daerah (APBK) juga bervariasi antar kab/kota. Pada tahun 2013, total anggaran kemiskinan kab/kota berjumlah Rp 637,1 miliar. Pada tahun 2014, jumlahnya naik tipis 8 persen menjadi Rp 688,6 miliar. Apabila dibandingkan dengan total APBK tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 802,6 miliar dan Rp 1,03 triliun, maka proporsi anggaran kemiskinan kab/kota di Aceh rata-rata sebesar 11,3 persen dan 9,6 persen.

Kab. Aceh Barat tercatat mengalokasikan anggaran kemiskinan paling besar dalam dua tahun terakhir, diikuti Aceh Barat Daya dan Kota Langsa. Aceh Barat mengalokasikan anggaran kemiskinan masing-masing sebesar Rp 432,1 miliar atau Rp 216 miliar pada tahun 2013 dan 2014, atau sebesar 24% dan 22% dari APBK-nya. Di sisi lain, Aceh Jaya

tercatat sebagai daerah yang paling sedikit mengalokasikan anggaran kemiskinan yakni hanya sebesar Rp 96,1 miliar atau Rp 48 miliar per tahun. Aceh Utara tercatat memiliki proporsi anggaran kemiskinan dari APBK yang paling kecil yakni hanya 4,7% (2013) dan 3,7% (2014) senilai Rp 64,4 miliar dan Rp 65,1 miliar. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 15.



Sumber : Bappeda Kab/Kota, 2015 (diolah)

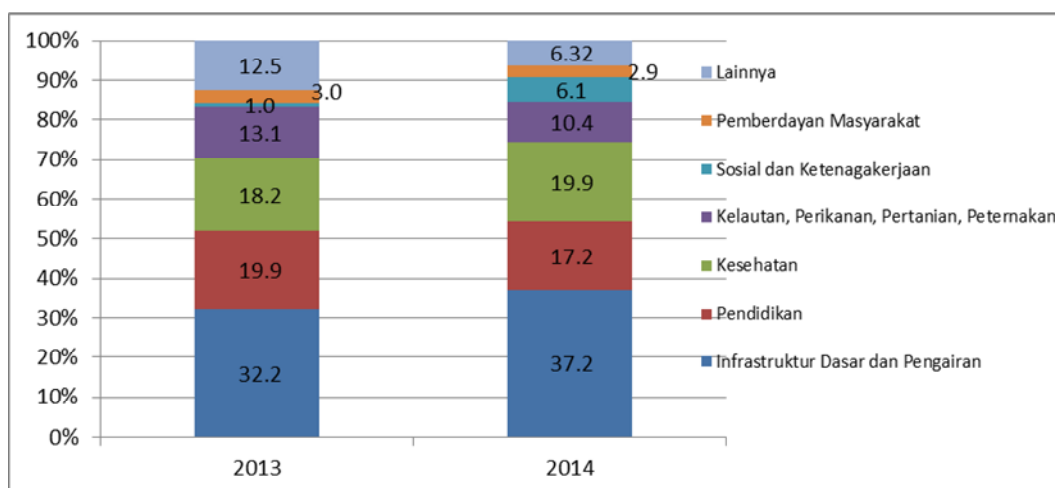
Gambar 15. Proporsi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Terhadap APBK Kab/Kota di Aceh

Gambar 15 menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi proporsi anggaran kemiskinan kab/kota di Aceh. Kabupaten Aceh Utara yang memiliki anggaran (APBK) paling besar yakni Rp 1,36 triliun (2013) dan Rp 1,75 triliun (2014) hanya memplotkan anggaran kemiskinan

² Anggaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan hanya diperoleh dari Bappeda tujuh Kab/Kota di Aceh yakni: Langsa, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Aceh Barat, Banda Aceh, dan Aceh Jaya.

masing-masing sebesar Rp 64,4 miliar (4,7%) dan Rp 67,5 miliar (3,8%). Sebaliknya pada tahun yang sama, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hanya memiliki APBK Rp 568 miliar dan Rp 777,2 miliar, namun mampu menganggarkan Rp 148,5 miliar (25%) dan Rp 258,6 miliar (33%) untuk program kemiskinan.

Selain isu proporsi anggaran kemiskinan, juga terdapat isu distribusi yang relatif kurang proporsional dan cenderung divergen untuk banyak urusan. Pada tahun 2013, anggaran kemiskinan terdistribusi pada 18 urusan, namun mayoritas (75%) terkonsentrasi pada 5 urusan yakni: Infrastruktur Dasar (23%), Pendidikan (20%), Kesehatan (18%), Kelautan, perikanan, peternakan, pertanian (13%), dan Pengairan (9%). Sisanya tersebar pada 13 urusan lainnya. Sementara itu, alokasi untuk urusan sosial dan ketenagakerjaan hanya sebesar 1%. Pada tahun 2014, anggaran kemiskinan terdistribusi pada 21 urusan, namun mayoritas (82%) terkonsentrasi pada 6 urusan yakni: Infrastruktur Dasar (23%), Pendidikan (19%), Kesehatan (18%), Kelautan, perikanan, peternakan, pertanian (13%), Pengairan (9%), dan Baitul Mal (5%). Sisanya sebesar 18% tersebar pada 14 urusan lainnya. Sama dengan tahun sebelumnya, urusan sosial dan ketenagakerjaan yang juga mendapat alokasi sebesar 1%. (Gambar 16).



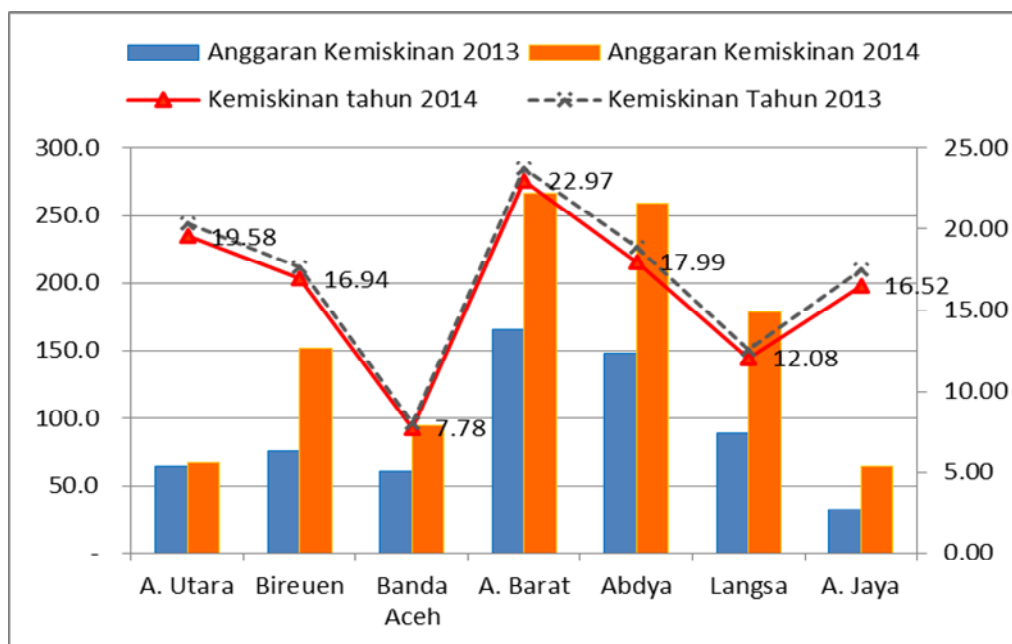
Sumber : Bappeda Kab/Kota, 2015 (diolah)

Gambar 16. Anggaran Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2013-2014

Beberapa hal di atas menggambarkan bahwa koordinasi dan sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Aceh masih perlu ditingkatkan. Selain isu disparitas proporsi, komposisi, serta sebaran yang divergen, juga terdapat indikasi penetapan anggaran yang kurang relevan dengan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah. Kondisi ini menyimpulkan bahwa indikasi bahwa fungsi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan belum diterapkan secara konsisten oleh masing-masing kab/kota. Dengan kata lain, alokasi anggaran kemiskinan kab/kota belum sepenuhnya relevan dengan kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran dibandingkan dengan tingkat kemiskinan masing-masing kab/kota. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi tidak serta-merta memplotkan anggaran yang besar untuk program penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan rata-rata sampel kab/kota di Aceh pada tahun 2013 dan 2014 tercatat

sebesar 16,97% dan 16,26%. Kabupaten Aceh Barat tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 23,7% (2013) dan 22,97% (2014), disusul Kabupaten Aceh Utara sebesar 20,34% dan 19,58%. Sementara itu, proporsi anggaran kemiskinan terhadap APBK yang terbesar justru berada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sebesar 25% atau senilai Rp 148,5 miliar (2013) dan 33% atau senilai Rp 258,6 miliar (2014). Di sisi lain, Kabupaten Aceh Utara yang memiliki anggaran (APBK) terbesar, Rp 1,36 triliun (2013) dan Rp 1,75 triliun (2014) hanya memplotkan anggaran kemiskinan sebesar 4,7% (Rp 64,4 miliar) dan 3,8% (Rp 67,5 miliar). Padahal, tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh Utara terbilang tinggi, yakni 20,34% (2013) dan 19,58% (2014). (Gambar 17).

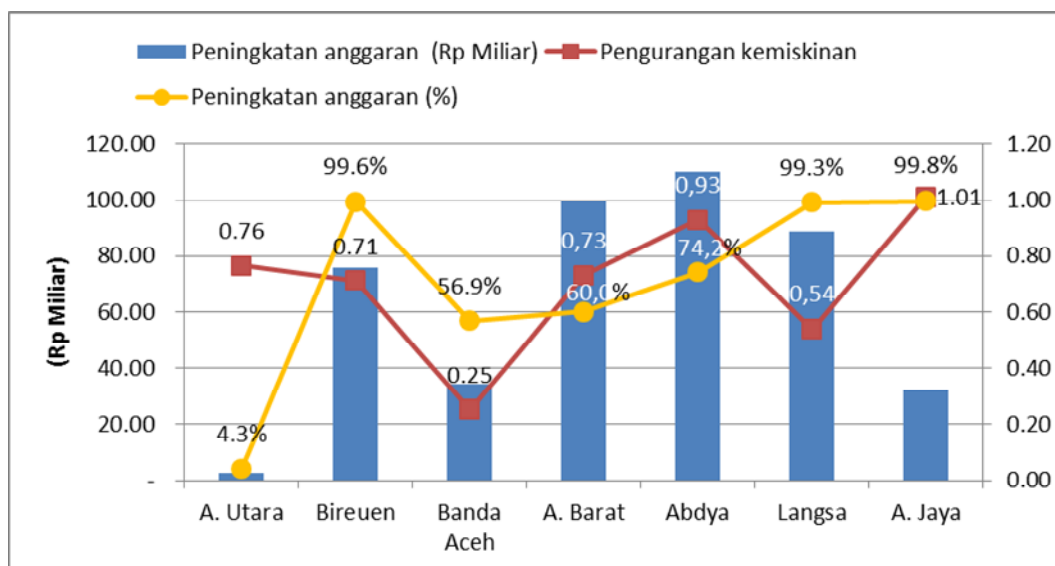


Sumber : Bappeda Kab/Kota dan BPS Aceh, 2015 (diolah)

Gambar 17. Relevansi Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota di Aceh

Proporsi anggaran kemiskinan yang belum konsisten dan belum berimbang antar kab/kota menjadi salah satu tantangan dalam mengukur efektifitas anggaran kemiskinan di Aceh. Kondisi ini jelas mengakibatkan sulitnya mengevaluasi upaya penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Meski secara umum dapat dilihat bahwa anggaran yang kecil cenderung tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, namun di beberapa daerah dengan anggaran yang besar ternyata juga mengalami hal serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir, terjadi peningkatan anggaran kemiskinan kab/kota di Aceh rata-rata sebesar 70,6 persen. Kabupaten Aceh Jaya, Bireuen, dan Kota Langsa tercatat sebagai daerah yang memiliki peningkatan anggaran kemiskinan terbesar, masing-masing sebesar 99,8, 99,6, dan 99,3 persen dengan nominal Rp 31,87 miliar, 75,77 miliar, dan 88,84 miliar. Sementara, capaian pengurangan angka kemiskinan tertinggi hanya terjadi di Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 1,01 persen, dari 17,53 persen (2013) menjadi 16,52 (2014). Padahal, secara absolut jumlah anggaran kemiskinan Kab. Aceh Jaya termasuk yang paling minim. Sedangkan Kabupaten Bireuen dan Kota Langsa hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,71 dan 0,54 persen. Di sisi lain, Kabupaten Aceh Utara yang memiliki anggaran kemiskinan

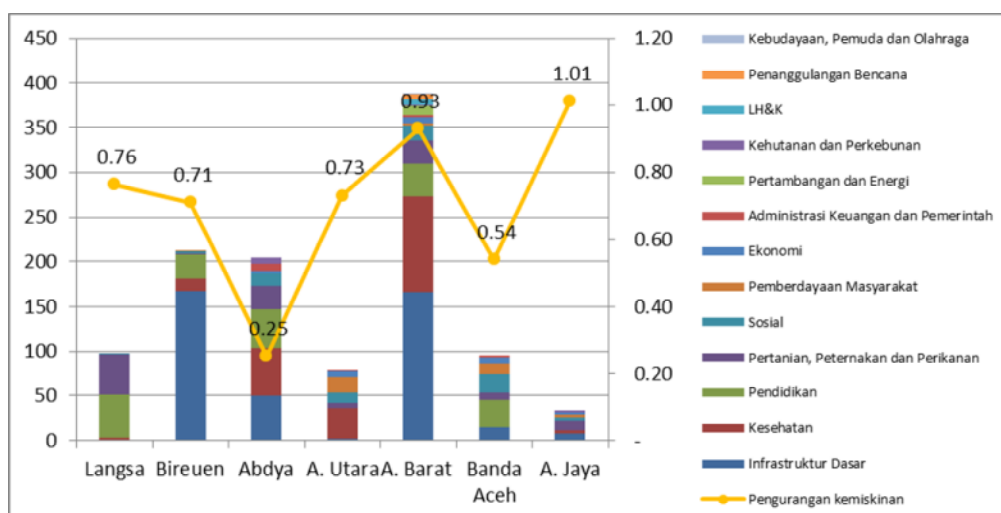
cukup kecil, dan juga mengalami peningkatan anggaran yang sangat sedikit (4,3 %), namun berhasil menekan angka kemiskinan relatif lebih baik dibandingkan Bireuen dan Langsa yakni 0,76 persen, dari 20,34 menjadi 19,58. (Gambar 18)



Sumber : Bappeda Kab/Kota dan BPS Aceh, 2015 (diolah)

Gambar 18. Peningkatan Anggaran dan Pengurangan Angka Kemiskinan

Belum efektifnya fungsi anggaran terhadap upaya penanggulangan kemiskinan turut dipengaruhi oleh minimnya kualitas perencanaan dan penganggaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari variasi distribusi dan komposisi anggaran yang belum seimbang antara satu dinas/lembaga dengan dinas/lembaga lainnya. Hal yang sama juga terlihat ketika dibandingkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran program kegiatan kemiskinan masih belum terpola dengan baik sehingga masing-masing kab/kota mendistribusikan anggaran kemiskinan sekenanya. Misalnya, Kota Langsa hanya mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk 4 urusan dengan komposisi: Pendidikan (49%), Pertanian, Peternakan dan Perikanan (47%), Kesehatan (3%), dan Sosial (1%). Sementara, Kab. Aceh Barat yang memiliki anggaran kemiskinan paling besar (Rp 386,5 miliar) mendistribusikannya untuk 13 urusan, dimana 91 persennya terdistribusi pada 5 urusan saja yakni: Infrastruktur Dasar (43%), Kesehatan (28%), Pendidikan (9%), Pertanian, peternakan, dan perikanan (7%), dan Sosial (4%). Sisanya didistribusikan pada 8 urusan lainnya. Berikutnya, Kabupaten Aceh Jaya yang memiliki anggaran kemiskinan relatif paling kecil (Rp 33,3 miliar) dibanding kab./kota lainnya, namun memiliki capaian paling tinggi dimana mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,01 persen. Distribusi anggaran kemiskinan di Kab. Aceh Jaya dialokasikan untuk 8 urusan dengan komposisi sebagai berikut: Pertanian, peternakan, dan perikanan (31%), Infrastruktur Dasar (24%), Sosial (12%), Pemberdayaan Masyarakat (11%), Kesehatan (8%), Ekonomi (7%), Kehutanan dan Perkebunan (6%), dan Pendidikan (1%). (Gambar 19).



Sumber : Bappeda Kab/Kota dan BPS Aceh, 2015 (diolah)

Gambar 19. Distribusi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 2014

Gambar 19 di atas memperlihatkan inkonsistensi program/kegiatan antar kab./kota di Aceh. Kondisi ini menggambarkan bahwa fungsi anggaran belum sepenuhnya disusun sebagai insentif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Dengan kata lain, visi/misi, pemahaman dan komitmen pengentasan kemiskinan masih beragam di antara kabupaten/kota di Aceh. Hal ini mengindikasikan lemahnya koordinasi dan pengawasan program pengentasan kemiskinan di Aceh.

5.1.4 Efektifitas Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Hasil FGD menunjukkan bahwa ada tiga permasalahan mendasar yang mengakibatkan tujuan pembangunan pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, program yang dijalankan lebih bersifat politis dibandingkan aspek strategis dan ekonomis. Pada kenyataannya banyak terjadi program-program yang dirancang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penentuan lokasi dan penerima manfaat program lebih ditentukan oleh “kedekatan spesial” kelompok-kelompok tertentu dengan birokrasi maupun legislatif. Kondisi ini tentunya sangat sulit untuk menilai efektifitas program yang dilakukan dari aspek strategis dan ekonominya. Dan tentunya mengakibatkan kecemburuan sosial antar kelompok petani dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya kelompok-kelompok petani yang tidak memiliki “kedekatan spesial” dengan pemangku kebijakan.

Kedua, penilaian keberhasilan program pembangunan lebih ditekankan pada penyerapan anggaran. Keberadaan P2K-APBA yang menitikberatkan pada percepatan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan SKPA dinilai telah memberikan andil yang cukup positif untuk menggenjot penyerapan anggaran. Keberhasilan capaian realisasi keuangan APBA 2011 sebesar 93,5% perlu mendapatkan apresiasi besar. Namun keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari tinggi-rendahnya penyerapan anggaran akhir tahun tetapi seberapa besar dampak pembangunan yang dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat menjadi poin yang lebih penting.

Ketiga, sinergi dan ego sektoral. Pembangunan di sektor pertanian selama ini masih belum menunjukkan adanya sinergisitas antar seluruh stakeholder. Sinergi antar bidang pembangunan sangat diperlukan demi kelancaran pelaksanaan dan tercapainya secara efektif dan efisien berbagai sasaran pembangunan. Demikian pula dengan adanya indikasi ego sektoral didalam suatu pengelolaan pembangunan. Satu sektor merasa lebih superior dibandingkan sektor-sektor lain. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan belum transparannya pembagian tugas dan fungsi instansi-instansi pertanian, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan kekuasaan. Pembangunan masing-masing sektor yang berdiri sendiri akan sulit mencapai keberhasilan. Konkritnya, program-program pertanian yang dilakukan di Aceh harus ditunjang oleh semua sektor terkait.

Berbagai program dan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin secara umum dinilai telah efektif, sementara bantuan yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha cenderung tidak efektif. Program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Rehab Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sosial berbasis keluarga seperti raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), pengembangan kawasan transmigrasi, dan lainnya. Sementara program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hampir bermiripan yang terdiri dari Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), beasiswa anak yatim, Pemodal KUMKM, Bantuan sarana dan prasarana untuk petani/peternak/nelayan/dan pedagang, program rehab kebun masyarakat (bantuan bibit), dan bantuan lainnya. Sedangkan program dan bantuan dari LSM juga beragam dan bertujuan menuntaskan isu tertentu dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Program LSM ini secara umum dianggap lebih sukses karena fokus dan terukur. Hanya saja programnya bersifat temporer dan tidak berlanjut. Sementara program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memiliki tingkat efektifitas yang beragam. Bantuan-bantuan sosial yang sifatnya membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin (seperti raskin, jaminan kesehatan, beasiswa, bantuan rumah, dan sejenisnya) dinilai telah cukup efektif meskipun persoalan keakuratan data menjadi penyebab biasanya para penerima manfaat. Semetara bantuan-bantuan yang bersifat pemberdayaan (bantuan modal, bantuan alat/sarana, bantuan bibit, dan sejenisnya) memiliki tingkat efektifitas yang rendah. Ini akibat rendahnya sumberdaya masyarakat miskin untuk memanfaatkan bantuan tersebut serta tidak adanya pendampingan. Program baru seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) juga dipercayai akan tidak berhasil jika sumberdaya aparat desa tidak dibenahi dan pendampingan tidak diperkuat.

Tabel 112. Efektifitas Program Pengentasan Kemiskinan

Program dan Bantuan	Efektifitas	Kelebihan	Kekurangan
A. Pemerintah Pusat			
1. PNPM	Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Program ini sangat partisipatif karena dimulai dengan musyawarah desa - Ada desa prioritas penerima manfaat atas dasar musyawarah - Aktifitas simpan pinjam perempuan umumnya sukses 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua desa ada PNPM - Kegagalan manajemen simpan pinjam (tingginya tunggakan)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Belum dapat dinilai (program baru)	Jumlah dana ADD cukup potensial untuk membangun desa	Ada potensi ADD disalahgunakan oleh aparat desa akibat lemahnya SDM dan pengawasan
3. Bantuan Rumah	Efektif	Sangat membantu warga miskin yang tidak memiliki rumah atau rumahnya telah rusak	Masih adanya penerima yang berdasarkan kedekatan dengan pemangku kekuasaan (KKN)
4. Pengembangan kawasan Transmigrasi	Efektif	Program ini sukses di beberapa desa dan warga menetap disana	Ada sejumlah desa yang warganya pindah setelah jadup habis
5. Bansos Berbasis Keluarga (i.e Raskin)	Efektif	Sangat membantu warga miskin yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya	Bantuan ini cenderung berujung pada pemerataan, sehingga tidak lagi tepat sasaran (mengurangi jatah Raskin bagi orang miskin)
6. Program Keluarga Harapan (PKH)	Efektif	Ada pendamping/verifikator penerima setiap tahun	Keterlambatan up-date data (PPLS)
B. Pemerintah Provinsi			
1. BKPG	Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Dimulai dengan musyawarah desa - Dikelola oleh TPK 	Khusus program simpan pinjam mengalami kemacetan
2. Program Rumah Layak Huni (RTLH)	Efektif	Sangat membantu warga miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada penerima yang belum tepat sasaran - Tidak adanya verifikasi (penerima tidak di-SK-kan) - Adanya pungutan dari penerima
3. Beasiswa Anak Yatim	Efektif	Sangat membantu anak yatim yang benar-benar miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang tepat sasaran (yatim kaya juga menerima beasiswa) - Terjadinya mark up data anak yatim
4. Pendampingan Koperasi dan UMKM	Kurang (tidak) efektif	Mampu membina koperasi yang masih aktif	Pendataan lemah, penerima juga banyak tidak jelas
5. JKRA	Efektif	Sasaran sangat merata, dengan manfaat yang luar biasa	

C. Pemerintah Kab/Kota			
1. ADG	Belum dapat dinilai (program baru)	Dana ini cukup potensial untuk membangun desa	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya SDM aparatur desa mengakibatkan penggunaan dana tidak efektif - ADG cenderung digunakan untuk pembangunan fisik saja, cenderung mengabaikan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat - Tidak adanya pendataan potensi desa (profil desa) sehingga penggunaan dana cenderung tidak terarah
2. RTLH (Bantuan Rumah Layak Huni)	Efektif	Sangat membantu warga miskin	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada penerima yang belum tepat sasaran - Tidak adanya verifikasi (penerima tidak di-SK-kan) - Adanya pungutan dari penerima
3. Pemodalan UMKM	Kurang (tidak) efektif	50% penerima tepat sasaran	50% penerima tidak tepat sasaran
4. Bantuan sarana dan prasarana untuk petani, peternak, nelayan, dan pedagang`	Kurang (tidak) efektif	50% penerima tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - 50% penerima tidak tepat sasaran - Fasilitas kelompok dijadikan milik pribadi/dijual
5. Program rehab kebun masyarakat (bantuan bibit, dsb)	Kurang (tidak) efektif	50% penerima tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai kebutuhan, tapi sesuai keinginan - Bibit dijual kembali - Fasilitas dijadikan milik pribadi/dijual
6. Program populer: beasiswa untuk siswa (SD, SMP, dan SMA), dana takziah, biaya berobat, dsb.	Kurang efektif	Mampu menghibur masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa dari keluarga mampu juga mendapatkan beasiswa (tidak tepat sasaran) - Melunturkan nilai-nilai sosial dan kegotong royongan dalam masyarakat (dana takziah, dsb)
D. Donor/LSM			
Berbagai program penguatan pelayanan publik, penguatan kapasitas masyarakat, rehabilitasi perkebunan, dsb.	Efektif	Fokus pada pemecahan masalah tertentu (terarah), sangat efisien.	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi dengan pemerintah - Cenderung mengabaikan kesuksesan pemerintah - Temporer/tidak sustainable/tidak dapat dilanjutkan oleh pemerintah

Sumber: Hasil FGD (2015)

Percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan berbagai kebijakan, strategi dan pendekatan program yang meliputi perbaikan sistem data, fokus anggaran, regulasi usaha, infrastruktur ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi nilai-nilai sosial. Program pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan data. Beragamnya data yang dipunyai antar lembaga dirasakan cukup membingungkan. Oleh sebab itu diperlukan penyamaan, integrasi, pemusatan dan pemutakhiran data kemiskinan disetiap kabupaten/kota. Dengan demikian koordinasi dan kerjasama antar instansi menjadi sangat penting. Selain itu juga diperlukan penetapan kriteria atau target penerima manfaat berbagai program bantuan dari pusat/provinsi/kabupaten sehingga program menjadi tepat sasaran. Kemudian, diperlukan pola penganggaran pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan pembangunan, bukan pada belanja pegawai, guna mengurangi inefisiensi. Terkait ini juga dibutuhkan road map penggunaan dana OTSUS untuk penanggulangan kemiskinan yang setiap tahun fokus kepada pemecahan masalah tertentu (infrastruktur, sosial, Kultural, kesehatan, pendidikan, dan lainnya). Percepatan penanggulangan kemiskinan juga membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan investasi. Ini termasuk peningkatan kualitas jalan ke berbagai wilayah terisolir terutama bagian tengah provinsi Aceh, perbaikan infrastruktur dasar kab/kota (seperti listrik, air bersih, waduk, pelabuhan, dan lainnya), perbaikan regulasi dan sistem registrasi bisnis, serta menjamin keamanan investasi (seperti Menanggulangi ancaman dan pungli). Berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin juga tidak akan bermanfaat jika tidak adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur desa untuk pengelolaan berbagai dana. Terkait ini, penguatan BUMG sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa menjadi sangat penting. Disamping itu, pembinaan kelompok-kelompok usaha dalam masyarakat juga memerlukan pendampingan yang kuat dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan penyuluh-penyuluh pertanian dan perikanan yang berpengetahuan tinggi dan profesional. Fasilitator desa harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola berbagai sumberdaya desa. Masyarakat juga perlu ditingkatkan kemampuannya dalam hal pengawasan berbagai program. Untuk merehab spirit usaha dan mindset kemandirian ekonomi, pendekatan agama dan lokal wisdom harus diutamakan. Dalam hal ini diperlukan usaha-usaha untuk menghidupkan kembali berbagai kearifan lokal seperti Kultural gotong royong dan partisipasi.



**STRATEGI DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

6

Temuan-temuan Utama

- Tata kelola pemerintahan merupakan simpul utama dalam upaya pengurangan kemiskinan di Aceh. Mengingat bahwa anggaran pemerintah memainkan peranan utama dalam perekonomian di Aceh, maka kebijakan anggaran APBD yang berpihak kepada kemiskinan (*Pro-Poor Budgeting*) mutlak dibutuhkan.
- Banyak dana yang telah diluncurkan guna mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh, baik oleh pemerintah melalui dana APBN, APBA dan APBK maupun lembaga non-pemerintah, namun hasilnya dinilai belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh secara signifikan.
- Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan dihasilkan berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, wilayah regional (zona), dan provinsi harus dianalisis melalui pendekatan SWOT.
- Implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan masih mendapatkan kendala di lapangan antara lain ketidaksiapan keorganisasian aparatur pemerintah desa untuk memenuhi persyaratan administrasi bantuan dan bentuk pertanggungjawaban.
- Implementasi yang diharapkan adalah setiap program dan kegiatan harus didasarkan pada pendataan yang baik (*by name by address*), terukur dan valid, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal dan vertikal.

Bab ini menjelaskan tentang kerangka utama penyusunan strategi, prinsip-prinsip pengembangan dan strategi pengurangan kemiskinan di masa yang akan datang. Kerangka utama ini penyusunan strategi disusun dengan mengelaborasi beberapa kluster utama dari hasil yang diharapkan dalam upaya pengurangan kemiskinan di Aceh secara sistemik dan menyeluruh, meliputi: (1) tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, (2) pertumbuhan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan (3) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan merupakan simpul utama dalam upaya pengurangan kemiskinan di Aceh. Mengingat bahwa anggaran pemerintah memainkan peranan utama dalam perekonomian di Aceh, maka kebijakan anggaran APBD yang berpihak kepada kemiskinan (*Pro-Poor Budgeting*) mutlak dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan upaya membangun komitmen politik (*political will*) untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. Oleh sebab itu, koordinasi, komunikasi dan akuntabilitas, pelibatan para pihak, serta pengawasan menjadi faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan di Aceh secara holistik dan sinergis.

Disadari bahwa meskipun pertumbuhan mutlak diperlukan, namun belum cukup untuk mengurangi angka kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu dicari formula yang sesuai dengan mempertimbangkan potensi dan faktor utama yang memicu kemiskinan di masing-masing daerah.

6.1. Prinsip-prinsip Strategi

Untuk memastikan integritas strategi yang akan disusun, maka perlu dibangun prinsip-prinsip yang akan memandu intervensi dan tindakan yang akan diambil ke depan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa strategi yang disusun dapat dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan dan dapat mengundang partisipasi aktif mereka secara konsisten. Beberapa prinsip yang penting selama pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi strategi program kegiatan kemiskinan antara lain:

- a) Keberpihakan Pengambil Kebijakan, Komitmen Politik, dan Reformasi Birokrasi
- b) Perbaikan struktur makroekonomi
- c) Peran sektor-sektor strategis
- d) Koordinasi dan kolaborasi internal
- e) Potensi Wilayah
- f) Pembangunan Manusia Berkelanjutan
- g) Keterkaitan Mikro-Makro
- h) Pengarusutamaan Isu-isu Lintas Sektoral

6.2. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Banyak dana yang telah diluncurkan guna mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh, baik oleh pemerintah melalui dana APBN, APBA dan APBD maupun lembaga non-pemerintah, namun hasilnya dinilai belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh secara signifikan. Fenomena ini mengindikasikan ada yang sesuatu keliru terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di Aceh yang telah dilakukan selama ini. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kajian bab-bab sebelumnya, pada bab ini berusaha mengkaji secara lebih cermat untuk menemukan solusi berupa strategi yang adaptif yang dapat

diimplemenasikan berdasarkan potensi dan permasalahan di masing-masing wilayah kabupaten/kota maupun provinsi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Aceh pada masa mendatang. Rumusan strategi ini akan dibagi berdasarkan jenjang wilayah, yaitu: provinsi, wilayah regional (zona), dan kabupaten/kota jika dianggap memiliki keunikan lokal atau spesifik strategi intervensi yang harus dilakukan.

6.2.1. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Provinsi Aceh

Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian intervensi dan langkah adaptif yang disarankan untuk mengefektif berbagai program pembangunan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di Aceh ke depan. Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan dihasilkan berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, wilayah regional (zona), dan provinsi yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis SWOT untuk masing-masing kabupaten/kota, wilayah regional (zona), dan provinsi dapat dilihat pada Tabel 112 berikut ini:

Tabel 113. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Provinsi Aceh

FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian dana OTSUS 2. Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh 3. Pembukaan pelabuhan bebas Sabang 4. Alokasi dana desa semakin besar 5. Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) 6. Pasar MEA lebih terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan pasar bebas MEA 2. Perubahan politik dan aturan anggaran nasional 3. Terletak di garis bencana alam 4. Terletak di wilayah perbatasan 5. Rekayasa konflik sosial baru 6. Harga produk-produk masyarakat fluktuatif 7. Asimiliasi Kultural/nilai globalisasi
FAKTOR INTERNAL	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (S-T)
<p>STRENGHT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi laut dan garis pantai laut yang panjang 2. Memiliki lahan yang subur 3. Memiliki komoditas unggulan daerah 4. Memiliki UUPA 5. Memiliki Otonomi Khusus 6. Memiliki APBA dan APBN yang lebih besar 7. Memiliki 8 PTN dan 10 PTS 8. Memiliki angkatan kerja muda 9. Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa 10. Semakin Banyak program pemberdayaan masyarakat 11. Masih kuatnya nilai-nilai Islam dan adat dalam masyarakat Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mengembangkan kluster model berdasarkan potensi komoditas dan lokalitas pada masing-masing kabupaten/kota 2. Membangun sarana dan prasarana dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi 3. Memperkuat pola kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat (kelembagaan) dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal 4. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal 5. Penguatan manajemen tata kelola pemerintah Aceh 6. Penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing kualitas produk lokal Aceh melalui perbaikan penerapan teknologi 2. Perbaikan input produksi 3. Pembangunan agro-industri berbasis produk pertanian Aceh 4. Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik dan lembaga sertifikasi 5. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro 6. Memperkuat lembaga keagamaan/fungsional adat pada tingkat lokal 7. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong 8. Membangun lembaga dewan riset dan inovasi daerah

WEAKNESS	STRATEGI (W-O)	STRATEGI (W-T)
1. Blueprint Pemanfaatan dana OTSUS belum selesai	1. Menyelesaikan Blueprint pemanfaatan dana OTSUS	1. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk Aceh
2. Belum memiliki sistem perbenihan utk meningkatkan produktivitas usaha	2. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih Aceh	2. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana
3. Infrastruktur irigasi belum tersedia secara optimal	3. Membangun dan memperbaiki irigasi prioritas berdasarkan potensi kabupaten/kota	3. Integrasi pengetahuan kebcanaan dalam perencanaan pembangunan Aceh
4. Infrastruktur jalan produksi belum tersedia secara optimal	4. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi	4. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakata-rakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah
5. Infrastruktur air bersih belum tersedia secara optimal	5. Membangun sistem jaringan air bersih	5. Membuat Qanun terkait sistem rekretmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintah Aceh
6. Infrastruktur kesehatan belum tersedia secara optimal	6. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di Aceh	6. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan Aceh
7. Belum berkembangnya agro-industri di Aceh	7. Memperbaiki sistem dan mutu pelayanan kesehatan Aceh	7. Membuat Qanun yang dapat mendorong penguatan dan pengembangan Partai Lokal di Aceh
8. Potensi SDM dan SDA belum terkelola secara optimal	8. Pengembangan klaster komoditas yang dapat mendorong lahirnya Agro-industri di Aceh	8. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteia calon pimpinan daerah (gubernur dan wakil gubernur) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
9. Kelembagaan keuangan dan petani belum kuat	9. Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada masing-masing kabupaten/kota	
10. Tata kelola pemerintahan lemah	10. Advokasi kebijakan dan Capacity Building secara sitematik kepada aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
11. Semangat dan nilai-nilai kerja keras masyarakat melemah	11. Membentuk tim percepatan pengurangan kemiskinan Aceh di bawah koordinasi Gubernur	
12. Angka kemiskinan masih tinggi		
13. Ketimpangan SDA dan SDM antar wilayah masih tinggi		
14. Koordinas antar lembaga terkait program kemiskinan lemah		
15. Mental ketergantungan masyarakata-kat pada pihak luar tinggi		
16. Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin		

Berdasarkan Tabel 113 dapat dirumuskan beberapa **program strategis** dalam percepatan program pengurangan kemiskinan di tingkat Provinsi Aceh sebagai berikut:

A. Strategi (S-O) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membentuk dan mengembangkan klaster model berdasarkan potensi komoditas dan lokalitas pada masing-masing kabupaten/kota
2. Membangun sarana dan prasarana dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi
3. Memperkuat pola kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat (kelembagaan) dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal
4. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal
5. Penguatan manajemen tata kelola pemerintah Aceh

B. Strategi (S-T) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing kualitas produk lokal Aceh melalui perbaikan penerapan teknologi
2. Perbaikan input produksi
3. Pembangunan agro-industri berbasis produk pertanian Aceh

4. Memperkuat dan memperbanyak lembaga pendidikan vokasi SMK /D3/Politeknik dan sertifikasi
 5. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro
 6. Memperkuat lembaga fungsional adat pada tingkat lokal
 7. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong
 8. Membentuk dan mengembangkan lembaga dewan riset dan inovasi daerah
- C. Strategi (W-O) dapat dirumuskan sebagai berikut:**
1. Menyelesaikan Blueprint pemanfaatan dana OTSUS
 2. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih Aceh
 3. Membangun dan memperbaiki irigasi prioritas berdasarkan potensi kabupaten/kota
 4. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi
 5. Membangun sistem jaringan air bersih
 6. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di Aceh
 7. Memperbaiki sistem dan mutu pelayanan kesehatan Aceh
 8. Pengembangan klaster komoditas yang dapat mendorong lahirnya Agro-industri di Aceh
 9. Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada masing-masing kabupaten/kota
 10. Advokasi kebijakan dan *Capacity Building* secara sistematis kepada aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 11. Memperkuat tim percepatan pengurangan kemiskinan Aceh di bawah koordinasi Gubernur
- D. Strategi (W-T) dapat dirumuskan sebagai berikut:**
1. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk Aceh
 2. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana
 3. Integrasi pengetahuan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan Aceh
 4. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah
 5. Membuat Qanun terkait sistem rekrutmen dan kriteria penjurangan karir dalam sistem pemerintah Aceh
 6. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan Aceh
 7. Membuat Qanun yang dapat mendorong penguatan dan pengembangan Partai Lokal di Aceh
 8. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteria calon pimpinan daerah (gubernur dan wakil gubernur) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan kembali **program strategis prioritas** dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di zona wilayah tengah, yaitu sebagai berikut:

- A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi program:**
1. Pembangunan irigasi prioritas berbasis potensi kabupaten/kota, minimal satu-tiga (1-3) irigasi prioritas per tahun menurut zona wilayah (prioritas wilayah II dan III)

2. Pembangunan infrastruktur dasar yang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat, seperti: jalan ke sentra produksi prioritas berdasarkan kebutuhan kabupaten, minimal satu-tiga (1-3) km per tahun per desa menurut zona wilayah (prioritas wilayah I, kecuali Banda Aceh); saluran irigasi ke lahan petani; dan saluran menuju tambak masyarakat
3. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan-SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas) berdasarkan potensi wilayah, minimal tiap kabupaten/kota memiliki satu SMK atau satu Politeknik atau satu Akademi Komunitas yang diarahkan untuk melatih keterampilan tenaga kerja produktif
4. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan terpadu pada suatu wilayah regional tertentu yang meliputi beberapa kabupaten/kota sehingga memiliki satu pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan regional
5. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan
6. Pembangunan fasilitas air bersih melalui sistem pompanisasi untuk desa terpilih, minimal 2 desa per mukim, prioritas desa pesisir tanpa sumber air tawar

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, meliputi program:

1. Pemberian dan penyediaan beasiswa untuk keluarga miskin
2. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin
3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian
5. Memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi, meliputi program:

1. Pembangunan dan pengembangan Bank Usaha Mikro, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin
2. Penguatan KUD dan kelompok tani mandiri melalui pedampingan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
3. Pembentukan kelompok muda wirausaha
4. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa
5. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Aceh

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, meliputi program:

1. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren
3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis produk unggulan

5. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih
 6. Mengupayakan desentralisasi manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru;
 7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah;
 8. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah.
 9. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan
- E. Peningkatan kegiatan ekonomi yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin, meliputi program:**
1. Perbaiki sistem perbenihan Aceh
 2. Pedampingan dan penyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin melalui program kemitraan dengan pengusaha sukses
 3. Pembangunan klaster komoditas berbasis potensi wilayah, minimal perkabupaten satu klaster model yang mendukung pembangunan agro-Industri bidang perkebunan (9 komoditas strategis Aceh), bidang pangan, bidang perikanan dan peternakan
 4. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi unggulan berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten dengan melibatkan minimal 30 % masyarakat miskin
 5. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi bagi perempuan janda miskin berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten
 6. Pengembangan sistem “bapak angkat” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan bidang usaha unggulan daerah kabupaten terpilih
- F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, meliputi program:**
1. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan
 2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat melalui pendekatan klaster
 3. Pembangunan Sain Park dan Sain Techno Park sesuai dengan potensi daerah
 4. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi daerah (implementasi)
- G. Penguatan Tim Percepatan Penggulangan Kemiskinan kabupaten/kota, meliputi program:**
1. Penyelenggaraan capacity building secara sistematis bagi TIM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan
 2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan)

3. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa

H. Pembaharuan Tatakelola pemerintah dan politik

1. *Capacity Building* untuk penguatan tatakelola dan kelembagaan pemerintah
2. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan Reformasi Agraria dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan pertanian produktif
3. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan pembaharuan politik anggaran yang lebih berpihakan pada masyarakat miskin

Berdasarkan beberapa program strategis yang dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh, maka perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan prioritas yang harus terlebih dahulu dilaksanakan. Sistem pembobotan ini kemudian digunakan untuk mengurut kembali beberapa program strategis dan program prioritas yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis SWOT pada jenjang provinsi, akan dilakukan analisis SWOT pada jenjang wilayah yang merupakan representatif dari beberapa kabupaten yang dianggap memiliki karakteristik yang relatif sama. Karena itu, salah satu alasan dan tujuan dilakukan SWOT pada jenjang zona wilayah, bukan pada jenjang kabupaten, adalah untuk menghindari terjadinya banyak pengulangan pada saat analisis potensi dan masalah dalam merumuskan strategi pengurangan kemiskinan di kabupaten yang termasuk dalam zona wilayah tersebut.

Berdasarkan karakteristik wilayah, maka penelitian membagi wilayah ke dalam lima zona, yaitu: 1. Pantai Timur, 2. Pantai Barat selatan, 3. Wilayah Tengah, 4. Wilayah Perkotaan dan 5. Wilayah Kepulauan. Zona Pantai Timur meliputi kabupaten: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Zona Pantai Barat meliputi kabupaten: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Singkil. Zona Wilayah Tengah meliputi kabupaten: Bener Mariah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Zona Perkotaan meliputi kota: Banda Aceh, Lhoksemawe, Langsa, dan Subulussalam. Zona Kepulauan meliputi kota/kabupaten: Sabang dan Simeulu.

6.2.2. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Zona Wilayah Pantai Timur (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang)

Wilayah Timur Provinsi Aceh meliputi kabupaten kota yang secara umum memiliki potensi utama di sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan. Untuk itu maka strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan merupakan serangkaian intervensi dan langkah adaptif yang berbasis pada tiga sub sektor tersebut. Sehingga diharapkan serangkaian program tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan di Aceh ke depan. Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan dihasilkan berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah timur Aceh yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis SWOT untuk wilayah timur Provinsi Aceh (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang) dapat dilihat pada Tabel 114.

Tabel 114. SWOT Permasalahan dan Potensi di Wilayah Timur Aceh.

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian dana OTSUS 2. Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh 3. Alokasi dana desa semakin besar 4. Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) 5. Pasar MEA lebih terbuka 6. Permintaan Produk Perikanan dan Perkebunan yang semakin meningkat. 	<p>THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan pasar bebas MEA 2. Perubahan politik dan aturan anggaran nasional 3. Terletak di garis bencana alam 4. Terletak di wilayah perbatasan 5. Rekayasa konflik sosial baru 6. Biaya Produksi relative tinggi. 7. Akses Pelarian Modal ke luar Aceh
<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>STRATEGI (S-O)</p>	<p>STRATEGI (S-T)</p>
<p>STRENGHT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi laut dan garis pantai laut yang panjang 2. Memiliki lahan yang subur 3. Memiliki komoditas Perkebunan Unggulan (Kakao, Kelapa Sawit dan Karet) 4. Memiliki Sarana Pelabuhan Laut yang memadai 5. Memiliki 4 PTN dan 10 PTS 6. Piramida Penduduk 7. Penduduk Sangat Heterogen 8. Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa 9. Indeks Pembangunan Manusia yang relative lebih baik dibandingkan dengan bagian barat-selatan dan tengah. 10. Lemahnya Infrastruktur Jalan Produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mengembangkan klaster model berdasarkan potensi komoditas dan lokalitas 2. Membangun sarana dan prasarana dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi 3. Memperkuat pola kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat (kelembagaan) dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal 4. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing kualitas produk lokal Aceh melalui perbaikan penerapan teknologi 2. Perbaikan input produksi 3. Pembangunan agro-industri berbasis produk pertanian. 4. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro 5. Memperkuat lembaga keagamaan/ fungsional adat pada tingkat lokal 6. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong 7. Membangun lembaga dewan riset dan inovasi daerah

WEAKNESS	STRATEGI (W-O)	STRATEGI (W-T)
<p>1. Produk Unggulan Perkebunan Masih Sangat Terbatas.</p> <p>2. Produktivitas dan daya saing Sektor Pertanian (perkebunan dan perikanan) Relatif masih sangat rendah</p> <p>3. Pengetahuan masyarakat sangat terbatas terhadap budidaya perikanan yang ramah lingkungan.</p> <p>4. Belum tersedianya bahan tanaman yang berkualitas dan bersertifikasi.</p> <p>5. Terbatas dan rendahnya SDM Petani dan Penyuluh</p>	<p>1. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih Aceh</p> <p>2. Membangun dan memperbaiki irigasi prioritas berdasarkan potensi kabupaten/kota</p> <p>3. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi</p> <p>4. Membangun sistem jaringan air bersih</p> <p>5. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di Aceh</p> <p>6. Pengembangan klaster komoditas yang dapat mendorong lahirnya Agro-industri di Aceh</p> <p>7. Mendorong lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada masing-masing kabupaten/kota</p> <p>8. Memperkuat tim percepatan pengurangan kemiskinan Aceh di bawah koordinasi Wakil Bupati/Walikota</p>	<p>1. Membangun dan mengembang-kan sentra pemasaran produk-produk pertanian dan perikanan.</p> <p>2. Integrasi pengetahuan keben-canaan dalam perencanaan pembangunan Aceh</p> <p>3. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan Aceh</p> <p>4. Membuat Qanun yang dapat mendorong penguatan dan pengembangan Partai Lokal di Aceh</p>

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan kembali **program strategis** dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Wilayah Aceh Bagian Timur, yaitu sebagai berikut:

A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi:

1. Pembangunan dan pengambangan irigasi, khususnya untuk centra-centra produksi pangan (Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireueun, Aceh Utara dan Aceh Timur).
2. Pembangunan Infrastruktur dasar, seperti: jalan ke sentra produksi, khususnya centra produksi perkebunan; fasilitas air bersih untuk wilayah prioritas terpilih
3. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan terpadu, tiap Regional Wilayah memiliki satu pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan regional.
4. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan .

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia yang meliputi:

1. Pemberian dan penyediaan beasiswa untuk keluarga miskin
2. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin

3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian
5. Memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah.

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi.

1. Pembangunan dan pengembangan Bank Usaha Mikro atau Baitul Mal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin
2. Penguatan KUD dan kelompok tani mandiri melalui pedampingan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
3. Pembentukan kelompok muda wirausaha
4. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa
5. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Aceh

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

1. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih.
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren.
3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis produk unggulan
5. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan
6. Mengupayakan desentralisasi manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru;
7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah;
8. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah.
9. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan

E. Peningkatan kegiatan ekonomi real yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin.

1. Perbaiki sistem perbenihan Aceh
2. Pedampingan dan peyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin
3. Pembangunan klaster komoditas berbasis potensi wilayah, minimal perkabupaten satu klaster model yang mendukung pembangunan agro-Industri bidang perkebunan (9 komoditas strategis Aceh), bidang pangan, bidang perikanan dan peternakan
4. Pedampingan dan pemodalan kegiatan ekonomi unggulan berbasis klaster model

F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

1. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan.
2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
3. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi daerah (implementasi)

G. Penguatan Tim Percepatan Penggulangan Kemiskinan kabupaten/kota.

1. Penyelenggaraan capacity building secara sistematis bagi TIM aparaturnya pemerintah, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan)
3. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa

6.2.3 Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Zona Wilayah Pantai Barat – Selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Singkil)

Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah barat - selatan saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk wilayah Barat – Selatan yang di susun berdasarkan potensi komoditas yang bisa dikembangkan seperti di bidang perkebunan adanya kelapa sawit, karet, nilam dan pala sedangkan untuk potensi di bidang perikanan seperti budidaya keramba, udang dan kepiting. Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan dihasilkan berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten yang ada di wilayah pantai barat selatan yang nantinya akan dianalisis melalui pendekatan SWOT.

Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan di lakukan di Wilayah Barat – Selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil) dapat dirumuskan dengan analisis SWOT permasalahan dan potensi yang ada di Wilayah Barat – Selatan seperti tertera pada Tabel 115.

Tabel 115. SWOT Permasalahan dan Potensi di Wilayah Barat – Selatan

<p><u>FAKTOR EKSTERNAL</u></p>	<p><u>OPPORTUNITY</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian dana OTSUS 2. Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh 3. Alokasi dana desa semakin besar 4. Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) 5. Pasar MEA lebih terbuka 6. Investasi di sektor pertanian semakin berkembang 7. Investasi di sektor tambang semakin berkembang (batubara dan emas) 8. Bantuan sosial anak yatim 9. Permintaan Produk Perikanan dan Perkebunan yang semakin meningkat. 	<p><u>THREATS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan pasar bebas MEA 2. Perubahan politik dan aturan anggaran nasional 3. Terletak di garis bencana alam 4. Rekrutasi konflik sosial baru 5. Harga produk-produk masyarakat fluktuatif 6. Asimiliasi Kultural/nilai globalisasi 7. Kerusakan lingkungan akibat berkembangnya investasi di sektor perkebunan dan tambang 8. Turunan produk olahan perkebunan 9. Produktifitas hasil perkebunan relatif sangat rendah 10. Akses permodalan yang sangat tertutup 11. Adanya ancaman Illegal fishing dari nelayan luar negeri
<p><u>FAKTOR INTERNAL</u></p>	<p><u>STRATEGI (S-O)</u></p>	<p><u>STRATEGI (S-T)</u></p>
<p><u>STRENGTH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi laut dan garis pantai laut yang panjang 2. Memiliki lahan yang subur 3. Memiliki komoditas unggulan daerah seperti pala, nilam, sawit dan karet 4. Memiliki varietas padi local 5. Memiliki angkatan kerja muda 6. Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa 7. Memiliki lembaga lokal berbasis komoditas unggulan daerah seperti forum pala. 8. Memiliki potensi hasil kayu dan non kayu 9. Memiliki hutan yang sangat luas. 10. Potensi perkembangan peternakan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Jaya 11. Potensi laut untuk perkembangan tambak dan kerambah. 12. Memiliki 1 PTN dan 9 PTS 13. Indeks Pembangunan Manusia yang relative lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Timur 14. Termasuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk dan mengembangkan klaster model berdasarkan potensi komoditas perkebunan daerah seperti pala, nilam, sawit dan karet 2. Pembangunan sarana dan prasarana dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi masyarakat di Wilayah Barat – Selatan 3. Memperkuat pola kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat (kelembagaan) dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal 4. Penguatan manajemen tata kelola pemerintahan Wilayah Barat – Selatan 5. Penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat 6. Pemberian Beasiswa Unggulan Daerah, khusus keluarga miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing kualitas produk lokal melalui perbaikan penerapan teknologi 2. Perbaikan input produksi 3. Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik dan lembaga sertifikasi 4. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro/koperasi 5. Memperkuat lembaga keagamaan/fungsional adat pada tingkat lokal 6. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa dibawah struktur Pemerintahan Gampong 7. Membentuk lembaga riset dan inovasi di Wilayah Barat – Selatan 8. Pengembangan agro-industri pala, nilam, sawit dan karet. 9. Mengembangkan teknologi pengolahan hasil untuk menaikkan tingkat produksi. 10. Pengembangan wisata

WEAKNESS	STRATEGI (W-O)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki lembaga perbenihan untuk meningkatkan produktivitas usahatani 2. Infrastruktur irigasi belum tersedia secara optimal 3. Infrastruktur jalan produksi belum tersedia secara optimal 4. Infrastruktur air bersih belum tersedia secara optimal 5. Infrastruktur kesehatan belum tersedia secara optimal 6. Belum berkembangnya agro-industri 7. Potensi SDM dan SDA belum dikelola secara optimal 8. Kelembagaan keuangan dan petani belum kuat 9. Tata kelola pemerintahan lemah 10. Semangat dan nilai-nilai kerja keras masyarakat melemah 11. Angka kemiskinan masih tinggi 12. Ketimpangan SDA dan SDM antar Kecamatan masih tinggi 13. Koordinasi antar lembaga terkait program kemiskinan lemah 14. Mental ketergantungan masyarakat-kat pada pihak luar tinggi 15. Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin 16. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan hasil hutan 17. Belum tersedianya bahan tanaman yang berkualitas dan bersertifikasi. 18. Terbatas dan rendahnya SDM Petani dan Penyuluh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih 2. Membangun dan memperbaiki irigasi prioritas berdasarkan potensi wilayah 3. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi 4. Membangun sistem jaringan air bersih 5. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di Wilayah Barat – Selatan 6. Memperbaiki sistem dan mutu pelayanan kesehatan 7. Pengembangan klaster komoditas yang dapat mendorong lahirnya Agro-industri 8. Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada masing-masing Wilayah Barat – Selatan 9. Advokasi kebijakan dan Capacity Building secara sistematis kepada aparaturnya Kabupaten/Kota 10. Mengoptimalkan fungsi peran tim percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten di bawah koordinasi Bupati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk 2. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana 3. Integrasi pengetahuan kebidanan dalam perencanaan pembangunan Aceh 4. Mengembangkan dan membentuk UKM/Koperasi untuk memasarkan produk yang ada di masyarakat 5. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah Barat – Selatan berbasis potensi wilayah 6. Membuat Qanun terkait sistem rekrutmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintahan 7. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan Wilayah Barat – Selatan

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan kembali **program strategis** dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Wilayah Barat – Selatan yaitu sebagai berikut:

A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi:

1. Pembangunan jalan ke sentra produksi seperti jalan ke sentra produksi tanaman pangan dan perkebunan minimal satu-tiga (1-3) km per tahun per desa;
2. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan-SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas) minimal memiliki satu SMK atau satu Politeknik atau satu Akademi Komunitas yang diarahkan untuk melatih keterampilan tenaga kerja produktif;
3. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan terpadu, tiap kecamatan memiliki satu pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan;
4. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan;
5. Membangun dan meningkatkan irigasi teknis pada lahan-lahan potensial serta membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah secara terkendali, satu-sepuluh (1-10) irigasi prioritas per tahun;
6. Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air;
7. Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh dengan menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah kawasan yang ada di Wilayah Barat – Selatan;
8. Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir untuk mengurangi kesenjangan antar Kecamatan/Desa;
9. Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi, fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan;
10. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat;
11. Pembangunan pasar untuk pendistribusian barang/produk pertanian, perkebunan dan perikanan yang telah ada di Wilayah Barat – Selatan;
12. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil seperti kelapa sawit, nilam, karet dan pala;
13. Pembangunan puskesmas, Pembangunan puskesmas pembantu, Pembangunan posyandu dan Pengadaan sarana dan prasarannya;
14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang bermutu.

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

1. Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah untuk keluarga miskin;

2. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin;
3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian;
5. Memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah;
6. Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan dayah;
7. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA);
8. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta pelatihan-pelatihan kejuruan;
9. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan.

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi

1. Pembangunan dan pengembangan Baitul Mal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin;
2. Pembentukan kelompok muda wirausaha;
3. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa;
4. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Barat Selatan (BASEL);
5. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-usaha kelompok dan koperasi;
6. Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi lemah;
7. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga;
8. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berkelanjutan.

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

1. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih;
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren;
3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
4. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih;
5. Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang bermutu;
6. Mengupayakan desentralisasi sekolah /manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru;
7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah;

8. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah
9. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan

E. Peningkatan kegiatan ekonomi real yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin yaitu, sebagai berikut:

1. Perbaiki sistem Pengembangan perbenihan/Pembibitan;
2. Pedampingan dan peyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin;
3. Pedampingan dan pemodalanan kegiatan ekonomi unggulan berbasis kluster model;
4. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi antara lain pengendalian konflik satwa, penetapan tapal batas antara Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan di luar KEL;
5. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar;
6. Pencegahan penebangan dan perdagangan kayu ilegal melalui penguatan dan pembinaan satuan pengamanan hutan dalam rangka terciptanya hutan lestari dan pengembangan ekonomi berkelanjutan;
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pengembangan hutan rakyat;
8. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasankawasan yang teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan Kultural lokal;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan daerah;
10. Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit dengan pelayanan unggulan;
11. Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin di seluruh wilayah kabupaten yang ada di wilayah Barat-Selatan dalam bentuk pengobatan gratis;
12. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
13. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI);
14. Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan;
15. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian: Perluasan areal Lahan (Lahan Sawah 25.000 Ha);
16. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
17. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
18. Pembangunan balai latihan kerja;
19. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan pencari kerja;
20. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat yaitu:

1. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan;
2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat;
3. Pembangunan Sain Park dan Sain Techno Park sesuai dengan potensi daerah;
4. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi daerah (implementasi);
5. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi untuk menanamkan modalnya di daerah;
6. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi bagi daerah;
7. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
8. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna;
9. Perencanaan pembangunan daerah peternakan;
10. Perencanaan pembangunan kawasan pagan;
11. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur;
12. Diversifikasi pangan melalui modernisasi aneka ragam pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga;
13. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
14. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial seperti pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (tagana), Pelatihan petugas penyuluh sosial dan penyuluh sosial keliling;
15. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
16. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan melakukan penelitian bersama;
17. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi;
18. Pengembangan desa model di wilayah Barat Selatan (BASEL);
19. Melakukan penelitian dampak lingkungan penggunaan mercury, khususnya di kawasan pertambangan emas Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya dan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

G. Penguatan Tim Percepatan Pengulangan Kemiskinan di Wilayah Barat-Selatan.

1. Penyelenggaraan capacity building secara sistematis bagi TIM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan);
3. Revitalisasi kelembagaan TKPK sehingga kelembagaan TKPK berfungsi dengan baik;
4. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa;

6.2.4. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Zona Wilayah Tengah (Bener Mariah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara)

Zona Wilayah Tengah memiliki karakteristik wilayah dengan topografi pengunungan dan

memiliki beberapa tanaman perkebunan dan buah-buahan yang khas lokal, seperti kopi, tebu, vokat dan jeruk kuprok untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Begitu juga tanaman Serei Wangi, Kemiri, Aren dan jagung untuk wilayah kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Aceh Tengah dan Gayo Lues juga memiliki ternak besar yang menjadi keunikan lokal, seperti Kuda Gayo di Takengon dan Kerbau di Gayo Lues. Selain memiliki potensi, Zona Wilayah Tengah juga memiliki beberapa kelemahan, seperti belum tersedianya jalan ke sentra produksi yang memadai, sehingga pengelolaan perkebunan rakyat menjadi kurang optimal, serta belum berkembangnya industri pengolahan dan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat lokal. Berikut ini akan dilakukan analisis SWOT untuk zona wilayah tengah (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara).

Tabel 116. SWOT Permasalahan dan Potensi Zona Wilayah Bagian Tengah

FAKTOR EKSTERNAL	OPPORTUNITY	THREATS
	<ol style="list-style-type: none"> Masih ada pembagian dana OTSUS Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh Alokasi dana desa semakin besar dari APBN Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) Minat investor thd perkebunan unggul lokal (Kopi Arabika, Tebu, Serei Wangi, Aren sbg bahan baku industri) Pasar MEA lebih terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> Persaingan pasar bebas MEA Perubahan politik dan aturan anggaran nasional Ancaman bencana alam gunung berapi, gempa bumi dan longsor Kerusakan hutan semakin luas Terletak di wilayah perbatasan (Aceh Tenggara) Harga produk-produk masyarakat fluktuatif Penguasaan lahan produktif oleh investor luar semakin luas Asimiliasi Kultural/nilai globalisasi Izin ekspor kopi semakin ketat
FAKTOR INTERNAL	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (S-T)
<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki lahan yang subur Memiliki komoditas perkebunan unggulan daerah (kopi, Tebu, Serei Wangi, Aren) Memiliki komoditas buah dan sayuran unggulan daerah (jeruk keprok, Alpokat, Nenas, Kentang, Cabe dan Tomat) Memiliki ternak unggul lokal (Kuda Gayo) Memiliki varietas padi lokal Masuk dalam kawasan yang masuk dlm Taman Nasional Gunung Leuser Memiliki kawasan hutan yg relatif luas Memiliki Perguruan Tinggi Memiliki angkatan kerja muda Merupakan kawasan pengembangan agribisnis Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa yang kuat Sudah terbentuk Asosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun jalan ke sentra produksi untuk menyokong kegiatan ekonomi, minimal 2-3 km per desa terpilih per tahun Memperbaiki sistem perbenihan terhadap beberapa komoditas unggulan lokal Membentuk dan mengembangkan kluster model komoditas perkebunan- an unggulan daerah, Kopi Arabika dan Tebu untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah; Serei Wangi, Kemiri dan Aren untuk Galo Lues dan Aceh Tenggara Membentuk dan mengembangkan kluster model komoditas buah dan sayuran unggulan daerah, Keruk Keprok, Alpukat, Kentang, Nenas untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah; Cabe, Jagung untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues, Pengembangan agro-industri kopi, gula di wilayah Aceh Tengah Pengembangan agro industri berbasis minyak atseri dan gula aren diwilayah Gayo Lues dan Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan daya saing kualitas produk perkebunan kopi gayo, tebu, serei wangi, kemiri, dan aren Peningkatan daya saing kualitas produk buah dan sayuran jeruk alpukat, nenas, kentang melalui perbaikan benih dan penerapan teknologi Pembangunan agro-industri tebu, gula aren berbasis produk pertanian Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik bidang minat kopi, gula dan aren Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro yg tumbuh bersama masyarakat, dan simpan pinjam khusus perempuan Memperkuat lembaga fungsional adat pada tingkat lokal khusus bidang pengurangan kemiskinan Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah

<p>Kopi Gayo</p> <p>13. Tumbuhnya pengusaha lokal dalam perkebunan kopi arabika</p> <p>14. Masih kuatnya nilai-nilai Islam dan adat dalam masyarakat Aceh</p> <p>15. Tumbuhnya koperasi berbasis usaha kopi</p> <p>16. Memiliki Danau Air Tawar (Aceh tengah)</p> <p>17. Memiliki hawa udara yang masih sejuk dan alami</p>	<p>Tenggara</p> <p>7. Memperkuat pola kemitraan PT dan pemerintah dan swasta dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal</p> <p>8. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)</p> <p>9. Penguatan manajemen tata kelola pemerintah melalui pelatihan Capacity Building</p> <p>10. Pemberian Beasiswa Unggulan Daerah, khusus keluarga miskin</p> <p>11. Pembangunan dayah model untuk penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>struktur Pemerintahan Gampong</p> <p>8. Membangun lembaga riset dan inovasi daerah pada tingkat kabupaten/kota</p> <p>9. Menumbuh-kembangkan koperasi berbasis usaha komoditas unggulan supaya dapat menumbuh modal usaha di tingkat masyarakat lokal</p> <p>10. Penguatan dan advokasi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan</p> <p>11. Pengembangan sektor wisata</p> <p>12. Peningkatan kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani</p>
<p>WEAKNESS</p>	<p>STRATEGI (W-O)</p>	<p>STRATEGI (W-T)</p>
<p>1. Belum memiliki sistem perbenihan utk meningkatkan produktivitas usaha</p> <p>2. Pertambahan penduduk shg alokasi penguasaan lahan semakin kecil (< 2ha)</p> <p>3. Tingkat adopsi inovasi masih lemah</p> <p>4. Sudah mulai mengeksploitasi hutan dan lereng bagi pembukaan lahan pertanian baru</p> <p>5. Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum tersedia secara optimal</p> <p>6. Infrastruktur kesehatan belum tersedia secara optimal</p> <p>7. Belum berkembangnya agro-industri di zona wilayah tengah</p> <p>8. Potensi SDM dan SDA belum terkelola secara optimal</p> <p>9. Kelembagaan keuangan dan petani belum kuat</p> <p>10. Tata kelola pemerintahan lemah</p> <p>11. Semangat dan nilai-nilai kerja keras masyarakat belum optimal</p> <p>12. Angka kemiskinan masih tinggi</p> <p>13. Koordinasi antar lembaga terkait program kemiskinan lemah</p> <p>14. Mental ketergantungan masyarakat-kat pada pihak luar tinggi</p> <p>15. Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin</p>	<p>1. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih komoditas unggulan wilayah tengah (kopi, aren, kentang, jeruk keprok)</p> <p>2. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi sawah dekat danau</p> <p>3. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi</p> <p>4. Membangun sistem jaringan air bersih</p> <p>5. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di wilayah tengah</p> <p>6. Memperbaiki mutu pelayanan kesehatan di wilayah tengah</p> <p>7. Intensifikasi komoditas unggulan wilayah tengah yang dapat mendorong lahirnya agro-industri (kopi, tebu, jeruk keprok dan Alpukat serta nenas untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah) dan Serei Wangi, Kemiri, Kakao, dan Aren untuk wilayah Gayo Lues dan Aceh Tenggara)</p> <p>8. Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada kabupaten wilayah tengah</p> <p>9. Advokasi kebijakan dan <i>Capacity Building</i> secara sistematis kepada aparat pemerintah Kabupaten wilayah tengah</p> <p>10. Membentuk tim percepatan pengurangan kemiskinan masing kabupaten wilayah tengah di bawah koordinasi Bupati</p>	<p>1. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk masyarakat wilayah tengah</p> <p>2. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan langsor</p> <p>3. Integrasi pengetahuan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan kabupaten di wilayah tengah</p> <p>4. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah</p> <p>5. Membuat Qanun terkait sistem rekretmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintah kabupaten dalam wilayah tengah</p> <p>6. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan kabupaten dalam wilayah tengah</p> <p>7. Membuat Qanun yang dapat mendorong kerjasama beasiswa anak miskin</p> <p>8. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteria calon pimpinan daerah (bupati/wakil) dan DPRD di tingkat kabupaten wilayah tengah</p> <p>9. Membentuk Team Khusus percepatan pengurangan kemiskinan kabupaten wilayah tengah</p>

Berdasarkan Tabel 116. dapat dirumuskan beberapa program strategi prioritas dalam percepatan program pengurangan kemiskinan pada jenjang zona wilayah tengah sebagai berikut:

A. Strategi (S-O) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun jalan ke sentra produksi untuk menyokong kegiatan ekonomi, minimal 2-3 km per desa terpilih per tahun
2. Memperbaiki sistem perbenihan terhadap beberapa komoditas unggulan lokal
3. Membentuk dan mengembangkan klaster model komoditas perkebunan unggulan daerah, Kopi Arabika dan Tebu untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah; Serei Wangi, Kemiri dan Aren untuk Galo Lues dan Aceh Tenggara
4. Membentuk dan mengembangkan klaster model komoditas buahan dan sayuran unggulan daerah, Keruk Keprok, Alpukat, Kentang, Nenas untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah; Cabe, Jagung untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Lues,
5. Pengembangan agro-industri kopi, gula di wilayah Aceh Tengah
6. Pengembangan agro industri berbasis minyak atseri dan gula aren di wilayah Gayo Lues dan Aceh Tenggara
7. Memperkuat pola kemitraan PT dan pemerintah dan swasta dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal
8. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)
9. Penguatan manajemen tata kelola pemerintah melalui pelatihan Capacity Building
10. Pemberian Beasiswa Unggulan Daerah, khusus keluarga miskin
11. Pembangunan dayah model untuk penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Strategi (S-T) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing kualitas produk perkebunan kopi gayo, tebu, serei wangi, kemiri, dan aren
2. Peningkatan daya saing kualitas produk buah dan sayuran jeruk alpukat, nenas, kentang melalui perbaikan benih dan penerapan teknologi
3. Pembangunan agro-industri tebu, gula aren berbasis produk pertanian
4. Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik bidang minat kopi, gula dan aren
5. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro yg tumbuh bersama masyarakat, dan simpan pinjam khusus perempuan
6. Memperkuat lembaga fungsional adat pada tingkat lokal khusus bidang pengurangan kemiskinan
7. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong
8. Membangun lembaga riset dan inovasi daerah pada tingkat kabupaten/kota

9. Menumbuh-kembangkan koperasi berbasis usaha komoditas unggulan supaya dapat menumbuh modal usaha di tingkat masyarakat lokal
10. Penguatan dan advokasi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan
11. Pengembangan sektor wisata
12. Peningkatan kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani

C. Strategi (W-O) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih komoditas unggulan wilayah tengah (kopi, aren, kentang, jeruk keprok)
2. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi sawah dekat danau
3. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi
4. Membangun sistem jaringan air bersih
5. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di wilayah tengah
6. Memperbaiki mutu pelayanan kesehatan di wilayah tengah
7. Intensifikasi komoditas unggulan wilayah tengah yang dapat mendorong lahirnya agro-industri (kopi, tebu, jeruk keprok dan Alpukat serta nenas untuk wilayah Aceh Tengah dan bener Meriah) dan Serei Wangi, Kemiri, Kakao, dan Aren untuk wilayah Gayo Lues dan Aceh Tenggara)
8. Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada kabupaten wilayah tengah
9. Advokasi kebijakan dan *Capacity Building* secara sistematis kepada aparatur pemerintah Kabupaten wilayah tengah
10. Membentuk tim percepatan pengurangan kemiskinan masing kabupaten wilayah tengah di bawah koordinasi Bupati

D. Strategi (W-T) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk masyarakat wilayah tengah
2. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan langsor
3. Integrasi pengetahuan keben-canaan dalam perencanaan pembangunan kabupaten di wilayah tengah
4. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah
5. Membuat Qanun terkait sistem rekretmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintah kabupaten dalam wilayah tengah
6. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan kabupaten dalam wilayah tengah
7. Membuat Qanun yang dapat mendorong kerjasama beasiswa anak miskin
8. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteia calon pimpinan daerah (bupati/wakil) dan DPRD di tingkat kabupaten wilayah tengah
9. Membentuk Team Khusus percepatan pengurangan kemiskinan kabupaten wilayah tengah

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan, maka dapat

dirumuskan kembali **program strategis prioritas** dalam mempercepat pengurangan kemiskinan pada jenjang zona wilayah tengah, yaitu sebagai berikut:

A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi program:

1. Membangun jalan ke sentra produksi prioritas untuk menyokong kegiatan ekonomi, minimal 2-3 km per desa terpilih per tahun berdasarkan kebutuhan kabupaten
2. Memperbaiki sistem perbenihan terhadap beberapa komoditas unggulan lokal, seperti kopi arabika, kentang, jeruk keprok, alpokat, nenas serei wangi, dan aren
3. Membentuk dan mengembangkan klaster model komoditas perkebunan unggulan daerah (kopi arabika, tebu serei wangi, kemiri dan aren) serta komoditas buahan dan sayuran unggulan daerah (jeruk keprok, alpokat, kentang, nenas, cabe, jagung)
4. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas) berbasis komoditas perkebunan, buahan dan sayuran unggulan lokal
5. Pembangunan infrastruktur dan agro-industri berbasis komoditas unggul lokal (kopi, gula tebu, gula aren, dan gula tebu)
6. Pembangunan pusat pelayanan kesehatan terpadu, melalui pembangunan pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional
7. Pembangunan fasilitas air bersih untuk desa terpilih berdasarkan kesepakatan dan potensi sumber air.
8. Pembangunan rumah dhuafa sesuai dengan kebutuhan
9. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk masyarakat wilayah tengah
10. Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana letusan gunung berapi, gempa bumi dan langsor
11. Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, meliputi program:

1. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin
2. Pemberian beasiswa unggulan daerah khusus untuk keluarga miskin
3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian
5. Integrasi pengetahuan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan kabupaten di wilayah tengah
6. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)
7. Penguatan manajemen tata kelola pemerintah melalui pelatihan *Capacity Building*
8. Penguatan dan advokasi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan
9. Pengembangan sektor wisata

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi, meliputi program:

1. Pembangunan dan pengembangan Bank Usaha Mikro atau Baitul Mal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin
2. Penguatan KUD dan kelompok tani mandiri melalui pedampingan dan kerjasama dengan stakeholder terkait
3. Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro yg tumbuh bersama masyarakat, dan simpan pinjam khusus perempuan
4. Memperkuat lembaga fungsional adat pada tingkat lokal khusus bidang pengurangan kemiskinan
5. Menumbuh-kembangkan koperasi berbasis usaha komoditas unggulan supaya dapat menumbuh modal usaha di tingkat masyarakat lokal
6. Pembentukan kelompok muda wirausaha
7. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa
8. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Aceh
9. Memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan berbasis potensi wilayah (Aceh Tenggara)
10. Memperkuat pola kemitraan PT dan pemerintah dan swasta dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal
11. Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong
12. Membangun lembaga riset dan inovasi daerah pada tingkat kabupaten
13. Pembangunan dayah model untuk penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, meliputi program:

1. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren
3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis produk unggulan
5. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih
6. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan

E. Peningkatan kegiatan ekonomi real yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin, meliputi program:

1. Peningkatan daya saing kualitas produk perkebunan kopi gayo, tebu, serei wangi, kemiri, dan aren
2. Peningkatan daya saing kualitas produk buah dan sayuran jeruk alpukat, nenas, kentang melalui perbaikan benih dan penerapan teknologi
3. Pedampingan dan peyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin melalui program kemitraan dengan pengusaha sukses

4. Pembangunan klaster komoditas berbasis potensi wilayah, minimal perkabupaten satu klaster model yang mendukung pembangunan agro-Industri bidang perkebunan (9 komoditas strategis Aceh), bidang pangan, bidang perikanan dan peternakan
5. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi unggulan berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten dengan melibatkan minimal 30 % masyarakat miskin
6. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi bagi perempuan janda miskin berbasis klaster model untuk bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan minimal satu klaster model per bidang per kabupaten
7. Pengembangan sistem “bapak angkat” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan bidang usaha unggulan daerah kabupaten terpilih
8. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih komoditas unggulan wilayah tengah (kopi, aren, kentang, jeruk keprok)
9. Membangun dan memperbaiki saluran irigasi sawah dekat danau.

F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, meliputi program:

1. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan
2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat melalui pendekatan klaster
3. Pembangunan Sain Park dan Sain Techno Park sesuai dengan potensi daerah
4. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi daerah (implementasi)

G. Penguatan Tim Percepatan Penggulangan Kemiskinan kabupaten/kota, meliputi program:

1. Penyelenggaraan *capacity building* secara sistematis bagi TIM aparatur pemerintah kabupaten dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan)
3. Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih komoditas unggulan wilayah tengah (kopi, aren, kentang, jeruk keprok)
4. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa

H. Pembaharuan Tatakelola pemerintah dan politik

1. *Capacity Building* untuk penguatan tatakelola dan kelembagaan pemerintah
2. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan Reformasi Agraria dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan pertanian produktif
3. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan pembaharuan politik anggaran yang lebih berpihakan pada masyarakat miskin
4. Membuat Qanun terkait sistem rekretmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintah kabupaten dalam wilayah tengah
5. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan kabupaten dalam wilayah tengah

6. Membuat Qanun yang dapat mendorong kerjasama beasiswa anak miskin
7. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteria calon pimpinan daerah (bupati/wakil) dan DPRD di tingkat kabupaten wilayah tengah

Berdasarkan beberapa program strategis dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh, maka perlu dilakukan pembobotan untuk menentukan prioritas yang harus terlebih dahulu dilaksanakan. Sistem pembobotan ini kemudian digunakan untuk mengurut kembali beberapa program strategis prioritas yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten yang berada dalam zona wilayah tengah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di kabupatennya masing-masing.

6.2.5. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Zona Wilayah Perkotaan (Banda Aceh, Lhoksemawe, Langsa, dan Subulussalam)

Zona Wilayah Perkotaan memiliki karakteristik wilayah dengan topografi dataran dan pesisir. Wilayah ini tidak memiliki keunikan dalam hal pertanian, walaupun demikian untuk potensi Kota Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam pertanian padi berperan dalam sektor pertanian. Demikian halnya pengembangan perikanan pesisir dan tangkap mendominasi mata pencaharian di sektor perikanan untuk Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa. Sub sektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet sangat mendukung mata pencaharian di Wilayah ini. Sektor industri dan jasa merupakan penggerak utama Wilayah Perkotaan, sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk mengembangkan perekonomian di wilayah ini.

Beberapa kelemahan pada Zona Wilayah Perkotaan yaitu, kepemilikan lahan yang dikuasai perusahaan besar, individu (pengusaha). Demikian halnya untuk sumberdaya pesisir dan laut, kepemilikan lahan pesisir dan alat tangkap didominasi oleh individu (pengusaha). Migrasi penduduk pedesaan menuju perkotaan dapat berakibat meningkatnya persaingan tenaga kerja, sementara itu rendahnya pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan tidak mampu bersaingnya penduduk di wilayah perkotaan. Berikut ini akan dilakukan analisis SWOT untuk zona wilayah tengah (Tabel 117).

Tabel 117. SWOT Permasalahan dan Potensi pada Jenjang Zona Wilayah Perkotaan (Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam)

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>OPPORTUNITY</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih ada pembagian dana OTSUS Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh Alokasi dana desa semakin besar dari APBN Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) Usaha produksi dan jasa berkembang pesat Pemberdayaan masyarakat miskin semakin meningkat melalui APBD, APBA dan APBN Memiliki kawasan industri Pasar MEA lebih terbuka 	<p>THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> Persaingan pasar bebas MEA Persaingan usaha lokal Perubahan politik dan aturan anggaran nasional Ancaman bencana alam banjir, tsunami dan tanah longsor Kerusakan hutan semakin luas Terletak di wilayah pesisir/pantai Harga produk-produk masyarakat (consumer goods) fluktuatif Penguasaan lahan produktif oleh investor luar semakin luas Asimiliasi Kultural/nilai globalisasi
<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>STRATEGI (S-O)</p>	<p>STRATEGI (S-T)</p>
<p>STRENGHT</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki lahan yang subur Potensi perikanan laut dan pesisir Potensi perkebunan dan pertanian Memiliki varietas padi lokal Memiliki kawasan hutan Memiliki Perguruan Tinggi Memiliki angkatan kerja muda Merupakan kawasan pengembangan agribisnis (perkebunan dan perikanan) Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa yang kuat Tumbuhnya pengusaha lokal di sektor produksi dan jasa Masih kuatnya nilai-nilai Islam dan adat dalam masyarakat Aceh Tumbuhnya lembaga keuangan mikro Tersedianya lembaga pelatihan ketrampilan 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan manajemen tata kelola pemerintah melalui pelatihan Capacity Building Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal Masyarakat Pemberian Beasiswa Unggulan Daerah, khusus keluarga miskin Penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat Memperkuat pola kemitraan PT dan pemerintah dan swasta dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal Membangun jalan ke sentra produksi untuk menyokong kegiatan ekonomi, minimal 2-3 km per desa terpilih per tahun di Kota Subulussalam Menyediakan dan membangun pusat-pusat UKM berbasis produk/bahan baku lokal Melatih dan mendampingi SDM untuk mengembangkan UKM produk unggulan lokal dan jasa Pengembangan perikanan darat, pesisir dan perikanan tangkap Pengembangan agro industri berbasis, pesisir dan perikanan tangkap di wilayah Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa Pengembangan agro industri perikanan darat di Kota Subulussalam 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan dan advokasi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik bidang teknik, jasaboga, pengolahan hasil pertanian Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro yg tumbuh bersama masyarakat, dan simpan pinjam khusus perempuan Memperkuat lembaga fungsional adat pada tingkat lokal khusus bidang pengurangan kemiskinan Peningkatan daya saing produk industri lokal melalui standarisasi/ISO/SNI Peningkatan daya saing industri pengolahan produk pertanian melalui standarisasi/ISO/SNI Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa di bawah struktur Pemerintahan Gampong Kerjasama Pemda – Perguruan Tinggi dalam pelatihan dan pendampingan untuk membina UKM Industri dan jasa lokal Menumbuh-kembangkan koperasi berbasis usaha komoditas unggulan supaya dapat menumbuh modal usaha di tingkat masyarakat lokal Pengembangan wisata pesisir dan laut di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe Pengembangan wisata hutan kota di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa Pengembangan wisata hutan alam di Kota Subulussalam

WEAKNESS	STRATEGI (W-O)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat adopsi inovasi masih lemah 2. Pengangguran terdidik meningkat 3. Ketrampilan rendah dan tidak sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan 4. Mulai mengeksploitasi hutan untuk membuka lahan pertanian baru 5. Angka kemiskinan rendah, namun potensi menjadi miskin tinggi 6. Penguasaan lahan semakin kecil (< 2 Ha) 7. Infrastruktur jalan ke sentra produksi belum optimal 8. Belum berkembangnya agro-industri di zona wilayah tengah 9. Potensi SDM dan SDA belum terkelola secara optimal 10. Belum optimalnya pendampingan masyarakat miskin 11. Kelembagaan keuangan dan petani belum kuat 12. Tata kelola pemerintahan lemah 13. Semangat dan nilai-nilai kerja keras masyarakat belum optimal 14. Koordinas antar lembaga terkait program kemiskinan lemah 15. Mental ketergantungan masyarakat-kat pada pihak luar tinggi 16. Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan Blueprint pemanfaatan dana OTSUS 2. Advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas secara sistematis kepada aparat pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Meningkatkan kapasitas dan kerjasama im percepatan pengurangan kemiskinan Kota di bawah koordinasi Wakil Wali Kota 4. Mendorong lahirnya satu model kawasan industri/jasa lokal pada masing-masing kota (minimal 1 unit di setiap Kota) 5. Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi di Kota Subulussalam dan Langsa 6. Membangun dan memperbaiki jalan dan fasilitas pariwisata 7. Membangun sistem jaringan air bersih 8. Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan di Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan ketrampilan/keahlian sesuai kebutuhan industri/jasa 2. Membangun dan memperkuat sentra produksi lokal berbasis potensi wilayah 3. Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk unggulan lokal (hasil pertanian, industri dan jasa) 4. Membuat Qanun terkait sistem rekretmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintah Kota 5. Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan Kota 6. Membuat Qanun tentang sistem dan kriteia calon pimpinan daerah (walikota dan wakil) di tingkat kotaMembangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana 7. Integrasi pengetahuan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan Kota

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan (Tabel 6.3), maka dapat dirumuskan kembali **program strategis** dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Wilayah Perkotaan, yaitu sebagai berikut:

A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi program:

1. Pembangunan jalan ke sentra produksi prioritas berdasarkan kebutuhan kota, minimal satu-tiga (1-3) km per tahun per desa menurut zona wilayah (prioritas wilayah I, kecuali Banda Aceh)
2. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan-SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas) berdasarkan potensi wilayah, di setiap kota memiliki satu SMK , Akademi Komunitas (AKA) atau Politeknik yang diarahkan untuk melatih keterampilan tenaga kerja produktif
3. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan
4. Pembangunan fasilitas (sentra) pertumbuhan ekonomi berbasis potensi wilayah
5. Pembangunan fasilitas air bersih melalui sistem pompanisasi untuk desa terpilih, minimal 2 desa per mukim, prioritas desa pesisir tanpa sumber air tawar

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, meliputi program:

1. Pemberian dan penyediaan beasiswa untuk keluarga miskin
2. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin
3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian
5. Meningkatkan penyediaan pelatihan dan ketrampilan berbasis potensi wilayah, industri atau pasar tenaga kerja

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi, meliputi program:

1. Pembangunan dan pengembangan Baitul Mal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin
2. Penguatan KUD dan Kelompok Tani Mandiri melalui pendampingan dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait
3. Pembentukan, penguatan dan pendampingan kelompok muda wirausaha
4. Pembangunan dan pendampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa
5. Pembangunan pusat pemasaran produk khas lokal

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, meliputi program:

1. Pelatihan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren

3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
 4. Pemberdayaan masyarakat berbasis produk unggulan
 5. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih
 6. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan
- E. Peningkatan kegiatan ekonomi real yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin, meliputi program:**
1. Pedampingan dan penyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin melalui program kemitraan dengan pengusaha sukses
 2. Pembangunan kluster komoditas berbasis potensi wilayah, minimal satu kluster model di setiap kota yang mendukung pembangunan agroindustri bidang perkebunan (9 komoditas strategis Aceh), bidang pangan, bidang perikanan dan peternakan
 3. Pedampingan dan penyertaan modal kegiatan ekonomi bagi wirausaha muda miskin berbasis kluster model untuk bidang pertanian pangan, peternakan dan perikanan minimal satu kluster model per bidang di setiap kota
 4. Pengembangan sistem “bapak angkat” dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berdasarkan bidang usaha unggulan daerah
- F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat, meliputi program:**
1. Pembentukan dan penguatan Tim khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan
 2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat melalui pendekatan kluster
 3. Pembangunan *Sains Park* dan *Sains Techno Park* sesuai dengan potensi daerah
 4. Penguatan Dekranasda dalam mendukung riset dan inovasi daerah (implementasi)
- G. Penguatan Tim Percepatan Penggulangan Kemiskinan, meliputi program:**
1. Penyelenggaraan *capacity building* secara sistematis bagi TIM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan
 2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan)
 3. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa

H. Pembaharuan Tatakelola pemerintah dan politik

1. *Capacity Building* untuk penguatan tatakelola dan kelembagaan pemerintah
2. *Capacity Building* untuk penguatan tatakelola dan kelembagaan lintas sektoral pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan Reformasi Agraria dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan pertanian produktif
4. Advokasi bagi lahirnya peraturan dan kebijakan pembaharuan politik anggaran yang lebih berpihakan pada masyarakat miskin

6.2.6. Strategi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Jenjang Zona Wilayah Kepulauan (Sabang dan Simeulu)

Persoalan kemiskinan selalu menjadi persoalan pembangunan dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan. Pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi sering menghadapi pilihan dilematis antara kemajuan pertumbuhan dan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan sepatutnya ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut maka perlu dirumuskan strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan di implementasi oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang. Strategi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan di lakukan di daerah kepulauan dapat dirumuskan dengan analisis SWOT permasalahan dan potensi yang ada di Wilayah tersebut seperti tertera pada Tabel 118.

Tabel 118. SWOT Permasalahan dan Potensi di Wilayah Kepulauan

<u>FAKTOR EKSTERNAL</u>	<u>OPPORTUNITY</u>	<u>THREATS</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pembagian dana OTSUS 2. Komitmen untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh 3. Alokasi dana desa semakin besar 4. Inovasi dan teknologi semakin berkembang 5. Pasar MEA lebih terbuka 6. Inovasi dan teknologi semakin berkembang (Alsintan) 7. Investasi di sektor pertanian semakin berkembang 8. Investasi di sektor perikanan dan semakin berkembang 9. Bantuan sosial anak yatim 10. Permintaan Produk Perikanan dan Perkebunan yang semakin meningkat. 11. Kondisi Aceh semakin kondusif 12. Permintaan ekspor terhadap cengkeh dan Lobster 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan pasar bebas MEA 2. Perubahan politik dan aturan anggaran nasional 3. Terletak di garis bencana alam 4. Rekayasa konflik sosial baru 5. Harga produk-produk masyarakat fluktuatif 6. Asimiliasi Kultural/nilai globalisasi 7. Produktifitas hasil perikanan relatif sangat rendah 8. Akses permodalan yang sangat tertutup 9. Adanya ancaman Illegal fishing dari nelayan luar negeri

FAKTOR INTERNAL	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (S-T)
<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki potensi laut dan garis pantai laut yang panjang Memiliki lahan yang subur Memiliki komoditas unggulan daerah Memiliki angkatan kerja muda Memiliki lembaga fungsional adat pada tingkat desa Semakin Banyaknya program pemberdayaan masyarakat Masih kuatnya nilai-nilai Islam dan adat istiadat dalam masyarakat Wilayah Barat – Selatan Memiliki potensi wisata bahari Memiliki hasil laut unggulan seperti lobster dan ikan karang. Memiliki komoditas unggulan seperti cengkeh, kakao dan kelapa dalam. Adanya BPKS di Sabang 	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk dan mengembangkan klaster model berdasarkan potensi komoditas dan lokalitas pada masing-masing Kecamatan Pembangunan sarana dan prasarana dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi masyarakat Memperkuat pola kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat (kelembagaan) dalam upaya menghasilkan inovasi atau teknologi berbasis kebutuhan lokal Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan lokal Penguatan manajemen tata kelola pemerintahan Penguatan nilai-nilai Agama ke dalam kehidupan bermasyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan daya saing kualitas produk lokal melalui perbaikan penerapan teknologi Pembangunan agro-industri berbasis perikanan dan kelautan seperti usaha budidaya lobster dan kepiting. Mengembangkan agro-indutri di sektor perkebunan Membangun lembaga pendidikan vokasi SMK/D3/Politeknik dan lembaga sertifikasi Memperbanyak dan memperkuat lembaga keuangan/modal mikro/koperasi Memperkuat lembaga keagamaan/fungsional adat pada tingkat lokal Membentuk lembaga perencanaan dan implementasi pembangunan desa dibawah struktur Pemerintahan Gampong Membentuk lembaga riset dan inovasi produk. Pengembangan wisata
<p>WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum memiliki lembaga perbenihan untuk meningkatkan produktivitas usaha Infrastruktur irigasi belum tersedia secara optimal Belum optimalnya pengelolaan tempat pariwisata di sabang dan simeulue Infrastruktur jalan produksi belum tersedia secara optimal Infrastruktur air bersih belum tersedia secara optimal Infrastruktur kesehatan belum tersedia secara optimal Belum berkembangnya agro-industri Potensi SDM dan SDA belum terkelola secara optimal Kelembagaan keuangan dan petani dan nelayan belum kuat Tata kelola pemerintahan lemah Belum tersedianya teknologi yang modern bagi nelayan Semangat dan nilai-nilai kerja keras masyarakat melemah Angka kemiskinan masih tinggi Ketimpangan SDA dan SDM antar Kecamatan masih tinggi Koordinasi antar lembaga terkait program kemiskinan lemah Mental ketergantungan masyarakat-kat pada pihak donatur Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin Pengelolaan hasil laut yang belum optimal 	<p>STRATEGI (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendirikan dan mengembangkan sistem perbaikan benih dan bibit Membangun dan memperbaiki irigasi prioritas berdasarkan potensi wilayah Membangun dan mengembangkan jalan ke sentra produksi Membangunan sistem jaringan air bersih Memperbaiki sistem dan mutu pendidikan Memperbaiki sistem dan mutu pelayanan kesehatan Pengembangan klaster komoditas yang dapat mendorong lahirnya Agro-industri Mendorong minimal lahirnya satu model Agro-industri prioritas pada masing-masing kabupaten/kota Advokasi kebijakan dan Capacity Building secara sitematik kepada aparaturnya Kabupaten/Kota Mengoptimalkan fungsi peran tim percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten di bawah koordinasi Bupati. 	<p>STRATEGI (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun dan mengembangkan sentra pemasaran produk-produk Membangun prasarana dan sarana dasar berbasis mitigasi bencana Integrasi pengetahuan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan Aceh Mengembangkan dan membentuk UKM/Koperasi untuk memasarkan produk yang ada di masyarakat Membangun dan memperkuat sentra model ekonomi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota Membuat Qanun terkait sistem rekrutmen dan kriteria penjenjangan karir dalam sistem pemerintahan Membuat Qanun terkait sistem jaminan terintegrasinya pengelolaan lingkungan dalam percepatan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota

Berdasarkan strategi (S-O;S-T; W-O dan W-T) yang telah dirumuskan, maka dapat dirumuskan kembali **program strategis** dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang yaitu sebagai berikut:

A. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar yang mampu menyokong kegiatan ekonomi, meliputi:

1. Pembangunan jalan ke sentra produksi seperti jalan ke sentra produksi perkebunan.
2. Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
3. Pendirian dan pembangunan pendidikan vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan-SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas) minimal memiliki satu SMK atau satu Politeknik atau satu Akademi Komunitas yang diarahkan untuk melatih keterampilan tenaga kerja produktif;
4. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan terpadu, tiap kecamatan memiliki satu pusat pelayanan kesehatan terpadu sebagai Rumah Sakit Rujukan;
5. Pembangunan rumah untuk kaum dhuafa sesuai dengan kebutuhan ;
6. Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai, muara, dan pantai yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air;
7. Mendukung pembangunan kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh dengan menyediakan jaringan pelabuhan, jalan dan jembatan yang memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang.
8. Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir untuk mengurangi kesenjangan antar Kecamatan/Desa;
9. Menyediakan sarana dan prasarana dasar pemukiman, air bersih, sanitasi, fasilitas umum bagi masyarakat, dengan berpedoman kepada tata ruang serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan;
10. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan rakyat, bandar udara sehingga memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan akses pariwisata.
11. Pembangunan pasar untuk pendistribusian barang/produk yang telah ada di Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang;
12. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil perkebunan seperti cengkeh, kakao dan kelapa dalam;
13. Mengupayakan tumbuhnya dan berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan seperti lobster dan kepiting
14. Pembangunan puskesmas, Pembangunan puskesmas pembantu, Pembangunan posyandu dan Pengadaan sarana dan prasarananya:
15. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembelajaran yang bermutu;
16. Pengembangan kawasan agowisata di sepanjang garis pantai yang ada di Kota Sabang dan Simuelue.

B. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

1. Tersedianya beasiswa dan bantuan biaya pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah untuk keluarga miskin;

2. Pemberian dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin;
3. Integrasi kurikulum pengembangan karakter/moral/akhlak dalam pendidikan formal mulai dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan kegiatan penyuluhan dan pelatihan pada pelaku usaha pertanian dan non-pertanian;
5. Mengembangkan pendidikan unggulan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan dayah;
6. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA);
7. Peningkatan kompetensi tenaga kerja formal dan informal, serta pelaku UMKM melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas Balai Latihan Kerja serta pelatihan-pelatihan kejuruan;
8. Percepatan aplikasi teknologi di sektor pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan sistem penyuluhan.

C. Penguatan Kelembagaan Ekonomi

1. Pembangunan dan pengembangan Baitul Mal, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM dalam mendukung ketersediaan modal usaha bagi masyarakat miskin;
2. Pembentukan kelompok muda wirausaha;
3. Pembangunan dan pedampingan lembaga penyerta modal di tingkat desa;
4. Pembangunan pusat pemasaran produk khas masyarakat Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang;
5. Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dengan sasaran utama usaha-usaha kelompok dan koperasi;
6. Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi lemah;
7. Memfasilitasi peningkatan jalinan kemitraan usaha yang lebih luas antara kelompok usaha besar dengan pelaku UMKM dan industri rumah tangga;
8. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berkelanjutan.

D. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

1. Pelatihan penguatan ekonomi dalam meningkatkan keterampilan para pimpinan pasantren dan santri terpilih;
2. Penguatan manajemen keuangan dan sumberdaya pasantren;
3. Penguatan pasantren untuk bidang-bidang keahlian tertentu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha terpadu
4. Penyuluhan dan pelatihan terkait peningkatan etos kerja masyarakat bagi kelompok terpilih;
5. Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang bermutu;
6. Mengupayakan desentralisasi sekolah /manajemen kelembagaan, dan manajemen perencanaan pengembangan guru;
7. Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah;

8. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah.
9. Pelatihan teknis dan manajerial untuk penguatan organisasi atau lembaga keagamaan yang dilakukan secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan

E. Peningkatan kegiatan ekonomi real yang secara langsung berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat miskin yaitu, sebagai berikut:

1. Perbaiki sistem Pengembangan perbenihan/Pembibitan;
2. Pedampingan dan peyertaan modal bagi usaha terpilih yang dimiliki masyarakat miskin;
3. Pedampingan dan pemodalannya kegiatan ekonomi unggulan berbasis kluster model;
4. Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi termasuk peningkatan Indeks Penanaman (IP), dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar;
5. Meningkatkan kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan pangan, serta peningkatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan dan Kultural lokal;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan daerah;
7. Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit dengan pelayanan unggulan;
8. Meningkatkan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Simeulue Kota Sabang dalam bentuk pengobatan gratis;
9. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;
10. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI);
11. Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan;
12. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
13. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
14. Pembangunan balai latihan kerja;
15. Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan pencari kerja;
16. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

F. Penguatan kerjasama kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat yaitu:

1. Pembentukan TIM khusus yang akan memfasilitasi, mengimplementasikan kemitraan;
2. Penyusunan Perda tentang pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan Masyarakat;
3. Pembangunan Sain Park dan Sain Techno Park sesuai dengan potensi daerah;
4. Penguatan lembaga dewan riset dan inovasi di Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang (implementasi);
5. Pengembangan sistem informasi dan promosi yang dapat menarik investasi untuk menanamkan modalnya di daerah;
6. Melakukan upaya meningkatnya ekspor daerah baik peningkatan volume maupun nilai, terutama komoditi-komoditi yang memiliki nilai tambah tinggi bagi daerah seperti lobster dan kepiting;

7. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
8. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perikanan tepat guna;
9. Perencanaan pembangunan daerah perikanan dan perkebunan di Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang;
10. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur;
11. Diversifikasi pangan melalui moderisasi aneka ragam pengolahan pangan lokal di tingkat rumah tangga;
12. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial seperti pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (tagana), Pelatihan petugas penyuluh sosial dan penyuluh sosial keliling;
14. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan melakukan penelitian bersama lintas stakeholder;
15. Melakukan Kajian potensi sumberdaya yang ada terkait dengan investasi;
16. Pengembangan desa model di Kabupaten Simelue dan Kota Sabang.

G. Penguatan Tim Percepatan Pengulangan Kemiskinan di Wilayah Kepulauan.

1. Penyelenggaraan capacity building secara sistematis bagi TIM aparat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, program khusus pengurangan kemiskinan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan desa (lembaga perencanaan program khusus pengurangan kemiskinan);
3. Revitalisasi kelembagaan TKPK sehingga kelembagaan TKPK berfungsi dengan baik;
4. Pengembangan sistem ICT yang dapat mendukung aplikasi database permasalahan, potensi dan perencanaan berbasis desa;

6.3. Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagian besar penyebab kegagalan dalam mengimplementasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan adalah karena kurang memperhatikan faktor pembatasnya dan dilakukan secara tidak terpadu dan tidak komprehensif. Akibatnya ide yang baik tidak selalu akan menghasilkan implementasi yang baik. Sehubungan dengan persoalan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan program percepatan penanggulan kemiskinan, antara lain: (1) prioritas program, (2) program pendukung, dan (3) mempertimbangkan multiplayer effect dari program.

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan dan strategi penanggulangan kemiskinan, maka ada beberapa langkah implementasi yang dapat digunakan dalam upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan pada jenjang Provinsi Aceh dan jenjang zona wilayah kabupaten/kota yang dibagi dalam 5 zona wilayah, yaitu: (1) implemetasi melalui intervensi secara tidak langsung dan (2) implementasi melalui intervensi secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan.

Implementasi secara tidak langsung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan infrastruktur dasar yang menyokong kegiatan ekonomi, seperti jalan ke sentra produksi dan irigasi untuk bidang pertanian padi/pangan dan jaminan pasar serta stabilitas harga dari produk yang dihasilkan masyarakat sehingga membuat keluarga miskin kreatif dalam berusaha
2. Pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga dapat memutuskan lingkaran kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian kartu kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin.
3. Pembangunan lembaga keuangan yang mampu menyalurkan modal usaha secara terstruktur sehingga memungkinkan mereka yang paling miskin dapat mengakses bantuan modal usaha yang disalurkan kepada mereka.

Sementara itu, implementasi secara langsung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bantuan langsung kemiskinan, yang membantu secara langsung kepada orang miskin, seperti pemberian input produksi dan modal usaha melalui kelompok tani atau mitra usaha lainnya. Fenomena ini juga telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak jaman pertengahan;
2. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain;
3. Persiapan bagi yang lemah. Secara teori menunjukkan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan dalam implementasi percepatan pengurangan kemiskinan yaitu bantuan secara langsung kepada orang miskin. Banyak negara yang menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Mengingat kondisi ekonomi masyarakat miskin di Aceh pada jenjang provinsi dan kabupaten/kota pada jenjang zona wilayah masih ditandai dengan kegiatan-kegiatan ekonomi primer berbasis sumberdaya alam, maka langkah implementasi percepatan pengurangan kemiskinan harus memberi manfaat ekonomi yang mampu meningkatnya pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja di kalangan masyarakat miskin. Berkaitan dengan hal tersebut, ada 2 langkah strategis yang harus dilakukan dalam upaya implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu strategi umum dan strategi khusus.

Strategi umum dalam pengentasan kemiskinan dapat ditempuh dalam bentuk kebijakan yang membagi program percepatan pengurangan kemiskinan dalam skala prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah; seperti (1) membangun infrastruktur perdesaan (jalan ke sentra produksi), terutama di wilayah upland, untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, (2) menyediakan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan irigasi) yang tidak saja memberikan pelayanan pada masyarakat miskin, tapi juga sekaligus mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi.

Strategi khusus dalam implementasi penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh melalui:

- (1) pemberian modal usaha dengan sasaran khusus untuk kaum perempuan dalam kegiatan

ekonomi melalui program “home industri” berbasis bahan baku pertanian dan perikanan. Program ini harus diikuti dengan pedampingan input, proses dan output. Melalui peningkatan peran perempuan dalam perekonomian maka penghidupan keluarga miskin diharapkan menjadi lebih sejahtera, khususnya pada rumahtangga yang kepala keluarganya janda; dan (2) pemberian bantuan modal usaha dengan sasaran khusus untuk rumah tangga miskin yang diikuti dengan: (a) pedampingan input, menyediakan bahan baku awal yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya; (b) pedampingan proses, menyediakan keahlian/pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka memiliki keahlian yang dapat dipertukarkan dalam mengolah input menjadi output; dan (c) pedampingan output, pada tahap awal menampung input yang dihasilkan masyarakat dan selanjutnya membangun *networking* pasar yang memungkinkan masyarakat miskin dapat berkembang dan mengembangkan usahanya secara mandiri. (3) pemberian modal usaha melalui suatu mekanisme pembinaan bertahap, yaitu (a) pemberian modal usaha secara hibah kepada keluarga yang paling miskin, kemudian setelah dilakukan pedampingan usaha dan apabila dianggap usahanya berkembang, pada tahap berikutnya (b) pemberian modal usaha dengan bunga rendah kepada keluarga miskin yang usahanya sudah berkembang, pada tahap berikutnya (c) pemberian modal usaha dengan bunga normal dan dihubungkan dengan Bank Konvensional kepada keluarga yang sudah keluar dari garis kemiskinan dan usahanya sudah berkembang secara mandiri. Untuk dapat mencapai tahap-tahap tersebut, maka pemberian modal usaha kepada keluarga miskin dibutuhkan adanya “mentor pedamping” atau “bapak angkat” yang menjamin harga dan pasar dari produk usaha yang dihasilkan keluarga miskin.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh juga melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pondasi dasar untuk melepaskan dari jeratan kemiskinan. Usaha UMKM yang dapat ditempuh disesuaikan dengan potensi daerah dan kemampuan keahlian yang dimiliki. Jika belum mempunyai keahlian, tentunya dilakukan pelatihan terlebih dahulu oleh pemerintah. Selanjutnya diberikan permodalan atau dijembatani dengan pihak perbankan dan pemberi modal lainnya. Seterusnya diberikan pendampingan dalam pemasaran hasil produksi UMKM tersebut, baik dalam bidang pembungkusan (*packaging*), pemberian label atau merek (*labelling*), pembubuhan masa kedaluwarsa untuk jenis makanan dan minuman, standar registrasi kesehatan dan industri, serta lainnya.

Selama ini di daerah penelitian dijumpai adanya beberapa usaha kecil dan menengah yang dapat diberdayakan. Di bidang industri perikanan dan kelautan antara lain didapati adanya usaha memperbaiki bot atau perahu yang rusak, membuat jaring penangkap ikan, produksi mata pancing, budidaya usaha perikanan darat (lele, bandeng, udang, dan sebagainya), industri pengawatan dan penggaraman ikan, dan lainnya. Namun belum dijumpai adanya industri pengalengan ikan. Di bidang industri pertanian tanaman pangan (*agroindustry*), antara lain dijumpai adanya usaha membuat kue yang bahan baku utamanya dari hasil tanaman pangan setempat seperti tape, tahu, tempe, krupuk, dan berbagai jenis kue atau panganan sebagainya. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) mengungkapkan bahwa pada umumnya UMKM di lokasi penelitian kekurangan modal dan kualitas hasil produksi karena keterbatasan teknologi, serta sempitnya pemasaran hasil produksi. Sehingga acapkali tidak memperoleh laba karena kadangkala harga biaya produksi terutama bahan baku penolong mengalami kenaikan. Usaha UMKM lainnya di bidang peternakan antara lain adanya usaha

penggemukan sapi, ternak ayam, bebek, kambing, yang bersifat kecil-kecilan (lokal) artinya masih belum berorientasi pemenuhan pasar luar daerah. Sehingga belum dapat memberikan keuntungan yang besar bagi peternak. Sementara di bidang jasa antara lain ditemukan adanya usaha perbengkelan motor, becak dan sepeda, tukang pangkas dan saloon, usaha pertukangan dan perabotan, persewaan seperti pelaminan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lokasi, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar kemiskinan dapat berkurang di lokasi penelitian bilamana usaha UMKM masyarakat miskin yang sudah ada dapat diberdayakan secara berkelanjutan dengan memberikan modal, pendampingan, dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergisitas berbagai program pemerintah terutama terkait dengan kebencanaan. Seperti diketahui bahwa dewasa ini sering terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran, dan sebagainya yang menyebabkan beberapa keluarga menjadi kehilangan rumah dan harta benda lainnya, dan kehilangan pekerjaan karena hilangnya tanah atau lahan usaha disebabkan bencana tersebut. Oleh karenanya diperlukan program pemerintah antar sektor yang saling bersinergi untuk mengurangi atau mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya bencana alam maupun yang tidak mengalami bencana alam.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sinergisitas antara program dan proyek pembangunan pemerintah belum sepenuhnya mengarah kepada orang miskin di Aceh secara berkesinambungan. Pembangunan selama ini masih bersifat memberikan bantuan fisik berupa rumah untuk kaum duafa dan miskin, alat-alat atau sarana produksi terutama untuk sektor pertanian, dan sebagainya. Hal yang seringkali terabaikan adalah belum adanya sinkronisasi antara proyek bantuan pemerintah untuk kaum miskin dengan potensi yang dimiliki oleh orang miskin. Di samping itu, acapkali tidak tepat sasaran (tidak tergolong miskin), tidak tepat jumlah (terlalu sedikit sehingga menimbulkan konflik sesama masyarakat), dan bantuan alat-alat kurang berkualitas sehingga tidak dapat digunakan dalam jangka panjang, serta persoalan lainnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sinergisitas antara dinas terkait dengan perangkat desa dan masyarakat miskin itu sendiri. Oleh karena itu ke depan diperlukan sinkronisasi dan sinergisitas program dan proyek percepatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

6.4. Beberapa Program Yang Dilakukan Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil FGD memperlihatkan bahwa terdapat beberapa program yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD), maupun kabupaten (APBK). Semua bentuk bantuan tersebut baik fisik maupun non fisik ditujukan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah di Provinsi Aceh adalah:

1. Program APBN
 - a. Pemberian bibit tanaman cengkeh, coklat, ternak untuk bidang perkebunan dan peternakan.

- b. Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - c. KUBE (Kelompok Usaha Bersama): 20 jt /kelompok untuk 10 KK
 - d. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - e. Program Keluarga Harapan (PKH): status diatas KKS.
 - f. Raskin
 - g. Dinas perkebunan memberikan saprodi untuk petani
 - h. Bantuan untuk jompo
2. Program APBA
 - a. Bantuan bibit,
 - b. Bantuan lansia: kriteria lansia: usia 60 keatas,
 - c. Bantuan yang diberikan bagi yg cacat
 - d. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
3. Program APBK
 - a. Bantuan kematian : 5 jt/ musibah
 - b. Bantuan untuk anak sekolah (SD, SMP, SMA jumlahnya sama), dan mahasiswa : Rp 1 jt/ semester.

Berdasarkan hasil FGD diperoleh informasi bahwa hampir semua jenis bantuan terutama jenis bantuan tunai, tidak secara langsung dapat mengatasi masalah kemiskinan. Menurut salah satu peserta FGD, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, karena data yang kurang valid, yang didapatkan tanpa ada evaluasi dari kepala desa setempat. Sehingga terkesan bahwa semua jenis kartu tersebut menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk berusaha mengatasi masalah kemiskinan yang mereka alami.

Demikian juga halnya dengan program bantuan RASKIN. Dalam pembagian beras miskin ini kepala desa tidak mampu untuk memberikan beras tersebut hanya untuk masyarakat miskin saja, tetapi beras miskin ini juga diberikan untuk golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Dengan kata lain, beras miskin ini dibagi rata pada semua masyarakat di desa tersebut. Kondisi ini terjadi karena beberapa masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi tidak setuju jika beras bantuan tersebut hanya diberikan pada sebagian penduduk saja, karena jika ada beberapa kegiatan desa (seperti gotong royong), semua masyarakat dilibatkan.

Kartu PKH hanya diberikan kepada ibu rumah tangga. Monitoring dan evaluasi terhadap pengguna kartu ini dilakukan pada 5 tahun pertama. Dana pengguna kartu PKH dimasukkan ke rekening ibu, jika setelah 5 tahun pengguna kartu ini ada usaha, maka pada tahap kedua jika berhasil, sedikit demi sedikit bantuan akan dikurangi. Program ini cukup membantu dan memotivasi masyarakat dalam berusaha untuk meningkatkan pendapatannya.

6.5. Beberapa Usaha Untuk Mengatasi Permasalahan Bantuan

Berdasarkan hasil FGD, dapat dilihat bahwa beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Adanya pendampingan atau penyuluhan pada setiap bantuan yang diberikan pada masyarakat, sehingga setiap bantuan dapat berfungsi seperti yang diharapkan.
- b. Perlu adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- c. Merubah perilaku masyarakat, melalui pendekatan keagamaan.
- d. Perlu adanya sanksi yang jelas, jika diketahui adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, contoh: “sering bantuan dari pemerintah tidak berhasil karena tidak ada monitoring, tapi jika bantuan dialihkan pada pihak lain pasti berhasil. Coba lihat petugas kebersihan: jika fasilitas umum pasti kotor, tapi jika dilakukan oleh pihak swasta pasti bersih.” (Bappeda Sabang)
- e. Perlu adanya kriteria miskin yang jelas bagi warga.
- f. Perlu adanya tim monitoring dari instansi sosial.
- g. Perlu adanya pembaharuan data.
- h. Adanya komitmen penerima bantuan, untuk menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya
- i. Bagi penerima bantuan tahun ini, tidak terima lagi bantuan yang sama pada tahun depan.
- j. Perlu adanya monitoring dan evaluasi setiap adanya bantuan (adanya tindak lanjut).

Secara ringkas berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada dengan pendekatan SWOT diatas, dapat di susun masalah dan rekomendasi kebijakan yang harus dilaksanakan merujuk kepada empat level masalah yaitu: level rumah tangga, komunitas, infrastruktur publik dan sinersigitas program. Secara rinci keempat level maslaah dan rekomendasi kebijakan disajikan dalam bentuk matrik seperti Tabel 119.

Tabel 119 . Ringkasan Masalah dan Rekomendasi Kebijakan Program Pendampingan

LEVEL MASALAH	MASALAH	REKOMENDASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM
RUMAH TANGGA / POTENSI SDM & SDA	Kemiskinan Aceh didominasi oleh faktor kultural	Buat program pembinaan mental spiritual kepada masyarakat miskin	Meningkannya motivasi masyarakat miskin untuk mengatasi masalahnya
	Keterampilan dan pendidikan masyarakat rendah	Buat program diklat, pendampingan, penyuluhan dan pelayanan Pronangkis multi sektor secara reguler	Meningkannya pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk memperbaiki mata pencaharian dan taraf hidupnya
	Semangat dan etos kerja masyarakat melemah		
	Mental ketergantungan masyarakat pada pihak luar tinggi	Intensifkan pendampingan program peningkatan usaha mikro/RT	Meningkatnya keberhasilan dan kesinambungan usaha mikro/RT
	Potensi SDM dan SDA belum dikelola secara optimal	Perbaharui database kemiskinan elektronik yang komprehensif	Optimalnya pemanfaatan SDM & SDA melalui database elektronik
	Ketimpangan SDM antar wilayah tinggi	Tingkatkan sinergitas dan proporsi pronangkis antar wilayah	Berkurangnya gap kapasitas SDM antar wilayah
KOMUNITAS & KELEMBAGAAN	Kemiskinan Aceh juga disebabkan faktor struktural	Aktifkan peran dan tanggung jawab TKPKD Prov/Kab/Kota	Meningkatnya peran dan tanggung jawab TPKD terhadap masalah kemiskinan di Prov/Kab/Kota
	Tata kelola pemerintahan lemah	Buat forum diskusi reguler tentang kemiskinan di Prov/Kab/ Kota	
		Tingkatkan kapasitas aparatur menyelesaikan masalah program	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pronangkis
		Buat pusat pengaduan TKPKD/BAPPEDA Prov/Kab/Kota	Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi Pronangkis di Prov/Kab/Kota
		Libatkan beragam ahli rumuskan kebijakan dan strategi Pronangkis di Prov/Kab/Kota	
	Kelembagaan keuangan dan kelompok tani lemah	Kuatkan dan libalkan Forum BKM dan LSM di Prov/Kab/Kota	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi BKM dan LSM sebagai 'kontrol sosial' dalam Pronangkis
		Fasilitasi penyusunan Pronangkis SPKD dan PJM Prov/Kab/Kota secara partisipatif	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana Pronangkis di Prov/Kab/Kota
Regulasi perlindungan komoditas lokal minim	Siapkan usulan regulasi perlindungan komoditas lokal	Tersedianya regulasi yang melindungi komoditas lokal	

LEVEL MASALAH	MASALAH	REKOMENDASI KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM
INFRASTRUKTUR PUBLIK & PROGRAM BERJALAN	Infrastruktur publik untuk Warga Miskin Tidak Memadai	Perbaharui database infrastruktur kemiskinan berbasis elektronik	Tersedianya database infrastruktur berbasis elektronik
	Ketimpangan Infrastruktur antar wilayah masih tinggi	Tingkatkan proporsionalitas infrastruktur antar Pemprov/Kab/Kota	Tersedianya infrastruktur yang proporsional antar wilayah
	Infrastruktur penunjang produksi masyarakat minim	Bangun infrastruktur penunjang produksi ekonomi masyarakat	Tersedianya infrastruktur penunjang produksi ekonomi masyarakat
	Alokasi anggaran belum sepenuhnya pro-rakyat miskin	Naikkan proporsi alokasi APBD Pronangkis Prov/Kab/Kota	Terciptanya proporsionalitas anggaran Pronangkis di Prov/Kab/Kota
	Kualitas Pronangkis di Prov/Kab/Kota masih rendah	Libatkan pakar dalam penyusunan Pronangkis di Prov/Kab/Kota	Terwujudnya dokumen perencanaan Pronangkis yang baik
	Belum berkembangnya agro-industri di Aceh	Facilitasi sektor swasta untuk membangun industri agro	Tumbuhnya industri agro yang dipelopori oleh pengusaha lokal
SINERGITAS PROGRAM	Tidak ada acuan (SOP) Pronangkis di Prov/Kab/Kota	Buat SOP Pronangkis Prov/Kab/Kota	Meningkatnya kualitas Pronangkis Prov/Kab/Kota
	Sistem E-planning Pronangkis Prov/Kab/Kota belum tersedia	Tingkatkan kapasitas IT aparatur (SIM/Website) Prov/Kab/Kota	Tersedianya website yang menampilkan capaian Pronangkis secara berkala
	Koordinasi antar lembaga terkait program kemiskinan lemah	Tingkatkan koordinasi program Pronangkis Prov/Kab/Kota	
	Program pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran	Tingkatkan transparansi program/anggaran Pronangkis Prov/Kab/Kota	Terbangunnya kontrol masyarakat terhadap masalah implementasi Pronangkis
	Blueprint Pemanfaatan dana OTSUS belum selesai	Percepat penyelesaian Blueprint Otsus Aceh	Tersedianya kepastian program dan pendanaan Pronangkis



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



7.1. Kesimpulan

Permasalahan kultural dan struktural merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan kemiskinan di Aceh. Meskipun pada beberapa kasus dan tempat juga ditemukan penyebab yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, Kultural maupun struktural dengan komposisi yang variatif. Dari segi Kultural, penyebab kemiskinan masyarakat utamanya disebabkan oleh sifat malas, ketergantungan kepada bantuan pemerintah, perilaku konsumtif, suka menjual aset daripada memanfaatkannya untuk hal-hal produktif, masih adanya mental untuk menjadi buruh daripada menjadi usahawan, serta hilangnya berbagai kearifan lokal. Hal ini terakumulasi dalam bentuk sikap pasrah terhadap kondisi kemiskinan yang dialaminya. Sikap pasrah ini dilanjutkan dengan rendahnya keinginan masyarakat untuk berusaha memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Sedangkan dari sisi struktural, masyarakat masih berada dalam kemiskinan akibat tidak efektifnya lembaga pemerintahan desa, tidak berfungsinya lembaga ekonomi desa, program pemerintah yang tidak tepat sasaran, belum optimalnya kinerja TKPK Daerah, turunnya harga pasca panen berbagai produk pertanian dan perikanan akibat tidak adanya proteksi dan regulasi, serta infrastruktur publik yang memburuk seperti air dan listrik. Dari sisi faktor alamiah, kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal misalnya: bencana alam, terisolirnya daerah, mahalnya harga-harga berbagai kebutuhan pokok, banyaknya anggota keluarga namun pendidikannya rendah, tidak adanya keahlian, serta tidak memiliki pekerjaan tetap.

Tanpa disadari, permasalahan kemiskinan yang menyelimuti masyarakat miskin telah membentuk lingkaran perilaku sosial yang menjadikan mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan. Rendahnya keterampilan mengakibatkan rendahnya pendapatan, yang mengakibatkan tidak mampu memperoleh pendidikan yang memadai. Rendahnya pendidikan menjadikan masyarakat miskin tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga dan mengendalikan diri dalam konsumsi. Sifat konsumerisme mendorong mereka untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan, sehingga seringkali terjadi pengeluaran untuk konsumsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Sikap konsumtif tersebut sering mengalahkan kebutuhan yang lebih penting misalnya untuk pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, dll. Kondisi ini akan berlanjut pada rendahnya kualitas SDM masyarakat, yang berlanjut pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Meskipun kabupaten kota punya persepsi berbeda terhadap faktor utama penyebab kemiskinan di masing-masing daerah, namun semuanya menilai bahwa permasalahan struktural dan kultural menjadi penyebab utama masih tingginya kemiskinan di seluruh Aceh. Tidak meratanya pembangunan dan inefisiensi anggaran dianggap sebagai masalah struktural paling mendasar. Sementara hilangnya nilai spiritual dan kearifan lokal, seperti sikap mandiri dan Kultural gotong royong, termasuk faktor Kultural penyebab hilangnya kemandirian sosial dan ekonomi. Kemandirian ekonomi masyarakat sangat tergantung dengan bantuan dana (anggaran) dari pemerintah.

Konsep kemiskinan yang menunjuk pada ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan lebih menganggap bahwa orang yang dianggap miskin dilihat sebagai objek dari sebuah program dan tidak ditempatkan kedudukannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengakses sumber-sumber ekonomi produktif. Ini artinya terjadi depolitisasi warga negara sehingga posisi individu/keluarga miskin juga dilepas dari hak-hak mereka

sebagai warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dengan berbasis distribusi sumber daya. Warga masyarakat, khususnya kelompok miskin, cenderung menjadi *denizen* daripada *citizen*, yaitu warga masyarakat yang diabaikan posisi haknya sebagai warga dalam relasinya dengan negara yang memiliki kewajiban untuk melakukan distribusi terhadap sumberdaya produktif. Apa yang terjadi selama ini adalah negara hanya memberikan bantuan kepada individu/keluarga miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan akan konsumsinya dan tidak membukakan ruang akses, *control*, dan pengaruh terhadap sumberdaya produktif yang dikelola oleh negara.

Karena ketiadaan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif, orang miskin menggunakan mekanisme utang (gali lubang tutup lubang) sebagai strategi bertahan hidup. Dengan demikian, menjadi problematik, mereka mencari jalan keluar dari kemiskinannya atau justru melanggengkan kemiskinannya.

Oleh karena individu/keluarga miskin mengalami proses depolitisasi, maka dengan mudah mereka masuk dalam pusaran kepentingan politik dari partai penguasa dan birokrasi yang mengelola negara. Oleh karena itu, program bantuan sosial kepada individu/keluarga miskin cenderung menjadi alat politik penguasa (partai dan birokrasi) untuk meraup dukungan dalam kandidasi politik. Hal ini dapat dilihat dari pola anggaran untuk bantuan sosial cenderung meningkat ketika politisi petahana mencalonkan kembali untuk periode kedua jabatan politik melalui pemilihan kepala daerah.

Banyaknya program pengentasan kemiskinan yang ditangani oleh multi-kementerian ternyata masih tetap memperagakan model kebijakan yang tidak koordinatif dan bahkan parsial, baik dalam hal aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, dan pengelolaannya. Sebagai konsekuensinya, implementasi program pengentasan kemiskinan belum juga lepas dari persoalan-persoalan usang seperti ego sektoral, *overlapping*, ambiguitas, konflik struktural, dan konflik horisontal di tingkat masyarakat.

7.2 Rekomendasi

1. Keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan, keputusan penanganan kemiskinan masyarakat miskin harus diambil melalui proses koordinasi diinternal pemerintah perlu digaris bawahi adalah kemiskinan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh satu sektor saja melainkan seluruh pihak terkait.
2. Keterpaduan keahlian dan pengetahuan untuk merumuskan berbagai kebijakan dan strategi serta program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat miskin.
3. Keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif dan tidak parsial.
4. Keterpaduan lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan lintas sector, sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
5. Perlunya proses pendampingan secara intensif terkait program peningkatan usaha. Kegagalan dan kesuksesan usaha individu atau kelompok sangat ditentukan oleh ada tidaknya pendampingan dalam proses menjalankan usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

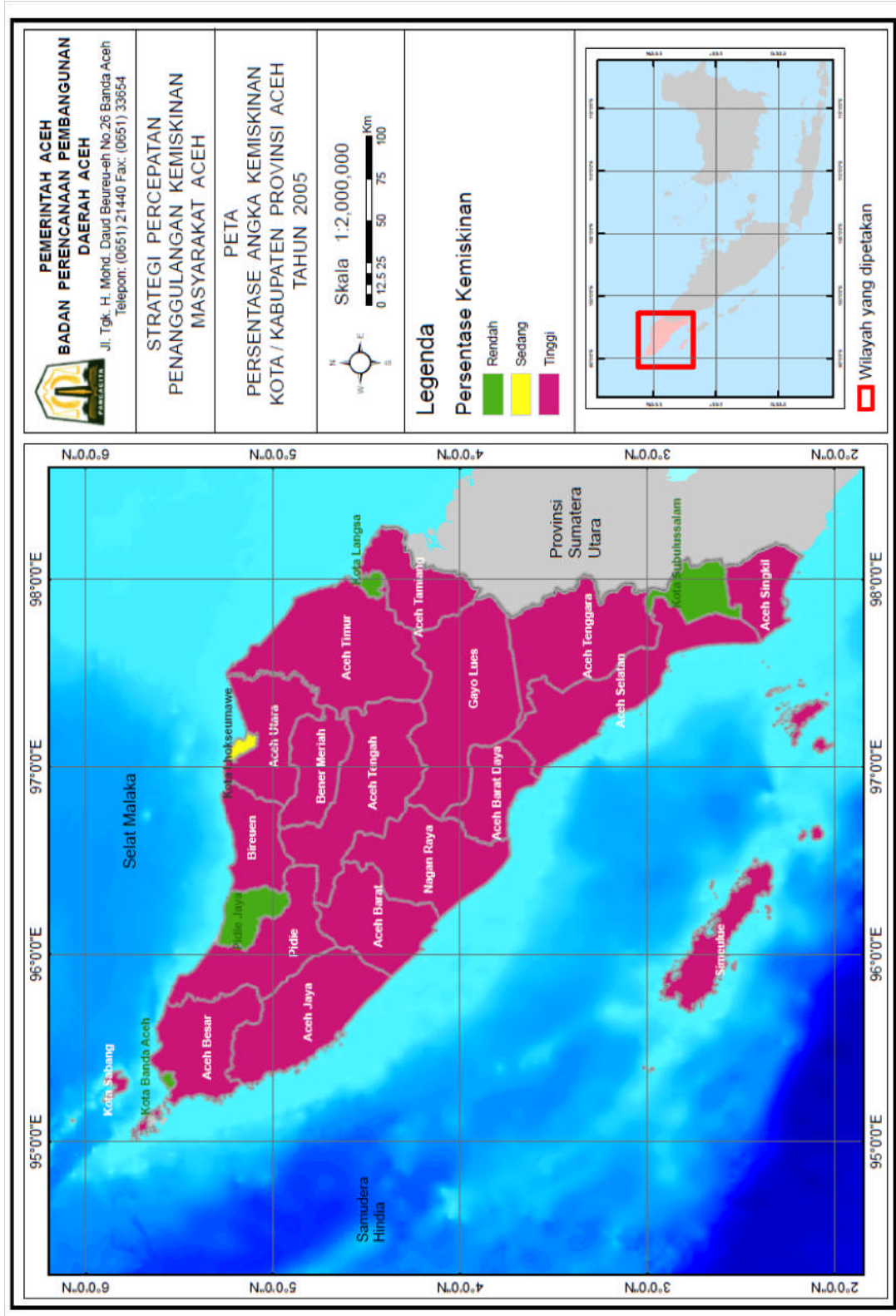
- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit BP STIE YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *PDRB Kabupaten/Kota se-Indonesia*. BPS Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Banda Aceh Dalam Angka 2014*. Banda Aceh.
- Bank Dunia. (2008). *Kajian Kemiskinan di Aceh*. Kerjasama dengan Pemerintah Aceh Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Babbie, E. 1992. *The Practice of Social Research (Edisi Keenam)*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Badan Pengawas BRR. 2007. *Evaluasi Dampak Program Ekonomi BRR melalui LKM Banda Aceh (Laporan Internal)*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Black, J.A., dan D.J.Champion., 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Penerbit PT. Eresco
- Blanchard, K., P.C. John, dan R. Alan. 1998. *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih Dari Semenit (terjemahan oleh Zoelkifli Kasip)*. Jakarta: Penerbit Interaksara.
- Burns, R.B. 1993. *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan, dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Arcon.
- Dasgupta, P., dan I. Serageldin, 2000. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington D.C.: The World Bank.
- Doyal, L. and Ian G. 1991. *A Theory of Human Need*. London: MacMillan Education, Ltd.
- Eriklane, J. 1995. *The Public Sector: Concept, Models, and Approach*. SAGE.
- Herbert, P. 2001. *The DAC Guidelines Poverty Reduction*.
- Hjelle, L.A., dan D.J.Ziegler., 1992. *Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and Applications. (Third Edition)*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Handler, Joel F. dan Hasenfeld, Yeheskel, (2007). *Blame Welfare: Ignore Poverty and Inequality*, Cambridge University Press, NY., USA.
- Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R., (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*, World Bank, Washington DC., USA.
- Iskandar, A. 2007. *Model dan Strategi Pemberdayaan Keluarga Miskin di kabupaten Bogor*. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan sosial.
- Just, R.E., dan R.D. Pope. 1979. "Production Function Estimation and Related Risk Considerations." *American Journal of Agricultural Economics*. 61 (2).
- Johnson, A. G. 1996. *Human Arrangement (Edisi Keempat)*. Toronto: Brown and Benchmark Publisher.
- Kant, I., 1962. *Fundamental Principles of The Metaphysic of Ethics*. Trans. T.K. Abbott. Longman
- Kartasmita. 1996. *Bias Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.

- Kaye, H. 1997. Mengambil Keputusan Penuh Percaya Diri. Jakarta: Penerbit Mitra Utama
- Kerlinger, F. N. 1973. *Fondatiaons of Behavioral Research* (Edisi Kedua). New York: Holt. Renehart and Winston, Inc.
- Kidder, L.H. 1981. *Research Methods in Social Relations*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Krech, D., S.C.Richard, dan L.B. Egerton., 1962. *Individual in Siciety*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Kuncoro, Mudrajat, (2003), *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Levinshon, Jim, (2003), *The World Bank's Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Good Marketing or Good Policy? G24 Discussion Paper Series, No. 21, April 2003, United Nations Conference for Trade and Development, New York and Geneva.*
- Maslow, A. H. 1984. *Motivasi dan Kepribadian* (terjemahan). Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith.2003, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga,
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2012), *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh, Banda Aceh.*
- Santana S., K. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998 *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Syamsudin Al-Ghazi, (2005), *Kitab Fath-hul Qarib*, Penerbit Daar Ibn Hazm, Beirut, hal. 132 – 133.
- Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Hushainiy Al-Hishniy Al-Dimasyqiy Al-Syafiiy, (2001), *Kifayatul Akhyarfii Halli Ghayatil Ikhtishar*. Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, Libanon, 1422H/2001M. hal 277-278.
- Todaro. MP dan Smith. (2006). *Development Economic*. Prentice Hall. New York.
- United Nation for Child Education Fund, (2012). *Pemetaan Kebijakan Pro Rakyat Miskin di Provinsi Aceh*. Unicef-Bappeda Aceh. Banda Aceh.
- UNDP dan Unsyiah, 2007. *Assessment Pelaksanaan Program Livelihoods Oleh Beberapa Mitra UNDP*. Banda Aceh (Laporan Internal).
- Winardi. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit Gramedia. Jakarta.
- World Bank (Aceh Public Expenditure Analysis Update-APEA). 2008. *Managing Reources for Better Outcomes in a Special Autonomy Region*. World Bank.
- Zastrow, Charles dan Ashman, KKK. (2007). *Understanding of HBSE*. hal 448.

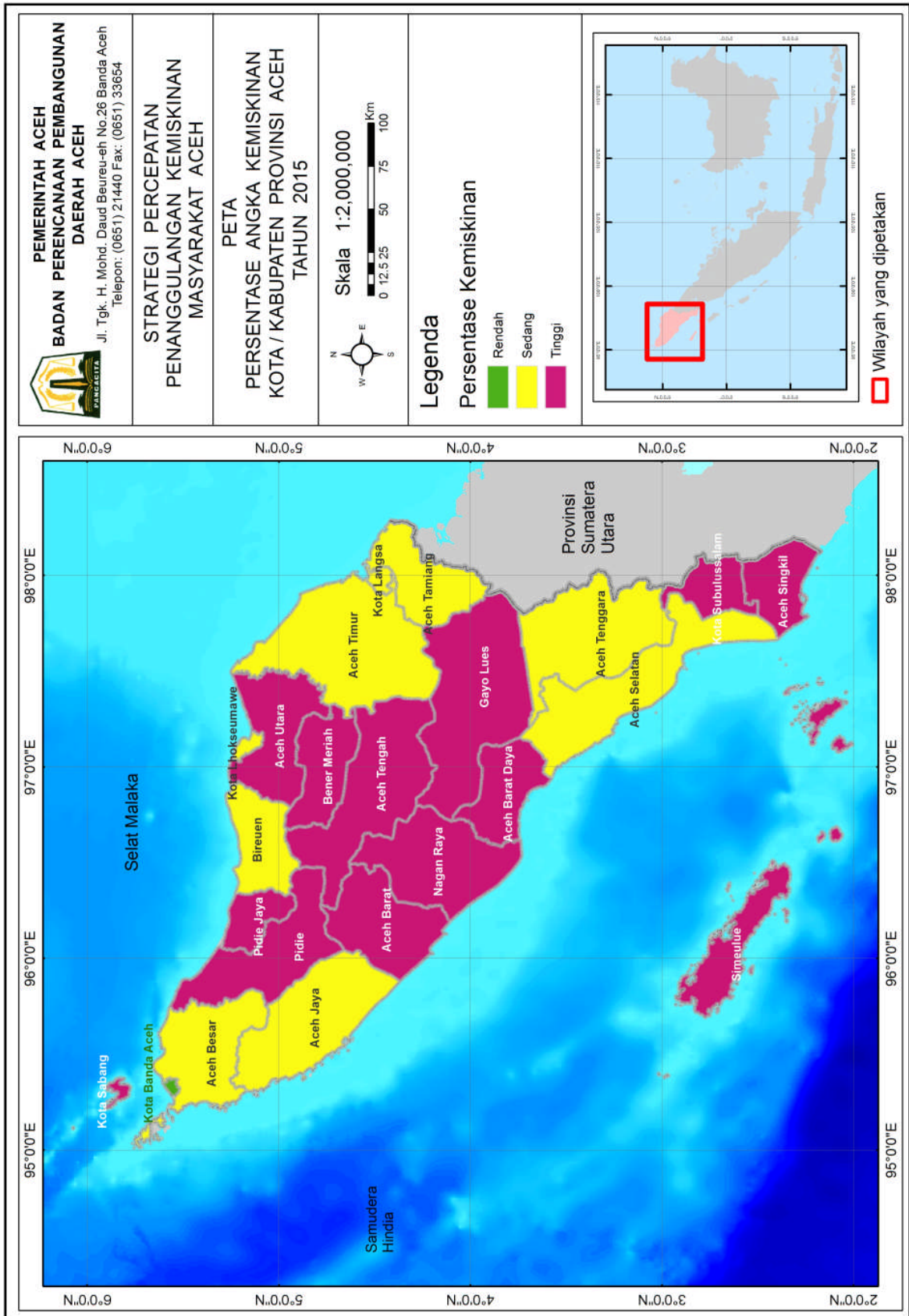


LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Persentase Angka Kemiskinan Kota/ Kabupaten di Provinsi Aceh Tahun 2005



Lampiran 3: Peta Persentase Angka Kemiskinan Kota/ Kabupaten di Provinsi Aceh Tahun 2015.



Lampiran 4. Anggaran Provinsi Aceh dan Kab/Kota di Aceh.

Anggaran	Pelayanan Umum	Ketertiban dan Ketentraman	Ekonomi	Lingkungan Hidup	Perumahan dan Fasilitas Umum	Kesehatan	Pariwisata dan Kultural	Pendidikan	Perlindungan Sosial
Prov. Aceh 2013	4.315.123	61.671	1.828.113	28.861	3.632.367	886.579	106.170	738.234	182.720
Prov. Aceh 2014	6.195.011	62.157	1.637.096	23.594	2.587.677	1.090.270	102.844	1.373.618	295.762
Kab/Kota 2013	4.234.038	198.193	1.433.260	335.711	1.629.203	1.938.233	94.721	5.518.565	300.685
Kab/Kota 2014	4.789.597	258.638	2.056.756	437.903	3.448.189	2.522.142	118.589	6.696.271	363.840
Total 2013	8.549.161,13	259.864,37	3.261.372,90	364.571,77	5.261.570,31	2.824.812,69	200.890,41	6.256.798,28	483.405,30
Persentase 2013	0,31	0,01	0,12	0,01	0,19	0,10	0,01	0,23	0,02
Total 2014	10.984.607,40	320.794,92	3.693.851,79	461.497,07	6.035.865,59	3.612.412,08	221.432,77	8.069.889,33	659.602,09
Persentase 2014	0,32	0,01	0,11	0,01	0,18	0,11	0,01	0,24	0,02
Pertumbuhan Anggaran Provinsi	1,44	1,01	0,90	0,82	0,71	1,23	0,97	1,86	1,62
Pertumbuhan Anggaran Kab/Kota	1,13	1,30	1,44	1,30	2,12	1,30	1,25	1,21	1,21
Persentase Prov. Aceh 2013	0,37	0,01	0,16	0,00	0,31	0,08	0,01	0,06	0,02
Persentase Kab/kota 2013	0,27	0,01	0,09	0,02	0,10	0,12	0,01	0,35	0,02
Persentase Prov. Aceh 2014	0,46	0,00	0,12	0,00	0,19	0,08	0,01	0,10	0,02
Persentase Kab/kota 2014	0,23	0,01	0,10	0,02	0,17	0,12	0,01	0,32	0,02
Rata-rata Provinsi	0,41	0,00	0,14	0,00	0,25	0,08	0,01	0,08	0,02
Rata-rata Kab/Kota	0,25	0,01	0,10	0,02	0,14	0,12	0,01	0,34	0,02

Sumber: DJPK, Departemen Keuangan RI, 2015 (Diolah)

